JURNAL
ANALISIS SOSIAL
Vol. 10 No.1 Juni 2005

AKATIGA

PERDEBATAN KONSEPTUAL TENTANG KAUM MARGINAL

ISSN 1411-0024

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Vol. 10 No. 1 Juni 2005

Penanggung Jawab

Yulia Indrawati Sari

Redaksi

Yulia Indrawati Sari
Rini Andrijani

Penyunting Bahasa

Rina Magdalena
Rini Andrijani

Penerjemah

Hesti H. Legowo

Penata Letak & Perancang Kulit

Pamuji Slamet

Alamat Penerbit & redaksi

Jl. Tubagus Ismail II/2, Bandung 40134
Telp. (022) 2502302
Faks. (022) 2535824
E-mail: akatiga@indosat.net.id
Homepage: www.akatiga.or.id

ISSN 1411-0024
Terbit 3 kali setahun
Sejak 1996

DAFTAR ISI

Perdebatan Konseptual Tentang Kaum Marginal ____ v
Conceptual Debates on The Marginal Group ____ xiii

BAHASAN UTAMA

Memahami Gerakan Pendudukan Tanah dalam *Land Reform*
Pinky Chrysantini ____ 1

Perlawanan Petani, Konflik Agraria, dan Gerakan Sosial
Sadikin ____ 19

Pembenahan Tata Produksi Pertanian Pangan: Strategi dan Praktik Menuju Kedaulatan Petani
Yusup Napiri Maguantara ____ 43

Modal Bergerak, Serikat Terserak: Perubahan Situasi Perburuhan dan Tantangan Gerakan Buruh di Indonesia
Indrasari Tjandraningsih & Maria Dona Dewi Puspitaningrum ____ 67

Dapatkah Usaha Kecil Menjadi Basis Perluasan Kesempatan Kerja yang Layak?
Resmi Setia M.S. ____ 89

Kerentanan Usaha Kecil: Faktor Pengaruh, Dampak, dan Solusi
Dede Mulyanto ____ 117

'Partisipasi Politik': Strategi Subsistensi Ekonomi Rumah Tangga?
Eka Chandra 141

RESENSI BUKU

Menuju Kampung Pemerdekaan
M. Krismara 149

SUPLEMEN

Perpustakaan dan Konsep Digitalisasi: Antara Kebutuhan dan Realitas
Yose Ali Rahman 157

PERDEBATAN KONSEPTUAL TENTANG KAUM MARGINAL

Artikel di dalam Jurnal Analisis Sosial AKATIGA kali ini disarikan dan dirangkum dari hasil kajian pustaka penelitian-penelitian AKATIGA di bidang yang menjadi tradisi AKATIGA sejak lama: usaha kecil, agraria, buruh, dan ditambah dengan bidang yang baru berdiri tiga tahun lalu mengenai ketatapengaturan (*governance*). Kajian pustaka merupakan salah satu tahap yang harus dilewati dari keseluruhan tahap penelitian yang dilakukan dalam setiap program penelitian AKATIGA. Hasil dari kajian pustaka ini adalah kertas posisi yang menggambarkan berbagai perdebatan konseptual terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di kelompok petani, buruh, dan pengusaha kecil mikro. Kajian pustaka ini juga dimaksudkan untuk membuat peneliti mampu menentukan pendekatan apa yang akan dijadikan dasar bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan.

Topik-topik penelitian yang dilakukan AKATIGA kali ini disusun berdasarkan masukan dari kelompok-kelompok yang terkait dengan visi dan misi AKATIGA, terutama sejumlah organisasi non pemerintah (ornop), organisasi masyarakat (ormas),

lembaga donor, dan kelompok-kelompok akademis. Informasi itu dikumpulkan melalui serangkaian proses diskusi dan wawancara. Di bidang usaha kecil, tema penelitian yang muncul adalah mengenai pemberdayaan perempuan usaha kecil dan mikro. Studi agraria terdiri dari tiga tema, yaitu konflik agraria dalam kehidupan sehari-hari, pendudukan tanah, dan tata produksi pangan. Studi buruh mencakup dua tema, yaitu mengenai pengorganisasian buruh di tempat kerja dan pengorganisasian buruh dalam komuniti. Topik yang terakhir itu penting untuk mengikuti perkembangan situasi industri yang kian banyak menerapkan siasat fleksibilisasi produksi sekaligus sebagai upaya untuk merekomendasikan strategi pengorganisasian buruh yang lebih responsif terhadap situasi industri saat ini. Masih dalam dimensi buruh, ada topik mengenai kesempatan kerja yang hendak melihat relasi antara kesempatan kerja yang semakin terbatas di sektor industri formal dengan potensi-potensi yang ada di sektor usaha kecil dan mikro. Sementara itu studi *governance* akan membahas mengenai politik golongan miskin. Studi ini dimaksudkan untuk melengkapi jawaban mengenai tesis yang diperoleh dari studi-studi sebelumnya mengenai terbatasnya partisipasi kelompok marginal dalam forum-forum pengambilan keputusan di tingkat publik.

★★★

AGRARIA

Beberapa hasil studi yang telah dilakukan AKATIGA tentang keagrariaan menunjukkan bahwa praksis pembangunan pertanian (dalam arti luas) selama ini telah melahirkan masalah-masalah dalam bentuk ketimpangan struktur relasi agraria yang melahirkan persoalan-persoalan kerusakan sumber daya, marginalisasi, dan rentannya kehidupan petani.

Ketimpangan struktur relasi agraria tersebut harus diselesaikan segera secara tuntas, agar persoalan-persoalan agraria tidak berlarut kian kompleks, terutama karena di dalamnya terbentuk pula akulturasi dengan proses kapitalisasi dan liberalisasi yang datang dari luar. Pelaksanaan pembaruan agraria merupakan suatu keharusan untuk menyeimbangkan struktur relasi agraria – penataan kembali struktur penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (terutama tanah) untuk kepentingan petani miskin (gurem, buruh tani, dan tunakisma).

Terkait dengan tujuan reforma agraria, manifestasi dari reforma agraria yang didongkrak dari bawah (*agrarian reform by leverage*) yang paling nyata bisa dilihat dari fenomena-fenomena pengambilalihan penguasaan dan pemilikan tanah di tingkat lokal. Gejala-gejala ini kerap dibahasakan sebagai peristiwa-peristiwa *(re)claiming*. **Pinky**

Chrysantini dengan artikelnya mengenai "Gerakan Pendudukan Tanah dalam *Land Reform*" memperluas kajian-kajian mengenai pengambilalihan tanah yang selama ini lebih ditekankan pada pembahasan dalam kerangka ketidakadilan dan konflik. Ia mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai: 1) apakah gerakan untuk mengambil alih penguasaan dan kepemilikan tanah-tanah yang dianggap seharusnya dapat dimanfaatkan oleh petani benar-benar memberikan kemanfaatan bagi petani kecil; dan 2) apakah nasib petani berubah pasca penguasaan lahan. Penulis memberikan pemahaman yang lebih tajam melalui penelaahan pengambilalihan lahan secara kritis yang ditempatkan dalam 3 konsep, yaitu: (1) *land reform*; (2) petani dan tanah serta perubahan di pedesaan; dan (3) gerakan sosial atau mobilisasi petani. Penulis juga mengkaitkan kajian mengambil alih kepemilikan dan penguasaan lahan dengan upaya-upaya penataan pola produksi, sebagai kritik atas kelemahan pengambilalihan tanah yang berhenti hanya pada perebutan tanah.

Pembahasan yang seringkali terkait dengan gerakan pengambilalihan pemilikan dan penguasaan lahan adalah konflik agraria. Konflik agraria (dalam definisi yang luas) seringkali dipandang sebagai akibat dari ketimpangan agraria yang kemudian memacu terjadinya pendudukan tanah, walaupun terjadinya konflik tidak selalu sampai menyebabkan pendudukan tanah. Dalam kerangka ini, **Sadikin**, peneliti bidang agraria, dalam artikelnya yang berjudul "Perlawanan Petani, Konflik Agraria, dan Gerakan Sosial" memberikan argumen bahwa konflik merupakan bagian dari strategi dan taktik perjuangan petani untuk mewujudkan reforma agraria. Karenanya konflik tidak selalu harus diselesaikan melainkan dikelola untuk menjadi kekuatan yang dapat mendorong reforma agraria dari bawah (*agrarian reform by leverage*). Penulis menguatkan argumennya melalui serangkaian penjelasan yang mengaitkan antara konsep dan kedudukan petani dengan studi gerakan sosial.

Tulisan selanjutnya terkait dengan kekhawatiran dan pertanyaan besar yang diajukan oleh penulis sebelumnya (Pinky) yang mempertanyakan bagaimanakah nasib petani pasca pengambilalihan pemilikan dan penguasaan lahan? Beberapa fakta mengenai gejala-gejala penjualan tanah pasca pengambilalihan dari petani-petani menunjukkan gejala-gejala penjualan kembali tanah. Dengan demikian, setiap upaya pengambilalihan pemilikan dan penguasaan lahan tidak boleh terlepas dari upaya-upaya penataan pola produksi, distribusi, dan konsumsi yang berorientasi pada kesinambungan pertanian dan kedaulatan petani atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Pembahasan mengenai penataan pola produksi yang diharapkan dapat memberikan ruang-ruang alternatif dan keberpihakan bagi petani dijelaskan oleh **Yusup Napiri** dalam artikelnya yang

berjudul "Pembenahan Tata Produksi Pertanian Pangan: Strategi dan Praktik Menuju Kedaulatan Petani". Terinspirasi oleh film *A Bug's Life*, penulis meyakini bahwa perlawanan petani itu mungkin, berupaya menggali gerakan-gerakan perlawanan petani di arena penataan pola produksi untuk mendukung alternatif-alternatif upaya keberpihakan kepada petani di tengah-tengah arus komersialisasi dan komodifikasi perdagangan pangan dan pertanian yang menghimpit mereka.

★★★

BURUH

Ada beberapa perkembangan baru yang terjadi di dalam dunia perburuhan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Soeharto terutama pada penyempitan kesempatan kerja di sektor formal dan gejala-gejala informalisasi yang semakin besar. Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi berdampak cukup jelas pada industri formal, terutama di bidang TPT (tekstil dan produk tekstil). Perubahan strategi modal dalam konteks makro juga mendorong terjadinya proses-proses informalisasi dan fleksibilasi yang dilakukan oleh industri sebagai bentuk strategi efisiensi produksi. Perubahan ini jelas berdampak terhadap kesempatan kerja dan memperlemah posisi tawar mereka.

Sayangnya, buruh dan organisasi buruh sedang menghadapi kesulitan besar untuk menghadapi persoalan-persoalan akibat perubahan-perubahan tersebut dengan menggunakan perangkat organisasi dan strategi yang selama ini sudah dikembangkan. Kenyataan itu menimbulkan kesadaran pada sejumlah aktivis dan organisasi perburuhan tentang perlunya memikirkan dan mengembangkan alternatif-alternatif strategi, pengorganisasian, dan kerangka pemikiran yang baru untuk mendukung perbaikan nasib dan posisi kaum pekerja di Indonesia.

Terkait dengan konteks tersebut, maka artikel yang ditulis oleh **Indrasari Tjandraningsih** dan **Maria Dona Dewi Puspitaningrum** penting dalam menjelaskan mengenai perubahan situasi ekonomi dan politik makro serta mekanisme dan dampak proses informalisasi yang dilakukan industri terhadap buruh dan komuniti. Penjelasan ini kemudian dikaitkan dengan upaya pengembangan kerangka alternatif pengorganisasian dan gerakan buruh pada masa mendatang yang lebih responsif terhadap situasi industri dan perburuhan yang sedang terjadi saat ini.

Masalah perburuhan sendiri apabila ditempatkan dalam konteks makro selalu akan bersinggungan dengan isu kesempatan kerja. Fokus pembahasan perburuhan yang hanya terbatas kepada buruh di sektor formal akan mengabaikan lebih dari 90% angkatan kerja yang tidak terserap di sektor formal. Hal ini memperlihatkan pentingnya perhatian kepada buruh-buruh yang tidak terserap di sektor fomal. Maka pertanyaan berikutnya

adalah kesempatan kerja apa yang bisa menjadi potensi dan layak bagi mereka? Tulisan dari **Resmi Setia** melengkapi gambaran mengenai situasi perburuhan di arena makro melalui kupasan mengenai kesempatan kerja yang layak, dengan analisis potensi dan tantangan yang terdapat di sektor usaha kecil dan mikro (UKM).

★★★

USAHA KECIL DAN MIKRO (UKM)

Walaupun banyak pihak di kalangan ornop dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia mengakui bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus diarahkan pada pengembangan usaha kecil dan perbaikan iklim serta infrastruktur ekonomi, dukungan nyata terhadap upaya itu masih sangat terbatas. Pemahaman tentang struktur-struktur hubungan UKM di tingkat mikro dan kaitannya dengan struktur ekonomi yang lebih besar merupakan syarat penting bagi upaya tersebut. Sayangnya hal itupun masih terbatas ketersediaannya.

Di sisi pengusaha kecilnya sendiri, pemberdayaan usaha kecil menjadi suatu hal yang penting terjadi jika ekonomi Indonesia ingin bertumpu pada sektor itu. Karena kenyataan memperlihatkan bahwa di dunia itu – khususnya di sektor informal/ perdagangan – sebagian besar pelakunya adalah perempuan, maka penguatan perempuan pengusaha kecil menjadi penting diupayakan. Meskipun keinginan dan upaya ke arah itu sudah banyak dilakukan, kegiatan pengembangan strategi pemberdayaan yang menghubungkan peran perempuan di dalam kegiatan usaha dengan peran-peran di dalam rumah tangga masih belum menemukan bentuknya yang konkret. Hal ini penting diperhatikan mengingat kerentanan yang dihadapi perempuan di arena usaha dan domestik umumnya bersumber dari situasi yang ada di dalam kehidupan rumah tangganya dan dari struktur-struktur yang tidak adil bagi perempuan maupun pengusaha kecil.

Dalam konteks ini, tulisan **Dede Mulyanto,** peneliti di bidang usaha kecil, mengenai "Kerentanan Usaha Kecil: Faktor Pengaruh, Dampak, dan Solusi" dapat memberi pengetahuan mengenai kerentanan dan keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Pengetahuan ini diharapkan bisa menjadi landasan pengembangan siasat penguatan perempuan usaha kecil yang efektif.

★★★

GOVERNANCE

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sipil di dalam proses demokratisasi di tingkat lokal menjadi suatu momentum penting yang dapat kita saksikan di era pasca Soeharto. Berbagai inisiatif untuk memperbesar ruang-ruang bagi masyarakat sipil untuk menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan bermunculan

di Indonesia. Upaya-upaya untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat sipil terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan kontrol terhadap pelayanan publik juga telah menjadi sesuatu yang sedang tumbuh dalam beberapa tahun terakhir ini.

Pertanyaan utama yang terus menerus harus dikaji jawabannya adalah sejauh mana proses-proses ini telah menjadi wadah untuk memberdayakan masyarakat sipil. Lebih khusus lagi, apakah perubahan-perubahan memang telah memberdayakan masyarakat sipil yang tergolong miskin dan marginal, seperti buruh, pelaku ekonomi kecil, dan petani kecil.

Eka Chandra dalam artikelnya mengenai "'Partisipasi Politik': Strategi Subsistensi Ekonomi Rumah Tangga? – Catatan Pinggir Studi Pustaka Partisipasi Politik 'Orang Miskin'" menjelaskan mengenai cara pandang untuk memahami tiga konsep utama, yaitu: partisipasi, kemiskinan, dan politik yang dikategorikan ke dalam partisipasi minimalis dan maksimalis. Partisipasi minimalis adalah cara pandang yang dianggap kurang memadai untuk menjelaskan makna politik yang terbatas yang secara substansial tidak sesuai dengan situasi kelompok miskin. Di sisi lain, kontribusi cara pandang maksimalis terletak pada pandangan-pandangannya yang dianggap lebih memadai untuk menjelaskan antara politik, kekuatan kelompok miskin, dan hubungan kekuatan antara elit dan non-elit. Partisipasi adalah kegiatan yang melibatkan relasi kuasa: dominasi, persaingan, konflik, dan kerjasama.

★★★

Dalam rubrik resensi buku, **M. Krismara**, menuliskan resensi mengenai buku "Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-Akarnya - Belajar dari Romo Mangun Di Pinggir Kali Code". Buku ini ditulis oleh Darwis Khudori dan diterbitkan oleh Yayasan Pondok Rakyat, Yogyakarta. Penulis saat ini berdomisili di Perancis, tetapi pemikiran-pemikiran sosialnya masih mewarnai perkembangan akademik di Indonesia. Penulis buku ini memiliki hubungan sejarah dengan Romo Mangun dan merupakan bagian dari proyek Kali Code. Program ini tidak hanya merupakan proyek permukiman biasa, tetapi lebih dari itu, penataan ruang dan bangunan di Kali Code mencerminkan pemikiran besar dan keberpihakan tata ruang kepada kelompok marginal. Berhubung tidak banyak tata ruang yang berpihak kepada kelompok marginal, maka AKATIGA menilai buku ini sangat penting untuk dibaca, dan diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada para perencana dan arsitek untuk mulai memikirkan secara serius salah satu peran dan kontribusi mereka bagi kelompok marginal. Krismara selaku peresensi buku secara baik mampu menuliskan isi dan penilaiannya terhadap buku ini.

Tulisan lain yang akan berguna bagi

kalangan ornop, pembaca, dan pengoleksi berbagai macam referensi, diberikan oleh pustakawan AKATIGA, **Yose Ali Rahman**, mengenai dokumentasi kepustakaan dalam bentuk konsep digital. Dalam tulisannya mengenai "Konsep Digitalisasi: antara Kebutuhan dan Realitas", penulis mengedepankan konsep perpustakaan digital sebagai alternatif untuk melengkapi perpustakaan konvensional (dalam bentuk tertulis). Penulis mengemukakan berbagai kelebihan dan kekurangan dari konsep ini, dan kemudian memfokuskan pembahasan kepada salah satu aplikasi paling sederhana dari dokumentasi digital dalam bentuk *e-book*.

★★★

Kertas posisi ini hanyalah salah satu bagian dari penelitian dan peneliti-peneliti AKATIGA. Sampai saat tulisan ini dibuat, peneliti AKATIGA telah kembali dari penelitian lapangan dan sedang melakukan tahap penulisan. Semoga tulisan-tulisan di atas dapat memberikan manfaat bagi pembaca, bagi perkembangan penelitian-penelitian sosial. Saran dan kritiknya sangat kami tunggu dan dapat disampaikan langsung ke email akatiga@indosat.net.id.

Terimakasih

Yulia Indrawati Sari
Direktur Eksekutif AKATIGA

CONCEPTUAL DEBATES ON THE MARGINAL GROUPS

The article in the AKATIGA's Journal of Social Analysis is summarized and extracted from the results of the literature study of the AKATIGA's respective research in the fields that have long been the tradition of AKATIGA, i.e.: small enterprises, agrarian, labor, and the additional field existed since three years ago, i.e. governance. The literature study is one of the parts that should be gone through of all the research stages carried out in every research program of AKATIGA. The results of the literature study are the position papers that describe conceptual debates and arguments towards the social phenomena occurring in the group of peasants, labors, and small-micro enterprises. The literature study is also aimed to make the researchers capable to determine what kind of paradigm/ approach to be made the basic, and to be studied in the future researches.

The research topics going to be carried out by AKATIGA are formulated based on the inputs of the groups related to the vision and the mission of AKATIGA, especially a number of non-governmental organizations (NGO), civil society organizations, donating institutions, and academic societies.

The information is collected through a range of discussion and interview process. In the field of small enterprises, the theme of the research emerging is on the empowerment of the women of small-micro enterprises. The agrarian study consists of three themes, i.e.: the agrarian conflicts in daily lives, land (re)claiming, and the agriculture production. The study of labor includes the theme of organizing workers in work places, as well as the organizing workers in communities. The last topic mentioned is essential to following up the development of industrial situations that mostly apply the strategy of production flexibility, which is, at the same time, also an effort to recommend the more-responsive strategy of organizing workers towards the industrial situations today.

Still in the labor dimension, there is a topic on the employment opportunities viewing the relation between the job opportunities which are getting limited in the sector of formal industries, and the potentials available in the small and micro enterprises sectors.

Meanwhile, the study of governance is going to discuss the politics of the poor. This study is aimed at completing the answer to the thesis gained from the previous studies on the limited participation of the marginal groups in making decision at public forums.

★★★

AGRARIAN

Some of the study results on agrarian having been carried out by AKATIGA, show that the practice of agricultural development (in a broad meaning) has, so far, resulted in lots of various problems in the form of unbalanced condition of the agrarian relation structure, reflecting in the problems of scarce resources, marginalizing, and the vulnerability of peasants' lives.

The imbalanced structure of agrarian relation should thoroughly be overcome immediately, in order that the problems are not getting more and more complicated, especially since there is a form of acculturation with the outer process of capitalization and liberalization. The application of agrarian renewal is a must in order to balance the agrarian relation structure – the restoration of the authorizing power and the utility of the agrarian resources (especially land utility) for the sake of the poor peasants (landless, subsistence level of peasant, filler).

In relation to the goals of agrarian reform, the manifestation of agrarian reform boosted from the *grass root* levels *(agrarian reform by leverage),* is the most obvious thing that can be seen from the phenomena of (re)claiming, as well as from the land ownership.

Pinky Chrysantini, in her article on "Gerakan Pendudukan Tanah Dalam *Land Reform*" (*The Movement of Land (Re)claiming in Land Reform*), has

broadened her study on the land handover, which has, so far, been emphasized on the discussion in the frame of the unfairness and the conflicts that have been more critical along with the questions on: 1) whether the movement of (re)claiming, which are supposed to be able to be utilized by the peasants, can really be utilized for the sake of the poor peasants, 2) and whether the peasants' livelihood can change after the land (re)claiming. The writer provides a far sharper understanding through the study of the critical land takeover, with the efforts of managing the production patterns, as the criticism towards the weaknesses of land takeover for being stagnant in the land fight.

The discussion frequently related to the movement of the land (re)claiming is the agrarian conflicts. Agrarian conflicts (in a broad definition) are frequently viewed as the impact of imbalance agrarian matters, which, in turn, has triggered the land (re)claiming, although the conflicts occurring do not always result in the land (re)claiming. For this matter, **Sadikin**, a researcher of the agrarian field, has put forward the argument that conflicts are parts of the strategy and tactics of the peasants' struggle in order to make the land reform come true. Thus, conflicts do not necessarily have to be terminated, but should be managed in order to become the power to boost the agrarian reform from the *grass root* level (*agrarian reform by leverage*). The writer has strengthened his argument through a range of explanation relating the concepts and the peasants' position to the social movement.

The further passage is related to the major concern and question put forward by the previous writer (Pinky), asking how the peasants' livelihood would be, after the land (re)claiming. Some facts have shown the phenomena of land reselling after land (re)claiming.

Thus, every effort of the land (re)claiming has to be synergized with the efforts of managing production patterns, distribution, and consumption oriented in a more sustainable way and guarantee the peasants' sovereignty.

Therefore, the discussion on the production pattern management, which is expected to provide alternative spaces, and sidedness towards the peasants, is explained by **Yusup Napiri Maguantara** in his article entitled "Pembenahan Tata Produksi Pertanian Pangan" (*The Management of Agricultural Food Production*). Being inspired by the film "A Bug's Life", the writer is convinced that the peasants' struggle may be an effort of digging the peasants' struggling movements in the area of the production pattern management, in order to support the alternative efforts of making the peasants' sidedness, in the middle of the commercialization flow, as well as the peasants' and food trade modification that have pressed the peasants down.

★★★

LABORS

There have been some new progress and development occurred in the labor world in Indonesia, ever since the resignation of Soeharto's regime, especially in the narrowing of job opportunities in formal sectors, and the phenomena of informalization that are getting bigger and bigger. The economic instability has contributed to the vivid impacts in formal industries, especially in the field of textile and textile products. The alternation of the capital strategy in the macro context has also boosted the process of in-formalization and flexibility carried out by the industries as the form of production efficiency strategy. Such alternation has absolutely given bad impacts to the peasants and weakened their bargaining position.

Unfortunately, labors and labor organizations are now encountering a major difficulty in facing the changing problems using the means of organization and strategy developed recently. The fact has evolved a sort of consciousness among some activists and labor organizations on the need of thinking and developing some alternatives of strategy, as well as developing new frames of thoughts, in order to improve and support the position of Indonesian labors.

Related to the above context, the article written by **Indrasari Tjandraningsih** and **Maria Dona Dewi Puspitaningrum** has become important, as it is able to explain the changing situation of the economics and macro-politics, as well as the mechanism and the impacts of the in-formalization process carried by industries towards their labors and communities. This explanation is then connected to the efforts of developing alternative frames of organizing and moving labors in the future which are more responsive towards the industrial and labor situations going on today.

The labor matter itself, when placed in a macro-context, will always deal with the matter of employment opportunity. The focus on labor discussion limited only on labors of formal sectors will surely neglect over 90% of work force unabsorbed in formal sectors. Thus, the following question would be what sort of job opportunity it is that would become potential and appropriate for them. **Resmi Setia,** in her writing, completes the description of the labor situations in macro arenas through the writing discussing the appropriate job opportunities through a potential analysis and challenges, in the sectors of small and micro enterprises.

★★★

SMALL AND MICRO ENTERPRISES

Even though a lot of parties of non-governmental organizations and international financial institutions like the World Bank and Asian Development Bank admit that the Indonesian economic development should be directed to developing the small enterprises, its economic

structure and environment improvement, the real supports towards such things are still very limited. The understanding of the interrelationship of the small-micro entrepreneurships in micro levels, as well as the connectivity to a bigger economic structure, is of an important prerequisite to the efforts. Unfortunately, such things are also very limited.

On the side of the small entrepreneurs, the empowerment of small enterprises becomes essential to be carried out for Indonesian economy to be based on. Since the fact has shown that in the world of, especially, informal sectors/trades, most of the doers are women, the empowerment of women in small enterprises becomes very important to do. A lot of efforts towards the matter have been carried out, though. Yet, the activities of developing the strategy of empowerment relating the role of the women in the entrepreneurship to their roles in their households have not found its concrete form. This matter becomes essential concerning the women's vulnerability in the entrepreneurship and domestic arenas, which are generally derived from their household life, as well as from the structures unfair to them outside their household.

In this context, **Dede Mulyanto**, a researcher of the field of small entrepreneurship, in his writing on "Kerentananan Usaha Kecil: Faktor Pengaruh, Dampak, dan Solusi" *(The Vulnerability of Small Enterprises: The Influencing Factors, Impacts, and Solutions*), has contributed some knowledge of the vulnerability and the influencing conditions. Such knowledge is expected to be the basic of developing the effective strategy of empowering women in small enterprises.

★★★

GOVERNANCE

The efforts of empowering civil society in the process of democratization of local levels post Soeharto's era has become an important moment that we can see. Various initiatives to enlarge the spaces for civilian to express and defend their interests have been emerging in Indonesia. The efforts to create the mechanism that enable the civilian to get involved in the process of decision making, as well as in the control towards public service, have also become a growing thing since the last few years.

The main question in which the answer to it needs continuously discussing is how far such a process has been the facility for the civil society empowerment. And to be more specific, the question is whether the changes have really empowered the poor and marginal civil society like labors, small-micro economic actors, and peasants.

Eka Chandra in his article on "Partisipasi Politik': strategi subsistensi ekonomi rumah tangga? –

Catatan pinggir studi pustaka partisipasi politik 'orang miskin' '' *(Political Participation: the strategy of household economic subsistence? – A note of the literary study of the poor people's political participation*), explains the points of view of understanding the three main concepts, i.e.: participation, poverty, and politics categorized as minimum participation and maximum participation. Minimum participation is the point of view considered to be insufficient to explain the limited political essence, which is substantially not appropriate for poor societies. On the other hand, the contribution of the point of view of maximum participation is laid on its views, which are considered to be more sufficient to explain the politics, the power of the poor, and the interrelationship of the power between the elite and non-elite. The maximum participation activities are the ones involving the power relation: domination, rivalry, conflicts, and teamwork.

★★★

In a book review, **M. Krismara** has written his review on a book written by Darwis Khudori entitled "Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya, Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code" (*Towards The Village of Liberation: Building the Civil Society from the Roots, Learning from Father Mangun at the Bank of Code River*), published by the Yayasan Pondok Rakyat, Yogyakarta. The writer himself has recently been staying in France; however, his social thoughts are still influencing the Indonesian academic development. The writer has a historical relationship with Father Mangun, and was a part of the Code River project. The project was not merely an ordinary project of residency, but much more than that, the land use and its architecture or the layout of Code River, reflects a great thought and the sidedness of the layout towards the marginal societies.

Since there are not many land use have the sidedness towards the marginal society, AKATIGA assumes this book is extremely worth reading, and expects that it could also be a learning process for planners and architects to start thinking seriously of one of their roles and contribution to marginal societies. M. Krismara**,** as the reviewer of the book, is able to write the essence, and express his assessment on it very well.

Another writing that would be useful for non-governmental organizations, readers, as well as for collectors of references, was dedicated by a librarian of AKATIGA, i.e. **Yose Ali Rahman,** on the literary documentation in a form of digital concept. In his writing on "Konsep Digitalisasi: antara Kebutuhan dan Realitas" (*Digitalization Concepts: between the Need and Reality"*), the writer has put forward the concept of digital library as an alternative to completing the available conventional library. The writer has also put forward the strengths and weaknesses of the

concept, and he has further focused the discussion on one of the simplest applications of the digital documentation in a form of e-book.

★★★

This position paper is only a part of the researches of AKATIGA. Up to the moment, the AKATIGA's researchers have been back from their field researches, and on the process of writing the reports. We hope that the writing could be of a benefit for readers, and for the sake of social research development. We really look forward to having some criticism as well as suggestion that could be addressed directly to akatiga@indosat.net.id.

Thank you very much.

Yulia Indrawati Sari
Executive Director of AKATIGA

MEMAHAMI GERAKAN PENDUDUKAN TANAH DALAM *LAND REFORM*

Pinky Chrysantini [1]

Abstract

This passage is trying to explain the referred concepts in order to figure out the move of the land occupation, or what is normally called the reclaim by the activists and agrarian observers believing that the reclaim is the initializing step towards the land reform. The concept paper is trying to commence with some related concepts of: 1) land reform, 2) peasants and the lands as well as the rural alternation, 3) social movement and the peasants' mobilization.

Penelitian dan tulisan-tulisan mengenai pendudukan tanah pada umumnya menekankan pemaparan konflik dan ketidakadilan yang dialami oleh petani atau penggarap tanah melalui perspektif hukum, pelanggaran hak asasi manusia, dan gerakan sosial yang menyertainya, sementara tulisan atau penelitian yang mencoba memahami sebuah tindakan pendudukan tanah dengan menelaah ke dalam aksinya secara lebih kritis, nyaris tidak ada. Siapa saja aktor yang terlibat? Apa yang terjadi ketika tanah sudah diambil alih dan diduduki? Bagaimana mekanisme pembagian tanahnya, dan untuk siapa? Siapa yang sesungguhnya mengambil manfaat dari pendudukan tanah? Persoalan apa yang muncul ketika para tunakisma memiliki tanah? Bagaimana pemanfaatannya? Apa implikasinya terhadap tatanan sosial ekonomi yang sudah ada? Apakah konflik atas tanah selesai? Bagaimana keterlibatan aktor luar petani dalam proses pendudukan dan pengetahuan apa yang mereka sampaikan kepada petani? Apakah sesudah memiliki tanah persoalan

[1] Peneliti Yayasan AKATIGA

kemiskinan selesai? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab dan dianalisis lebih kritis untuk lebih memahami gerakan-gerakan pendudukan tanah; apakah pada akhirnya gerakan pendudukan tanah memang mendukung kepada dan sejalan dengan pembaruan agraria yang dicita-citakan.

Tulisan ini mencoba memaparkan konsep-konsep rujukan untuk memahami gerakan pendudukan tanah, atau yang lazim disebut *reclaim* oleh para aktivis dan pemerhati agraria yang percaya bahwa *reclaim* merupakan langkah awal menuju *land reform*.[2] Pembahasan diawali dengan beberapa konsep yang berkaitan dengan pendudukan tanah antara lain konsep-konsep mengenai (1) *land reform*, (2) petani dan tanah serta perubahan di pedesaan, dan (3) gerakan sosial atau mobilisasi petani.

Pendudukan Tanah dalam *Land Reform*

Istilah 'reforma' mengisyaratkan adanya proses perubahan untuk mengubah sesuatu yang timpang atau tidak adil. Kenyataan menunjukkan bahwa penguasaan tanah pada masyarakat sangat timpang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Studi Agro Ekonomi-Studi Dinamika Pedesaan (SAE-SDP) menunjukkan bahwa pada skala mikro ketimpangan justru lebih tinggi. Demikian juga studi yang dilakukan oleh AKATIGA di pedesaan[3] menunjukkan fakta bahwa tekanan masalah di atas telah menyebabkan semakin banyak petani tak bertanah atau buruh tani. Rata-rata penguasaan mereka atas lahan pertanian sesungguhnya tidak lebih dari 0,3-0,5 Ha tiap rumah tangga. Meski sulit untuk menentukan seberapa banyak buruh tani yang ada, namun dapat dipastikan bahwa kelompok 43% di atas didominasi oleh petani berlahan sempit dan sekaligus keluarga buruh tani yang anak-anaknya pergi ke kota, tinggal di daerah kumuh pinggiran kota, atau sebagai buruh pabrik dengan tingkat pendapatan yang sifatnya fluktuatif.

Pandangan mengenai *Land reform* – pembaruan pertanahan – juga mengisyaratkan perlunya perubahan semacam ini. *Land reform* adalah sebuah perubahan terencana untuk menata kembali tatanan-tatanan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah yang tidak adil, sehingga membicarakan pembaruan pertanahan menurut pandangan ini berarti akan mengarah kepada perombakan struktur sosial ekonomi dan politik yang lebih luas (Jacoby, 1971; Fidro, et.al, 2002; Wiradi, 2000). Pandangan-pandangan mengenai

---

[2] Sengaja bukan istilah reforma agraria (*agrarian reform*) yang digunakan di sini karena reforma agraria mengandung pengertian yang lebih luas yaitu melingkupi seluruh komponen agraria yang dimaksud dalam UUPA 1960 yaitu tanah, air, dan angkasa yang melingkupinya. Kajian dalam tulisan ini sengaja difokuskan hanya kepada tanah (*land*) untuk lebih bisa memahami persoalan pengambilalihan dan pendudukan tanah.

[3] Studi Struktur Relasi Agraria di Jawa Tengah, Bali, dan Lampung pada kisaran tahun 2001-2002.

land reform semacam ini menitik-beratkan kepada persoalan kelembagaan (*institutional*). Artinya, *land reform* tidak semata-mata membagi-bagikan tanah kepada petani penggarap, namun harus diiringi oleh perbaikan pada tatanan di bidang-bidang (*sphere*) lain. Sehingga, menurut Jacoby (1971), adalah sebuah tindakan yang keliru ketika tanah dibagi-bagikan dengan harapan mengentaskan kemiskinan tetapi tetap membiarkan kekuatan pasar yang rakus mendikte kehidupan petani.

Semangat *land reform* di Indonesia dipercayai merujuk kepada paham neo-populis yang dipopulerkan oleh A.V. Chayanov. Pandangan neo-populis dalam konteks *land reform* mendukung adanya kepemilikan tanah bagi petani, meskipun kecil. Tanah untuk petani, seperti halnya tenaga kerja (*labor*), merupakan *fixed cost* (biaya tetap) yang menjadi aset mutlak agar petani bisa memenuhi batas level subsistensi keluarganya. Berkurangnya tanah mengakibatkan petani tidak dapat memenuhi level subsistensinya, dan dalam hal ini petani akan berusaha memperoleh tanah. Kalau tanah pun sulit diperoleh atau tidak cukup, salah satu jalan yang ditempuh adalah bekerja semakin keras (tanpa upah lembur seperti pada petani kapitalis) dan mengintensifkan produksi tanahnya. Itu sebabnya dalam pandangan neo-populis, ukuran tanah yang dimiliki oleh petani ditentukan oleh besarnya anggota keluarga (kebutuhan subsistensi harian). Inilah yang disebut *labor-consumer balance* yaitu petani sebagai produsen sekaligus konsumen memperhitungkan efisiensi pemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan jumlah anggota keluarganya, jadi tidak berlebihan (Kitching, 1982).

Pandangan Neo-populis yang melihat bahwa satuan-satuan ekonomi rumah tangga merupakan bentuk ekonomi yang efisien, menjadi pandangan dasar upaya *land reform* di Indonesia. Asumsinya adalah karena ekonomi keluarga dipandang efisien, maka setiap keluarga petani seharusnya menguasai tanah meskipun kecil, sehingga ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah dari masa kolonial harus ditata ulang menjadi tatanan pertanahan yang lebih adil. *Land reform* di Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 memiliki semangat untuk memperkuat fondasi ekonomi di level masyarakat desa, dengan menekankan kepemilikan tanah yang adil karena tanah adalah faktor produksi utama dan pada dasarnya merupakan milik rakyat, sehingga tidak boleh dimiliki secara serakah apalagi digunakan sebagai alat kekuasaan orang seorang untuk menindas.

Land reform di banyak negara dan kajian literatur sering diidentikkan dengan membagi-bagikan tanah kembali kepada rakyat (*land redistribution*). Menurut Jacoby (1971), *land reform* tidak identik dengan distribusi tanah, tetapi

sebaliknya, distribusi tanah yang dilakukan dalam kerangka *land reform* adalah sebuah distribusi yang spesifik, yaitu sebuah proses distribusi yang mengandung rekayasa sosial ekonomi untuk tujuan tertentu. Di sisi lain, *land reform* yang dicetuskan melalui revolusi identik dengan distribusi tanah (berjuang untuk mengambil dan membagikan tanah), karena *land reform* melalui revolusi semacam ini memang didasari oleh keinginan untuk merombak tatanan kepemilikan tanah yang dirasakan tidak adil (Jacoby, 1971:23). Pandangan semacam ini meletakkan reformasi pertanahan dalam sebuah konteks perubahan struktur mendasar dan perubahan institusional (yang lebih kepada aturan, norma, dan nilai), sehingga *land reform* seharusnya tidak parsial dan tidak hanya berwujud membagi-bagikan tanah, tetapi merupakan sebuah reformasi besar menyangkut perombakan struktur sosial ekonomi politik yang terkait dengan tanah untuk kehidupan petani.

Dalam pembaruan agaria, khususnya reformasi pertanahan, dikenal istilah "*land reform by leverage*", yaitu sebuah gerakan pembaruan (*reform*) yang dilakukan oleh petani yang mengorganisir diri sedemikian rupa sehingga dengan kekuatannya mampu melakukan tawar menawar dengan penguasa tanah atau pemerintah (Powelson dan Stock, 1987:3). Dari definisinya, pembaruan agraria *by leverage* (pendongkrakan) ini mengandung pengertian bahwa untuk mampu melakukan tawar menawar dan mendesakkan aspirasinya ke dalam kebijakan pembangunan, maka sebuah gerakan petani harus 'berdaya' (*empowered*). Untuk mencapai tahap 'berdaya' ini sudah tentu petani membutuhkan waktu yang lama dan pengetahuan yang cukup mengenai keagrariaan. Gerakan pendudukan tanah tidak identik dengan gerakan *reform by leverage*, namun bisa dipandang sebagai salah satu bentuk pengorganisasian petani untuk mendesakkan kebutuhannya akan tanah. Penataan ulang struktur penguasaan tanah dan praktik pemanfaatan lahan yang berkelanjutan serta perbaikan pada pranata-pranata pendukungnya (seperti kredit, koperasi, dan pemasaran) menjadi rangkaian proses panjang pemberdayaan petani. Dengan demikian pendudukan tanah bisa dipandang sebagai salah satu langkah awal dari rangkaian reforma agraria.

Land reform by leverage atau pendongkrakan dari bawah, oleh Powelson dan Stock, dipandang sebagai 'lawan' dari pembaruan berdasarkan kedermawanan atau *land reform by grace* yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan contoh dari 16 negara yang melakukan pembaruan agraria, kecuali Korea Selatan dan Taiwan, Powelson dan Stock menunjukkan bahwa pembaruan berdasarkan kedermawanan ini terbukti tidak berhasil untuk memperbaiki kehidupan petani dan tidak berkelanjutan, karena selalu dilakukan berdasarkan prasangka-prasangka yang keliru mengenai

kemampuan dan kehidupan petani. Selain itu, kelemahan paling dasar dari *land reform by grace* adalah sangat rentan terhadap perubahan sistem politik dan pergantian kekuasaan (elit) negara, sehingga pergantian pemimpin bisa berarti perubahan terhadap tatanan agraria yang ada. Dengan demikian, pembaruan melalui kedermawanan pemerintah atau negara tidak lagi tepat untuk dilakukan. Namun, Menurut Wiradi (1995), sebagaimana layaknya pembaruan lainnya, *land reform by leverage* tetap memerlukan kekuasaan pemerintah untuk memungkinkan desakan aspirasi dari masyarakat terwujud dalam kebijakan pembangunan.

Dalam konteks mendesakkan aspirasinya inilah otonomi daerah membuka peluang untuk terjadinya proses pembaruan agraria yang lebih desentralistis. Posisi tawar politik petani, lewat organisasi tani, dimungkinkan untuk mendapat perhatian dari pemerintah dan dapat mempengaruhi kebijakan agraria. Peran pemerintah daerah tetap menjadi penting terutama dalam membuat keputusan-keputusan formal yang tertuang dalam peraturan-peraturan perundangan. *Land reform by leverage* dengan demikian menghendaki pemerintah untuk demokratis terhadap aspirasi petani (Suhendar, 2002), meskipun, seperti telah dikemukakan di awal, otonomi daerah juga membawa sisi negatif dari keterbukaan.

Perombakan struktur dan pranata sebagai suatu kesatuan untuk mencapai keadilan agraria pada kenyataannya sering jatuh kembali kepada persoalan sekedar membagi-bagikan tanah. Istilah '*reclaim*' kemudian sering digunakan dan populer di kalangan aktivis agraria untuk menunjuk kepada hampir semua tindakan mengambil alih tanah dan mendudukinya. Dalam kajian *land reform* dan literatur-literaturnya, tidak ditemukan istilah '*reclaim*', melainkan *claim* atau redistribusi tanah. Istilah *reclaim* menjadi rancu karena penggunaan kata-kata '***re***' yang artinya kembali, sehingga '*reclaim*' seolah-olah adalah 'mengklaim-kembali' atau mengakui kembali sesuatu yang pernah dimiliki sebelumnya. Pada kenyataannya, tidak semua kegiatan mengambil alih tanah adalah kegiatan mengambil **kembali** miliknya atau haknya yang terdahulu, tetapi bisa saja mengambil karena tekanan ketidakadilan di lokasi-lokasi tertentu. Tampaknya istilah *reclaim* digunakan hanya untuk memudahkan, sehingga orang segera tahu bahwa ketika istilah itu disebutkan maksudnya adalah mengambil alih (menduduki) tanah dari pemilik/pengelola sebelumnya, tanpa memperhatikan apakah tanah itu memang milik mereka sebelumnya (yang dirampas dan diambil alih kembali). Dalam tulisan ini akan digunakan istilah pendudukan tanah untuk menggantikan istilah '*reclaim*'. Istilah 'pendudukan tanah' di sini digunakan baik untuk tanah yang dulu dirampas dari rakyat kemudian diambil kembali oleh warga, maupun juga yang digunakan untuk tanah-tanah obyek *land reform* yang diambil

warga karena kondisi (tekanan) ketidakadilan yang dialaminya.

Mengambil alih dan menduduki tanah dilakukan bukan tanpa alasan, juga bukan sembarang tanah, serta tidak dibagikan kepada sembarang orang. Pendudukan tanah dalam kerangka *land reform* ini pada hakekatnya "diizinkan" oleh Undang Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) yang telah menggariskan kebijakan menuju keadilan agraria (Sandy, 1991:144-145) sejalan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 45 yaitu upaya menggunakan kekayaan alam untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (seluruh rakyat). UUPA 1960 lahir dengan semangat untuk memperbaharui peraturan-peraturan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dari masa kolonial yang merugikan bangsa Indonesia, terutama petani miskin. Namun demikian, negara tidak selamanya memenuhi janji tersebut, dan pelaksanaan UUPA 1960 yang mendasari tata ulang agraria agar lebih adil menjadi terhambat[4]. Akibatnya ketimpangan penguasaan tanah tetap terjadi dan membuat jurang kaya-miskin semakin tajam. Kemudian dipercayai bahwa demi alasan menuju keadilan agrarialah maka tindakan pengambilalihan itu dilakukan.

Sementara itu tanah yang diduduki adalah tanah-tanah yang masuk kedalam kategori 'obyek *land reform*'. Obyek *land reform* adalah tanah-tanah yang bisa dan hendak dibagikan kepada yang berhak. Tanah-tanah *obyek land reform* itu diatur dalam PP No. 224 tahun 1961,[5] yang antara lain adalah tanah yang:

1. Melebihi batas maksimum sebagaimana ditetapkan di UU No. 56 pp tahun 1960, sehingga jatuh kepada negara.
2. Ditinggalkan pemiliknya karena bertempat tinggal di luar kecamatan (tanah *absentee*) dan akan diambil alih pemerintah.
3. Tanah swapraja atau bekas swapraja yang telah beralih kepada negara sesuai dengan diktum keempat hukum A UU Pokok Agraria.
4. Dikuasai langsung oleh negara dan ditegaskan lagi oleh menteri agraria.

Tanah obyek *land reform* tidak dimaksudkan atas tanah kepentingan umum, perumahan, jalan, hutan, dan sarana umum lainnya, melainkan hanya yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian.

Tanah obyek *land reform* yang bisa diambil alih tidak boleh dibagikan

---

[4] Lihat I Made Sandy, 1991, "Catatan Singkat tentang Hambatan-hambaran Pelaksanaan UUPA", jurnal Analisis CSIS th XX no. 2

[5] Untuk lengkapnya lihat *Hukum Agraria Indonesia* oleh Prof. Boedi Harsono, 1996, Penerbit Djambatan. Atau untuk versi singkatnya lihat *Land Reform* di Desa oleh Boy Fidro dkk, 2002, Read Book, Jogjakarta

kepada sembarang orang. Menurut pasal 8 PP No. 224 tahun 1961, untuk pembagian tanah dan syarat-syaratnya, prioritas diberikan kepada yang paling membutuhkan dan menggantungkan hidupnya dari tanah. Disini muncul persoalan mengenai siapa yang sebetulnya dianggap paling membutuhkan tanah. Lebih lanjut, pasal 8 menunjuk "petani", "penggarap", "buruh tani tetap", "pekerja tetap", berikut definisinya (lihat Fidro dkk, 2002; Harsono, 1996). Pada kenyataannya, pengambil alih tanah memang terdiri dari petani, tetapi apakah petani yang mengambil tanah itu memang termasuk kategori paling membutuhkan dan menggantungkan hidupnya dari tanah?

Sebenarnya semua pihak menghendaki terwujudnya pembaruan agraria melalui *land reform* yang lebih adil. Tidak kurang Bank Dunia juga mengisyaratkan kebijakan penataan ulang tanah agar petani bisa memperbaiki kehidupannya. Lembaga internasional semacam ini menawarkan program-program sertifikasi yang menjamin hak-hak individu atas tanah. Namun jaminan *property rights* semacam itu belum tentu menguntungkan petani-petani miskin yang memiliki kerumitan realitasnya sendiri yang sering tidak diperhatikan oleh lembaga-lembaga tersebut. Selain lembaga-lembaga internasional seperti itu, usaha pembaruan agraria datang tak kalah sengitnya dari organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop) yang mempromosikan perubahan di tingkat kebijakan ataupun perubahan-perubahan mendasar yang radikal di tingkat akar rumput.

AKATIGA tetap menekankan kembali pentingnya untuk melakukan *land reform* sebagai sebuah kesatuan perombakan atau penataan ulang secara menyeluruh atas pranata-pranata sosial ekonomi dan politik baik di tingkat akar rumput maupun kebijakan yang terkait, sehingga gerakan *land reform* sekali lagi bukan hanya mengambil alih tanah dan mendudukinya, tetapi juga dibarengi oleh perencanaan dan penataan di bidang-bidang lain yang kemudian dijaga oleh aturan-aturan main yang disepakati bersama serta menciptakan mekanisme untuk menjaga dan menegakkan aturan main yang telah disepakati itu. Perencanaan dan penataan tanah serta pertanian ke depan sesudah tanah diambil alih menjadi tugas yang sangat penting yang harus dilakukan sesudah tanah berhasil diduduki. Disinilah *land reform by leverage* betul-betul harus dimulai, yaitu dengan mengupayakan agar petani mampu menjaga, mempertahankan, dan mengelola tanah serta produksi pertaniannya sehingga punya posisi tawar dengan pembuat kebijakan.

Masyarakat Petani dan Perubahan di Pedesaan

Land reform yang hendak menata ulang struktur sosial ekonomi dan politik mau tidak mau harus mendasarkan dirinya kepada

pemahaman mengenai masyarakat petani dan pertanian serta perubahan-perubahan yang mempengaruhinya. Dengan demikian rangkaian reforma agraria kemudian mempersoalkan logika-logika petani dalam menyiasati hidupnya dan dinamika perubahan di pedesaan akibat interaksi dengan sistem ekonomi yang lebih besar. Tidak jarang petani dengan mudah melepaskan tanah yang sudah dengan susah payah diperoleh lewat perjuangan pendudukan tanah dan kembali kepada ketergantungan dengan pihak luar.

Tindakan-tindakan petani pasca pendudukan tanah tidak bisa dilepaskan dari sejarah yang membentuk pola penguasaan tanah dan susunan sosial serta rasionalitas ekonominya yang menunjukkan bahwa petani tidak homogen. Menurut van der Kroef (1984), pola penguasaan tanah, khususnya di Jawa, bervariasi jenisnya dan berada diantara kepemilikan komunal dan kepemilikan individu. Dalam hal ini terdapat kelenturan pola kepemilikan dan penguasaan yang ditunjukkan oleh penguasaan tanah komunal di masa kerajaan Hindu dan Islam, saat tanah komunal desa boleh dikuasakan kepada perorangan dan ahli warisnya tetapi dengan pengawasan komunal. Kepemilikan komunal dengan penguasaan pribadi semacam ini memudar seiring dengan berbagai perubahan internal seperti tekanan penduduk, datangnya pemerintahan kolonial, dan meluasnya penggunaan uang serta tindakan-tindakan ekonomi pribadi. Pengawasan komunal terhadap tanah-tanah yang dikuasai pribadi mengendur dan ditandai dengan, istilah van der Kroef, perasaan solidaritas kelompok yang samar (*ibid*, 147). Masuknya partai politik modern ke desa, terutama lewat Partai Komunis waktu itu, menciptakan polarisasi kelas antara 'petani kaya' dan 'petani miskin'. Diferensiasi kelas yang 'dibuat' oleh partai Komunis inilah yang kemudian mendorong petani miskin melakukan pendudukan atas tanah petani kaya.

Van der Kroef (1984) lebih lanjut menunjukkan bahwa sejak kepemilikan komunal mulai mengendur akibat tatanan pemerintahan kolonial dan perubahan-perubahan yang cepat, jumlah petani tidak bertanah serta petani penggarap semakin banyak. Pada kondisi dimana solidaritas kelompok masih kental, masyarakat memiliki mekanisme komunal untuk menyerap keberadaan petani tak bertanah, sehingga kepemilikan komunal dipertahankan sedemikian rupa untuk menjaga agar petani tetap bisa menggarap tanah dan hidup dari bertani. Namun pada masyarakat dimana nilai-nilai tradisional yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan tanah tidak lagi menjadi penunjang utama, petani Jawa umumnya akan beralih kepada kegiatan-kegiatan lain di luar pertanian.

Paling tidak ada dua hal yang bisa ditarik dari apa yang dikemukakan oleh van der Kroef. *Pertama*, dari sisi kepemilikan dan penguasaan tanah terbentuk struktur masyarakat yang

tidak homogen, baik dari hak maupun kewajibannya dalam mengelola, menguasai, dan memiliki tanah. Struktur kepemilikan dan penguasaan tanah adalah bentukan dari kekuasaan yang dominan di masa itu. Pemilik tanah, sejak zaman kerajaan-kerajaan, adalah orang-orang 'khusus' yang mendapat hak pemilikan tersebut dari raja, sedangkan orang-orang yang tidak memiliki tanah diperbolehkan menguasai tanah milik komunal dengan pengawasan komunal dan tetap boleh mengolahnya hingga anak cucunya (boleh diwariskan). Dengan kata lain, petani tidak bertanah dapat terus menggarap tanah lewat mekanisme komunal tradisional yang menjamin mereka bisa hidup dari bertani. Tetapi hal lain yang juga bisa diartikan dari kondisi itu adalah bahwa petani tak bertanah menyadari posisinya (kelas) sebagai masyarakat yang sebetulnya tidak memiliki kuasa atas kepemilikan tanah. 'Kesadaran' kelas ini baru dimunculkan ketika kekuatan partai komunis mulai mempromosikan *land reform*-nya yang memunculkan istilah 'petani kaya' dan 'petani miskin' dan mendorong petani tak bertanah untuk melawan petani pemilik tanah luas terutama perkebunan dan mendudukinya (Kroef, 1984:164-167). Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tradisi, nilai, dan struktur yang membentuk masyarakat membuat petani tak bertanah atau buruh tani tidak memiliki bayangan untuk memiliki tanah apalagi melakukan perlawanan untuk merebut dan mendudukinya. Seperti akan dipaparkan di bawah (bagian pengorganisasian petani), petani tak bertanah dan buruh tani sebetulnya tidak memiliki taktik atau strategi untuk melakukan perlawanan. Dengan demikian, pendongkrakan dari bawah tidak selalu merupakan gerakan yang lahir dari petani miskin.

Kedua, perubahan stuktur kepemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan akibat tekanan penduduk desa, pertumbuhan ekonomi, teknologi pertanian, lalu diiringi kepemilikan individual yang makin menguat serta solidaritas komunal yang makin mengendur, membuat petani tidak bertanah, penggarap, dan buruh tani dengan mudah beralih kepada kegiatan-kegiatan di luar pertanian, misalnya membuat kerajinan, berdagang di pasar, atau pergi ke kota. Tindakan-tindakan untuk 'keluar' dari sektor pertanian ini menunjukkan besarnya pengaruh hubungan pasar (*market relationship*), perdagangan, dan industri skala mikro (seperti ditunjukkan lewat pedagang di pasar tradisional dan pekerja kerajinan di desa) terhadap kehidupan petani. Hal ini juga menunjukkan bahwa petani bukanlah masyarakat yang homogen dan melulu bekerja di pertanian (Alexander, et al., 1991), melainkan telah beralih juga kepada kegiatan-kegiatan ekonomi non-pertanian yang menghasilkan pendapatan untuk kecukupan hidup rumah tangga petani. Dengan demikian, istilah 'petani' menunjuk tidak hanya sebatas pada matapencaharian pertanian atau penguasaan tanah saja, tetapi pada 'petani' melekat juga seperangkat

hubungan ketenagakerjaan berdasarkan hubungan-hubungan yang diatur oleh pasar. Ini membuat 'petani' bukan sekelompok orang yang homogen.

Seperti yang dipaparkan van der Kroef (1984) dan Alexander, et.al. (1991), tindakan-tindakan petani masa kini merupakan hasil dari perjalanan panjang pembentukan sejarah melalui kekuatan-kekuatan kolonial, pasar, dan industri. Namun, kekuatan-kekuatan pasar ini ternyata tidak menghapuskan bentuk-bentuk non-pasar khas petani (Bernal, 1994). Bernal menandaskan bahwa petani bekerja dengan rasionalitas hubungan produksi yang pluralis, yaitu tidak sepenuhnya bersifat kapitalis yang mengenakan nilai (atau harga) atas segala sesuatu (*profit seeking*), tapi juga tidak sepenuhnya memegang nilai-nilai tradisional yang seringkali tidak memperhitungkan keuntungan (misalnya melibatkan tenaga kerja dari kerabat). Petani 'terpaksa' bekerja di luar pertanian untuk kelangsungan produksi rumah tangganya di desa dengan menjadi buruh yang dibayar (*waged labor*) di kota. Produksi petani juga merespons ekonomi nasional (seperti tampak pada jenis-jenis produksi pertanian yang dikehendaki pasar), sehingga petani tidak bebas dari pengaruh pasar.

Tindakan-tindakan petani sesudah mengambil-alih tanah erat kaitannya dengan bagaimana mereka merespons kondisi ekonomi/pasar yang lebih luas. Di sinilah dimana terdapat pertemuan antara 'dunia luar' dan 'dunia petani', banyak literatur yang melihat (masyarakat) petani sebagai kategori masyarakat yang khas baik secara ekonomi maupun politik (Kerblay, 1971; Bernal, 1994, dll). Salah satu pendekatan yang bisa menjelaskan tindakan petani sesudah menguasai tanah adalah prinsip "*safety first*" atau tingkat yang aman (Scott, 1976:15). Prinsip ini menjelaskan ekonomi petani umumnya berkisar di wilayah yang aman, dimana dia bisa memenuhi kebutuhan minimum hidupnya dan keluarganya (subsisten). Risiko-risiko di masa krisis dihindari sedemikian rupa agar ia tetap berada di wilayah aman itu karena mereka senantiasa hidup di batas marjin. Kalau produksi pertaniannya gagal, petani terpaksa menjual sebagian atau seluruh tanahnya, atau aset-aset lain (seperti kerbau), agar level minimum kebutuhan hariannya tetap terpenuhi (*ibid*:14). Namun di sisi lain, Popkin (1986) membantah hal ini. Ia mengatakan bahwa petani sebetulnya tidak hanya hidup di batas marjin saja, tetapi juga membuat kalkulasi mengenai investasi, tabungan, dan perhitungan-perhitungan lain, sehingga sebenarnya petani juga berorientasi pasar. Dalam hal ini, argumen Bernal (1994) lebih mengambil jalan tengah mengakomodasi pandangan Popkin dan Scott. Bernal memandang bahwa rasionalitas sangat kontekstual (*all rationality is contextual* – hal 806) di masa sekarang. Kehidupan ekonomi petani dan 'rasionalitasnya' tidak bisa terlalu kaku dilihat pada ekonomi

subsisten saja atau sepenuhnya kapitalis, tapi keduanya berdampingan (*co-exist*) dan menciptakan dinamika tersendiri pada kehidupan ekonomi petani. Petani merespons pasar (dalam hal ini kebutuhan regional nasional untuk kebutuhan pangan atau tanaman produksi lain) dengan melakukan kalkulasi dan pengelolaan tenaga kerja yang ada (dalam keluarganya) dan terlibat dalam kegiatan *waged labor* (orientasi pasar), tetapi dengan tetap beorientasi kepada rasionalitas subsisten yang meminimalkan segala risiko yang salah satunya dengan cara meminimalkan biaya produksi pertanian dengan menggunakan tenaga kerja tidak dibayar – *unwaged labor* – yang umumnya terdiri dari keluarga dekat.

Pengorganisasian Petani dalam Pendudukan Tanah

Apakah petani mampu melakukan perlawanan atau pemberontakan? Wolf (1971) dan Migdal (1974) mengatakan bahwa pada dasarnya petani tidak memiliki bayangan ataupun keinginan untuk melakukan perlawanan atau pemberontakan, kecuali ada tekanan atau krisis yang sangat menekan mereka dan ketika ada pihak luar yang mendorong lebih jauh. Wolf dengan eksplisit mengatakan (1971:268) bahwa mempertahankan gerakan petani untuk bisa terus membuatnya mampu berposisi tawar dengan kuat (*on going political leverage*) sama sekali tidak mudah, terutama jika petani tidak punya taktik untuk bisa terus mengkontrol sumber daya yang dimilikinya sebagai dasar tawar menawar. Selain itu, petani tak bertanah yang hubungannya telah terpola sedemikian rupa dengan tuan-tuan tanah, tidak memiliki taktik jitu untuk terus mempertahankan posisinya. Pandangan bahwa petani sebetulnya tidak mampu melakukan perlawanan juga dianut oleh pengikut Marxist yang mengatakan bahwa petani tidak mungkin membuat revolusi kecuali ada pemimpin dari luar yang memulainya, dan baru memulai untuk berpolitik jika petani sudah mempercayai orang luar, karena petani juga tahu bahwa ada orang luar yang bersedia membantu. Meskipun sebuah pemberontakan berhasil dan mampu membentuk-ulang struktur sosial di desa, sebetulnya pengaruhnya hanya sekitar itu dan tidak meluas kepada negara atau struktur yang lebih besar lainnya. Sehingga pemberontakan petani di masyarakat yang sudah kompleks, yang kekuatan industrialisasinya sudah sedemikian kuat, cenderung akan terbatas dengan sendirinya (Migdal, 1974).

Berseberangan dengan pandangan ekonomi moral Wolf (1971), Migdal (1974) dan Scott (1976) yang memandang bahwa petani senantiasa mendasarkan tindakannya atas nama kelompok (baik dalam berproduksi maupun berpolitik dan melakukan perlawanan) dan cenderung memandang bahwa petani miskin merasa mereka tidak bisa keluar dari stukturnya (petani miskin tidak punya taktik untuk melawan), Popkin (1986)

cenderung melihat petani sesungguhnya tidak terlalu mementingkan kelompok dan mampu melakukan perlawanan atas dasar kepentingan-kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Menurutnya, tindakan kolektif memerlukan lebih dari sekedar konsensus atau intensitas kebutuhan, dan harus ada kepentingan pribadi, sehingga sebuah perjuangan tidak ditungganggi oleh *free rider* (pembonceng).

Menurut Huizer (1999), ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengkaji keberhasilan atau kegagalan sebuah gerakan atau mobilisasi petani, yaitu: (1) kondisi-kondisi yang mendorong timbulnya pergerakan; (2) faktor pemimpin; dan (3) strategi yang digunakan. Faktor pendorong yang menyebabkan petani melakukan mobilisasi dan perlawanan adalah rasa frustrasi yang ekstrim akibat tekanan-tekanan yang muncul akibat kesenjangan pembangunan. Menurutnya, berdasarkan contoh gerakan petani di 11 negara, petani yang melakukan perlawanan biasanya bukanlah petani yang sangat miskin, tetapi justru dilakukan oleh petani yang berada di wilayah-wilayah yang terdapat program-program pembangunan yang menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan. Daerah-daerah ini biasanya letaknya cukup dekat dengan kota dan memiliki hubungan ekonomi yang cukup baik dengan kota. Modernisasi berikut eksploitasi terhadap sumber daya alam dan manusia mengakibatkan petani kehilangan tanah dan memunculkan patron-patron baru yang lebih eksploitatif dan menghilangkan tatanan sosial lama antara pemilik tanah dan petani.

Faktor pemimpin adalah faktor penting untuk sebuah gerakan petani terutama pada tahap awal gerakan. Keberadaan pemimpin yang karismatik secara psikologis memberikan inspirasi dan rasa aman kepada anggotanya. Pemimpin semacam ini mampu memotivasi anggotanya untuk mengubah tatanan yang dianggap tidak adil. Namun, di sisi lain, pemimpin yang karismatik dapat menyebabkan rasa ketergantungan anggota, sehingga jika ia 'dihilangkan' maka gerakan bisa runtuh.

Selain pemimpin karismatik yang mampu menggerakkan massa, ada juga organisasi petani yang dengan baik dibentuk karena kehadiran pengorganisir dari luar. Umumnya pengorganisir semacam ini datang dari orang yang memiliki latar belakang daerah *urban* yang datang ke desa. Akan ada proses penolakan pada awalnya, namun jika terbukti dia dapat dipercaya dan diandalkan, gerakan massa yang efektif juga akan tercapai.

Strategi pergerakan dan perlawanan petani menjadi faktor yang menentukan keberhasilan sebuah gerakan. Strategi memobilisasi petani bisa dibangun melalui penciptaan-penciptaan kelas, konflik (antara yang kaya dan miskin), atau gerakan *disobedience* (ketidakpatuhan) yang non-kekerasan, gerakan boikot, dan sebagainya.

Peran organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop) sebagai pengorganisir dari luar masyarakat terbukti berpengaruh kepada mobilisasi massa. Ornop, merujuk arti katanya, bisa mencakup semua bentuk organisasi di luar pemerintah, mulai dari gerakan sosial, gerakan pengawas (government-watch), sampai organisasi-organisasi minat dan hobi. Meskipun mencakup berbagai jenis, istilah organisasi non-pemerintah lebih menunjuk kepada organisasi yang memberi dukungan finansial maupun teknis kepada masyarakat atau organisasi lain yang sedang mengupayakan pembelaan-nya di akar rumput (Hulme dan Edwards, 1997:21). Ornop atau NGO dalam hal ini bisa merupakan organi-sasi yang tidak langsung bersentuhan dengan keseharian masyarakat (bukan *grassroot organisation*), tetapi organisasi yang berada satu tahap sesudah organisasi akar rumput yang oleh Pearce (1997:259) diistilahkan sebagai *intermediary development organization,* yang terdiri dari orang-orang kelas menengah terdidik dan profesional, dan memilih jalur politik atau kemanusiaan dalam mendedika-sikan kerjanya untuk membela orang miskin dan terpinggirkan. Organisasi non pemerintah dipercayai memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, seperti kemampuan untuk menjang-kau masyarakat di wilayah pelosok dalam segala cuaca, dan yang terpenting adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mempromo-sikan demokrasi.

Pada tahapan hendak mengambil alih tanah, ornop melakukan pendam-pingan kepada organisasi petani di tingkat akar rumput. Ada upaya untuk 'menyadarkan' posisi petani dalam sebuah bangun hubungan kekuasaan yang lebih besar dalam menuntut keadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Fidro dkk (2002:13) '*pembaruan agraria berdasarkan kemauan rakyat adalah pembaruan agraria yang dikawal oleh kedaulatan rakyat - maka rakyatlah yang akan menegur jika pemerintah yang berkuasa melenceng dari jalan pembaruan agraria. Jadi tugas kita adalah mempersatukan kemauan rakyat*'.

Pada tahap ini, baik ornop yang bersangkutan maupun organisasi pendamping masyarakat perlu menciptakan agenda dan motif yang kuat untuk menduduki tanah. Salah satu yang dikemukakan dalam rekayasa ini adalah membentuk identitas kelompok. Dalam persoalan ambil alih tanah, ornop membung-kusnya menjadi petani tidak bertanah ataupun buruh tani. Sampai seberapa jauh kebenaran apakah kelompoknya betul-betul terdiri dari petani tidak bertanah, akan menuai hasilnya pada masa sesudah mengambil alih tanah. Pada tahap ini, petani yang mengaku dirinya tidak punya tanah ternyata merespons dengan berperilaku seolah mereka tidak membutuhkan tanah. Disinilah gerakan ambil alih tanah mulai kehilangan arahnya. Kesalahan yang mendasar dari organisasi non pemerintah dan organisasi akar rumput yang mendampingi petani

adalah mereka cenderung melihat petani dan desa sebagai sebuah kesatuan homogen. Anggapan ini memang penting sebatas ditujukan untuk keberhasilan menduduki tanah. Namun sesungguhnya itu adalah keberhasilan semu, karena perjuangan sesungguhnya untuk keluar dari kemiskinan lewat cita-cita *land reform* baru dimulai ketika petani mulai menata tanah dan produksinya dan perjuangan ini bisa terancam runtuh ketika petani mulai bertindak dengan aturan-aturan main pasar yang tidak dia kuasai.

Pada tahap pengambilalihan tanah, adalah penting untuk membentuk kesamaan tujuan atau identitas kelompok yang homogen untuk menghadapi atau mencapai tujuan yang sama. Namun pada tahap berikutnya, yaitu mengelola tanah, identitas yang dibuat homogen ternyata menyimpan kemungkinan adanya benih untuk kegagalan mencapai tujuan keluar dari kemiskinan. Salah satu gerakan petani yang keberhasilannya diakui dunia adalah gerakan pekerja tani tak bertanah di Brazil atau *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/*MST, atau sering disebut *Sem Terra*. Gerakan ini terus bertahan selama 20 tahun dan berhasil menggerakkan 145.000 keluarga dan memantapkan 843 *settlement* (pemukiman) di atas tanah seluas kurang lebih 3,6 juta hektar (Wolford, 2001; Branford, tanpa tahun). Gerakan ini bertahan dan berhasil membawa manfaat karena meniti jalan kepada arah yang dikehendaki *land reform,* yaitu mewujudkan keadilan agraria bagi anggotanya. Salah satunya adalah karena anggota gerakan ini betul-betul terseleksi sebagai petani pekerja yang mengalami perlakuan tidak adil dan tidak memiliki tanah; tanahnya diambil dan mereka diusir. Kehatian-hatian dalam memilih anggota pergerakan menjadi syarat utama MST mencapai keberhasilan.

Penutup

Penutup disini adalah untuk merangkum kembali konsep-konsep di atas yang diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar persoalan ambil alih tanah dan pendudukan, terutama untuk menjawab 'teka-teki' yang diresahkan oleh aktivis agraria yaitu, “kenapa tanah yang sudah berhasil diambil itu dijual kembali?” atau kekhawatiran lain menyangkut pengelolaan tanah sesudah ambil alih. Beberapa butir di bawah merupakan besaran-besaran yang mungkin bisa menjelaskan teka-teki tersebut.

* *Land reform* di Indonesia percaya bahwa setiap keluarga petani harus punya tanah untuk bisa mengupayakan kehidupan yang lebih baik. seringkali *land reform*, dengan singkat, selalu diidentikkan dengan: ambil tanah dan bagikan.

* Ketika mengambil alih tanah, sebuah gerakan pendudukan tanah membutuhkan identitas 'kelompok' yang relatif homogen, yaitu petani tidak bertanah dan buruh

tani atau penggarap, supaya mereka punya tanah.

* Namun, kenyataannya, belum tentu orang-orang dalam kelompok itu homogen seperti yang dibayangkan. Kelompok bisa terdiri dari beragam petani yang heterogen, baik berdasarkan sejarahnya dalam kepemilikan tanah, dalam hubungan tenaga kerja, cara memandang 'dunia' petani dan pertanian, serta kepentingan serta motif. Kesalahan mengkategorikan petani secara homogen inilah yang bisa menyebabkan ambil alih tanah salah arah dari tujuan *land reform* yang sesungguhnya (misalnya tanah dijual lagi).

* Ada beberapa hal yang menjelaskan keragaman ini. *Pertama*, karena sejak dulu struktur sosial berdasarkan pemilikan dan penguasaan tanah menunjukkan petani tak bertanah dan penggarap memposisikan dirinya sebagai pihak yang memang tidak bertujuan atau punya hak memiliki tanah. Dalam posisi sosial dan nilai-nilai tradisi ini petani tidak bertanah dan petani penggarap tidak punya kesadaran melawan untuk memperoleh tanah meskipun mereka punya rasionalitas ekonomi sendiri. Sebaliknya yang mempunyai kepentingan utama adalah orang-orang yang dahulu pernah memiliki tanah, atau punya motif-motif ekonomi tertentu dengan memiliki tanah. *Kedua*, heterogenitas juga bisa dijelaskan oleh timbulnya kepentingan-kepentingan individu yang muncul dan dikendalikan oleh bermacam-macam faktor (i.e. pasar tenaga kerja, komersialisasi, industrialisasi, tekanan penduduk). Dalam hal ini, pola subsistensi dan kapitalisme yang masuk ke pedesaan berdampingan dan menciptakan dinamika yang khas; ada hubungan-hubungan bercorak pasar (*waged labor*) dalam mencapai subsistensi, namun tetap ada corak non-pasar (*unwaged labor*) untuk meminimalkan biaya produksi yang berorientasi pasar (hasil tanaman keras atau hasil pertanian lain untuk dijual).

* Dengan demikian, dalam konteks atau kerangka untuk mengambil alih tanah, harus ada rekayasa yang dibuat oleh pihak luar (atau pihak dalam) bahwa petani itu tunggal, yaitu tidak punya tanah, sehingga harus dibuat mempunyai tanah. Sedangkan pada masa pasca pengambilalihan tanah persoalannya adalah rekayasa homogenitas semacam ini malah menjadi persoalan karena petani bisa bertindak diluar kepentingan kelompok. Rasionalitas menjadi sesuatu yang kontekstual, bukan dipengaruhi moral kelompok ataupun motif individu seperti yang diperdebatkan antara Scott (1976) dan Popkin (1986).

* Organisasi non-pemerintah dan organisasi akar rumput tidak steril dari agenda-agenda 'pasar' yang kemudian disampaikan kepada

petani. Langkah-langkah yang dilakukan ornop cenderung dengan cepat memposisikan dirinya bertentangan dengan negara atau pemegang modal, dan menamakan gerakannya sebagai gerakan sosial. Persoalannya adalah biasanya bentuk perlawanannya cenderung dilakukan dengan membungkus masyarakat desa atau petani kedalam satu kesatuan yang dianggap homogen, membangun identitas bahwa kelompok adalah tunggal, dan memungkinkan sebuah bentuk tujuan yang sama, sehingga pencapaian tujuan (dalam hal ini pendudukan tanah) lebih mudah untuk dilakukan. Persoalan baru muncul kemudian, ketika tanah sudah diduduki, ternyata kehomogenan kelompok tidak selalu terbukti benar, karena petani setiap saat dapat kembali kepada kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi.

Daftar Rujukan

Alexander, Paul, Peter Boomgaard, dan Benjamin White (eds). 1991. "Introduction", dalam *In the Shadow of Agriculture*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.

Bernal, Victoria. 1994. "Peasants, Capitalism, and (ir)Rationality". *Jurnal American Ethnologist*, vol. 21, no. 4, hal 792-810.

Branford, Sue. tt. "Brazil's Landless Movement (MST): From Peasant Revolt to the Politics of Anti-Globalisation". [Online]. Www.eche.ac.Uk/research/smg/pdf.

Fidro, Boy, dkk. 2002. *Land Reform di Desa*. Yogyakarta: ReaD books.

Harsono, Boedi. 1996. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Huizer, Gerrit. 1999. Peasant Mobilization for Land Reform: Historical Case Studies and Theoretical Considerations. UNRISD Discussion Paper no. 103.

Hulme, David & Michael Edwards (eds.). 1997. "NGOs, States and Donors: an Overview". *NGOs, States, and Donors Too Close for Comfort*. London: Macmilan Press.

Jacoby, Erich H. 1971. *Man and Land: the Essential Revolution*. New York: Alfred

A Knopf.

John P. Powelson & Richard Stock. 1987. *The Peasant Betrayed: Agriculture and Land Reform in the Third World.* Boston: Oegelschlager Gunn And Hain Publisher.

Kerblay, Basile. 1971. "Chayanov and the Theory of Peasantry as a Specific Type of Economy", dalam Teodor Shanin (ed.). *Peasants and Peasant Societies.* Australia: Penguin Books.

Kitching, Gavin & Ray Broomley (eds.). 1982. *Development, Underdevelopment in Historical Perspective*. London: Methuen & Co. Ltd.

Migdal, Joel S. 1974. *Peasants, Politics and Revolution: Pressure Toward Political and Social Change in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.

Pearce, Jenny. 1997. "Between Co-option and Irrelevance? Latin American NGOs in the 1990s", dalam David Hulme & Michael Edwards (eds.). *NGOs, States, and Donors Too Close for Comfort*. London: Macmilan Press.

Popkin, S.I. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.

Sandy, I Made. 1991. "Catatan Singkat tentang Hambatan-hambatan Pelaksanaan UUPA". Jurnal *Analisis CSIS* tahun XX No 2. Maret-April, hal 143-159.

Scott, James. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven and London: Yale University Press.

Van der Kroef, Justus M. 1984. "Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial di Pedesaan Jawa", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro & Gunawan Wiradi (eds.). *Dua Abad Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa.* Jakarta: PT. Gramedia.

Wiradi, Gunawan. 1995. Makalah pada Lokakarya Nasional Agraria dan Musyawarah Nasional Anggota Konsorsium Pembaruan Agraria.

_____. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar.

Wolf, Eric. 1971. "On Peasant Rebellion", dalam Teodor Shanin (ed.). *Peasants*

and Peasant Societies. Australia: Penguin Books.

Wolford, Wendy. 2001. "Case Study Grassroot-Initiated Land Reform in Brazil: The Rural Landless Workers' Movement", dalam Alain de Janvry, dkk. (eds.). *Access to Land, Rural Poverty, and Public Action.* New Rotk: Oxford University Press.

PERLAWANAN PETANI, KONFLIK AGRARIA, DAN GERAKAN SOSIAL

Sadikin[1]

Abstract

Peasants hold an important role in the social alternation and the history development in a society. Researches on the peasants' struggle as well as the agrarian conflicts are supposed to be placed in the frame of the study of social movement. Conflicts are parts of the strategy and tactics of the peasants' struggle in order to make the agrarian reform come true. Thus, conflicts do not always have to be ended, but managed in order to become the power to boost the agrarian reform (agrarian reform by leverage).

Pendahuluan

Tulisan ini didasari oleh tiga pengandaian. *Pertama,* perlawanan petani – upaya-upaya yang dilakukan petani untuk menentang segala bentuk kebijakan yang mengakibatkan hilangnya hak penguasaan/pemilikan mereka atas sebidang tanah – merupakan salah satu bentuk gerakan sosial. Gerakan sosial yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan perubahan atau mempertahankan keadaan yang menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat. *Kedua,* konflik agraria (tanah) merupakan gejala dan/atau peristiwa yang timbul dari perlawanan sekelompok orang yang mengidentitaskan dirinya sebagai petani - termasuk pihak-pihak yang mendukung perlawanan petani - terhadap kelompok masyarakat lain, atau institusi – pemerintah, perusahaan, maupun militer – yang tidak mengakui dan/atau merebut hak penguasaan/pemilikan petani atas sebidang tanah yang mereka yakini sebagai

[1] Peneliti Yayasan AKATIGA

miliknya[2]. *Ketiga,* jika konflik agraria diletakkan dalam kerangka gagasan *reforma agraria,* maka konflik agraria lebih bermakna sebagai strategi perjuangan petani untuk mendorong pelaksanaan *reforma agraria*[3].

Berdasarkan tiga pengandaian tersebut, dapat ditarik dua kesimpulan hipotetis. *Pertama,* gejala dan peristiwa konflik agraria pada dasarnya merupakan *"manufactured product"*, bukan *"primordial matter"* sebuah gerakan sosial[4], karena gejala dan peristiwa tersebut merupakan insiden yang memang direncanakan terjadi, yaitu merupakan bagian dari strategi dan taktik perjuangan petani untuk mewujudkan *reforma agraria*[5]. *Kedua,* karena perlawanan petani dan konflik yang ditimbulkannya merupakan bagian dari taktik dan strategi gerakan, maka konflik dalam kerangka perjuangan *reforma agraria* bukan sesuatu yang menuntut penyelesaian layaknya penyakit yang harus disembuhkan, melainkan harus terus dikobarkan sehingga menjadi kekuatan yang dapat mendorong pelaksanaan *reforma agraria*.

Jika pengandaian dan kesimpulan hipotetis di atas kita gunakan sebagai "cetak biru" untuk mengkonfirmasi organisasi-organisasi gerakan sosial[6] yang mengklaim dirinya memperjuangkan *reforma agraria*, apakah kenyataan yang ada sekarang sudah konsisten dengan logika pengandaian dan kesimpulan hipotesis di atas?

Kedudukan Petani dalam Penelitian Sosial

Perhatian kalangan ilmuwan sosial terhadap kaum petani *(peasant),* khususnya yang mencuat setelah Perang Dunia Kedua (era Perang Dingin) terutama didorong oleh peran mereka (petani) dalam gerakan sosial pemberontakan dan revolusi[7], seperti dicatat oleh Clammer,

---

2 Dasar pengakuan dan keyakinan di sini bisa didasari oleh konstitusi, faktor sejarah, maupun bukti-bukti kepemilikan yang sah secara hukum.

3 Bandingkan dengan Gunawan Wiradi, "Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak Kandung Pembaruan Agraria", makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pembaruan Agraria, diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Yogyakarta, 16 Juli 2002.

4 Lihat Robert Mirsel, 2004. Teori Pergerakan Sosial (terjemahan), Yogyakarta: Insist Press. Pembahasan tentang masalah relevansi sosial dan teoretis dapat dilihat juga dalam Ignas Kleden, 1987. Strategi Kebudayaan, Jakarta: LP3ES.

5 Dalam pengertiannya yang paling sederhana, reforma agraria adalah perombakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dalam masyarakat.

6 Gerakan sosial yang dimaksud dalam konteks kalimat ini secara spesifik menunjuk pada organisasi petani dan organisasi non-pemerintah yang mendukung perlawanan petani dan terlibat dalam konflik agraria – langsung maupun tidak – dan secara institusional memiliki komitmen untuk memperjuangkan reforma agraria.

7 Lihat Sartono Kartodirjo, 1984, Pemberontakan Petani Banten 1888, Terjemahan, Jakarta: Pustaka Jaya; John Clammer, 2003. Henry A. Landsberger dan Yu. G. Alexandrov, 1984, Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial, Terjemahan, Cetakan Keempat, Jakarta: YIIS; John Clamer, 2003, Neo-Marxisme

> "…proporsi terbesar populasi pedesaan di dunia (dan oleh karena itu populasi terbesar secara total) adalah "petani", dan kelompok manusia yang luar biasa besarnya ini sekalipun merupakan proletariat pasif dan homogen, namun sebaliknya, telah dibuktikan oleh gerakan-gerakan petani yang signifikan di Asia Selatan, Amerika Latin, Afrika, dan bahkan di Eropa (di mana banyak orang telah lupa jika petani masih eksis di sana)." (2003:195)

Meskipun gambaran Clammer tentang petani tidak tepat benar jika dipetakan pada sosok kaum tani dewasa ini,[8] namun kita tidak bisa memungkiri bahwa petani memiliki peran penting dalam perubahan sosial dan perkembangan sejarah dalam suatu masyarakat. Pernyataan Clammer tersebut memperkuat catatan Wolf (1969) tentang perlawanan petani Vietnam terhadap invasi Perancis dan Amerika Serikat. Wolf mencatat,

> "…melalui bantuan militer untuk Prancis yang tengah berperang, kemudian melalui misi militernya, dan akhirnya sejak tahun 1962 memperkuat komitmen pasukannya sendiri, Amerika Serikat mencari kemenangan militer dan politik dalam suatu perang bagi kontrol atas jantung dan pikiran suatu rakyat petani." (2004:1)

Catatan Wolf tersebut menunjukkan pada kita tentang dua hal. *Pertama,* bahwa kaum petani yang sering distereotipkan bodoh dan pasrah (tunduk pada nasib kemiskinan dan penderitaannya), yang oleh pejabat militer Amerika Serikat sering disebut *"si haram jadah compang camping berpiyama hitam"* (Wolf, 2004:1) itu pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat yang secara politis tidak mudah ditaklukkan dan menyerah begitu saja pada kondisi yang tidak menguntungkan kehidupannya. *Kedua,* bahwa kaum yang sering disikapi secara sinis sebagai kelompok masyarakat yang tidak memiliki sejarah itu pada dasarnya mengambil peran penting dalam perkembangan sejarah dan perubahan sosial suatu masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Kartodirjo (1984), meskipun dalam gerakan sosial dan pemberontakan yang diberi label "pemberontakan petani" *(peasant revolt)* kaum petani lebih banyak berperan sebagai "gerbong" (massa aksi) pengikut kaum pemuka desa, bukan subyek gerakannya itu sendiri, tetapi mereka memiliki peran penting dalam sejarah dan perubahan sosial suatu masyarakat. Dalam sejarah Indonesia

---

Antropologi: Studi Ekonomi Politik Pembangunan, Terjemahan, Yogyakarta: Sadasiva, khususnya hal. 197-220; Eric R. Wolf, 2004, Perang Petani, Terjemahan, Yogyakarta: Insist.

8 Tentang gambaran petani dewasa ini, lihat misalnya James Petras 1998, "The Revolutionary Peasantry: The Growth of Peasant-Led Opposition to Neoliberalism", dalam Rebelion: Petras Essays in English, http://www.rebelion.org/petrasenglish.htm.

misalnya, terutama dalam sejarah Jawa abad XIX, pemberontakan petani yang oleh penjajah dianggap sebagai wabah atau penyakit sosial merupakan bukti bahwa petani memiliki peran penting dan posisi politik yang diperhitungkan dalam perkembangan sejarah Indonesia.

Masyarakat petani di negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka (1950-1960-an) sudah lama menjadi perhatian kalangan ilmuwan sosial Barat. Kajian terhadap masalah petani terutama berpusat pada hubungan mereka (petani) dengan negara, terutama jika mereka menimbulkan masalah bagi negara (revolusioner dan membangkang) (Selemink, 2004:263). Konteks hubungan petani dan negara tersebut secara spesifik adalah konteks penetrasi kapitalisme Barat (terutama Amerika Serikat) ke negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka.

Tumbuhnya perhatian besar terhadap masalah petani, terutama gerakan perlawanan mereka,[9] bukan semata-mata didorong oleh minat dan kehausan intelektual, melainkan karena tekanan internal dan eksternal dalam ilmu sosial (Mirsel, 2004), yakni kehendak untuk mewujudkan ilmu sosial yang memiliki relevansi teoretis dan politis.[10] Dengan kata lain, perhatian tersebut didasari oleh kehendak untuk mewujudkan ilmu sosial yang sesuai dengan kepentingan ideologi-politik yang dominan maupun marginal dalam sebuah masyarakat. Pertempuran antara kubu *ekonomi moral* melawan *ekonomi rasional* yang muncul dalam konteks "Perang Vietnam" misalnya, bukan semata-mata perdebatan antara kubu kaum substantifis dan rasionalis yang murni muncul karena pertimbangan-pertimbangan teoretis, melainkan dipicu oleh pertempuran kapitalisme lawan sosialisme; kaum revolusioner lawan kontra-revolusioner.[11] Demikian pula perdebatan antara intelektual pengusung gagasan *reforma agraria* lawan pendukung *revolusi hijau* dalam konteks Perang Dingin dan era *state-led-development* (tahun 1960-1970-an) pada dasarnya merupakan pertempuran antara kubu kapitalisme melawan sosialisme dan populisme.[12] Pada titik ini kita bisa menyepakati Scott yang mengatakan

---

9 Indikator yang bisa dan biasa digunakan untuk mengukur besar kecilnya perhatian ilmuwan sosial terhadap masalah petani atau isu-isu sosial apapun antara lain adalah jumlah penelitian, pertemuan ilmiah dan jumlah publikasinya, serta jumlah lembaga yang memberi dukungan dana untuk kegiatan penelitian, pembentukan lembaga penelitian, publikasi hasil penelitian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Untuk kasus Asia Tenggara, lihat misalnya Leontine Visser dan Nico G. Schulte Nordholt, "Refleksi tentang Konstruksi Pengetahuan di Asia Tenggara", dalam Nico G. Schulte Nordholt dan Leontine Visser, 1997, Ilmu Sosial di Asia Tenggara: dari Partikularisme ke Universalisme, Terjemahan, Jakarta LP3ES, hal. 171-178.

10 Pembahasan tentang relevansi teoretis dan sosial, lihat Ignas Kleden, 1987, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Jakarta: LP3ES.

11 Lihat Oscar Salemink, 2004. "Intervensi Ilmu Sosial", dalam Philip Quarles van Ufford dan Ananta Kumar Giri, Opcit, hal. 261-296.

12 Periksa Dieter Nohle, Editor, 1994. Kamus Dunia Ketiga, Terjemahan, Jakarta: Grasindo.

bahwa perdebatan ilmiah bukanlah sebuah proses yang berdiri sendiri, melainkan ditentukan oleh konteks historis dan politisnya.[13]

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat membuat beberapa catatan tentang posisi petani dalam kajian ilmu sosial. *Pertama,* perhatian terhadap masalah petani, terutama gerakan perlawanan mereka *vis a vis* kapitalisme-negara yang dipropagandakan negara-negara Barat lebih banyak didasari oleh kepentingan ideologi-politik Amerika Serikat untuk menanamkan pengaruhnya di negara-negara Dunia Ketiga di satu sisi, dan menandingi pengaruh negara-negara Eropa Timur, terutama Uni Soviet, yang berhaluan sosialisme-komunisme di sisi lain. Itu artinya, besarnya perhatian intelektual Barat terhadap kehidupan petani di negara-negara Dunia Ketiga lebih banyak didasari oleh kehendak untuk membangun kekuatan kontra-revolusi terhadap kekuatan-kekuatan yang potensial menentang sistem kapitalisme-liberalisme. Dengan demikian, *kedua,* selain menjadi obyek kajian ilmu sosial, petani juga menjadi obyek pertempuran ideologi-politik dominan. Itu artinya, petani menjadi arena diskursif kekuasaan dan pengetahuan. Seperti telah disinggung di atas, hal ini logis, karena petani merupakan kelompok masyarakat yang menempati proporsi terbesar penduduk dunia, terutama di negara-negara Dunia Ketiga.

Kedudukan Studi Gerakan Sosial dalam Ilmu Sosial

Satu persoalan klasik yang senantiasa dihadapi ilmu sosial adalah masalah pembatasan atau pemberian arti sebuah istilah. Dalam ilmu sosial tidak pernah ada satu istilah pun yang memiliki arti tunggal. Demikian pula dengan istilah gerakan sosial. Tidak saja pengertiannya bermacam-macam, tetapi juga kontroversial. Ini merupakan konsekuensi logis dari: (1) realitas sosial yang selalu berubah; (2) beranekaragamnya latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat yang hendak "dijelaskannya" (positivisme), "dipahaminya" (interpretatif), dan "diubahnya" (kritisisme)[14]; (3) adanya hubungan timbal-balik antara realitas sosial (yang "diteorikan") dengan teori sosial (yang "direalitaskan")[15];

13 James Scott, sebagaimana dikutip oleh Oscar Selemink, 2004, Op.cit., hal. 264.

14 Pembahasan tentang masalah ini, lihat Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitatif Research", dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 1994. Handbook of Qualitatif Research, Eds., London New Delhi: Sage Publications, hal.105-117.

15 Menurut kubu teoretisi kritis Mazhab Frankfurt, jika teoretisi sosial berusaha melepaskan – lebih tepatnya menutup mata dan menegasikan – kaitan antara realitas sosial dan teori sosial, maka pada saat itulah ilmu sosial mengalami krisis. Untuk menangani krisis, maka tugas utama teoretisi sosial adalah melakukan kritik pada dua tataran sekaligus, yakni tataran teori sosial dan realitas sosial. Pada tataran teori, dia harus mampu membongkar ideologi dan kepentingan yang menyelubungi upaya pemurnian (semu) teori sosial dari realitas sosial; sedangkan pada tataran realitas sosial dia harus mampu menggunakan teori sosial sebagai alat bagi pembebasan (emansipasi) manusia dari ketertindasan dan dominasi kapitalisme.

dan (4) khusus untuk konteks Indonesia, adanya persoalan kekurangtepatan perangkat teoretis yang berasal dari Barat untuk menjelaskan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.[16]

Karena rumusan sebuah istilah senantiasa dikendalikan oleh paradigma pemikiran atau landasan filosofis yang mendasarinya,[17] maka sebelum mengemukakan beberapa pengertian gerakan sosial, terlebih dahulu penulis akan membahas kedudukan dan perkembangan studi gerakan sosial dalam khasanah perkembangan ilmu sosial. Pembahasan masalah ini penting mengingat perkembangan ilmu sosial serta realitas sosial yang membentuk dan dibentuknya senantiasa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan internal dan eksternal. Tekanan internal adalah teka-teki yang masih tersembunyi dan belum terjawab dalam paradigma sebuah cabang ilmu pengetahuan tertentu (Mirsel 2004:11). Tekanan eksternal terjadi pada dua tataran. *Pertama,* terjadinya pergeseran-pergeseran di dalam gaya pemikiran *(intellectual fashions)* dan aliran pemikiran *(intellectual currents)*; dan *kedua,* datang dari perubahan yang terjadi dalam gejala-gejala itu sendiri. Kaitan antara pergeseran-pergeseran internal dan eksternal di dalam ilmu pengetahuan dengan pola-pola aliran pemikiran yang lebih luas maupun dengan gejala itu sendiri disebut sebagai *ruang lingkup sejarah.*

Teori Gerakan Sosial Klasik: Tinjauan Singkat

Perhatian terhadap gerakan sosial pertama kali lahir sebagai reaksi terhadap munculnya gejala kerumunan *(crowd), acting mob,* kelompok-kelompok panik, perilaku yang berubah-ubah *(fads),* kerusuhan massal, histeria, protes, dan tindakan-tindakan kolektif lainnya yang dianggap brutal, intoleran, tidak rasional, dan destruktif, seperti gerakan McCarthysisme di Amerika Serikat yang menggerus dan menghabisi para pendukung golongan kiri (gerakan anti-komunisme), atau gerakan nazi yang menghabisi etnis Yahudi. Itulah sebabnya studi gerakan

---

[16] Merujuk pada Alatas, kekurangtepatan itu meliputi segi kekurangaslian; ketidaksesuaian antara asumsi dengan kenyataan; ketidakterapan (teori, konsep, dan cara Barat tidak bisa diterapkan dalam konteks masyarakat bukan Barat; pengasingan (terjadinya pengasingan ilmu sosial dari konteksnya akibat faktor pertama dan kedua); keremehan, kekeliruan, dan kesederhanaan. Untuk lengkapnya, lihat Syed Farid Alatas, 2003. "Pengkajian Ilmu-ilmu Sosial: Menuju ke Pembentukan Konsep Tepat", dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Th. XXVII, No. 72, Sep-Des 2003, hal 1-23.

[17] Untuk mengetahui bagaimana perdebatan paradigmatis dalam studi gerakan sosial yang lebih lengkap, lihat antara lain Jason Bradley DeFay, Opcit.; Muukkonen, Martti, 1999. From Deviant Phenomenon to Collective Identity: Paradigm Shifts in Social Movement Studies, Master Thesis, http://www.cc.joensuu.fi/~muukkone/SMstudy.rtf; Pamela E. Oliver, Jorge Cadena-Roa, dan Kelley D. Strawn, "Emerging Trends in the Study of Protest and Social Movements", http://www.ssc.wisc.edu/~oliver/PROTESTS/ArticleCopies/EmergingSMAug02FinalSP1.pdf; Sergen Mamay, "Theories of Social Movements and Their Current Development in Soviet Society", http://www.lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian/mamay.html.

sosial pada masa ini (1940-1960-an) menekankan pada aspek irrasionalitas yang mendorong munculnya tindakan kolektif dalam bentuk kekerasan. Implikasinya, sebagai sebuah gejala, gerakan sosial dan perilaku kolektif lainnya dipandang secara negatif – dianggap sebagai penyakit sosial yang harus disembuhkan. Munculnya pandangan semacam itu terkait erat dengan paradigma pemikiran yang dominan waktu itu, yakni teori-teori konsensus (fungsionalisme) yang menekankan keseimbangan, harmoni, keteraturan, dan stabilitas *(status quo)* dalam masyarakat. Pilihan ini logis, karena pada saat yang sama dunia tengah berada dalam kondisi di mana rezim-rezim anti-demokrasi dan represif – seperti Nazisme di Jerman, Fasisme di Jepang dan Italia, Stalinisme di Uni Soviet – menjadi kekuatan geopolitik utama.

Penelitian tentang gerakan sosial pada periode ini terutama diarahkan untuk menjawab pertanyaan "*mengapa*" muncul gerakan sosial dan faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melibatkan diri dalam gerakan sosial. Ada tiga perspektif teoretis yang menjadi dasar bagi para ilmuwan sosial dalam menjawab pertanyaan tersebut, yakni fungsionalisme (Emile Durkheim), Marxisme (Karl Marx), dan liberal-individualisme (para filsuf pencerahan, seperti John Locke, Thomas Hobes, John Stuart Mill, dan Adam Smith).[18]

Perspektif fungsionalisme, seperti kita ketahui, mengandaikan kehidupan sosial itu seperti tubuh makhluk hidup. Mereka percaya bahwa analogi biologi dapat digunakan untuk menjelaskan kehidupan masyarakat. Individu-individu sebagai bagian dari masyarakat kemudian disejajarkan dengan sel-sel yang ada dalam tubuh makhluk hidup, yang selalu tergantung dan tidak terpisahkan dari fungsi-fungsi sel-sel lainnya. Layaknya tubuh makhluk hidup, kelangsungan kehidupan masyarakat dapat dipertahankan apabila individu-individu yang ada di dalamnya saling bergantung dan berfungsi dengan individu-individu lainnya. Itulah sebabnya, perspektif ini memandang kehidupan sosial sebagai sesuatu yang harus selalu ada dalam keteraturan agar dapat bertahan hidup. Implikasinya, segala bentuk tindakan dan gejala yang dinilai mengancam keteraturan akan dianggap sebagai gangguan atau penyakit yang harus disembuhkan. Tugas individu-individu adalah menjaga agar fungsi-fungsi mereka di dalam masyarakat dapat berjalan secara teratur sebagaimana harusnya. Dengan mengandaikan kehidupan sosial layaknya tubuh makhluk hidup, maka perspektif ini melihat gerakan sosial sebagai gejala terjadinya krisis di dalam masyarakat.

---

[18] Untuk uraian lebih rincinya, lihat Jason Bradley DeFay, "The Sociology of Social Movement", http://www.weber.ucsd.edu/~jdefay/sm.html, hal.2-15. Bandingkan dengan Martti Muukkonen, 1999, Ibid, khususnya hal:3-11.

Meskipun Durkheim secara pribadi tidak mengkaji gerakan sosial, tetapi pandangannya tentang masyarakat banyak memberi sumbangan konseptual bagi studi-studi gerakan sosial periode awal. Konsep-konsep tersebut antara lain "anomie", "regulasi sosial" *versus* "integrasi sosial", dan "solidaritas sosial" *versus* "kesadaran kolektif". Konsep-konsep tersebut selanjutnya digunakan untuk mempelajari kondisi-kondisi sosial dan faktor-faktor sosial-psikologis yang mendorong lahirnya gerakan sosial, seperti protes, kerusuhan massa, dan perilaku-perilaku kolektif lainnya yang dianggap destruktif dan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat.

Berbeda dengan fungsionalisme, perspektif Marxis dalam memandang masyarakat tidak bersifat statis, karena selalu berada dalam kondisi yang konfliktual, yakni pertentangan kelas proletar lawan borjuis. Sejarah masyarakat, demikian menurut Marx, adalah sejarah perjuangan kelas. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa struktur sosial suatu masyarakat secara deterministik dibentuk oleh sistem ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Terciptanya struktur sosial dalam suatu masyarakat bukan karena individu-individu yang ada di dalamnya saling bergantung dan berfungsi satu sama lain, melainkan karena adanya kelas yang didominasi (kaum proletar) dan kelas yang mendominasi (kaum borjuis). Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat tidak pernah statis, karena kaum proletar sebagai pihak yang didominasi akan senantiasa melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis. Asumsinya, hanya dengan jalan mengubah sistem ekonomilah maka struktur masyarakat yang dominatif akan berubah. Karena itu, meskipun Marx meyakini adanya *telos* (tujuan akhir) dalam perjalanan sejarah masyarakat – yang itu berarti akhir dari konflik dan pertentangan kelas – tetapi dia percaya, hanya dengan jalan perjuangan kelas dan revolusilah *telos* dari perjalanan sejarah masyarakat bisa tercapai.

Dilihat dari perspektif Marxis, maka gerakan sosial tidak dianggap sebagai penyakit sosial, melainkan merupakan gejala yang positif. Kemunculannya bukan disebabkan oleh adanya gangguan dalam struktur sosial, melainkan karena terjadinya proses eksploitasi dan dominasi satu kelas terhadap kelas lainnya. Gerakan sosial, dengan demikian, dipahami sebagai reaksi (perlawanan) kaum proletar terhadap kaum borjuis dan merupakan ekspresi dari struktur kelas yang kontradiktif. Singkatnya, gerakan sosial adalah perjuangan kelas yang lahir karena adanya kesadaran kelas.

Gagasan liberal-individualisme merupakan produk *pencerahan* masyarakat Eropa Barat. Gagasan ini menekankan akan arti pentingnya hak-hak dan kebebasan individu dan rasionalitas (akal). Itulah sebabnya, kepentingan-pribadi *(self-interest)* yang rasional sifatnya diletakkan sebagai kata kunci

untuk memahami kehidupan sosial, terutama aspek ekonomi dan politik. Para penganutnya percaya, bahwa kehidupan sosial senantiasa berjalan di bawah kendali motif kepentingan-pribadi yang melekat dalam diri setiap individu. Perspektif liberal-individual ini menyumbangkan gagasan terhadap studi gerakan sosial yaitu bahwa faktor pendorong utama lahirnya gerakan sosial adalah karena adanya kepentingan pribadi dari setiap individu yang terlibat di dalamnya. Kepentingan pribadi di sini secara spesifik menunjuk pada keuntungan ekonomi dan politik (kekuasaan). Oleh sebab itulah, dalam perspektif liberal-individual gerakan sosial lebih dimaknai sebagai kalkulasi kepentingan-kepentingan individu untuk memperoleh keuntungan ekonomi-politik.

Teori Gerakan Sosial Baru dan Mobilisasi Sumber Daya: Tinjauan Singkat

Teori gerakan sosial baru dan mobilisasi sumber daya merupakan dua perspektif teori yang mendominasi studi-studi gerakan sosial kontemporer.[19] Tidak hanya itu, kedua teori itupun memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan gerakan sosial di negara-negara Dunia Ketiga. Kedua perspektif tersebut lahir sebagai kritik terhadap teori gerakan sosial klasik yang dinilai tidak mampu memberikan pemahaman yang utuh terhadap perkembangan gejala gerakan sosial dewasa ini.

Jika dalam studi-studi gerakan sosial yang berkembang pada tahun 1940-1960-an gerakan sosial dianggap sebagai gejala penyimpangan *(deviant)*[20], irasional, dan dianggap penyakit sosial, maka dalam studi-studi yang berkembang pada 1960-1970-an dan 1980-an hingga sekarang, gerakan sosial dipandang sebagai gejala positif yang kelahirannya didasari oleh alasan-alasan rasional. Lahirnya pandangan positif merupakan implikasi dari perkembangan gerakan sosial dewasa ini, yang dinilai telah berhasil mendorong proses demokratisasi. Gerakan sosial yang dimaksud adalah gerakan perjuangan hak-hak sipil,

---

19 Lihat Eduardo Canel. "New Social Movement Theory and Resources Mobilization Theory: the Need for Integration", dalam Michael Kaufman dan Haraldo Dilla Alfonso, Ed., 1997. Community Power and Grassroots Democracy: the Transformation of Social Life, London dan New Jersey: Zed Books; Kumar, "Do We have a Theoretical Framework to Explain Social Movement? Third System, Third Sector, Third Way No Way", http://www (?); Steven M. Buechler, "Beyond Resource Mobilisation? Emerging Trends in Social Movement Theory, http://www.vcn.bc.ca/citizens-handbook/social_movements.html; Crossley, "Habermas and the New Social Movement", http://les1.man.ac.uk/CMS/sy1432/Habermas%20and%20New%20Social%20Movements.doc; Alana Lentin, 1999, "Structure, Strategy, Sustainability: What Future for New Social Movement Theory?", http://www... (?); Pasuk Phongpaichit, "Theories of Social Movements and Their Relevance for Thailand", http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~ppasuk/theory socmovt.doc; Mario Diani, "Simmel to Rokkan and Beyond: Towards a Network Theory of (New) Social Movements", http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/uppsala/ws8/Diani.pdf.

20 Lihat Martti Muukkonen, 1999, Ibid.

gerakan anti kolonial, gerakan anti komunis, dan gerakan anti-rasial. Itulah sebabnya, minat para intelektual sosial untuk mempelajari gerakan sosial tidak lagi didasari oleh pertanyaan "mengapa", melainkan "bagaimana" organisasi gerakan sosial bekerja dalam memperjuangkan kepentingan dan tujuan-tujuannya, termasuk strategi dan taktik yang dijalankannya.

Sebagai konsekuensi logis dari orientasi nilai terhadap gerakan sosial di satu sisi dan dasar pertanyaan studi yang dikemukakan di sisi lain, perspektif teori yang mendominasi studi gerakan sosial pada periode ini adalah teori-teori pilihan rasional, teori mobilisasi sumber daya, dan teori-teori yang dikembangkan dari perspektif Marxis. Perspektif teori-teori yang dikembangkan pada umumnya meletakkan gejala gerakan sosial sebagai aktor penting yang berperan dalam proses perubahan dari otoritarianisme ke demokrasi.

Dalam konteks kekinian, ada dua teori yang mendominasi studi-studi gerakan sosial, yakni teori mobilisasi sumber daya yang berbasis di Amerika Serikat dan perspektif gerakan sosial baru yang berbasis di Eropa Barat.[21] Teori mobilitas sumber daya lahir sebagai tanggapan terhadap perspektif teori Durkheimian yang memandang gerakan sosial secara negatif, yaitu sebagai anomie dan perilaku irasional. Sedangkan perspektif teori gerakan sosial baru lahir sebagai tanggapan terhadap perspektif Marxis yang dinilai reduksionis, karena menerjemahkan gerakan sosial semata-mata sebagai perjuangan kelas.

Dalam memandang gerakan sosial, kedua perspektif tersebut tidak melihatnya sebagai artikulasi dari aliran pemikiran atau ideologi tertentu, melainkan sebagai tanggapan terhadap persoalan-persoalan sosial secara luas. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya gerakan-gerakan sosial yang tidak mendasarkan gerakannya pada kesadaran kelas dan "ideologi" tertentu, melainkan pada identitas dan kesadaran/perhatian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara luas. Secara empiris, gerakan sosial yang muncul pada periode ini dicirikan oleh kaburnya batas-batas ideologi, asal-usul dan latar belakang sosial, serta hal-hal sempit lainnya yang melekat pada seseorang, yang dapat merintangi upaya penyatuan kehendak untuk melakukan perubahan sosial. Gerakan sosial yang dimaksud adalah gerakan lingkungan, gerakan perempuan, gerakan anti-nuklir, gera-

21 Lihat Eduardo Canel. "New Social Movement Theory and Resources Mobilization Theory: the Need for Integration", dalam Michael Kaufman dan Haraldo Dilla Alfonso, Ed., 1997. Community Power and Grassroots Democracy: the Transformation of Social Life, London dan New Jersey: Zed Books; dan Kumar, "Do We have a Theoretical Framework to Explain Social Movement? Third System, Third Sector, Third Way No Way", http://www (?)

kan homoseks *(gay)*, dan gerakan-gerakan "lintas-batas kelas" lainnya.

Konsep Gerakan Sosial: Mencari Rumusan yang Tepat untuk Konteks Indonesia

Salah satu bidang kajian sosial yang mengalami perkembangan sangat cepat adalah studi tentang gerakan sosial.[22] Percepatan ini sejalan dengan terjadinya perubahan sosial yang begitu cepat pula. Implikasinya, upaya pengkonseptualisasian dan pendefinisian gerakan sosial masih terus diperdebatkan, dan belum ada kesepakatan umum. Implikasi berikutnya, konsep dan pengertian gerakan sosial sering dianggap kabur, karena beranekaragamnya pengertian yang ada.

Dalam ilmu sosial, masalah semacam ini tidaklah aneh, karena akan selalu muncul. Ada beberapa hal yang dapat ditunjuk sebagai penyebabnya. *Pertama,* pemaknaan terhadap suatu gejala sosial dan penerjemahan terhadap sebuah istilah dan konsep – sebagai abstraksi dari gejala – sangat ditentukan oleh, atau bergantung pada, landasan filosofis dan paradigma yang dianut/digunakan oleh si peneliti. *Kedua,* adanya kaitan yang sangat erat (hubungan timbal balik) antara si peneliti *(knower)* dengan obyek yang ditelitinya *(known)*. *Ketiga,* dalam studi gerakan sosial, perubahan dan pergeseran yang terjadi pada tataran empiris sangat cepat mempengaruhi perubahan dan pergeseran pada tataran teoretis, demikian pula sebaliknya. Dengan kalimat lain, hubungan timbal balik antara "gerakan sosial dari" dan "gerakan sosial untuk" relatif cepat terjadi. *Keempat, bias* kepentingan dalam studi gerakan sosial – seperti juga dalam studi-studi sosial pada umumnya signifikan mempengaruhi terjadinya pergeseran dan perubahan gerakan sosial, baik di tataran empiris maupun teoretis. Singkat kalimat, adanya tuntutan untuk mensinergiskan "relevansi teoretis dan sosial", "tekanan internal dan eksternal", serta "teori dan praksis" sangat kuat mendorong perubahan dan pergeseran gerakan sosial, baik sebagai gejala sosial yang hendak *dijelaskan* maupun sebagai alat untuk *menjelaskan*.

Dalam bagian ini akan dikemukakan hasil penelusuran (sementara) penulis tentang pengertian-pengertian gerakan sosial yang ada. Dari pengertian-pengertian tersebut akan akan dicoba untuk merumuskan ciri dan karakteristik gerakan sosial secara umum.

Menurut Davil L. Sills (1972:438-439), gerakan sosial adalah:

> *"the term social movement or its equivalent in other Western languages is being used to denote*

22 Meskipun masih diperdebatkan, beberapa sosiolog menyarankan bahwa, dan sebagian lagi sudah menganggap, studi gerakan sosial sebagai sub-disiplin dalam sosiologi.

a wide variety of collective attemps to bring about a change in certain social institutions or to create an enterely new order.
Social movements are a specific kind of concerted actions groups; they last longer and are more integrated than mobs, and crowds and yet are not organized like political clubs and other association."

Sementara itu, menurut Ribert Mirsel (2004:6-7), gerakan sosial adalah:

"seperangkat keyakinan dan tindakan yang tidak terlembaga *(noninstitutionalized)* yang dilakukan sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat."

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:312), gerakan sosial adalah:

"tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada."

Kuper dan Kuper (Kuper and Kuper 1985:778) menyebutkan bahwa gerakan sosial adalah:

"*institutionalized groups in some insurgent relationship to existing society, involving unmediated bonds between leaders and followers*."

Rudolf Heberle (1949) menyatakan bahwa, sebagaimana dikutip oleh Latit Kumar (2004), gerakan sosial adalah:

"collective attemps to bring about a social change."

Sedangkan menurut Herbert Blumer (1939:99):

"Social movements can be viewed as collective enterprises to establish a new order of life. They have their inception in the condition of unrest, and derive their motive power on one hand from dissatisfaction with the current form of life, and on the other hand, from wishes and hopes for a new scheme or system of living."

Encyclopedia Britanica, sebagaimana dikutip oleh Kumar, menyebutkan bahwa gerakan sosial adalah:

"loosely organized but sustained campaign in support of social goal, typically either the implementation or the prevention of a change in society's structure or values."

Menurut Turner dan Killan (1987:3), sebagaimana dikutip Muukkonen (1999:29), gerakan sosial adalah:

"a collectivity acting with some continuity to promote or resist a change in the society or groups of which it is a part."

McCarthy and Zald (1977:1217f), sebagaimana dikutip oleh Muukkonen (1999:23), gerakan sosial adalah:

"a set of opinions and belief in a population which represents

preferences for changing some elements of the social structure and for reward distribution of society."

Sementara itu, menurut Anthony Giddens (2001:699), gerakan sosial adalah"

"a large grouping of people who have become involved in seeking to accomplish, or to block, a process of social change. Social movement normaly exist in relations of conflict with organizations whose abjectives and outlook they frequently oppose. However, movements which successfully challenge for power, once they become institutionalized, can develop into organizations."

Menurut Jurgen Habermas, sebagaimana dikutip oleh Pasuk Phongpaichit (2004), gerakan sosial adalah:

"defensive relations to defend the public and private sphere of individuals againts the inroad of the state system and market economy."

Doug McAdam (1982:25) menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Benita Roth, gerakan sosial adalah:

"those organized efforts, on the part of excluded groups, to promote or resist changes in the structure of society that involve resource to noninstitutional forms of political participation."

Sidney Tarrow (1994:4) sebagaimana dikutip oleh Benita Roth, menerjemahkan gerakan sosial sebagai:

"expressions of extremism, violence, and deprivation, they are better defined as collective challenges, based on common purposes and social solidarities, in sustained interaction with elites, opponents, and authorities."

Menurut Ralph H. Turner dan Lewis M. Killian (1972, 1987:223) sebagaimana dikutip oleh Benita Roth, gerakan sosial adalah:

"a collectivity acting with some continuity to promote or resist a change in the society or organization of which it is a part."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, ada beberapa hal yang dapat dicatat sebagai ciri-ciri atau karakter yang melekat dalam gerakan sosial. *Pertama,* gerakan sosial merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif. *Kedua,* gerakan sosial senantiasa memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial atau untuk mempertahankan suatu kondisi. Itu artinya, tujuan sekelompok orang untuk melakukan gerakan sosial tidak selalu didasari oleh motif dan cita-cita 'perubahan', karena bisa juga – disadari atau tidak – ditujukan untuk mempertahankan keadaan *(status quo)*. *Ketiga,* gerakan sosial tidak identik dengan gerakan politik yang terlibat dalam perebutan kekuasaan secara langsung. *Keempat,* gerakan sosial merupakan perilaku kolektif

yang terorganisasi, baik formal maupun tidak. *Kelima,* gerakan sosial merupakan gejala yang lahir dalam kondisi masyarakat yang konfliktual.

Dengan melihat pengertian-pengertian tersebut, pemilahan antara gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru sesungguhnya menjadi tidak relevan, karena secara empiris keduanya eksis di masyarakat. Lebih dari itu, terjadi konvergensi atau percampuran antara gagasan yang terkandung dalam gerakan sosial baru dengan gerakan sosial lama. Seperti yang dilaporkan oleh Gianote *et.al.* (1985), MacRae (1992), Shneider (1992), dan Starm (1992) tentang gerakan sosial di Amerika Latin, bahwa secara empiris kita akan sukar untuk memilah karakter gerakan sosial yang ada sekarang ke dalam gerakan sosial baru dan lama secara ketat.[23] Dalam praktiknya, banyak organisasi-organisasi gerakan sosial – organisasi non-pemerintah – di Amerika Latin yang, disadari atau tidak, menggabungkan gagasan-gagasan perjuangan kelas dengan gagasan-gagasan perjuangan lintas-kelas yang dipromosikan oleh teori gerakan sosial baru dan mobilisasi sumber daya.[24] Kenyataan serupa terjadi pula di Indonesia. Salah satu contoh yang paling jelas dapat kita temukan dalam gerakan *reforma agraria* yang mengemuka pada tahun 1990-an hingga sekarang. Beberapa ornop dan organisasi petani pendukung *reforma agraria* yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tampak secara eksplisit hendak mempraksiskan gagasan perjuangan kelas, sebagaimana tampak dalam moto perjuangan mereka: "tanah untuk penggarap". Selain itu, gerakan mereka pun menjalankan upaya penyadaran dan penguatan petani untuk mendongkrak potensi perlawanan petani *vis a vis* pemilik modal dan negara. Namun demikian, strategi perjuangan kelas tersebut tampak menjadi ironis, karena di sisi lain, mereka pun terlibat dalam upaya merumuskan kebijakan agraria bersama-sama dengan pemerintah dan parlemen, serta terlibat dalam upaya penyelesaian konflik yang dilakukan di luar kerangka pelaksanaan *reforma agraria,* yakni perombakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah secara nasional.

Dengan mengacu pada contoh tersebut, maka akan sangat sulit bagi kita untuk memilah gerakan sosial kontemporer ke dalam kategori-kategori gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru.[25] Untuk itu, ada dua tugas utama yang harus kita lakukan jika hendak mempelajari gerakan sosial kontemporer. *Pertama,*

---

23 Jason Bradley DeFay, *Opcit.*

24 Lihat dan bandingkan dengan Victoria Juan Candial, 1995. "From Resistance to Organized Social Movement: A Comparative Study of Indigenous Movement in Ecuador and Colombia", Dissertation, University of Essex, Departement of Government.

25 Periksa Marta Fuentes dan Andre Gunder Frank, "Ten Theses On Social Movements", http://www.rrojasdatabank.info/agfrank/socmov.html.

membuat rumusan konsep atau pengertian gerakan sosial yang relatif longgar, dengan memperhatikan ciri dan karakteristik gerakan sosial yang dikemukakan di atas. *Kedua,* membuat semacam elaborasi dua atau lebih perspektif teori yang dinilai cocok dengan situasi dan kondisi di lapangan.[26]

Perlawanan Petani dan Konflik Agraria: Apa yang Hendak Dipelajari dari Sana?

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak literatur yang membahas gerakan sosial kontemporer, gerakan sosial dewasa ini tidak lagi mendasarkan gerakannya pada gagasan ideologi-ideologi besar, tidak mengenal sekat kelas, dan tidak revolusioner – perombakan struktur kekuasaan politik dan ekonomi. Gerakan lingkungan, gerakan kaum *gay,* gerakan perempuan, gerakan anti nuklir, dan gerakan masyarakat adat adalah beberapa contohnya. Di sisi lain, menurut beberapa kalangan aktivis gerakan sosial – praktisi pengguna teori gerakan sosial – yang umumnya tergabung dalam organisasi non-pemerintah, model gerakan yang lahir dari sejarah masyarakat Barat ini diyakini lebih "ampuh" dan relevan dengan perkembangan jaman, dibanding gerakan sosial yang berbasis ideologi dan kelas.

Adanya penilaian semacam itu merupakan pertanda bahwa gejala sosial yang muncul dalam sejarah masyarakat Barat itu tidak hanya menjadi pengetahuan tentang realitas sosial Barat, melainkan sudah menjadi sebuah model modelisasi – (dimodelkan) – gerakan sosial kontemporer yang dapat – disarankan, bahkan "diwajibkan" – ditiru dan diaktualisasikan dalam konteks masyarakat bukan Barat. Timbulnya keinginan untuk mencangkokkan realitas sosial Barat tersebut bukan semata-mata karena sudah lulus uji teoretis dan empiris, melainkan lebih merupakan satu bentuk keberhasilan propaganda dan hegemoni pengetahuan Utara ke Selatan, baik melalui birokrasi dan institusi pengetahuan akademis (perguruan tinggi) maupun non-akademis (organisasi non-pemerintah dan lembaga penelitian pemerintah dan swasta). Dalam hal ini saya tidak memandang bahwa masyarakat di Selatan itu statis dan tidak memiliki kehendak, sementara Utara itu dinamis dan selalu menjadi subyek. Saya percaya, bahwa kedinamisan adalah normal dan akan selalu demikian adanya. Namun, yang harus kita garis bawahi adalah, bahwa jiwa – hasrat, keinginan, motif, preferensi, referensi, dan ukuran tentang sesuatu – yang menghidupkan dinamika masyarakat bergantung pada relasi kuasa. Itu artinya, dinamika dan arah perubahan masyarakat sangat ditentukan oleh kehendak kekuasaan.

Pertanyaannya kini, apakah benar model gerakan sosial baru (GSB) lebih "ampuh" dari gerakan sosial "lama"

[26] Lihat Eduardo Canel. *Op cit.*

(GSL)? Pertanyaan ini muncul, karena saya yakin dalam tubuh GSB ada banyak persoalan yang cukup mendasar yang membuat GSB tidak tajam dan tidak revolusioner seperti gerakan sosial yang meletakkan ideologi dan kesadaran kelas sebagai basis gerakan. Secara hipotesis, saya bisa mengatakan bahwa perbedaan kelas dan latar belakang sosial, ekonomi, politik, serta budaya orang-orang yang terlibat dalam GSB banyak menyimpan persoalan – laten maupun manifes – yang membuat GSB tidak seradikal, sefundamental, dan serevo-lusioner gerakan kelas dan ideologi. Saya juga yakin ada mitos yang dipelihara dalam GSB sehingga orang-orang yang tadinya meyakini keampuhan GSL berbelok haluan ke GSB.

Menanggapi hal ini, maka tugas peneliti adalah membongkar asumsi-asumsi dan mitos-mitos yang melekat dalam paradigma GSB, dan menunjukkan bahwa lunturnya GSL bukan karena penjelasan-penjelasan teoretisnya gugur (sebagian) dalam menghadapi realitas dan pertanggung-jawaban teoretis, melainkan karena alasan-alasan ideologis dan politis. Kekalahan GSL dalam arena pertempuran wacana bukan semata-mata karena tesis GSL memiliki kelemahan, melainkan karena dimitoskan sebagai sesuatu yang sudah tidak cocok, tidak berguna, dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Untuk membuktikan apakah benar ada mitos atau tidak, maka harus dilakukan penelitian/kajian empiris. Salah satu kasus yang bisa diteliti adalah konflik tanah yang melibatkan tindakan kolektif petani, organisasi tani, dan organisasi non-pemerintah, termasuk lembaga donor yang ada di balik ornop.

Mengapa kasus konflik tanah? *Pertama,* konflik, baik sebagai sebuah peristiwa maupun gejala, merupakan produk perilaku kolektif masyarakat (petani) untuk memperoleh penguasaan atas tanah. *Kedua,* baik sebelum maupun setelah konflik terjadi, kehadiran ornop dan organisasi mahasiswa yang memberi dukungan – baik upaya penyelesaian maupun dorongan/mobilisasi untuk melakukan tindakan kolektif *non-institusionalized* – telah memberi pengaruh berupa pengetahuan, kesadaran, dan keyakinan (baru) yang berbeda dengan masyarakat yang "didampinginya". Selain itu, kehadiran ornop juga sedikit banyak akan memberi pengaruh dalam bentuk pengetahuan, kesadaran, dan keyakinan baru kepada masyarakat dalam melihat masalah pertanahan khususnya dan realitas kehidupan pada umumnya.

Pertanyaannya, pengaruh-pengaruh apa saja yang memasuki peta pengetahuan dan kesadaran masyarakat? Apakah pengaruh-pengaruh tersebut memberi sumbangan positif bagi upaya perbaikan kehidupan masyarakat sesuai dengan yang mereka bayangkan dan kehendaki? Apakah pengaruh pengetahuan dan kesadaran baru tersebut semakin memperkuat potensi dan aktualisasi perlawanan masyarakat, sehingga

mampu mendorong ke arah perubahan yang mendasar, atau justru sebaliknya?

Alasan k*etiga,* selain pengaruh pengetahuan dan kesadaran baru, kehadiran ornop di masyarakat juga telah membuka akses baru kepada masyarakat untuk terlibat dalam (1) jaringan yang lebih besar, formal, sistematis, rumit, dan terlembagakan; dan (2) melintasi batas geografis serta perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Apa implikasi positif dan negatif berjaringan terhadap perubahan di tingkat lokal?

Rekomendasi untuk Penelitian

Penelitian tentang perlawanan petani dan konflik agraria selayaknya diletakkan dalam kerangka studi gerakan sosial. Ada beberapa pertimbangan penting yang mendasari hal tersebut. *Pertama,* sebagai sebuah peristiwa maupun gejala, konflik agraria merupakan produk dari gerakan sosial, baik yang terorganisasi secara formal maupun tidak. *Kedua,* penelitian yang memfokuskan perhatian pada konflik agraria pada umumnya lebih diarahkan untuk kepentingan penyelesaian konflik, bukan untuk mencari jawaban, mengapa konflik yang sifatnya lokal tidak pernah berkembang menjadi besar. Pertanyaan ini penting untuk dikemukakan, mengingat logika perjuangan mewujudkan *reforma agraria* mensyaratkan adanya sebuah perlawanan massif dari petani terhadap struktur kekuasaan negara. *Ketiga,* organisasi petani yang berkembang di Indonesia pada umumnya lahir atas dukungan organisasi-organisasi non-pemerintah. Diletakkan dalam konteks studi gerakan sosial, gejala ini penting untuk diperhatikan, mengingat organisasi non-pemerintah memiliki peran dalam proses sosialisasi dan internali-sasi strategi dan model gerakan sosial Barat kepada organisasi petani yang menjadi "dampingannya". Arti penting kita memperhatikan masalah ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana modelisasi gerakan sosial yang dibawa oleh organisasi non-pemerintah membawa dampak terhadap dinamika dan arah gerakan organisasi-organisai petani di Indonesia. Diletakkan dalam kerangka *reforma agraria,* upaya ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan, apakah model dan strategi gerakan sosial yang disosialisasikan dan diinternalisasikan oleh organisasi non-pemerintah terhadap organisasi petani tersebut diarahkan untuk mendorong "revolusi", atau justru, disadari maupun tidak, merupakan "kontra-revolusi".[27]

---

27 Lihat dan bandingkan dengan James Petras, "The New Revolutionary Peasantry: The Growth of Peasant-Led Opposition to Neoliberalism"; James Petras, "Imperialism and NGOs in Latin America"; James Petras, "Non-Governmental Organizations in a Conjuncture of Conflict and War Psychosis"; James Petras, "The Ford Foundation and the CIA: A Documented Case of Philanthropic Collaboration with the Secret Police", dalam http://www.rebelion.org/petrasenglish.htm.

Upaya untuk menelusuri pengaruh organisasi non-pemerintah terhadap gerakan petani menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kenyataan sejarah bahwa dalam setiap gerakan sosial dan pemberontakan yang disebut "pemberontakan petani" *(peasant revolt)* sekalipun, petani sesungguhnya lebih banyak berperan sebagai "gerbong" (massa aksi) pengikut kaum pemuka desa, bukan subyek gerakannya itu sendiri.[28] Pemimpin-pemimpin gerakan petani kebanyakan berasal dari kalangan *elite* desa, seperti pemuka agama, kaum ningrat, atau orang-orang dari golongan penduduk desa yang menduduki status sosial terhormat (Kartodirjo, 1984:16).

Gerakan Sosial "dari" dan "untuk": Sebuah Ilustrasi Empiris

Setahun yang lalu (2003), saya sempat berdiskusi dengan direktur salah satu ornop yang menangani masalah petani di Yogyakarta, sebut saja Parto. Selain masalah agraria dan petani, satu persoalan menarik yang saya catat dari diskusi itu adalah soal wacana 'gerakan sosial'. *Wong* Yogya ini mengatakan, bahwa untuk saat ini, ornop, gerakan mahasiswa, organisasi tani, serikat buruh, dan lain-lain harus sudah mengubah strategi perjuangannya dari basis ideologis ke non-ideologis; dari gerakan kelas ke non-kelas. Dalam kondisi dan perkembangan masyarakat seperti sekarang, menurut dia, sudah tidak cocok lagi menempatkan perspektif pemikiran ideologi-ideologi besar – sosialisme, komunisme, populisme, dan sebagainya – sebagai pondasi perjuangan. Meskipun tidak cukup jelas kondisi seperti apa yang dia maksud, yang jelas dia menginginkan sebuah gerakan sosial yang bisa mendobrak batas-batas ideologi, asal-usul dan latar belakang organisasi, serta hal-hal sempit lainnya yang melekat pada seseorang, yang dapat merintangi upaya penyatuan kehendak untuk melakukan perubahan sosial. Dalam memperjuangkan pembaruan agraria misalnya, siapa dan dari manapun seseorang berasal bisa ikut bergabung memperjuangkan cita-cita tersebut. Tidak perlu ada pembatasan apakah dia petani atau bukan, berideologi kiri, tengah, kanan, atau "tanpa ideologi", petani yang didamping ornop atau bukan, dan seterusnya. Pembatasan-pembatasan tidak produktif seperti itu harus ditinggalkan dan diganti dengan konsep gerakan sosial yang bersifat inklusif. Label organisasi dan status seseorang (individu) yang dapat mengikat kebebasan dan totalitasnya untuk bersikap dan bertindak, menurutnya, harus dilepaskan.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Parto sampai pada pilihan konsep gerakan sosial semacam itu. *Pertama,* berdasarkan pengalamannya, kecenderungan terjadinya friksi, pertentangan, dan polarisasi di antara elemen organisasi pro pembaruan agraria banyak dipicu oleh perbedaan-perbedaan yang secara substantif tidak prinsipil, kecuali arogansi dan hasrat mengunggulkan diri merasa yang paling benar, atau rebutan proyek

[28] Lihat Sartono Kartodirjo, 1984, Pemberontakan Petani Banten 1888 (terjemahan), Jakarta: Pustaka Jaya.

dari donor. *Kedua,* konsep 'pendampingan' yang diterapkan ornop telah menjadi salah satu penyebab timbulnya friksi dan pertentangan, baik antarornopnya itu sendiri maupun antarmasyarakat dampingannya. Secara empiris, konsep itu telah membatasi sekaligus mengebiri bibit solidaritas dan kebersamaan antarsesama petani yang secara geografis dan programatis (untuk sebagian petani) tersekat-sekat. Selain itu, *ketiga,* ada juga fakta yang menunjukkan, bahwa masyarakat yang didampingi ornop sering dimanfaatkan, "diobyekkan", dan diklaim sebagai basis masa yang secara struktural berada di bawah ornop pendampingnya *(underbow)*. *Keempat,* dalam membangun aliansi atau front perjuangan bersama, latar belakang organisasi sering menjadi faktor yang membatasi seseorang untuk secara total terlibat dalam perjuangan. Alasannya bermacam-macam, bisa karena agenda perjuangan yang akan dilaksanakan tidak sejalan atau bukan bagian dari program kerja lembaga tempat dia beraktivitas/bekerja, tidak ada dukungan dana dari lembaga, tidak ada insentif yang jelas, dan hal-hal pragmatis lainnya. Jika saya boleh memberi tafsiran sementara, timbulnya gejala ini merupakan akibat dari adanya "pergeseran" komitmen perjuangan di lingkungan ornop dan organisasi gerakan sosial lainnya, yakni dari vokasionalisme ke profesionalisme.

Selain ketiga alasan tersebut, keinginan Parto – disadari atau tidak, sedikit atau banyak – juga dipengaruhi oleh wacana 'Gerakan Sosial Baru' yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat sejak tahun 1970 dan 1980-an. Gejala sosial yang ada dalam sejarah masyarakat Barat yang kemudian diabstraksikan menjadi konsep dan teori tersebut tampaknya mulai diaplikasikan di lapangan. Meskipun mungkin tidak bisa dikatakan sebagai'replikasi' atau 'modelisasi' logika sejarah Barat atas Indonesia, apa yang berkembang di Barat itu telah memberi inspirasi yang cukup berarti bagi usaha merancang sebuah gerakan sosial yang (dianggap) sesuai dengan harapan di satu sisi, dan dapat mengikis persoalan-persoalan yang selama ini menghambat laju perjuangan di sisi lain.***

Jika demikian adanya, maka pertanyaannya, mengapa kaum tani cenderung hanya menjadi gerbong sebuah gerakan sosial? Pertanyaan ini masih penting untuk dikemukakan, karena kecenderungan semacam itu tampaknya masih terjadi hingga kini. Perbedaannya hanya terletak pada aktor-aktor yang berdiri, baik di depan maupun di belakang gerakan perlawanan petani. Jika dulu peran itu dipegang oleh pemuka agama dan kalangan *elite* desa, maka sekarang peran itu diisi oleh kalangan intelektual perkotaan yang aktif dalam organisasi-organisasi non-pemerintah. Secara *De facto, elite* desa dan kalangan pemuka masyarakat memang masih memiliki peran penting, tetapi bukan sebagai aktor tunggal yang memberi preferensi nilai dan visi perjuangan seperti dulu. Peran mereka lebih sebagai penghubung (dalam arti luas) masyarakat dengan penggiat ornop, yakni sebagai "penerjemah bahasa" – pengetahuan, kesadaran, keyakinan, visi – kalangan ornop.

Daftar Pustaka

Alatas, Syed Farid. 2003. "Pengkajian Ilmu-ilmu Sosial: Menuju ke Pembentukan Konsep Tepat". *Jurnal Antropologi Indonesia,* Th. XXVII, No. 72, Sep-Des 2003, hal 1-23.

Brown, Kristie. 2003. Difference in Practice? Questioning Collective Identity in Australian Feminism/s. Makalah yang Disampaikan dalam Konferensi *Social Movements in Actions 2003,* [Online]. Www.international. activism.uts.edu.au/conferences/2003social movements/pdf/ socmoves2003.pdf, 3 November 2004.

Buechler, Steven M. tanpa tahun. "Beyond Resource Mobilisation? Emerging Trends in Social Movement Theory". [Online]. Http://www.vcn.bc.ca/ citizens-handbook/social movements. html.

Candial, Victoria Juan. 1995. From Resistance to Organized Social Movement: A Comparatif Study of Indegenous Movement in Ecuador and Colombia. *Dissertation.* University of Essex, Departement of Government.

Canel, Eduardo. 1997. "New Social Movement Theory and Resources Mobilization Theory: the Need for Integration", dalam Michael Kaufman dan Haraldo Dilla Alfonso (ed.). *Community Power and Grassroots Democracy: the Transformation of Social Life.* London dan New Jersey: Zed Books.

Clamer, John. 2003. *Neo-Marxisme Antropologi: Studi Ekonomi Politik Pembangunan* (Terjemahan). Yogyakarta: Sadasiva.

Crossley. tt. "Habermas and the New Social Movement". [Online]. http://les1.man.ac.uk/CMS/sy1432/Habermas%20and%20New%20Social%20 Movements.doc.

DeFay, Jason Bradley. tt. "The Sociology of Social Movement". [Online]. http://www.weber. ucsd.edu/~jdefay/ sm.html.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Kedua. Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka.

Diani, Mario. tt. "Simmel to Rokkan and Beyond: Towards a Network Theory of (New) Social Movements". [Online]. Http://www.essex.ac.uk/ecpr/ events/jointsessions/paperarchive/uppsala/ws8/Diani.pdf.

Fuentes, Marta and Andre Gunder Frank. tt. "Ten Theses On Social Movements". [Online]. http://www.rrojasdatabank.info/agfrank/socmov.html.

Giddens, Anthony. 2001. *Sociologi 4th Edition.* London: Blackwell Publishers Ltd.

Guba, Egon G. dan Yvonna S. Lincoln. 1994. "Competing Paradigms in Qualitatif Research", dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.). *Handbook of Qualitatif Research.* London New Delhi: Sage Publications, hal.105-117.

Herrick, James. tt. "Empowerment Practice and Social Change:The Place for New Social Movement Theory". [Online]. http://www.interweb-tech.com/nsmnet/docs/ herrick.htm.

Kartodirjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Jaya.

Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan.* Jakarta: LP3ES.

Kumar, Lalit. tt. "Do We have a Theoretical Framework to Explain Social Movement? Third System, Third Sector, Third Way No Way". [Online]. http://www (?)

Kuper, Adam, dan Kupper, Jessica (e*ds.).* 1985. *The Social Science Encyclopedia.* London: Boston, and Menley: Routledge and Kagan Paul.

Landsberger, Henry A. dan Yu. G. Alexandrov. 1984. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial* (terjemahan), Cetakan Keempat. Jakarta: YIIS.

Lentin, Alana. 1999. "Structure, Strategy, Sustainability: What Future for New Social Movement Theory?". [Online]. http://www... (?)

Mamay, Sergen. tt. "Theories of Social Movements and Their Current Development in Soviet Society". [Online]. http://www.lucy.ukc.ac.uk/ csacpub/russian/mamay.html.

Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial* (terjemahan). Yogyakarta: Insisist Press. Pembahasan tentang masalah relevansi sosial dan teoretis dapat dilihat juga dalam Ignas Kleden. 1987. *Strategi Kebudayaan.* Jakarta: LP3ES.

Muukkonen, Martti. 1999. From Deviant Phenomenon to Collective Identity: Paradigm Shifts in Social Movement Studies. *Master Thesis.* [Online]. http://www.cc.joensuu.fi/~muukkone/ SMstudy.rtf.

Nohle, Dieter (ed.). 1994. *Kamus Dunia Ketiga* (terjemahan). Jakarta: Grasindo.

Nordholt, Nico G. Schulte dan Leontine Visser. 1997. *Ilmu Sosial di Asia Tenggara: dari Partikularisme ke Universalisme* (terjemahan). Jakarta LP3ES.

Oliver, Pamela E., Jorge Cadena-Roa, dan Kelley D. Strawn. tt. "Emerging Trends in the Study of Protest and Social Movements". [Online]. http://www.ssc.wisc.edu/~oliver/PROTESTS/ArticleCopies/EmergingSMAug02FinalSP1.pdf.

Petras, James. tt. "The New Revolutionary Peasantry: The Growth of Peasant-Led Opposition to Neoliberalism". [Online]. http://www.rebelion.org/petrasenglish.htm.

_____. tt. "Imperialism and NGOs in Latin America". [Online]. Http://www.rebelion.org/petrasenglish.htm.

_____. tt. "Non-Governmental Organizations in a Conjuncture of Conflict and War Psychosis". [Online]. http://www.rebelion.org/petrasenglish.htm.

_____. tt. "The Ford Foundation and the CIA: A Documented Case of Philanthropic Collaboration with the Secret Police". [Online]. http://www.rebelion.org/petrasenglish. htm.

Phongpaichit, Pasuk. tt. "Theories of Social Movements and Their Relevance for Thailand". [Online]. http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~ppasuk/theorysocmovt.doc.

Roth, Benita. tt. "Select Definitions of Social Movements". [Online]. http://www.. (?)

Salemink, Oscar. 2004. "Intervensi Ilmu Sosial", dalam Philip Quarles van Ufford dan Ananta Kumar Giri (eds.). *Op cit*. hal. 261-296.

Sills, David L. (eds.). 1972. *International Encyclopedia of the Social Sciences.* London: Collier-MacMillan Publishers.

Visser, Leontine dan Nico G. Schulte Nordholt. 1997. "Refleksi tentang Konstruksi Pengetahuan di Asia Tenggara", dalam Nico G. Schulte Nordholt dan Leontine Visser (eds.). *Ilmu Sosial di Asia Tenggara: dari Partikularisme ke Universalisme* (terjemahan). Jakarta: LP3ES. hal. 171-178.

Wiradi, Gunawan. 2002. "Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak Kandung Pembaruan Agraria". Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pembaruan Agraria, diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (SPTN), Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yogyakarta, 16 Juli.

Wolf, Eric R. 2004. *Perang Petani* (terjemahan). Yogyakarta: Insist.

PEMBENAHAN TATA PRODUKSI PERTANIAN PANGAN: STRATEGI DAN PRAKTIK MENUJU KEDAULATAN PETANI

Yusup Napiri Maguantara [1]

Abstract

This passage is aimed to reexamine the results of the previous studies related to the strategy, practice, and the peasants' behavior in running their agriculture business, the experienced alternations as well as the impacts of them, and their efforts in overcoming the impacts threatening their lives. In the end, for the writer, such knowledge could be made a basic footstep in formulating the upcoming future plans of studies. It is not impossible that other parties intending to do the similar things could also make the best use of the knowledge.

With the background of peasants' problems, primarily the food producers in Java, AKATIGA, through its studies, is aiming to emerge the ideas enabling the peasants and their supporters to alter the situations, which are of no use to them. The study is also directed to discover the alternatives of developing the agricultural production systems without putting the peasants themselves aside.

Pembuka

Beberapa literatur yang menceritakan situasi dan kondisi petani di Jawa – khususnya sebagai golongan masyarakat yang memproduksi pangan – mengatakan bahwa petani selalu berada dibawah kendali secara politik, ekonomi, dan sosial dari kelompok non-petani. Melalui kekuasaan raja pada jaman feodal[2], kekuasaan kolonial[3], hingga kewenangan organisasi perdagangan dunia (WTO)[4], kekuatan kapital yang dimiliki sebagian kecil pengusaha

1 Peneliti pada Yayasan AKATIGA
2 Husken dan White (1989)
3 Jan Breman (1986); ---van Niel (2003); Boogaard (2004)
4 Lihat antara lain Setiawan (2003); Khudori (2004)

mendominasi arah dan kebijakan organisasi produksi usahatani petani-petani produsen. Kebijakan-kebijakan tersebut mengarah pada terciptanya kondisi yang menyebabkan golongan mayoritas petani menjauh dari penguasaan sumber produksi, termasuk tenaganya sendiri, dan memperlemah kemampuan mereka untuk berproduksi secara mandiri.

Dengan lugas Boeke (1922:52) melukiskan kondisi tersebut seperti dikutip Breman (1986), "*…dalam basis masyarakat kolonial ini kita dapat menerima kenyataan adanya dua lapisan, yaitu golongan kaum tani pribumi pada lapisan bawah, dan golongan pengusaha yang orang asing pada lapisan atas, yang menghasilkan dan menunjang kesejahteraan yang ada. Antara kedua lapisan tersebut pada hakikatnya tidak ada hubungan satu sama lain, kecuali bahwa lapisan yang di atas menindas yang di bawah dan menghisap darah kehidupannya….*"

Hal ini persis seperti yang ditampakkan secara *animasi* dengan baik oleh film "A Bug's Life.[5] Film tersebut menceritakan suatu penindasan dan eksploitasi yang dilakukan kelompok serangga belalang terhadap kelompok serangga semut, tanpa pernah mempertanyakan mengapa mereka harus menyediakan makanan untuk belalang, sementara kebutuhan pangan untuk mereka sendiri belum tercukupi. Babak selanjutnya menceritakan munculnya satu ekor semut yang kritis dan mencoba menyadarkan teman-temannya, termasuk ratunya, untuk melawan – bahkan hanya dengan mempertanyakan *kapan kita memproduksi makanan untuk kita sendiri?* Gagasan ini ditolak mentah-mentah karena rasa 'amat takut' atas kekerasan dan hukuman yang akan diberikan kelompok belalang kepada mereka. Bahkan si semut kritis ini diusir dari komunitasnya. Setelah semut kritis melanglang buana dia bertemu dengan jenis serangga lainnya yang dapat hidup 'berdaulat' dan kemudian diajak ke kampung halamannya untuk membantunya meyakinkan komunitas bahwa kalau mereka bersatu bisa melawan belalang (padahal semut terkenal sebagai jenis serangga yang punya organisasi hidup yang kuat). Singkat cerita, akhirnya secara bersama mereka menemukan cara untuk melawan – salah satunya dengan mengenali kelemahannya – dan bersatu padu dengan bantuan teman-teman serangga lainnya… akhirnya kaum belalang dapat diusir… dan kelompok semut merdeka.

Apa yang dapat ditarik menjadi pembelajaran dari film tersebut adalah: 1) bentuk-bentuk penindasan dapat dilawan bahkan dihilangkan; 2) bentuk perlawanan paling sederhana tetapi paling ditakutkan oleh pihak lawan adalah muncul dan berkembangnya ide atau gagasan untuk

[5] Produksi PIXAR Animation Studio, Walt Disney Home Entertainment Inc. 2004.

melakukan suatu perubahan; 3) gagasan untuk berubah biasanya datang dari seseorang yang kritis (bisa anggota komuniti ataupun luar komuniti) dan berani melakukan penyadaran atas ketertindasan; serta 4) perlu adanya pengorganisasian bagi anggota komuniti dan para pendukungnya untuk melawan kekuatan dominatif.

Berlatar belakang persoalan petani, khususnya produsen pangan di Jawa, AKATIGA melalui studinya bermaksud untuk memunculkan gagasan-gagasan yang memungkinkan bagi petani dan para pendukungnya untuk mengubah situasi tersebut. Studi ini juga diarahkan untuk menemukan alternatif-alternatif pengembangan sistem produksi usahatani tanpa harus meminggirkan petani itu sendiri.

Kami memandang persoalan tata produksi pangan[6] sebagai persoalan penting dengan tiga alasan. *Pertama,* merujuk pada White dan Husken dalam Hart (1989), persoalan produksi pangan dan penguasaan sumber agraria merupakan dua hal yang penting dan menjadi alat kontrol politik-ekonomi kaum penguasa. Keadaan tersebut sangat memungkinkan bagi munculnya berbagai kepentingan dalam pengaturan pangan dan sekaligus dapat menjadi titik pijak strategis bagi petani untuk mengubah keadaan.

Kedua, pengaturan tata produksi dianggap menjadi titik lemah di dalam tahapan upaya pengaturan struktur penguasaan sumber-sumber agraria yang lebih adil. Kegagalan dalam mengatur tata produksi disinyalir sebagai salah satu penyebab kembalinya kondisi ketimpangan struktur penguasaan tanah. [7]

Dan *ketiga,* meyakini apa yang dikemukakan Chayanov (1925) seperti dijelaskan oleh Kitching (1982), Kerblay (1971), dan Thorner (1962), bahwa setiap komunitas petani mempunyai tipe dan perilaku ekonomi yang spesifik, berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu upaya menemukan bentuk organisasi produksi yang tepat dapat dijadikan landasan menuju pertumbuhan bersama tanpa meninggalkan keadilan dan pemerataan.

Petani Pedesaan di Jawa: Beberapa Pandangan dan Temuan

Petani

Merujuk pada beberapa hasil studi yang menjelaskan kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya pedesaan-pertanian di negara-negara sedang berkembang, terdapat satu

6 Tata produksi kami terjemahkan sebagai upaya-upaya untuk mengatur kembali relasi produksi relasi kerja dan relasi produksi sosial – yang terkait dengan bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

7 Hasil diskusi dengan beberapa organisasi tani dan LSM pendamping organisasi tani.

golongan masyarakat yang disebut sebagai petani.[8] *Siapa sesungguhnya mereka dan apa yang menjadi ciri utama mereka sehingga dapat dibedakan dengan golongan masyarakat lainnya?* Berikut akan disampaikan beberapa jawaban yang diberikan oleh para ahli, yang oleh Sayogyo disimpulkan kurang lebih bervariasi, terutama pada situasi yang sedang serba berubah.[9] Tujuannya adalah melingkupi definisi kerja petani pada penelitian terkait.

Moore (1966:111) mencirikan petani sebagai kelompok yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dengan melihat posisinya sebagai golongan yang tersubordinasi, mempunyai budaya tersendiri, dan dibedakan berdasarkan derajat penguasaan tanahnya. Pencirian ini dilakukan karena diyakini tidak mungkin mendefinisikan petani dengan ketepatan yang mutlak sehubungan dengan kekaburan batasnya pada ujung kenyataan sosial itu sendiri. Sementara itu, Shanin (1971:15) membatasi masyarakat petani sebagai suatu komunitas pertanian mayoritas berupa petani produsen yang menggunakan peralatan sederhana dan penggunaan tenaga kerja keluarga serta memproduksi untuk kebutuhan mereka sendiri dan sebagian untuk memenuhi kewajibannya kepada penguasa politik-ekonomi dalam posisinya sebagai kelompok yang tersubordinasi dan tereksploitasi.

Dari kedua ahli tersebut tersebut terdapat satu pandangan yang sama mengenai hubungan petani dengan masyarakat lainnya yaitu sebagai kelompok yang tersubordinasi secara politik dan ekonomi. Atas posisi tersebut, Shanin mensinyalirnya sebagai alasan utama bagi mereka untuk melakukan perlawanan.

Khusus untuk kajian petani di Asia Tenggara, Marzali telah menggolongkan konsep *peasant* yang diacukan kepada sekurang-kurangnya tiga pengertian yang berbeda.[10]

Petama, istilah *peasant* digunakan untuk merujuk kepada semua penduduk pedesaan secara umum, tidak peduli apapun pekerjaan mereka. Mewakili pandangan ini antara lain Hart (1986), Hefner (1990), dan Alexander (1991).

Kedua, beberapa orang, antara lain Scott (1981) dan Hashim (1984), membatasi petani terbatas kepada penduduk pedesaan yang bekerja sebagai petani saja. Batasan tersebut mirip dengan Redfield (1985:19), yang melingkupi masyarakat petani sebagai sekelompok orang yang sekurang-kurangnya mempunyai

---

8 Pada semua literatur berbahasa Inggris disebut dengan istilah peasant. Dalam tulisan ini kami memadankannya dengan istilah petani.

9 Lihat pengantar Sayogyo untuk buku Scott (1993)

10 Bahan kuliah di Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB, tanpa tahun.

kesamaan dalam cara mencari nafkah dan cara hidup yaitu dengan mengolah tanah.

Ketiga, adalah mereka yang mengikuti batasan Wolf (1985), yang menggunakan konsep *peasant* untuk menunjuk kepada petani yang memiliki tanah dan menggarap sendiri tanah tersebut untuk menghasilkan produk yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya, bukan untuk dijual.

Batasan mengenai petani di atas memiliki beberapa kesamaan ciri yaitu menunjuk pada segolongan individu yang mempunyai cara hidup yang khas dengan mengolah tanah untuk menghasilkan pangan, dan oleh karenanya mereka selalu dikendalikan oleh kelompok masyarakat lainnya. Batasan tersebut dapat dijadikan pembeda kelompok petani dengan kelompok masyarakat lainnya. Namun demikian, kekhasan kondisi, ekologi-sosial, dan sejarah kehidupan inilah yang membuat batasan mengenai petani dari daerah tertentu berbeda dengan yang tinggal di daerah lainnya.

Pembatasan yang lebih rinci, terutama dalam masyarakat petani itu sendiri, perlu dilakukan mengingat realitas kondisi masyarakat petani lebih kompleks dibandingkan generalisasinya. Derajat penguasaan tanah yang digarap dan motif berproduksi cukup bisa menggambarkan adanya pelapisan dalam struktur sosial masyarakat tani, sekaligus juga membedakan antara petani (*peasant*) sebagai cara hidup dengan pengusaha tani (*farmer*) sebagai profesi untuk meraih keuntungan.

Rasionalitas dan Moralitas Petani: Respons Terhadap Perubahan

Perdebatan mengenai respons petani terhadap perubahan tak lepas dari upaya untuk membuktikan bahwa di satu sisi terdapat beberapa masyarakat petani yang mencoba bertahan dengan karakter dasar petani, sementara beberapa lainnya sudah berubah menjadi pengusaha tani. Marzali (2003), mengutip Geertz, menyebut respons tersebut sebagai model dari (*model of*) perilaku masyarakat yang terlihat dalam kenyataan hidup sehari-hari, sekaligus juga model bagi (*model for*) masyarakat tersebut untuk menjawab tantangan yang dibawa ke dalam keseharian mereka yang sedang berubah.

Keterikatan hubungan dengan pasar, meluasnya penggunaan uang sebagai alat tukar, pembedaan keahlian kerja, intensitas hubungan desa-kota, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan penguasa merupakan faktor-faktor yang ditengarai Shanin akan menjadi pengubah karakter tersebut. Meskipun demikian, dengan tegas Shanin mengatakan bahwa seberapa pun derasnya dorongan perubahan tersebut tidak akan menghilangkan dalam dirinya karakter petani sebagai sebuah cara hidup (Shanin, 1971).

Sedangkan Scott menemukan adanya cara hidup petani yang didasarkan pada kolektivitas, gotong royong, dan tolong menolong. Sikap ini dianggap sebagai respons atas struktur sosial ekonomi dan politik yang tidak berpihak dan sekaligus menjadi strategi mempertahankan hidup. Kebijakan pemerintah mengintensifkan usaha tani dan dorongan untuk mengomersialkan hasil-hasilnya dianggap sebagai dua hal yang mengancam kehidupan petani. Oleh karena itu asas pemerataan sangat dipegang kuat. Mereka percaya terhadap hak moral petani untuk dapat hidup berkecukupan (Scott, 1994).

Sementara itu, Popkin menyangkal pendapat tersebut dan memandang Scott terlalu meromantisir kehidupan kolektif dan hubungan patron-klien (Popkin, 1986). Popkin mengatakan bahwa petani, seperti halnya kebanyakan orang, bersifat rasional serta ingin meraih keuntungan dan menjadi kaya jika mempunyai kesempatan memiliki akses yang lebih leluasa terhadap pasar. Perubahan-perubahan yang terjadi di desa bukanlah kolektivitas masyarakat, melainkan pribadi para petani itu sendiri. Terlebih dengan adanya 'penangguk' di desa, yaitu orang-orang yang tidak mau bekerjasama tetapi menikmati hasil-hasil kerja kolektif. Institusi bagi hasil hanya dianggap sebagai sikap enggan pemilik tanah untuk membiarkan petani menjual hasilnya sendiri ke pasar.

Khusus untuk petani di Jawa, Marzali (2003:8-18) menyampaikan cara yang dilakukan petani dalam mengatasi perubahan yang disebabkan keterbatasan tanah dan pertumbuhan penduduk. *Pertama,* bertahan dengan budaya hidup memenuhi kebutuhan minimal, sehingga memperlihatkan pertumbuhan statis, seperti dikemukakan Boeke (1922). Pengimbangan meningkatnya kebutuhan pangan disiasati dengan memperluas tanah pertanian, bukannya meningkatkan produktivitas tanah melalui perubahan teknologi ataupun keahlian tenaga kerja. Pendapat ini mirip dengan pemikiran Chayanov yang mengatakan bahwa keluarga tani mempunyai rasionalitas tersendiri yang berbeda dengan rasionalitas kebanyakan (barat) yang orientasi tindakannya adalah untuk mencapai peningkatan pertumbuhan dan kelebihan nilai ekonomi.

Kedua, strategi involusi dan berbagi kemiskinan ala Geertz (1963). Dalam hal ini, upaya petani untuk meningkatkan produksi dilakukan dengan menambah jumlah tenaga kerja pertanian, yang sekaligus dijadikan cara untuk menyerap angkatan kerja baru. Hal ini dilakukan pada kondisi keterbatasan tanah, sehingga upaya ekspansi tanah pertanian tidak dapat diteruskan lagi. Dengan anggapan bahwa masyarakat pedesaan di Jawa homogen (tidak terstratifikasi), suka menolong, serta mampu menekan standar kebutuhan hidup, yang menjadikan mereka memilih untuk berbagi kemiskinan.

Ketiga, strategi petani rasional dalam masyarakat tradisional seperti ditemukan oleh Hayami dan Kikuchi (1987). Hal ini berbeda dengan analisis kedua ahli di atas yang mendasarkan pola strategi kehidupan petani pada asas resiprositas dan subsistensi yang lebih berorientasi pada moral. Hayami dan Kikuchi juga menolak terbentuknya perilaku rasional yang mengejar keuntungan diri sendiri dan mengabaikan nilai-nilai moral yang berlaku, seperti digambarkan oleh Popkin (1979). Dikatakan juga bahwa kedua rasionalitas tersebut dijalankan bersamaanserta bertindak sesuai dengan norma dan moralitas masyarakat yang merupakan cara yang paling tepat untuk menghemat biaya pengelolaan usaha tani. Semuanya tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, yang disebut Bernal (1994) sebagai rasionalitas kontekstual. Hanya saja, cara pandang Hayami dan Kikuchi hanya melihat dari sudut petani pemilik tanah yang menghadapi pilihan dilematis antara melanggar atau mematuhi pranata yang ada, demi mendapat keuntungan lebih besar.

Dalam kesimpulannya setelah melakukan studi lapangan, Marzali (2003:237-274) tidak menemui petani yang patuh sama sekali terhadap pranata pedesaan dan juga tidak ada sama sekali yang berkalkulasi rasional. Hanya saja, Marzali tidak membahas mengapa mereka hanya punya pilihan demikian dan apa yang dilakukan pada situasi petani tidak punya pilihan bahkan hanya untuk memilih jenis yang hendak ditanam.

Beberapa Cara Pandang Tentang Petani

Dalam bukunya, Shanin (1971) mennyarikan empat tradisi cara pandang yang digunakan para ahli untuk menganalisis struktur sosial masyarakat petani. *Pertama,* pendekatan teori klas *ala* Marxist. Penganut Marxist berpendapat bahwa karakteristik masyarakat petani dibentuk dalam struktur sosial politik yang ada. Analisis klas digunakan untuk melihat/memposisikan mereka dalam konteks relasi kuasa dalam struktur tersebut. Masyarakat desa masa kini dianggap sebagai sisa-sisa formasi sosial masa lalu (pra-kapitalis), sebagai kelas yang tereksploitasi dalam keseluruhan struktur kekuasaan yang ada.

Kedua, cara pandang kaum neo-populis yang diwakili oleh Chayanov. Kaum neo-populis melihat struktur sosial petani sebagai sebuah tipe ekonomi tertentu yang sangat spesifik, yang kuncinya terletak pada bekerjanya mekanisme 'usaha tani keluarga'.

Ketiga, tradisi berpikir antropologi. Kalangan antropolog cenderung mendudukkan *peasant* sebagai bentuk awal dari masyarakat yang bersifat residual seperti halnya masyarakat 'primitif' ataupun 'pem-buru-peramu'. Sedangkan Kroeber menempatkan masyarakat petani hidup berhubungan dengan kota-kota

pusat pasar, yang mana mereka merupakan bagian dari budaya kota tersebut.

Keempat, dengan menggunakan sudut pandang sosiologi fungsionalis yang merujuk pada pemikiran Durkheim dan Tonnies. Aliran ini memfokuskan perhatian pada proses perubahan secara evolusi dari bentuk masyarakat tradisional (primitif) menuju masyarakat industri (modern). Dalam hal ini, masyarakat primitif dicirikan oleh rendahnya tingkat produksi dan sistem pembagian kerja yang tidak efisien serta mekanisme solidaritas mekanik yang berdasar pada identitas dan kesepakatan diantara anggota masyarakat. Sementara itu masyarakat industri memiliki sistem pembagian kerja yang maju dan terspesialisasi (produksi, distribusi, dan konsumsi) serta mampu membangun solidaritas organik.

Sementara itu untuk melihat artikulasi cara produksi masyarakat petani dapat menggunakan konsep formasi sosial yang berakar pada pemikiran Marx. Konsep ini digunakan oleh Kahn (1973) dalam analisisnya mengenai masyarakat petani Minangkabau. Kahn membedakan tiga cara produksi, yaitu produksi subsisten, produksi komersialis, dan produksi kapitalis sebagai unsur dominan. Merujuk pemikiran Marx (1965) dalam Sitorus (1999), cara produksi subsistensi menghasilkan barang yang memiliki 'nilai pakai' (*use-value*), sedangkan dua cara produksi lainnya – mencirikan pada gejala komoditisasi – menghasilkan barang yang memiliki 'nilai tukar' (*exchange-value*).

Pada cara produksi komersialis, peranan modal relatif lemah, tenaga kerja umumnya berasal dari lingkungan keluarga, dan organisasi produksinya berupa unit-unit usaha rumah tangga. Sementara pada cara produksi kapitalis, peranan modal relatif kuat, tenaga kerja terutama berasal dari luar rumah tangga, dengan organisasi produksi relatif lebih kompleks yaitu berupa perusahaan skala kecil sampai besar. Sitorus mengatakan secara sederhana 'komersialis tidak dengan sendirinya kapitalis, tetapi kapitalis sudah pasti komersialis'.

Resume

1. Untuk masyarakat petani Indonesia, khususnya Jawa, yang sedang berada dalam proses transisi, ketiga cara produksi tersebut akan ditemui di tataran keyakinan, cara pikir, dan praktik.[11] Oleh karena itu tidak dapat dicirikan dengan tegas apakah komunitas mendasarkan cara produksi pada moral subsistensi (seperti dikatakan Scott) atau rasionalitas ekonomi kapitalis (seperti yang diyakini oleh Popkins). Selain itu, intensitas

[11] Bandingkan dengan laporan penelitian AKATIGA *Struktur Relasi Agraria* (2001) dan *Pemetaan Situasi Pangan Lokal* (2004), serta Pearse (1980:257)

pertarungan yang berbeda-beda antara satu komunitas dengan yang lain (tergantung pada daya resistensi pada suatu cara produksi) menyebabkan dengan sendirinya cara berproduksi masing-masing yang berbeda.

2. Tidak ada cara pandang yang paling baik dari keempat cara pandang di atas yang dapat menjelaskan dengan tepat masyarakat petani dan perubahan-perubahannya. White (1989) menyarankan sebuah riset empiris yang mempertanyakan penyebab perubahan sebagai proses ekspansi kapital dan kebijakan negara yang mendorong terbentuknya iklim perubahan relasi produksi serta perubahan dari sisi penawaran dan permintaan terhadap produk lokal dan pengadopsian teknologi baru yang memberi karakter baru pada relasi dan organisasi produksi.

Pembangunan Pertanian-Pedesaan dan Perubahan-perubahan yang Terjadi

Beberapa Strategi Pembangunan Pertanian-Pedesaan

Pada masa orde baru paling tidak kita menyaksikan pembangunan pertanian-pedesaan yang sedikit banyak membuat berbagai perubahan dalam masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa. Wiradi (1986), mengutip World Bank Sector Policy Paper (1975), mendefinisikan pembangunan pedesaan sebagai 'suatu strategi yang dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi kelompok tertentu dalam masyarakat, yaitu rakyat miskin pedesaan'. Mengingat basis penghidupan masyarakat miskin di pedesaan adalah pertanian, maka konsep pembangunan tersebut tertuju pada mayoritas masyarakat petani.

John Harris (1982:37-38) mengatakan bahwa secara mendasar terdapat tiga cara yang pernah diterapkan di berbagai negara yang bertujuan mencapai sistem produksi pertanian yang lebih produktif dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. *Pertama,* melalui pengembangan sistem pertanian kapitalis dengan skala ekonomi sebagai tujuan utama. Unit usahatani kecil diserap ke dalam bentuk produksi kapitalis skala besar dan kelebihan tenaga kerja diserap oleh industri pedesaan dan sektor jasa. Cara *kedua* adalah dengan mengembangkan unit-unit usahatani skala kecil yang padat modal dengan menerapkan prinsip produktivitas skala usaha dengan dukungan koperasi dalam pengolahan dan pemasaran input dan output pertanian. Dalam hal ini kelebihan buruh pedesaan diserap oleh industri dan sektor jasa. *Ketiga,* melalui inisiatif negara melalui pembentukan koperasi skala besar, kolektivisasi, atau usahatani negara. Kelebihan tenaga kerja pedesaan disalurkan pada kegiatan non pertanian dari koperasi kolektif atapun industri dan sektor jasa.

Sementara itu, dengan menilik keberhasilan Jepang, Taiwan, dan China, Pearse (180:244) menawarkan penerapan strategi pembangunan pertanian berbasis petani dengan dua kondisi capaian. *Pertama,* pembukaan akses petani penggarap atas tanah secara adil melalui pembatasan luas pemilikan tanah atau dengan unit usaha kolektif disertai pembagian kerja yang proposional dan, *kedua,* mendorong potensi pertumbuhan produksi melalui pembagian permodalan secara adil untuk menghindari akumulasi kekayaan yang dimonopoli sekelompok kecil petani besar.

Lebih lanjut dikatakan, capaian tersebut perlu didukung organisasi produksi petani dan koperasi yang bersama-sama berperan dalam pengaturan produksi dan distribusi hasil. Koperasi, khususnya, mengatur penyimpanan kelebihan hasil setelah kebutuhan pangan terpenuhi dan menginvestasikan pada pengolahan hasil dan fasilitas sosial. Dengan cara demikian tercapai pertumbuhan bersama melalui keadilan, sehingga gejala-gejala munculnya polarisasi secara perlahan berkurang. Strategi tersebut perlu mendapat dukungan politik dari pemerintah, terutama perlindungan dari tekanan politik pasar bebas pangan dunia.

Strategi yang ditawarkan Pearse di atas mirip dengan gagasan Chayanov yang mewakili pandangan utama kaum Neo-populis, bahwa usahatani skala kecil (keluarga) lebih efisien dan produktif dalam memajukan pertanian. Hal tersebut tentu saja mensyaratkan adanya kondisi penguasaan tanah pertanian oleh keluarga tani. Kitching (1982:54) menjelaskan tahapan pemikiran Chayanov dalam memajukan pertanian sebagai berikut:

1. Membentuk koperasi yang beranggotakan petani-petani kecil. Koperasi ini berfungsi menyediakan berbagai sarana produksi pertanian tertentu yang dibutuhkan.
2. Mengatur dan mengorganisasi penjualan hasil melalui koperasi. *Melalui hal ini dapat dicapai sebuah pertumbuhan kapital secara bersama dan berkembang menjadi kumpulan koperasi.*
3. Membangun organisasi (koperasi) kegiatan pengolahan hasil pertanian yang bekerjasama erat dengan bagian penjualan. *Mekanisme ini dapat memperpendek rantai-rantai distribusi penjualan yang hanya menguntungkan pedagang dan memberi beban biaya baik pada produsen maupun konsumen.*
4. Penggunaan koperasi untuk membesarkan dan mengorganisasi produksi usahatani dalam bentuk baru yang lebih maju dan juga menyebabkan produsen lebih terkendali, perencanaan usahatani lebih tertata serta mengacu pada kebijakan bagian pengolahan hasil dan penjualan, perbaikan teknik usahatani, hingga pengemasan sesuai dengan kebutuhan pasar di luar komunitas.

Revolusi Hijau: Perubahan Agraria yang Merenggut Kedaulatan Petani

Sebagaimana telah berjalan, Revolusi Hijau (RH) menjadi pilihan pembangunan pertanian di Indonesia yang ditujukan untuk mengatasi kekurangan pangan dan bahaya kelaparan serta mengurangi situasi dan kondisi pertanian yang menjadi penghalang pembangunan pedesaan secara keseluruhan. Akan tetapi, tidak demikian menurut White (2002), yang menilai bahwa RH tidak hanya sekedar instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen politik. Kebijakan agraria tersebut mempunyai dua target utama: 1) mengatasi konflik politik di daerah pedesaan dengan cara memberlakukan strategi 'masa mengambang' dan 2) kebutuhan untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga yang relatif stabil di daerah perkotaan untuk kelas menengah, dengan cara meningkatkan produksi dan ketersediaan stok beras yang aman secara nasional.[12]

Dengan kata lain, pemilihan RH sebagai cara untuk mencapai 'kemajuan' pertanian-pedesaan tidaklah ditujukan untuk kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani itu sendiri. Terlebih, ketika kemudian RH mengandaskan begitu saja program *land reform* – yang bertujuan tanah untuk petani – yang pada awal tahun 1960-an sudah berjalan. Sekurangnya ada tiga ahli dengan rekomendasinya masing-masing – yaitu Geertz (1963), Ladejinsky (1961-1963) [13], dan Mosher (1966:1974) – yang cukup mempengaruhi arah kebijakan politik ekonomi agraria Indonesia tersebut. Baik secara eksplisit maupun implisit, ketiganya menyarankan perlunya program peningkatan produktivitas pertanian dibandingkan melakukan penataan agraria melalui redistribusi tanah yang akan membahayakan stabilitas politik (White, 2002:62).

Baik kalangan peneliti maupun pengambil kebijakan merasa kagum dengan keberhasilan Indonesia yang dalam waktu relatif singkat mampu mencapai swasembada pangan, yaitu mencukupi kebutuhan pangan dari produksi sendiri. Terlebih lagi keberhasilan ini sebelumnya didahului dengan berbagai pesimisme pemikir dan pemerhati persoalan pertanian pedesaan, khususnya Jawa yang memperoleh cap statis dan enggan tumbuh dan maju. [14]

Fenomena tersebut menarik perdebatan di kalangan peneliti, baik asing maupun Indonesia, baik mengenai cara melihat keadaan, bagaimana proses 'keberhasilan' tersebut dilalui, maupun perubahan-perubahan sosial serta dampak yang terjadi (White, 2002). Berbagai penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang sangat beragam, tergantung dari

12 Lihat Husken dan White (1989:hal 235-36)
13 Lihat di Walinsky, L.J (1965)
14 Geertz (1963) dan Boeke (1982)

masalah utama yang menjadi pusat perhatian, cara pendekatan dan analisis, serta aliran teori yang menjadi dasar pandangan masing-masing.[15]

Namun di atas semua itu, bila kita cermati lagi, perdebatan para pakar tersebut pada intinya mengandung dua hal. *Pertama,* bahwa inovasi teknologi dan komersialisasi yang terkandung dalam paket revolusi hijau di Jawa telah mendorong terbentuknya diferensiasi sosial baru yang cenderung memusatkan penguasaan tanah pada petani lapisan atas dan pada saat yang sama mempersempit akses penguasaan tanah bagi petani lapisan bawah. Kesimpulan tersebut diperkuat secara kuantitatif, baik lewat data makro[16] di tingkat nasional maupun data mikro di tingkat desa, yang menggambarkan terjadinya penajaman ketimpangan struktur penguasaan tanah di pedesaaan. Bentuk struktur penguasaan tanah di pedesaan sejajar dan sebangun dengan derajat akses dan kesempatan kerja di sektor non-pertanian.[17] Artinya, jika dilihat dari sisi pendapatan, mayoritas petani lapisan bawah di pedesaan yang berpenghasilan kecil dari usahataninya juga cenderung berpenghasilan kecil dari sektor non-pertanian. Oleh karenanya, Griffin (1979:252-259) dengan tepat menyebut RH sebagai kisah dari kegagalan revolusi. Gagal dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Kedua, menguatnya bentuk-bentuk organisasi produksi kapitalis yang segala pengaturannya diserahkan pada mekanisme pasar dan sekaligus meredupkan pengaturan bentuk organisasi produksi keluarga yang dilandaskan pada pengetahuan dan pranata-pranata tradisional. Tercerapnya petani dalam sistem pasar yang terdistorsi melalui instrumen subsidi dan harga dasar, mengubah orientasi usahatani untuk pemenuhan pangan sendiri menjadi usahatani komersial, sehingga terjadi ekstraksi hasil produksi pedesaan ke masyarakat kota. Sementara itu, surplus ekonomi pasar dinikmati bukan oleh mayoritas petani produsen kecil, tetapi oleh segelintir elit petani penguasa tanah luas dan aparat pengatur pasar – Bulog dan KUD – dua organisasi baru yang meredupkan peranan lumbung di pedesaan. Fakta inilah yang membawa Booth (1988:7) pada penilaian bahwa RH berhasil meningkatkan produktivitas, tetapi gagal dalam mendistribusikannya.[18]

---

15 Lihat misalnya Hart (1986); Hart (1989); Husken (1998); Pincus (1996); Hayami dan Kikuchi (1987); White dan Husken (1989); Karsyno (1984); Tjondronegoro dan Wiradi (1984); Booth (1988); Pearse (1980); Griffin (1979); dan Wahono (1999).

16 Bersumber pada data Sensus Pertanian BPS yang dilakukan dalam rentang waktu 10 tahun sekali

17 Untuk data makro bandingkan antara Bachriadi (2003:1) dengan data sensus pertanian 2003 (BPS); sedangkan untuk data mikro bandingkan Kasryno (1984:104-130) dengan Laporan Studi Struktur Relasi Agraria AKATIGA khususnya kasus Desa Kebanggan.

18 Fenomena ini sekaligus membalikkan tesis Geertz yang menyatakan petani Jawa tidak produktif, tetapi

Kedua proses perubahan pertanian-pedesaan di atas kami sebut sebagai perenggutan 'kedaulatan petani', terenggutnya tanah sebagai identitas dan sumber penghidupan utama dari tangan petani. Seperti dikemukakan oleh Wahono (1990), bahwa keterlibatan petani dalam program peningkatan produksi pangan lebih merupakan keterpaksaan ekonomi dan ketakutan atas tekanan pemerintah daripada sebagai upaya petani memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan diri. Fenomena ini dijelaskan sebagai akibat dari perubahan agraris selama masa pertumbuhan pertanian yang relatif cepat dan tidak dilandaskan pada perubahan struktur agraria .[19]

Resume

Dari beberapa pendekatan dan cara dalam memajukan pertanian, terlihat adanya kesamaan pandangan, sebagai berikut: 1) mengisyaratkan peran pemerintah dalam memberi arah capaian yang jelas, 2) perbedaan mendasar dalam memilih adalah apakah mencapai kemajuan dengan mengembangkan organisasi produksi skala besar seperti dilakukan kalangan kapitalis dan sosialis, atau dengan menguatkan satuan-satuan usahatani kecil berbasis keluarga seperti gagasan neo-populis, dan 3) keberhasilan memajukan pertanian, baik memakai pendekatan usaha besar ataupun kecil mensyaratkan terlebih dahulu pentingnya penataan sumber-sumber agraria sebagai basis pengorganisasian produksi. Hal ini berbeda dengan pemajuan pertanian ala Revolusi Hijau.

Hanya dengan menguasai tanahlah kedaulatan petani atas pangan dan kehidupannya dapat terwujud. Ketika hal ini yang dijadikan arah capaian pembangunan pertanian-pedesaan, maka gagasan kaum neo-populislah yang dijadikan pilihan. Pada pandangan tersebut terdapat basis tata produksi yang bisa mencapai keseimbangan produksi dan distribusi yang adil tanpa harus menghilangkan pengetahuan dan interaksi sosial agraria yang terdapat dalam masyarakat.

Penutup

Merujuk pada beberapa kesimpulan di atas, petani lapisan bawah di pedesaan – petani gurem, tunakisma, dan buruh tani – sedang menanggung perubahan situasi yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Seperangkat cara dan prosedur (resep) yang harus mereka jalankan – panca usahatani, bimas, inmas, KUD, dan Bulog – untuk meningkatkan produksi pangan telah mencerabut pengetahuan dan pranata-pranata yang mereka miliki sebelumnya. Proses tersebut pada intinya menghancurkan basis-basis

mereka mendistribusikan hasilnya dengan baik.

19 Lihat Husken dan White (1989) dan Sobhan (1993)

pengorganisasian produksi – produksi, konsumsi, dan distribusi – yang cocok dan biasa mereka lakukan dalam mencapai kelestarian hasil dan penghidupan.

Dalam situasi demikian, yang serba kalah dan terjepit, masih adakah ruang untuk banyak petani lapisan bawah agar secara bersama-sama dapat keluar dari persoalan? Apa yang bisa mereka lakukan dan mulai dari mana? Serta "Strategi dan cara yang bisa dilakukan petani adalah bertahan, sebab saat ini memang belum mampu melawan kekuatan kapital global. Bentuk praktisnya adalah seperti gerakan petani yang melakukan pertanian alami dan mengkonsumsi produksi pangan untuk dirinya sendiri, tidak untuk dijual. Bagi petani yang tak punya alat produksi berjuang untuk itu, sementara yang sudah punya berupaya untuk mempertahankan", demikian menurut GWR.[20] Pendapatnya seperti dinyatakan Scott sebagai senjata kaum lemah. Perlawanan yang dilakukan tidak untuk mengubah, apalagi menumbangkan sistem dominasi. Tujuan mereka hanyalah untuk bertahan diri dalam sistem itu, dengan kerugian sekecil-kecilnya dan dilakukan tanpa henti.

Gerakan untuk 'kembali' pada sistem usahatani alami-tradisional mengisyaratkan perlunya melakukan pembenahan tata produksi – sisi produksi, distribusi, dan konsumsi – berbasis pengetahuan dan relasi-relasi agraria yang sebelumnya sudah mereka kuasai dan praktikkan. Berikut saya sampaikan pengalaman sebuah organisasi tani yang kemudian mengubah diri menjadi LSM dalam mempraktikkan pertanian alami-tradisional. Cara ini saya ungkapkan kembali[21] mengingat adanya beragam variasi motif dan tujuan praktik pertanian alami yang sering disamakan dengan pertanian organik. Model tersebut lebih berorientasi ke dalam serta meminimalkan ketergantungan terhadap pihak lain yang sekaligus mengurangi biaya produksi. Sementara model yang lain berorientasi pada pasar serta meningkatnya kebutuhan pangan sehat bagi masyarakat kota.

Pertanian Alami-Tradisional Terpadu: Menemukan Titik Pijak Bersama

Sementara persilangan pendapat diantara ahli mengenai apa yang telah terjadi di pedesaan masih terus berlangsung, para petani miskin tetap terus berusaha mencari jalan keluar dari berbagai persoalan yang melilitnya. Sekelompok petani 'terdidik', melalui beberapa proses pelatihan dan diskusi dengan pihak lain, berpikir dan mencoba merumuskan masalah serta tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi dan memperbaiki kehidupannya. Merujuk pada pesan film "A

20 GWR: Gunawan Wiradi dalam sebuah komunikasi pribadi

21 Pengalaman ini pernah dituliskan sebelumnya. Lihat Napiri (2002)

Bug's Life" di depan, cara demikian merupakan bentuk perlawanan yang paling sederhana tetapi paling ditakuti pihak lawan. Titik pijaknya sederhana saja, yakni pengalaman hidup sehari-hari dan keinginan bertahan hidup.

Bertolak pada apa yang dilakukan oleh program revolusi hijau terhadap petani melalui paket panca usahatani[22] yang telah mencabut budaya bertani yang selama ini dijalankan, secara perlahan-lahan petani mem biasakan dirinya hanya menanam padi sampai tiga kali tanam setiap tahun, menyingkirkan bibit lokal yang lebih rendah produktivitasnya, lebih memilih pupuk kimia yang secara instan dapat langsung dipakai, menggunakan pestisida yang dapat secara ampuh memberantas hama dan penyakit, dan seterusnya. Singkat kata, petani sudah mengalami ketergantungan terhadap teknologi pertanian yang semua kebutuhannya, kecuali tenaganya sendiri, diadakan oleh pihak lain dan harus menge luarkan uang untuk mendapatkannya. Sebagai konsekuensinya, petani kemudian mempertukarkan sebagian hasil berasnya untuk mendapatkan sarana produksi pertanian tersebut, sehingga tanpa sadar telah tergiring kepada budaya produksi komersial.[23]

Kegelisahan petani muncul pada saat daya dukung lahan telah melewati batas maksimal sehingga produktivitas lahan kemudian cenderung menurun. Kondisi tersebut diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan petani kecil, misalnya kebijakan pengurangan subsidi pupuk dan melakukan penjualan beras impor murah pada saat panen raya. Sementara itu, perkembangan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi hingga ke tingkat pedesaan semakin menambah beban pengeluaran bagi petani.

Semakin saratnya beban biaya hidup secara langsung telah mengancam sumber-sumber penghidupan petani. Bagi petani kecil dengan lahan sempit serta buruh tani, selain mengurangi konsumsi, kegiatan usaha di luar pertanian merupakan salah satu cara yang dilakukan. Bila upaya tersebut belum mencukupi maka mereka mulai menjual aset yang dimiliki, termasuk tanah yang menjadi alat produksi utamanya.

Berpijak pada keprihatinan tersebut, muncul gagasan untuk mencoba keluar dari perangkap revolusi hijau dengan mengembalikan cara berbudidaya tani secara tradisional dan alami seperti sebelumnya. Pertanian alami menjadi sebuah alternatif sistem pertanian baru berdasar pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan diyakini dapat mengantarkan petani dan sistem

22 Penggunaan pupuk 'kimia' berimbang, penanaman bibit unggul/VUTW, penggunaan pestisida 'kimia' untuk penanggulangan hama terpadu, dukungan irigasi dan perbaikan teknologi pengolahan lahan 'mekanisasi'

23 Bandingkan dengan Kahn (1974)

pertanian menuju kemandirian penghidupan.

Secara sederhana kemandirian petani dapat dilihat pada kemampuan mereka untuk memproduksi pupuk sendiri dan kemudian juga berani menentukan sendiri jenis tanaman yang akan ditanam. Perlu ditambahkan sebagai catatan, bahwa berbagai macam tantangan dan hambatan mewarnai 'perjuangan' untuk mencapai hal tersebut. Terutama dari pihak pemerintah saat itu yang selalu mencurigai segala sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan anjuran program pertanian pemerintah. Bahkan gerakan kembali ke pertanian tradisional ini sempat dicurigai sebagai gerakan bawah tanah.

Mengembangkan Gagasan Perlawanan dan Rasa Percaya Diri

Gagasan perlawanan tersirat pada pertanian alami-tradisional itu sendiri dan menjadi sebuah alternatif cara bertani di luar cara kebanyakan saat ini. Tradisional seringkali dilawankan dengan modern. Dalam konteks ini, mereka mengembangkan gagasan bahwa pertanian dengan teknologi modern hanya dapat dilakukan oleh sebagian kecil petani yang kaya. Sebaliknya, kembali kepada sistem tradisional diharapkan dapat diadopsi dengan cepat untuk semua golongan. Alami dipertentangkan dengan pabrikan kimiawi, khususnya untuk penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh petani, harganya mahal, dan daya rusaknya besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini, pupuk dan pestisida alami kembali digunakan dengan bahan baku yang terdapat di sekitar tanpa perlu 'membeli' dan mudah dalam pembuatannya.

Istilah 'terpadu' diletakkan pada kenyataan bahwa sebuah sistem produksi pertanian tidak dapat dilepaskan dengan bagian lain yang terkait, terutama penanganan saat lepas panen, distribusi, dan konsumsi. Selain itu terdapat faktor pendukung lain yang juga memerlukan perhatian, yaitu kekuatan organisasi tani dan kerjasama dengan pihak lain seperti masyarakat non-petani, pemerintah, lembaga donor, dan jaringan organisasi tani di tingkat nasional maupun internasional. Dengan itu diharapkan akan terbentuk kekuatan kolektif dalam menumbuhkan kembali kemandirian petani dalam bertindak dan menentukan jalan penghidupannya.

Menghidupkan kembali lumbung, pranata asli yang menghilang pada masa revolusi hijau, menjadi titik strategis dalam konsep pertanian alami-tradisional terpadu. Lumbung menjadi jangkar pengikat kepaduan tiga serangkai produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsep lumbung sejajar dengan konsep koperasi sebagai pengikat konsentrasi vertikal ala neo-populis. Pada konsep ini terletak pengaturan pemanfaatan hasil untuk konsumsi, pengaturan distribusi hasil, penyediaan input, dan penyimpanan cadangan pangan ketika krisis terjadi. Lumbung

memayungi satuan-satuan usahatani keluarga anggotanya. Lumbung juga menjadi basis pengorganisasian tani, sebagai media 'bertemunya' petani baik dalam satu kelompok maupun antar kelompok. Dalam konteks wilayah yang lebih luas, yaitu antar kelompok tani, dibentuk organisasi antar lumbung, yaitu pasar tani alami yang beranggotakan lumbung-lumbung kelompok tani. Dalam perannya sebagai jangkar, lumbung menjadi media pertemuan dengan kelompok masyarakat non-petani sebagai konsumen, sekaligus juga mungkin pemasok sarana produksi pertanian. Catatan terakhir yang penting adalah, manajer pengelola lumbung adalah perempuan.

Dalam praktik, pertanian alami-tradisional terpadu menemui banyak rintangan, terutama dalam menanamkan rasa percaya diri kepada keluarga tani lainnya bahwa model ini tidak membawa kerugian bagi mereka. Para pelopor gerakan ini memerlukan waktu setidaknya tiga musim tanam untuk membuktikan produktivitas panennya dapat mengimbangi produktivitas petani yang menggunakan budidaya dan input 'modern'. Sungguh tidak mudah untuk mengembalikan kesuburan tanah yang sudah terbiasa mendapat masukan pupuk kimia dengan menggantikan kompos alami buatan sendiri, demikian menurut mereka. Setelah demplot terbukti berhasil dan terdengar meluas, kemudian semakin banyak kelompok tani lainnya yang mengikuti gerakan tersebut. Namun demikian, keberhasilan dalam sisi produksi ternyata belum menjalar pada sisi distribusi dan konsumsi. Masih kuatnya mekanisme pasar ditengarai menjadi penyebab belum percayanya keluarga tani pada konsep lumbung.

Apa yang akan dilakukan AKATIGA

Kembali pada sistem usahatani alami berbasis pada pengetahuan mereka sebelumnya merupakan salah satu alternatif, setidaknya untuk melindungi dan mengurangi tekanan perluasan ekonomi pasar di pedesaan. Alternatif lain adalah mengubah arah pembangunan pertanian dengan mengintensifkan sistem produksi usahatani kecil, mengikuti gagasan dari kalangan pemikir neo-populis. Perubahan cara pandang tersebut meniscayakan adanya penguasaan tanah bagi setiap petani penggarap sebagai basis kedaulatan petani.

Berlatar belakang persoalan petani, khususnya produsen pangan di Jawa, AKATIGA melalui studinya bermaksud untuk memeriksa kembali gagasan dan praktik yang telah dilakukan yang memungkinkan petani mencapai kehidupan yang lebih baik dan berdaulat. Sebagai langkah awal, AKATIGA sudah mengawalinya dengan melakukan studi situasi lokal mengenai kemungkinan dan hambatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagi petani.

Daftar Bacaan

Bachriadi, D. 2003. Arti Penting Studi Mikro Ketimpangan Penguasaan Tanah Bagi Gerakan Pembaruan Agraria, Makalah yang disampaikan dalam lokakarya Hasil Penelitian Struktur Relasi Agraria yang diselenggarakan AKATIGA di Bandung, 10 Juni 2003.

Boeke, J.H. 1982. "Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda", dalam Sayogyo (Peny.). *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Boomgaard, P. 2004. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta: Djambatan.

Booth, A. 1988. "Agricultural Development in Indonesia". *Asian Studies Association of Australia: Southeast Asia Publication Series No 16*.

Breman, J. 1986. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.

Collier, W.L, dkk. 1993. A New Appoach to Rural Development in Java: Twenty Five Years of Village Study. Submitted to: ILO Sectoral Employment Policy and Planning Project. Tidak Diterbitkan.

Dewey, A.G. 1962. *Peasant Marketing in Java*. New York: Free Press.

Fadjar P. 2000. *Gerakan Rakyat Kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Firmansyah, dkk. 1999. *Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Petani Era 1980-an*. Jakarta: Yappika dan Sekretariat Bina Desa.

Gamst, F.C. 1974. *Peasant in Compex Society: Basic Anthropology Units*. New York: Holt, Rinehart, And Winston, Inc.

Geertz, C. 1963. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia.* Bhratara Karya Aksara.

Griffin, Keith. 1979. *The Political Economy of Agrarian Change2nd Edition*. London: The MacMillan Press Ltd.

Harris, Jonh (ed). 1982. *Rural Development: Theories of Peasant Economy and Agrarian Change*.

Hart, G. 1986. *Power, Labor, and Livelihood: Processes of Change in Rural Java*. California: University of California Press.

Hart, G., et all. (Eds.). 1989. *Agrarian Transformation: Local Processes and The State in Southeast Asia*. London: University of California Press, Ltd.

Hasyim, W. 1988. *Peasant: under Peripheral Capitalism*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hayami, Y., dan Masao Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hefner, R.W. 1999. *Geger Tengger: Perubahan sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LKIS.

Huizer, G. 1999. Peasant Mobilization for Land Reform: Historical Case Studies and Theoretical Considerations. Discussion Paper No. 103.

Husken, Frans. 1998. *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Jaman: Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta: Grasindo.

Husken, F. dan Benjamin White. 1989. "Java: Social Differentiation, Food Production, and Agrarian Control," dalam Hart, G., et all. (Eds.). *Agrarian Transformation: Local Processes and The State in Southeast Asia*. London: University of California Press, Ltd.

Husken, Frans dan Benjamin White. 1989. "Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa". *Majalah Prisma No 4 Tahun XVIII*.Jakarta: LP3ES.

Indrawati Sari, Y dan Tri H.S. 2004. Langkah Awal Memprakarsai Pembentukan Sistem Pangan Lokal. Draft Working Paper. Akan Diterbitkan. AKATIGA dan KRKP.

Joao Pedro de Campos Guimaraes. 2002. A Landscape of Contracts: The Organisation and Impact of Shrimp Culture in Southwest Bangladesh. Disertation. Tidak Diterbitkan. Utrecht University.

Kahn, Joel S. 1974. *Economic Integration and The Peasant Economy: The Minangkabau (Indonesia)*. London: Blacksmith, London. University of London (Disertasi).

Kano, Hiroyoshi. 1986. "Sejarah Ekonomi Masyarakat Pedesaan jawa: Suatu Penafsiran kembali," dalam Nagazumi, Akira. *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kano, Hiroyoshi. 1990. *Pagelaran: Anatomi Sosial Ekonomi Pelapisan Masyarakat Tani di Sebuah Desa Jawa Timur*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Kartodirdjo, S. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Kasdi, A. 2001. *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela.

Kasryno, F (Peny). 1984. *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kerblay, B. 1971. "Chayanov and the Theory of Peasantry as a Specific Type of Economy", dalam Shanin, T (ed). *Peasant and Peasant Society: Selected Readings*. Great Britain: Penguin Books.

Khudori. 2004. *Neoliberalisme Menumpas Petani: Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*. Yogyakarta: Resist Book.

Kitching, G. 1982. *Development and Underdevelopment in Historical Perspective*. London: Methuen & Co Ltd.

Kuhren, F. 1993. "Struktur Pertanian", dalam *Sosiologi Pertanian.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Landsberger, Henry A., dan YU. G. Alexandrov. 1981. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.

Marzali, A. tt. "Konsep Peisan dan Kajian Masyarakat Pedesaan di Indonesia". *Antropologi No 54. Universitas Indonesia*.

Marzali, Amri. 2003. *Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moore, Barrington. 1966. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Penguin Books.

Mosher, A.T. 1966. *Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and Modernization*. New York: Frederick A. Praeger.

Mosher, A.T. 1974. *Menciptakan Struktur Pedesaan Progresif untuk Melayani Pertanian Modern*. Jakarta: C.V. Yasaguna.

Napiri, Y. 2002. Evaluasi Program Sustainable Livelihood OXFAM GB di Beberapa LSM Pendamping Petani di Jawa. Laporan Penelitian AKATIGA. Tidak Diterbitkan.

Padmo, S. 2000. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*. Yogyakarta: Media Pressindo dan Konsorsium Pembaruan Agraria.

Pearse, A. 1980. *Seeds of Plenty, Seeds of Want: Social and Economic Implication of The Green Reolution*. New York: Oxford University Press.

Pincus, J.R. 1996. *Class Power and Agrarian Change*. London: Macmillan Press, Ltd.

Popkin, Samuel L. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.

Powelson, John P., and Richard Stock. 1987. *The Peasant Betrayed: Agriculture and Land Reform in the Third World*. Boston: Oelgeschlager, Gunn & Hain in association with the Lincoln Institute of Land Policy.

Pratikto, F. 2000. *Gerakan Rakyat Kelaparan, Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Media Presindo.

Redfield, R. 1985. *Masyarakat Petani dan Kebudayaan, Terjemahan Cetakan kedua*. Jakarta: CV Rajawali.

Sadikin dan Subekti Mahanani. 2004. Struktur Relasi Agraria di Tiga Desa: Kebanggan, Wanasari, dan Terbanggi Besar. *Draft Working Paper*. Belum Diterbitkan.

Scott, J.C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah, Cetakan I*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Scott, J.S. 1994. *Moral ekonomi petani, pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta.

Shanin, T (ed). 1971. *Peasant and Peasant Society: Selected Readings*. Great Britain: Penguin Books.

Sitorus MTF. 1999. Pembentukan Golongan Pengusaha Lokal di Indonesia: Pengusaha Tenun dalam Masyarakat Batak Toba. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor .

Sitorus, M.T.F, dkk. 2001. *Agribisnis Berbasis Komunitas: Sinergi Modal Ekonomi dan Modal Sosial*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.

Sobhan, Rohman. 1993. *Agrarian Reform and Social Transformation: Precondition for Development*. London and New Jersey: Zed Book.

Thorner, D. 1971. "Peasant Economy as a Category in Economic History" (1962), dalam Shanin, T (ed). *Peasant and Peasant Society: Selected Readings*. Great Britain: Penguin Books.

Tjondronegoro, S.M.P. 1999. *Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih*. Bandung: Yayasan AKATIGA.

Tjondronegoro, S.M.P., dan Gunawan Wiradi (Peny.). 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT Gramedia.

Van Niel, Robert. 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: LP3ES.

Victoria Bernal. 1994. "Peasant, Capitalism, and (Ir)rationalty". *American Ethnologist 21 (4): 792-810, American Anthropology Association.*

Wahono, F. 1999. "Revolusi Hijau: Dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi". *Jurnal Wacana No IV INSIST Press.*

Wahono, F.,dkk. 2003. *Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press.

Walinsky, L.J (Ed). 1965. *The Selected Papers of Wolf Ladejinsky: Agrarian Reform as Unfinished Business*. London: Oxford University Press.

White, Ben. 2002. "Agrarian Debates and Agrarian Research in Java, Past and Present", dalam Suhendar, dkk (ed.). *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: AKATIGA.

Wiradi, G. 1986. Kepenguasaan Tanah dalam Perspektif Transformasi Struktural. Makalah yang disampaikan dalam KIPNAS-IV, Jakarta.

Wiradi, Gunawan. 1993. Karya Chayanov Ditinjau Kembali. Bahan Diskusi ISI Cabang Bogor. Tidak Diterbitkan.

Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: INSIST Press.

Wolf, E. 1985. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

MODAL BERGERAK, SERIKAT TERSERAK:PERUBAHAN SITUASI PERBURUHAN DAN TANTANGAN GERAKAN BURUH DI INDONESIA

Indrasari Tjandraningsih & Maria Dona Dewi Puspitaningrum [1]

Abstract

The passage explains the alternation of economic situation and macro politics, as well as the mechanism and impacts of the informalizing process carried out by industrial sectors towards the labors and communities. This is further connected to the efforts of developing the alternative frame of organizing and the future labor movement that is more responsive towards the industrial and labor situations going on today.

Kapitalisme global telah melemahkan gerakan buruh karena menyamarkan identitas buruh sendiri dan lawan mereka. Analisis atau resistensi yang hanya berpusat pada buruh menjadi tidak memadai dan tidak efektif. Karena globalisasi membawa banyak korban kaum tertindas maka perlawanan yang efektif hanya mungkin bila dilakukan secara bersama-sama oleh semua kelompok tertindas tersebut.

Pengantar

Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan buruh, serikat buruh, dan pemerhati persoalan perburuhan bahwa sejak krisis tahun 1997 hingga kini telah terjadi titik balik situasi yang makin mempersulit kondisi buruh. Secara umum situasi sulit tersebut merupakan akibat dari situasi di tingkat makro. Dimulai dari jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang membawa efek domino berupa penutupan dan bangkrutnya pabrik-pabrik yang mengandalkan

[1] Peneliti pada Yayasan AKATIGA

bahan baku impor, dalam hal ini pabrik TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), karena tidak sanggup menanggung beban kenaikan harga. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang tak tertahankan. Selain karena pabrik tutup atau bangkrut, PHK massal juga terjadi sebagai dampak dari berbagai strategi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menyiasati dampak krisis, di antaranya adalah rasionalisasi jumlah tenaga kerja, efisiensi produksi, dan pergeseran preferensi tenaga kerja yang direkrut.

Di tengah situasi semacam itu, di tingkat kebijakan terjadi pergeseran orientasi kebijakan perburuhan yang tampaknya lebih memihak kepada buruh. Konvensi ILO tentang kebebasan berserikat dan berunding kolektif diratifikasi untuk selanjutnya diimplementasikan ke dalam UU Serikat Buruh/Serikat Pekerja No. 21 tahun 2000. Selain kebijakan setingkat UU, kebijakan dalam bentuk keputusan menteri juga menunjukkan pergeseran pendulum ke arah yang lebih *pro* buruh yakni Kepmen No. 78 tahun 2000 mengenai ketentuan PHK dan pesangon.[2] Reaksi keras dari pengusaha terhadap keputusan ini melahirkan Kepmen No. 150 tahun 2000 yang berbuah reaksi keras dari buruh karena dianggap menghilangkan lagi peluang yang menguntungkan buruh. Reaksi-reaksi yang muncul terhadap kebijakan tersebut setidaknya menunjukkan kepada kita proses perumusan kebijakan yang tidak didasari oleh pemahaman yang penuh terhadap situasi dinamika hubungan perburuhan yang sedang berkembang.

Sebagaimana juga umum diketahui, UU SB/SP (Serikat Buruh/Serikat Pekerja) baik pada tingkat rumusan maupun implementasinya telah menciptakan keadaan yang dilematis bagi buruh, karena di samping memberikan kebebasan untuk mendirikan serikat secara independen, UU ini pada saat yang bersamaan juga membuka lebar peluang fragmentasi atau perpecahan kekuatan buruh. Ketika kekhawatiran mengenai perpecahan itu disuarakan, berbagai pihak masih menganggapnya sebagai sesuatu yang hanya akan bersifat sementara. Tetapi dalam kenyataannya, hingga hari ini kekhawatiran tersebut makin relevan dan justru menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Kasus-kasus perpecahan serikat semakin sering terjadi dengan sebab-sebab yang berbeda-beda, baik yang diakui atau disembunyikan, di tingkat nasional maupun lokal, sehingga mempercepat proses pelemahan gerakan buruh.

Dalam situasi demikian, ancaman terhadap kelangsungan kerja buruh dan eksistensi serikat muncul dalam wujud serentetan aksi tutup pabrik

[2] Sebagaimana diketahui, keputusan ini mengundang reaksi keras dari pihak pengusaha karena dianggap sebagai pemihakan terhadap buruh yang terlalu membabibuta dan menjadi disinsentif bagi peluang kerja dan berusaha.

dan relokasi ke negara lain yang dilakukan oleh beberapa investor asing ternama di bidang elektronik dan sepatu. Penutupan dan relokasi tersebut menjadi tonggak yang menunjukkan gentingnya kondisi investasi dan kesempatan kerja di Indonesia. Perlu dicatat bahwa selain kasus-kasus yang terliput di tingkat nasional, masih banyak sekali insiden penutupan pabrik dan hilangnya kesempatan kerja di tingkat lokal di berbagai pusat industri di Jawa, Batam, dan Medan yang tidak terliput secara nasional.

Ketika serikat buruh sedang sibuk membenahi diri dalam situasi di atas, kembali pemerintah mengeluarkan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan No. 02/2004 yang membuat arena bagi gerak buruh dan serikat buruh menjadi semakin rumit. Pada hakikatnya, kedua UU ini, bersama dengan UU SB/SP di atas (ketiganya kemudian dikenal sebagai paket 3 UU Perburuhan) telah menciptakan berbagai tantangan 'baru' bagi buruh dan serikatnya yang harus disikapi dengan strategi dan cara yang baru pula.

Apabila dirumuskan secara lebih ringkas, dinamika perubahan situasi perburuhan yang diuraikan di atas merupakan sebuah wujud dari strategi modal untuk mendorong terciptanya fleksibilitas yang saat ini merupakan kata kunci bagi kegiatan operasinya. Upaya-upaya menciptakan fleksibilitas dilakukan melalui berbagai lini, yaitu lini kebijakan, lini produksi, lini tenaga kerja, dan lini serikat buruh, yang dilaksanakan secara sistematis melalui kerjasama dengan pemerintah pusat maupun lokal, dengan para pengamat ekonomi dan media massa, dan dengan serikat buruh sendiri.

Tulisan ini bermaksud menggambarkan bagaimana AKATIGA melihat perubahan situasi perburuhan yang terjadi dan apa tantangan yang akan muncul bagi organisasi dan serikat buruh yang harus dihadapi. Lebih lanjut tulisan ini akan mengidentifikasi seberapa jauh serikat telah mengembangkan cara-cara untuk menghadapi tantangan yang muncul dan menunjukkan hal-hal yang masih perlu dan dapat dilakukan. Identifikasi tantangan dan apa pekerjaan yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut menjadi dasar pemikiran lahirnya dua agenda penelitian AKATIGA dalam waktu dekat yang berfokus pada upaya-upaya pengorganisasian di dalam dan di luar tempat kerja. Kedua agenda penelitian tersebut bermuara pada keinginan memberikan sumbangan kepada proses untuk mendorong gerakan buruh agar lebih peka dan proaktif terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul akibat situasi yang berubah.

Untuk mencapai maksud di atas, ada tiga pertanyaan yang akan dijawab:

1. ***Perubahan apa yang terjadi dan bagaimana dampak serta bekerjanya mekanisme dampak tersebut terhadap kondisi buruh dan SB?***

2. ***Tantangan-tantangan 'baru' apa saja yang muncul bagi SB dan langkah-langkah apa yang telah diambil oleh SB dalam menghadapi tantangan tersebut?***

3. ***Langkah-langkah apa yang masih perlu dilakukan?***

Tesis AKATIGA dalam membahas masalah perubahan situasi perburuhan ini adalah, bahwa semua yang sedang terjadi merupakan perwujudan dan akibat dari strategi modal untuk menjaga kemampuannya berakumulasi melalui mekanisme fleksibilisasi. Strategi yang dijalankan dengan menggu-nakan berbagai lini secara serempak tersebut membawa dampak yang sangat signifikan bagi eksistensi SB dan semakin membuktikan bahwa keberadaan serikat sangat ditentukan oleh modal. Ketika pada saat ini serikat buruh masih dipercaya merupakan satu-satunya alat kolektif untuk memperjuangkan kepentingan buruh, pertanyaannya adalah: 1) bagaimanakah alat kolektif tersebut bisa bertindak lebih proaktif dan efektif untuk mengimbangi gerak-gerik modal, sehingga mampu mengurangi pendiktean modal terhadap apa yang dapat dilakukan oleh serikat; dan 2) bagaimanakah alat kolektif tersebut dapat menyuarakan dan mencarikan jalan keluar bagi persoalan anggota dan calon anggotanya, yang tidak terbatas pada lingkungan tembok pabrik dan melakukannya secara inklusif.

Kedua pertanyaan tersebut memiliki acuan logika sebagai berikut. Dalam konteks sejarah, keberadaan perlawanan buruh dan serikat atau organisasi buruh hampir setua gerak operasi modal, yaitu di belahan bumi Barat muncul pada abad ke-19 dan di Indonesia pada awal abad ke-20 dengan motif yang sama, yakni melawan penindasan dan eksploitasi oleh modal. Modus eksploitasi yang digunakan secara halus maupun kasar pada hakikatnya merupakan hasil pengembangan modus-modus lama yang seharusnya dapat diantisipasi oleh serikat, sehingga dapat dirumuskan strategi yang proaktif daripada reaktif. Dalam konteks sejarahnya, perlawanan dan gerakan buruh mencapai kematangannya karena bergerak dalam koridor yang lebih luas, dan membuka diri bagi dukungan dari elemen-elemen masyarakat yang lain. Dalam rumusan Michel Beaud, '*…the path by which the workers' movement matured was marked by infinite diversity and great richness' (2001:114).* Rumusan tersebut diletakkan dalam konteks pembahasan mengenai kemunculan perlawanan dan kesadaran bahwa penderitaan kaum buruh dan kaum miskin umumnya akibat eksploitasi oleh kaum elite di Eropa – terutama di Inggris dan Perancis – yang muncul dan mengkristal sebagai hasil suatu proses interaksi dan pertemuan beberapa kekuatan gerakan maupun pemikiran yang muncul di kitaran kelas pekerja. Dalam proses tersebut, kelas buruh – yang sangat beragam sifatnya – selalu berhubungan dengan berbagai lapisan masyarakat umum

dan menyatu dalam perjuangan yang lebih luas. Hal yang serupa juga terjadi di Indonesia ketika gerakan buruh selain memperjuangkan kepentingan kelas buruh juga menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan dalam melawan imperialisme Belanda.

Hubungan dan interaksi antara kelas buruh dengan elemen masyarakat miskin dan menengah lainnya pada hakikatnya merupakan wujud dari kehidupan sosial buruh, sehingga kepentingan dan aksi mereka tidak efektif untuk diperjuangkan secara terpisah dari kepentingan elemen masyarakat miskin lain. Selain itu buruh atau kelas buruh, sebagaimana dikatakan oleh Peter Boomgard, *'…is not only more than organized labour, it is, of course, also 'embedded' in the society at large, enmeshed in the fabric of everyday life…'* (2001). Karena buruh tidak hanya terdiri dari mereka yang tergabung dalam serikat buruh, melainkan merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan, dengan demikian perilaku dan kepentingan mereka di tempat kerja merupakan hasil dari interaksi kehidupan mereka di tengah masyarakat, maka menjadi sangat relevan apabila gerak serikat buruh mulai menembus keluar dinding pabrik untuk dapat menangkap sebenar-benarnya persoalan dan kepentingan buruh yang diwakilinya.

Selain karena alasan sebagai senjata kolektif bagi buruh, fokus pada serikat buruh dalam tulisan ini juga karena, sebagaimana dirumuskan oleh Roger Southall, sejalan dengan pengakuan bahwa *'…focus upon worker organizations is critical to any understanding of the defensive and offensive capacities of the third world poor, even (perhaps especially) in conditions that are not revolutionary* (1998). Fokus pada organisasi buruh penting untuk dapat memahami kemampuan orang miskin di dunia ketiga untuk bertahan maupun melawan secara kolektif dan terorganisir, bahkan dalam kondisi yang tidak revolusioner.

Bahan-bahan yang digunakan dalam membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah literatur mengenai perkembangan kapitalisme dan globalisasi serta literatur mengenai perkembangan serikat buruh; berbagai laporan penelitian, makalah workshop, dan seminar yang dilakukan oleh AKATIGA maupun lembaga-lembaga lain; hasil diskusi formal dan informal; serta artikel dan berita di surat kabar.

Pembahasan

1. Perubahan apa yang terjadi dan bagaimana dampak serta bekerjanya mekanisme dampak tersebut terhadap kondisi buruh dan SB?

Mengikuti tesis yang diajukan, inti dari perubahan yang sedang dan telah terjadi adalah diterapkannya restrukturisasi dan reorganisasi produksi secara global oleh modal untuk menjaga tetap tercapainya elemen-elemen kunci dari kapitalisme, yakni

tujuan untuk keuntungan, akumulasi, perluasan produksi, sirkulasi, hingga akhirnya perluasan pasar (Beaud 2001:127). Dalam usaha mempertahankan elemen-elemen kuncinya, modal selalu berusaha untuk mencari dan menciptakan pasar yang baru, proses yang baru, dan produksi yang baru tanpa henti. Konsekuensi dari usaha-usaha tersebut adalah bahwa perubahan ekonomi politik, krisis, dan resesi di tingkat global hingga lokal selalu akan segera disesuaikan oleh gerak-gerik modal. Dalam hal ini modal memang sangat antisipatif terhadap perubahan.

Itulah esensi dari globalisasi produksi. Praktik ini telah dimulai sejak diperkenalkan konsep *New International Division of Labour* (NIDL) atau Pembagian Kerja Internasional Baru yang diperkenalkan oleh Frobel, Heinrich, dan Kreye pada tahun 1980. Peter Dicken, seorang ahli geografi, mengartikan NIDL sebagai sebuah perubahan pola geografis dalam spesialisasi produksi di tingkatan global. Dalam NIDL terkandung dimensi spasial yang membedakannya dari pembagian kerja lama yang didefinisikan oleh Adam Smith, ahli politik ekonomi abad 18, yang hanya mengacu pada spesialisasi pekerjaan di antara buruh yang melakukan pekerjaan yang berbeda-beda dalam sebuah proses produksi. Sebagai cikal bakal sistem produksi global NIDL dimotori oleh perusahaan-perusahaan transnasional (TNC)[3] dan negara, baik secara bersama-sama maupun melalui kebijakan masing-masing (1986).

Konsep NIDL dari Froebel, Heinrich, dan Kreye menjelaskan berbagai cara mengorganisasi proses produksi secara global, yang melahirkan pembagian peran negara-negara kaya sebagai pemilik modal dan negara miskin sebagai penyedia tenaga kerja murah, serta dampak sosial yang muncul akibat pembagian peran tersebut. Selain itu NIDL juga menjelaskan fenomena munculnya negara-negara berkembang sebagai pusat-pusat industri baru yang menggantikan pusat industri tradisional di Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Jepang (dalam Roberts & Hite, 2000:266).

Penyebab utama negara berkembang menjadi pusat industri baru adalah tersedianya barisan buruh murah yang dapat direkrut dan dipecat dengan mudah, serta bersedia melakukan pekerjaan dalam kondisi apapun. Buruh murah diperoleh karena mereka hanya memiliki tingkat keterampilan yang rendah. Hal ini merupakan syarat yang dihasilkan dari rekayasa proses produksi yang dipecah-pecah menjadi tahap-tahap kerja yang sangat sederhana, dan dapat dilakukan dengan tingkat keterampilan

[3] Pengertiannya mengacu pada suatu perusahaan yang mengontrol dan melakukan kegiatannya di lebih dari satu negara, sering juga dinamakan perusahaan multinasional (MNC). Semua MNC adalah TNC akan tetapi tidak semua TNC adalah MNC (Dicken, 1986:4).

minimal serta dapat dikuasai dalam waktu yang sangat singkat. Dalam kerangka globalisasi produksi ini, Frobel, Heinrich, dan Kreye menyatakan bahwa kelangsungan hidup dan kemampuan perusahaan untuk mengakumulasi modal serta mencapai keuntungan hanya dapat dijamin lewat relokasi produksi ke lokasi industri baru yang buruhnya murah, melimpah, mudah diatur, atau dengan kata lain, melalui reorganisasi produksi secara transnasional (1980, lihat juga Hutchison & Brown, 2001).

Dalam sejarah perkembangan kapitalisme, berbagai modus organisasi kerja diciptakan dengan memikirkan cara-cara dan proses kerja yang baru, mengadopsi proses kerja yang lama, atau memodifikasinya. Cara-cara dan proses kerja tersebut diterapkan sesuai dengan perkembangan situasi dan selalu dengan model yang semakin disempurnakan. Strategi modal yang menggunakan proses kerja dan produksi lama yang diperkenalkan dan digunakan kembali untuk tujuan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi pada dasarnya merupakan strategi untuk menggenjot *surplus* tenaga kerja. Cara-cara tersebut meliputi kerja borongan, kerja di rumah, *sweat-shop system* [4], subkontrak, *Taylorism* [5], *Fordism* [6], dan *shift work.* Penerapan cara-cara kerja tersebut bagi buruh berimplikasi jam kerja yang makin panjang, intensifikasi tenaga, diskualifikasi atau pembatalan kerja, degradasi kondisi kehidupan/kondisi kerja, dan semua kombinasi yang mungkin dari implikasi tersebut (Beaud, 2001:218-220).

Apa yang sedang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari upaya-upaya transformasi modal dan menunjukkan bahwa fleksibilitas produksi dan hubungan kerja melalui kontrak, subkontrak, dan *outsourcing* merupakan kreasi baru yang diadopsi dari praktik-praktik produksi di masa lalu. Dengan kata lain, reorganisasi kerja yang dilakukan dengan orientasi efisiensi, fleksibilitas, individualisasi, dan kemudahan kontrol, bukanlah

---

4 Menunjuk pada sistem kerja dengan kondisi tempat kerja yang buruk: di ruang sempit, gelap, tertutup, dan minim sirkulasi udara. Secara harafiah berarti tempat kerja yang menyebabkan buruh bermandi keringat. Di Amerika dan Eropa biasanya menunjuk pada tempat kerja ilegal yang mempekerjakan imigran gelap.

5 Menunjuk pada penerapan sebuah sistem yang memisahkan dengan jelas kerja otak dan kerja fisik dalam proses produksi. Dasar pemisahan itu adalah analisis waktu dan gerak secara seksama untuk setiap pekerjaan dalam isolasi, dan menyerahkan kerja otak kepada manajer (*Red Feather Dictionary*). Dinamakan sesuai dengan penciptanya, F.W. Taylor. Sistem kerja ini, sebagaimana juga dengan *Fordism*, menekankan kontrol terhadap kerja buruh sebagai alat untuk menjauhkan buruh dari pengetahuan terhadap produksi dan memberikan kuasa kontrol terhadap proses kerja kepada manajemen (Braverman dalam Wood & Kelly, 1988).

6 Menunjuk pada bentuk proses kerja dengan pembagian kerja yang ekstrim, pengawasan ketat oleh pengawas/mandor dan kecepatan kerja yang ditentukan oleh kecepatan *assembly line*. Dinamakan sesuai dengan sistem kerja di perusahaan mobil Ford yang mengadopsi model tersebut dari industri pengepakan daging di Chicago (*Red Feather Dictionary*).

sebuah modus yang sama sekali baru melainkan pemberlakuan kembali cara kerja dan kontrol di abad-abad yang lalu. *'Control that was once best achieved through the concentration of production is now seen as better achieved through the deconcentration and dispersal. The putting-out system that existed in 18th century England, but was later destroyed by the introduction of the factory system in the 19th century, is now being reintroduced at the end of 20th century (Murray, 1988).*

Fleksibilitas sebagai isu sentral penyebab perubahan situasi perburuhan, meliputi fleksibilitas modal, fleksibilitas produksi yang berkait erat dengan fleksibilitas tenaga atau hubungan kerja, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Dalam literatur terdapat pengertian fleksibilitas yang beragam. Fleksibilitas produksi sebagaimana telah disinggung di atas menuntut penerapan proses produksi sesuai dengan kebutuhan, dan mengacu pada kemampuan untuk melakukan perubahan produk dan proses secara cepat, efisien, dan terus-menerus (Deyo dalam Hutchison & Brown 2001:17). Fleksibilitas tenaga kerja, yang intinya adalah pengelolaan dan penggunaan buruh, menurut OECD memiliki 5 bentuk yakni: *1) external numerical flexibility* (majikan menentukan berapa jumlah tenaga yang diperlukan pada saat tertentu); 2) *externalization* (berbagai bentuk subkontrak dan *putting-out*); 3) *internal numerical flexibility* (jumlah jam kerja dan shifts ditentukan berdasarkan kebutuhan majikan); 4) *functional flexibility* (penugasan dan rotasi kerja berdasarkan kebutuhan majikan); dan 5) *wage flexibility* (upah disesuaikan dan tergantung pada 'kinerja' dan produktivitas) (Munck, 1999:6). Fleksibilitas pasar tenaga kerja (LMF – *Labour Market Flexibility*) adalah kemudahan untuk menyesuaikan upah riil dan tingkat kesempatan kerja dengan perubahan kondisi dan gejolak dalam perekonomian, yang bergantung pada kemampuan perusahaan untuk merekrut dan memecat pekerja dengan biaya yang relatif rendah serta kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan upah. Dimensi lain adalah kemudahan yang memungkinkan pekerja untuk pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dari satu industri ke industri lain, dari satu sektor ke sektor lain, dan dari satu daerah ke daerah lain yang ditentukan oleh akses terhadap informasi kesempatan kerja, biaya perpindahan, fleksibilitas upah, dan tingkat pendidikan pekerja (Bappenas, 2004:3-5). Kebijakan fleksibilitas pasar tenaga kerja diadopsi oleh Bappenas karena diyakini merupakan kunci bagi pertumbuhan lapangan kerja secara pesat. Apa yang tidak diperhatikan dalam kebijakan ini adalah syarat yang melekat dalam LMF yang menuntut dihapusnya peraturan perundangan tentang kewajiban berserikat, perundingan bersama, upah minimum, jaminan sosial, dan tunjangan pengangguran yang dianggap menghambat penciptaan lapangan kerja (ILO, 2004; lihat juga Tjandraningsih, 2004). Implikasi

langsung dari kebijakan LMF adalah paket 3 undang-undang perburuhan yang baru, yang secara potensial maupun faktual terlalu merugikan buruh.[7]

Di tingkat implementasi, penerapan reorganisasi kerja dan fleksibilitas produksi tersebut telah menciptakan perubahan status kerja buruh berdasarkan:

a. Jangka waktu kontrak: buruh yang semula berdasarkan kontrak kerja waktu tak tertentu (buruh tetap) menjadi buruh dengan kontrak kerja waktu tertentu (buruh kontrak).
b. Proses kerja: menghasilkan dikotomi buruh subkontrak dan *outsourcing*
c. Sistem pengupahan: menghasilkan dikotomi buruh harian dan buruh borongan
d. Tempat kerja: menghasilkan dikotomi buruh pabrik dan buruh rumahan

Dampak yang harus dialami buruh akibat perubahan status kerja tersebut, meliputi: (1) kesejahteraan buruh tidak terjamin oleh peraturan ketenagakerjaan; (2) fungsi perlindungan negara terhadap buruh berkurang (mengecilnya intervensi pemerintah terhadap warga negara mengurangi tingkat pengawasan terhadap implementasi hak-hak buruh yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan); dan (3) posisi tawar buruh terhadap pengusaha dan negara lemah (Notulensi pertemuan LIPS-Yawas, 2003).

Dikotomi buruh di atas dengan jelas menunjukkan berubahnya karakter buruh dan meningkatnya heterogenitas atau keberagaman buruh. Kondisi tersebut merupakan dampak langsung dari fleksibilitas produksi yang selain menyebabkan peningkatan keberagaman buruh, juga menyebabkan kepentingan dan tuntutan buruh menjadi kurang sesuai untuk disampaikan secara kolektif (lihat juga Munck, 1999:6). Dengan kata lain, fleksibilitas produksi telah mengancam kolektivitas sebagai senjata ampuh bagi kaum buruh, karena perlahan tapi pasti hubungan secara emosional maupun profesional di antara mereka semakin dijauhkan melalui penciptaan karakter buruh yang semakin individual lewat proses produksi yang semakin terfragmentasi dan desentralistik. Bagi serikat buruh, kondisi ini secara langsung menyajikan tantangan tersendiri dalam usaha merekrut dan mengorganisasikan buruh.

Temuan dan pengalaman empirik di berbagai pusat industri di Jawa misalnya, menunjukkan bagaimana modus fleksibilitas produksi melalui kontrak, subkontrak, dan *outsourcing* makin gencar diterapkan. Dari Surabaya, Serang, dan Tangerang[8] tercatat beberapa kasus perusahaan

7 Lihat Tavip (2004) dan Komite Buruh Cisadane (2004) untuk praktik dari paket UU tersebut.
8 Informasi dari para pengurus serikat buruh di Surabaya dan Jakarta.

melakukan pemecatan massal atau penawaran pensiun dini terhadap buruh yang berstatus tetap dengan alasan bangkrut atau relokasi, sebagai strategi untuk merekrut buruh dan mempekerjakan mereka dengan status kontrak. Kini sudah menjadi modus umum yang sudah diketahui secara luas oleh serikat buruh, bahwa pabrik-pabrik padat karya di berbagai pusat industri mulai memperkecil jumlah buruh dengan status tetap dan memperbesar jumlah buruh dengan status tidak tetap. Di Majalaya[9], pabrik-pabrik mempekerjakan buruh dengan status kontrak tanpa kepastian dan pemberitahuan jangka waktu kontrak dan tanpa kriteria untuk keberlanjutan atau putus kontrak, kecuali dengan alasan dan pertimbangan kebutuhan perusahaan. Para pimpinan dan tokoh lokal di sana banyak menerima keluhan dari buruh – terutama buruh lokal – mengenai sangat tidak pastinya kelangsungan kerja buruh karena sistem kontrak, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena mereka '*...tidak bisa ikut campur urusan perusahaan*'[10]. Selain itu kondisi tersebut dianggap sebagai sebuah konsekuensi yang harus diterima – barangkali juga semacam *trade-off* – karena perusahaan bersedia menerima syarat dari pemerintah dan tokoh lokal agar mempekerjakan lebih banyak buruh setempat.[11]

Dari Tangerang, Bekasi, dan Jakarta ditemukan modus hubungan kerja kontrak yang serupa.

Fina, perempuan, 22 th, pabrik elektronik Jepang di Bekasi.
'...ia dikontrak setiap 11 bulan sekali. Pertama masuk 11 bulan dinamakan kontrak perdana; 11 bulan kedua dinamakan kontrak perpanjangan, setelah itu ada 11 bulan lagi menjadi kontrak pembaharuan. Namun untuk kontrak pembaharuan ada masa jeda 1 bulan.' (Lembur ed. 2 Juni 2004)

9 Temuan penelitian penulis dan AKATIGA.

10 Wawancara dengan kepala desa dan tokoh informal di Majalaya.

11 Isu buruh lokal dan pendatang sebenarnya juga isu penting yang harus diperhatikan oleh serikat buruh karena merupakan strategi perusahaan untuk memecah kekuatan dan solidaritas buruh. Lihat juga Silvey (2002) yang melaporkan mengenai perbedaan karakter buruh perempuan pendatang dan lokal dalam aktivisme mereka dan studi klasik Celia Mather (1975) mengenai kontrol terhadap perilaku buruh perempuan lokal dan pendatang yang dibangun melalui kerjasama antara perusahaan dengan tokoh masyarakat setempat.

Nina, perempuan, pabrik rambut palsu di Jakarta.
'Dua minggu pertama dijadikan buruh borongan. Ini bikin lamaran. Lalu masuk minggu ketiga, dikontrak selama 3 bulan dan begitu seterusnya. Setelah 6 kali kontrak 3 bulanan itu saya dipanggil dan disuruh bikin lamaran baru untuk menjadi buruh kontrak baru lagi. Setelah itu kontrak diperpanjang menjadi 4 bulan sekali.' (Lembur ed. 2 Juni 2004)

SNI, perempuan, 28, menikah, pabrik garmen di Tangerang.
'Saya kerja di perusahaan garmen di bagian packing. *Sudah 2 tahun lebih. Saya dikontrak. Dulu kontrak 6 bulan sekali dipanggil dan diperpanjang. Lalu 3 bulan sekali, dan sekarang 1 bulan sekali. Kalau habis kontrak diliburkan dulu sekitar 2 sampai 3 hari nanti dipanggil lagi.' (Lembur ed. 2 Juni 2004)*

Sumber yang sama juga mengangkat praktik rekrutmen dalam modus *outsourcing* yang tidak hanya terjadi di pabrik, tetapi juga di sektor jasa.

AJG, laki-laki, menikah, pabrik mi instan di Tangerang
'Saya kerja di perusahaan makanan di bagian operator produksi. Awalnya, perusahaan bilang kalau mau masuk kerja, melalui yayasan penyalur tenaga kerja. ...Setiap habis gajian, dua minggu sekali, dipotong Rp.50,000 untuk membayar yayasan tersebut. Katanya, selagi kerja disitu harus bayar sekitar Rp.400,000 sampai Rp.600,000.' (Lembur ed. 2 Juni 2004)

Shinta, perempuan, bank asing Eropa di Jakarta
'Saya pekerja PT PRS. Bank ARO membayar ke PT PRS dan PT PRS yang menggaji saya'. Dengan PT PRS hubungan kerja Shinta adalah kerja kontrak. Setiap 6 bulan sekali hubungan kerja dengan PT PRS diperpanjang. Jadi masa kontrak berlaku untuk 6 bulan, sekarang masa kontrak kedua. (Lembur ed. 2 Juni 2004)

Praktik subkontrak sebenarnya sudah merupakan lagu lama dan sangat biasa. Seorang aktivis serikat buruh di Surabaya menceritakan temuannya mengenai modus produksi subkontrak bunga tulip buatan dari kulit jagung untuk ekspor. Produksi bunga tersebut dilakukan secara terpecah-pecah. Tempat kerja untuk memotong kulit jagung sesuai bentuk, mewarnai, dan merangkai menjadi bunga dilakukan di tiga tempat kerja yang berbeda. Oleh karena itu 'pabrik-pabrik' bunga tulip di Surabaya hanya mempekerjakan sekitar 30 orang buruh, terutama perempuan, yang diupah sangat rendah. Di beberapa daerah di Bandung diketahui berlangsung proses produksi garmen independen maupun subkontrak yang dilakukan di rumah-rumah tinggal yang berukuran besar yang mempekerjakan hingga 100 orang buruh, atau dalam model *putting-out* di perkampungan kota.

Semua contoh tersebut memperlihatkan luasnya pengertian 'buruh', yang lingkup kegiatan kerjanya kini sudah semakin jauh dari batas-batas pabrik sebagai tempat kerja yang dikenal dan diyakini selama ini.

Pengalaman buruh di atas juga mencerminkan bagaimana globalisasi produksi melalui fleksibilisasi (*flexible specialisation*) membawa dampak yang merugikan bagi buruh, dan membuat posisi tawarnya sangat lemah atau hilang sama sekali. Situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dialami di berbagai negara lain dalam kurun waktu yang berbeda. Meskipun demikian, dampak negatif globalisasi terhadap posisi buruh sebagai sebuah fenomena global masih belum dapat dianggap *final*, karena juga muncul beberapa pengalaman positif globalisasi bagi buruh-buruh di Cina dan Malaysia misalnya (Sargeson, 2001; Rasiah, 2001). Akan tetapi, sepanjang pengamatan dan pengalaman AKATIGA serta LSM perburuhan dan serikat buruh lain, secara keseluruhan bagi buruh di Indonesia dampak negatif yang terjadi jauh lebih menonjol dibandingkan dampak positifnya. Apabila terdapat dampak positif, maka hanya akan dialami oleh sekelompok kecil buruh dengan tingkat kemampuan yang lebih tinggi, yang tidak sebanding atau kurang berarti dibandingkan dampak negatif yang dialami sebagian besar buruh dengan tingkat kemampuan lebih rendah yang merupakan karakteristik utama buruh di Indonesia.

Dampak negatif globalisasi produksi terhadap buruh membawa implikasi terhadap kebutuhan untuk menegaskan kembali eksistensi dan fungsi serikat buruh. Penegasan kembali tersebut diperlukan karena serikat buruh di negara ketiga menerima kritikan baik dari kaum kanan yang menganggap bahwa tuntutan upah oleh kelompok buruh terorganisir sebagai kaum minoritas yang egois (*selfish*) dan telah menyebabkan sumber investasi untuk kepentingan publik teralihkan, maupun dari kaum kiri yang menganggap bahwa karakter serikat terlalu birokratis dan hanya mewakili kaum '*labour aristocrats*'

yang mau menjadi sasaran bagi '*labour imperialism*' Barat (Southall, 1998:2).

Selain karena ciri institusionalnya, penegasan kembali eksistensi dan fungsi serikat juga diperlukan karena, sebagaimana dirumuskan oleh Ronaldo Munck, dalam banyak kasus, serikat buruh telah memarginalisasikan dirinya sendiri dengan cara melawan modal di atas arena kuno yang telah berubah (1999). Dengan kata lain, serikat buruh masih jalan di tempat sementara modal sudah lari entah kemana.

Dari uraian di atas, setidaknya luasnya pengertian buruh dan penegasan kembali terhadap eksistensi dan perilaku serikat merupakan tantangan bagi serikat yang harus dihadapi dan akan didiskusikan di bagian berikut ini.

2. Tantangan-tantangan 'baru' apa saja yang muncul bagi SB dan langkah-langkah apa yang telah diambil oleh SB dalam menghadapi tantangan tersebut?

Di tingkat internasional, pengalaman dampak fleksibilitas produksi telah dialami pada dekade sebelumnya, terutama dalam bentuk berkurangnya kesempatan kerja karena perpindahan modal. Mengikuti pergerakan modal dalam mencari tempat operasi yang lebih efisien, kaum buruh di Amerika dan Eropa mengalaminya pada tahun 1970-an ketika produksi dipindah ke negara Asia Timur seperti Jepang. Kemudian buruh Jepang mengalaminya di tahun 1980-an ketika produksi dipindahkan ke 'macan-macan Asia'. Akhir 1980-an dan 1990-an, buruh-buruh di negara tersebut banyak kehilangan pekerjaan karena produksi berpindah ke Malaysia, Indonesia, Thailand, Srilanka dan negara-negara pasifik. Era tahun 2000-an ini buruh Indonesia mulai terdesak oleh buruh Vietnam dan Cina yang dianggap lebih murah dan lebih produktif. Situasi semacam itu langsung mengancam eksistensi serikat buruh karena basis massanya mulai tergerogoti.

Ancaman terhadap eksistensi serikat merupakan bentuk dari krisis yang dialami serikat buruh di seluruh dunia. Berbagai studi dan observasi sistematis menunjukkan situasi krisis yang dihadapi oleh serikat buruh secara global yang kondisinya semakin lemah sebagai akibat dari restrukturisasi produksi yang menyebabkan kesempatan kerja berkurang, hubungan buruh-majikan dan sosok buruh maupun sosok majikan menjadi tersamar, menurunnya mutu kesempatan kerja secara drastis, menurunnya jaminan kerja, terbuangnya tenaga-tenaga produktif yang secara agregat bersifat sangat signifikan, makin informalnya hubungan kerja, makin pendeknya masa kerja buruh, serta makin tingginya ketidakpastian keberlangsungan kerja (*job insecurity & job sustainability*).

Dalam situasi semacam itu, pengorganisasian buruh melalui serikat buruh mendapatkan tantangan-

tantangan baru yang berada di luar pakem serikat buruh tradisional yang umumnya terpaku pada definisi buruh yang sangat spesifik, pada jenis pekerjaan dan jenis hubungan kerja yang spesifik, berbias laki-laki, selalu dipengaruhi oleh '*the iron law of oligarchy*' (menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan kontrol dari atas ke bawah serta memberikan hak kepada SB di struktur tertinggi untuk menentukan kebijakan bagi SB di struktur terendah), memunculkan kesenjangan hubungan dan komunikasi antara elit dengan anggota, serta menciptakan birokrasi yang cenderung kurang transparan. Ciri pengorganisasian serikat yang tradisional semacam itu tidak lagi memadai untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan kata lain, makin marginalnya serikat buruh antara lain disebabkan oleh dirinya sendiri yang tidak mampu keluar dari karakter tradisionalnya.

Singkatnya, di seluruh dunia serikat buruh menghadapi banyak masalah dan tantangan yang dirumuskan oleh Muller-Jentsch sebagai: (a) *krisis kepentingan kolektif*, yang disebabkan pembedaan buruh dan kecenderungan berdasarkan 'fleksibilitas'; (b) *krisis kesetiaan pekerja terhadap SB* yang disebabkan oleh serangan ideologi oleh majikan dan kelompok kanan baru; dan (c) *krisis perwakilan SB*, yang disebabkan kesulitan SB dalam mengorganisasi sektor teknologi baru. Tantangan tersebut harus dihadapi dengan imajinasi jika 'anggur baru' (ide baru) akan 'dituangkan' ke dalam 'botol lama' (serikat buruh) (Munck, 1999:18).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, di arena internasional telah muncul berbagai inisiatif untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan taktik, cara-cara organisasional, dan bahkan tujuan-tujuan lama karena disadari bahwa SB tidak lagi cukup 'mewakili' dalam cara-cara lama. Kesadaran terhadap situasi yang berubah dan berbagai inovasi serta terobosan untuk menaikkan kembali peran serikat telah memunculkan usaha-usaha mempelajari perbedaan dalam terminologi lokasi, tujuan, tindakan organisasi, dan media aksi antara gerakan buruh 'lama' dan gerakan sosial baru. Gerakan buruh 'lama' melakukan perlawanan buruh terbatas dalam lingkup politik, sedangkan gerakan sosial 'baru' biasanya diasumsikan beroperasi dalam masyarakat sipil. Sebagaimana tujuan buruh, gerakan buruh 'lama' biasanya berfokus di sekitar jaminan hak-hak ekonomi untuk pekerja dan politik integrasi pekerja dalam sistem yang dominan. Sementara itu gerakan sosial 'baru' menekankan otonomi masyarakat sipil dan sering melihat perubahan dalam nilai-nilai sosial atau gaya hidup. Organisasi buruh tradisional menggunakan cara formal dan mengadopsi aspek hirarki (Alan Scott, 1991).

Melalui perbedaan kedua gerakan tersebut kita dapat melihat tantangan institusional yang dihadapi oleh gerakan buruh yang tradisional

(Munck, 1999:12-13). Kita juga menemukan bahwa SB di seluruh dunia bergerak di luar gerbang pabrik dan mulai bergeser dari orientasi ekonomi semata (Munck, 1999). Beberapa tulisan selain menyajikan tantangan juga mengusulkan strategi baru bagi gerakan buruh yang lebih relevan dengan perubahan *setting* keberadaan dan fungsinya (Munck, 1999; Waterman, 1999; dan Antunes, 2001). Mereka percaya bahwa serikat buruh masih tetap merupakan alat kolektif buruh untuk memperjuangkan kepentingannya, akan tetapi hal itu hanya bisa efektif bila SB meninggalkan karakter tradisionalnya. Waterman menyodorkan strategi yang ditempuh gerakan sosial alternatif baru (feminis, lingkungan, HAM), yang menggunakan bentuk pengorganisasian dan strategi perjuangan yang baru yang informal, demokratik, memberdayakan diri, dan inklusif (Waterman, 1999:252). Sebuah contoh pembentukan serikat buruh dengan ciri baru sudah dilakukan di Filipina yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip: memperluas kegiatannya menembus keluar pabrik, memperjuangkan isu-isu politik-ekonomi nasional, mengandalkan demokrasi dan tanggung jawab terhadap anggota, serta bergabung dengan organisasi-organisasi sektoral untuk memperjuangkan tuntutan dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, seraya menolak untuk membatasi perjuangan hanya di buruh dan masalah mereka saja (Scipes, 1992).

Di sisi lain, berbagai pengalaman serikat buruh di Afrika, Amerika Latin, negara-negara Asia, seperti Korea Selatan dan Thailand secara umum menunjukkan perjuangan yang masih tetap mengandalkan struktur serikat buruh tradisional dalam menghadapi tantangan akibat globalisasi produksi. Namun demikian, mereka memperbaharui strategi menyuarakan kepentingan buruh dengan memperkuat posisi politik dan memperluas basis dukungan. Cara-cara yang dilakukan misalnya dengan cara beraliansi dengan partai politik (di Afrika Selatan dan Amerika Latin), dan/atau beraliansi dengan kekuatan sosial lain, seperti dengan mahasiswa dan publik yang lebih luas di Korea Selatan, atau dengan pekerja kerah putih dan media seperti yang terjadi di Thailand (Southall, 1998; Antunes, 2001; Brown, 2001; Koo, 2001; Rodrigues, 2004)

Dalam konteks Indonesia, serikat buruh saat ini sedang mengalami proses pelemahan melalui mekanisme globalisasi produksi (restrukturisasi dan reorganisasi produksi global). Secara sistematis kekuatan serikat buruh sedang digerogoti melalui: a) lini produksi, dengan diterapkannya praktik-praktik organisasi produksi yang semakin terpecah-pecah, hubungan kerja yang fleksibel, dan penciptaan ciri-ciri baru angkatan kerja; b) lini kebijakan, dengan disahkannya paket UU Tenaga Kerja di tingkat nasional serta kebijakan otonomi daerah di tingkat regional dan lokal; dan c) lini jaringan pendukung,

melalui pengkaplingan dukungan oleh serikat-serikat buruh internasional.

Dari arah lain, isu konflik antar serikat, konflik horisontal antara SB dengan elemen masyarakat lain, dan konflik antara serikat buruh dengan LSM juga menjadi bagian dari proses pelemahan tersebut.

Selain hal-hal di atas, saat ini juga sedang terjadi pelemahan serikat buruh melalui mekanisme yang sangat halus yang dilakukan oleh negara, modal, dan elit serikat buruh sendiri dengan cara menempatkan serikat dalam posisi *status quo* dengan memberikan posisi tinggi kepada serikat dan menerapkan sistem birokrasi pemerintahan dalam struktur dan mekanisme hubungan antara negara dengan serikat buruh yang membuat elit serikat merasa dianggap sebagai mitra yang setara. Struktur birokratis yang diadopsi oleh serikat buruh telah menciptakan pejabat-pejabat serikat yang berperilaku dan berpenampilan bak pejabat pemerintah, dan sebagai akibatnya, semakin menggerogoti empati terhadap persoalan yang dihadapi anggota dan merenggangkan hubungan dengan anggotanya. Mekanisme hubungan antara negara dengan serikat dalam kerangka hubungan industrial diciptakan sedemikian rupa, sehingga serikat cenderung *responsive* dan menggeluti agenda dan kepentingan buruh sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah dan modal. Secara umum dapat disebutkan bahwa agenda dan prioritas kerja serikat tidak berkisar jauh dari upah minimum dan protes terhadap kebijakan perburuhan. Secara internal, konsolidasi organisasi disebut sebagai prioritas dengan cara yang sangat formal. Sebagaimana diceritakan oleh seorang pengurus serikat, pendekatan kepada anggota oleh pimpinan serikat menjadi agenda utama yang dilakukan dengan cara 'turba' melalui kunjungan ke basis-basis. Hasilnya bagi basis adalah merupakan kebanggaan karena dikunjungi oleh petinggi serikatnya. Pertanyaannya kemudian, *seefektif apakah rasa bangga tersebut bagi motivasi dan keterlibatan anggota dalam organisasi mereka?*

Pertanyaan tersebut menjadi penting dijawab karena para pengurus serikat di berbagai tingkat [12] mengakui bahwa di tengah iklim kebebasan berserikat, buruh kini justru enggan, takut, dan bahkan merasa tidak aman untuk menjadi anggota serikat buruh. Bagi serikat, kenyataan ini tentu merupakan sebuah ancaman besar karena ketidakpercayaan buruh terhadap serikatnya secara langsung telah menghilangkan kebutuhan terhadap kolektivitas, dan dengan demikian menolak prinsip utama serikat buruh. Keengganan dan ketakutan buruh menjadi anggota serikat merupakan bukti keras bagaimana modal telah berhasil menaklukkan serikat buruh. Situasi yang sebenarnya dihadapi

[12] Diskusi terbatas AKATIGA dengan serikat dan aktivis buruh di Bandung, November 2004.

buruh adalah memilih antara terus bekerja atau menjadi anggota serikat. Sebuah pilihan yang dengan jelas merupakan pelanggaran terhadap hak dasar buruh dan UU kebebasan berserikat.

Serangan terhadap eksistensi serikat yang tidak hanya datang dari luar tetapi juga dari dalam serikat sendiri, segera menunjukkan satu tantangan besar yakni bergandanya 'musuh' yang harus dihadapi oleh serikat. Kini majikan atau pengusaha bukan lagi satu-satunya musuh serikat, akan tetapi masih terdapat serikat buruh yang lain, elemen masyarakat yang lain, pemerintah lokal, LSM, dan bahkan dari rekan buruh sendiri, sebagai pihak-pihak yang juga harus dihadapi.

Tantangan besar lainnya yang harus dihadapi adalah bagaimana menyikapi: a) makin tingginya keragaman buruh dari sisi status hubungan kerja, latar belakang, dan kebutuhan; b) makin terdesentralisasinya proses produksi, yang membawa implikasi makin kompleksnya persoalan dan kepentingan buruh; c) makin kecilnya kehendak buruh untuk berorganisasi; dan d) makin kaburnya batasan kategori 'buruh'. Tentang makin kaburnya batasan 'buruh', Ratna Saptari mengusulkan sebagai berikut: "Batasan buruh yang kabur dan senantiasa berubah menyebabkan kita harus bisa melihat apa konsekuensi pergeseran-pergeseran tersebut untuk posisi, kesadaran, dan kelangsungan hidup mereka. Apabila kita hanya terpaku pada eksistensi buruh sebagai buruh pabrik, tidak mungkin kita memahami perubahan yang terjadi dalam situasi buruh maupun dalam strategi modal untuk merekrut buruh yang masuk dalam kategori yang berbeda-beda" (2003).

Di tengah berbagai tantangan 'baru' semacam itu, belum banyak terobosan baru yang dilakukan oleh serikat buruh di Indonesia. Secara umum serikat masih terpaku pada format baku yang diciptakan oleh ILO untuk memperjuangkan hak buruh dan digunakan oleh pemerintah sebagai satu-satunya format dimana buruh dapat menyalurkan suaranya (Saptari, 2003).

3. Langkah-langkah apa yang masih perlu dilakukan?

Tantangan yang menghadang dan langkah-langkah yang telah diambil oleh serikat buruh dalam mengadapi tantangan sebagaimana yang digambarkan di atas jelas masih menyisakan sederetan pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh serikat. Ketika reorganisasi dan restrukturisasi produksi telah mampu mempertinggi kompleksitas karakter dan heterogenitas buruh, inilah tanda bahwa modal telah mampu menyerang serikat buruh tepat di jantungnya. Serikat tidak dapat lagi bertahan pada cara dan orientasi yang tradisional dalam mengorganisasi buruh karena konsep buruh yang semakin kabur. Kini saatnya serikat buruh perlu secara serius melakukan

usaha redefinisi konsep 'buruh' untuk mampu memahami perubahan yang dialami oleh kelompok yang diwakilinya.

Serikat buruh juga perlu memetakan posisinya di tengah berbagai tantangan tersebut dan membuat prioritas dan strategi untuk menghadapinya. Serikat juga berkepentingan untuk memetakan kawan dan lawan yang akan selalu bersinggungan ketika menjalankan perannya. Sambil melakukan *repositioning,* serikat buruh dapat mulai memperluas arena gerak dan mulai melepaskan diri dari keterjebakan menangani isu-isu klasik dengan cara-cara tradisional yang tak akan membawa buruh maupun serikat melangkah lebih maju.

Pekerjaan rumah lainnya adalah memikirkan upaya-upaya pengorganisasian baru agar lebih efektif dan mampu mengurangi ancaman pelemahan serikat. Untuk itu, dalam menyusun konsep pengorganisasian perlu diperhatikan aspek-aspek kultural, sosial, dan politik dalam kehidupan dan perilaku anggota dan/atau buruh calon anggota untuk mampu memahami karakter mereka, sehingga dapat dibuat strategi pendekatan dan persuasi yang lebih efektif. Memahami buruh secara lebih utuh dan mempertimbangkan multi-identitas yang mereka sandang baik di dalam maupun di luar pabrik, serta tidak sekedar melihat buruh sebagai massa tak berkarakter, akan dapat membantu serikat untuk tidak terpaku pada pola pengorganisasian dan kegiatan yang baku seperti yang didiktekan oleh pemerintah dan modal.

Apapun yang akan menjadi pilihan, baik bergerak dalam koridor serikat buruh maupun melangkah keluar ke arah gerakan sosial, prinsip-prinsip gerakan serikat buruh baru yang diusulkan Peter Waterman patut dipikirkan untuk mengefektifkan fungsi serikat buruh di tengah situasi yang berubah ini:

1. Perjuangan di arena kerja upahan tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan upah dan kondisi kerja tetapi juga meluas ke arena meningkatkan kontrol buruh dan serikat terhadap proses kerja, investasi, teknologi baru, relokasi, subkontrak, serta kebijakan pendidikan dan pelatihan. Strategi dan perjuangan di arena tersebut harus dilakukan melalui dialog dan aksi bersama dengan komuniti dan berbagai kepentingan yang terkena pengaruh, guna menghindari konflik dan secara positif meningkatkan dukungan terhadap perjuangan tersebut.
2. Mengartikulasikan perjuangan dan kepentingan buruh bersama dengan gerakan kelas pekerja yang belum atau tidak dapat diorganisasikan (usaha mikro, pekerja rumahan, petani, profesional, dan ibu rumah tangga).
3. Mengartikulasikan perjuangan dan kepentingan dengan gerakan-gerakan demokratik dan *pluralistic* yang non atau multi kelas (perempuan, warga, lingkungan, hak asasi manusia, dan perdamaian)

dalam usaha menciptakan masyarakat madani yang kuat dan beragam.

4. Mengartikulasikan perjuangan dan kepentingan bersama kelompok lain dalam posisi yang otonom, setara, dan demokratis tanpa melakukan klaim atau tersubordinasi.
5. Mengangkat isu sosial baru dalam masyarakat yang muncul berkaitan dengan isu yang dihadapi buruh maupun serikat.
6. Mendukung demokrasi di tempat kerja (*shopfloor)* dan mendorong hubungan horisontal langsung di antara buruh, serta antara buruh dengan kekuatan sosial demokratik (Waterman, 1999:260-261).

Semua itu bukan kerja aksi langsung yang bersifat reaktif sebagaimana biasanya dan secara tradisional dilakukan oleh serikat, melainkan kerja pemikiran dan penyusunan strategi yang mendahului aksi. Saatnya bagian riset dan pengembangan di serikat dihidupkan sebagai alat vital organisasi, bukan sekedar sampingan atau tempelan dalam diagram struktur organisasi.

Sebagai upaya untuk membantu berjalannya proses tersebut, AKATIGA telah mengagendakan dua penelitian untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam mencari terobosan untuk penguatan pengorganisasian buruh. Yang *pertama* adalah penelitian dengan fokus pada perubahan strategi dan karakter organisasi kerja serta implikasinya terhadap strategi pengorganisasian buruh. Analisis yang dilakukan nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan strategi pengorganisasian yang *responsive* terhadap perubahan yang terjadi dalam proses dan organisasi produksi. Penelitian yang *kedua* bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif model pengorganisasian yang lebih dapat merespons secara operasional berbagai persoalan baru yang muncul dalam masalah perburuhan dan pengorganisasian buruh. Studi ini lebih terfokus pada dinamika pengorganisasian dan kehidupan buruh di luar pabrik.

Hasil-hasil penelitian tersebut diarahkan untuk menyumbangkan pemikiran dan pengembangan alternatif strategi pengorganisasian dan kerangka pemikiran yang baru untuk mendukung perbaikan posisi kaum buruh di Indonesia (AKATIGA, 2004).

DAFTAR PUSTAKA

AKATIGA. 2004. *Rencana Strategis 2004-2006.*

Antunes, Ricardo. 2001. "Global Economic Restructuring and the world of labor in Brazil: The challenge to trade union and social movement". [Online]. <http://www.iisg.nl>

Bappenas. 2004. Kebijakan Pasar Kerja untuk Memperluas Kesempatan Kerja. Ringkasan Eksekutif.

Beaud, Michel. 2001. *The History of Capitalism 15002000*. New York: Monthly Review Press.

Boomgard, Peter. 2001. Contextualising 'Labour' in Modern Indonesian Labour History. Makalah dalam workshop internasional Reconstructing the Historical Tradition of 20th Indonesian Labour, Bali, 4-6 Desember.

Brown, Andrew. 2001. "After the Kader Fire: Labour Organising for Health and Safety Standards in Thailand", dalam Hutchison & Brown (ed.). *Organising Labour in Globalising Asia*. London & New York: Routledge.

Dicken, Peter. 1987. *Global Shift: Industrial Change in a Turbulent World.* London: Harper and Row.

Frenkel, Stephen. 1993. *Organized Labour in the Asia-Pacific Region*. Ithaca: ILR Press.

Frobel, Heinrich dan Kreye. 2000. "The New International Division of Labor in the World Economy" dalam Timmons Roberts & Amy Hite (ed). *From Modernization to Globalization:Perspectives on Development and Social Change,* Oxford: Blackwell Publishers.

Hutchison, Jane dan Andrew Brown. 2001. "Organising Labour in Contemporary Asia", dalam Hutchison & Brown (ed.). *Organising Labour in Globalising Asia*. London & New York: Routledge.

ILO. 2004. Dimensi Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Makro dan Sektoral, Seri 1 dari Indonesia Terbebas dari Kemiskinan. Jakarta: ILO.

Komunitas Buruh Cisadane. 2004. Dampak dari Sistem Ketenagakerjaan yang Fleksibel bagi Buruh di Wilayah Tangerang. Laporan Investigasi.

Koo, Hagen. 2001. *Korean Workers: The Cultural and Politics of Class Formation.* Ithaca and London: Cornell University Press.

Lembur. 2004. 2 Juni

LIPS-Yawas. 2003. Notulensi pertemuan.

Mather, Celia. 1987. "Rather than make trouble, it's better just to leave: Behind the lack of industrial strife in the Tangerang Region in West Java", dalam H.Afshar (ed.). *Women, Work and Ideology in the Third World.* Tavistock Publication.

Mizuno, Kosuke. 2000. Pola Organisasi Buruh di Tingkat Pabrik dam Hubungan Industrial di Indonesia. Makalah tak diterbitkan.

Murray, Fergus. 1989. "The Decentralization of Production The Decline of the Mass-Collective Worker?", dalam Pahl, R.E. (ed.). *On Work: Historical, Comparative and Theoretical Approaches.* London: Basil Blackwell.

Munck, Ronaldo.1999. "Labour Dilemmas and Labour Futures", dalam Munck & Waterman (eds.). *Labour Worldwide in the Era of Globalization*. London: Macmillan Press.

Rasiah, Rajah. 2001. "Labour and Work Organisation in Malaysia's Proton", dalam Hutchison & Brown (ed.). *Organising Labour in Globalising Asia.* London & New York: Routledge.

Rodrigues, Iram Jacome. 2004. "Crisis of Unionism in Latin America? Aspects of the Brazilian Experience". [Online]. <http://www.iisg.nl>

Saptari, Ratna. 2003. Beberapa Pokok Pikiran tentang Rencana Penelitian Perburuhan AKATIGA di Masa yang Akan Datang. Bahan diskusi internal.

Sargeson, Sally. 2001. "Assembling Class in a Chinese Joint Venture Factory", dalam Hutchison & Brown (eds.). *Organising Labour in Globalising Asia.* London & New York: Routledge.

Scipes, Kim. 1992. "Understanding the New Labor Movements in the "Third World": The Emergence of Social Movement Unionism". *Critical Sociologi*. 19 (2): 81-101.

Southall, Roger (ed.). 1989. *Labour and Unions in Asia and Africa: Contemporary Issues.* London: Macmillan Press.

Tavip, Saepul. tt. Bentuk Eksploitasi Pekerja itu bernama *Outsourcing.* Makalah tak diterbitkan.

Tjandraningsih, Indrasari. 2004. "Telaah Kritis terhadap Kebijakan Perburuhan dan Pasar Kerja Terkini di Indonesia". *Jurnal Analisis Sosial* 9 (2): 75-91.

Waterman, Peter. 1999. "The New Social Unionism: A New Union Model for a New World Order", dalam Waterman & Munck (eds.). *Labour Worldwide in the Era of Globalization: Alternative Union Models in the New World Order*. London: Macmillan Press.

Wood, Stephen dan John Kelly. 1989. "Repsonsible Autonomy and Management Strategy", dalam Pahl, R.E. (ed.). *On Work: Historical, Comparative and Theoretical Approaches.* London: Basil Blackwell.

DAPATKAH USAHA KECIL MENJADI BASIS PERLUASAN KESEMPATAN KERJA YANG LAYAK?

Resmi Setia M.S [1]

Abstract

This literature study is done in the frame of globally viewing the roles of small entrepreneurships, as well as viewing their position in the efforts of extending job opportunities. Small enterprises have been proven potential in absorbing labors and giving better work conditions, as well as giving appropriate income and social warranties.

The extension of job opportunities have become important, as it can provide the alternatives of fields for the labors terminated from the formal sectors, as well as for the blue workers being unable to 'dive' into the formal sectors owing to their insufficient qualifications.

Pendahuluan

Studi literatur ini dilakukan dalam rangka melihat peran usaha kecil secara makro dan melihat kedudukannya dalam upaya perluasan kesempatan kerja. Berbagai strategi perluasan kesempatan kerja telah coba ditawarkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti USAID (US Agency for International Development) [2], GIAT (Growth Through Invesment and Trade), ILO (International Labour Organization), dsb, maupun lembaga pemerintah melalui Bappenas, Depperindag, dan Kementerian Koperasi dan UKM. [3] Strategi yang

1 Peneliti Yayasan AKATIGA.

2 Lihat Dokumen Strategi Perluasan Kesempatan Kerja yang dipersiapkan untuk USAID.

3 Menurut UU RI No. 9/1995 tentang usaha kecil (UK). Kriteria UK dibuat berdasarkan besarnya modal yang ditanam yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dengan penjualan hasil tahunan paling banyak Rp. 1 milyar. BPS membuat kriteria UK berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap, yaitu 5-19 orang.

dikembangkan oleh lembaga-lembaga tersebut terbagi ke dalam dua pendekatan utama, yaitu perluasan kesempatan kerja melalui fleksibilisasi pasar kerja dan penguatan lembaga-lembaga pasar kerja (ILO, 2004). Target pendekatan pertama lebih ditekankan pada sektor modern/formal, sedangkan yang berikutnya pada penguatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) agar bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

Jika dilihat secara seksama, kedua pendekatan tersebut tidak difokuskan langsung pada upaya pengurangan kemiskinan, tetapi lebih melihat kemungkinannya sebagai kekuatan utama dalam menciptakan lapangan kerja, baik untuk kelompok miskin maupun kelompok masyarakat lainnya. Perluasan kesempatan kerja melalui sektor modern/formal memang tidak secara khusus melihat kelompok miskin sebagai sasaran utama, melainkan lebih melihat kepada kelompok masyarakat yang memiliki kualifikasi tertentu, baik tingkat pendidikan maupun keterampilan. Sementara itu, meskipun target utama perluasan kesempatan kerja melalui UK adalah kelompok miskin, tetapi upaya mengurangi kemiskinan hanya menjadi efek samping. Selain berbagai pendekatan tersebut, terdapat upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka mengurangi kemiskinan. Strategi yang dikembangkan agak berbeda, yaitu lebih menekankan pada pemberdayaan kelompok miskin. Strategi ini merespons faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, yaitu masalah struktural yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap sumber-sumber daya seperti ekonomi, politik, dsb.[4] Pendekatan terakhir ini lebih difokuskan kepada para pelaku usaha mikro/kecil dan struktur yang menghambat mereka untuk melakukan akumulasi dalam pengertian yang lebih luas.

Di mana posisi AKATIGA dalam berbagai pendekatan tersebut? Menanggapi tingginya angka pengangguran serta kondisi kerja dan jaminan sosial yang rendah, maka studi literatur ini akan difokuskan pada penguatan usaha kecil (UK) yang terbukti potensial menyerap tenaga kerja, mampu memberikan kondisi kerja yang baik, serta memberikan pendapatan dan jaminan sosial yang layak. Konsep layak yang dimaksud di sini mengacu kepada terbukanya kemungkinan para pengusaha dan pekerja di sektor UK untuk mengakumulasi uang, pengetahuan, jaringan, dan reproduksi usaha.[5] Cara melihat konsep kelayakan di sini berbeda dengan yang biasa dipergunakan di usaha modern/formal, yang biasanya mengacu pada tingkat upah minimum, kebutuhan hidup layak, dsb.

4 Lihat Notulen Workshop SDC, 10-11 Januari 2002 dengan topik "Current Trends in Pro-poor Small and Micro Enterprises Development", Conference Centre Schloss Munchenwiler/Murten.

5 Hasil diskusi dengan Isono Sadoko, 26 Juli 2004.

Dalam hal ini kita tidak hanya melihat tingkat upah yang diberikan, tetapi juga mengidentifikasi jaminan sosial lain seperti bantuan sekolah, pinjaman untuk biaya pengobatan, dsb. [6] Selain itu, sumbangan dari sektor-sektor usaha lain juga perlu diperhitungkan, contohnya bagi buruh yang melakukan diversifikasi usaha/pekerjaan karena curahan waktu bekerja di usaha kecil tidak sepanjang dan seketat di pabrik modern/formal, sehingga memungkinkan buruhnya untuk memiliki lebih dari satu pekerjaan.

Pada akhirnya, studi literatur ini diharapkan bisa menunjukkan contoh-contoh usaha kecil yang bisa memenuhi kriteria di atas dan mampu mengatasi kendala-kendala usaha baik internal maupun eksternal yang sering menjadi penghambat berkembangnya UK.

Gambaran Umum Ketenagakerjaan di Indonesia

Angka pengangguran terbuka di Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 2003 jumlah pengangguran sudah melebihi 10 juta orang atau hampir mencapai 10% dari keseluruhan angkatan kerja yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan timpangnya jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Angka tersebut akan terus mengalami peningkatan seiring dengan munculnya angkatan kerja baru. Tabel di bawah ini akan memperjelas gambaran lapangan kerja, angkatan kerja, dan pengangguran yang ada di Indonesia pasca krisis.

Tabel 1
Lapangan Kerja, Angkatan Kerja, dan Pengangguran 1999-2003

Tahun	Tambahan Lapangan Kerja (juta)	Angkatan Kerja Baru (juta)	Pengangguran Terbuka	
			Juta	%
1999	1,14	2,11	6,03	6,26
2000	1,14	0,94	5,81	6,07
2001	0,97	3,16	8	8,10
2002	0,84	1,97	9,13	9,06
2003	1,10	2,10	10,13	9,85

Sumber: Sakernas BPS (2000-2002); Bappenas (2003) dikutip oleh Bisnis Indonesia, 30 September 2003.

6 Lihat Safaria, dkk (2003) dan Benda-Beckmann (2000).

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata tambahan lapangan kerja per tahun selama periode 1999-2003 hanya mencapai sekitar 1 juta orang per tahun. Sementara itu, angkatan kerja baru bertambah sekitar 2 juta orang per tahunnya, belum termasuk korban PHK dan sisa angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berupaya untuk memperluas kesempatan kerja melalui berbagai sektor dan skala usaha. Seperti yang telah disebutkan di atas, tulisan ini akan terfokus pada perluasan kesempatan kerja melalui UK. Argumen tersebut akan diperkuat dengan sajian data-data statistik mengenai kemampuan penyerapan tenaga kerja serta sumbangan PDB UK dibandingkan dengan skala usaha lainnya.

Kondisi Investasi Terkini

Kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis terus mengalami perbaikan. Ini tampak dari meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dari 3,5% pada tahun 2001, 3,7% tahun 2002, dan 3,99% tahun 2003 (ISBRC & PUPUK, 2003; Bisnis Indonesia, 30 September 2003). Namun kenaikan tersebut lebih banyak dipicu oleh tingginya konsumsi domestik dan pemerintah. Sementara komponen lainnya seperti investasi dan ekspor cenderung mengalami penurunan. Dengan demikian, kenaikan angka pertumbuhan ekonomi tidak bisa langsung dilihat sebagai indikator membaiknya situasi pasar kerja dan iklim usaha di Indonesia. Secara umum total investasi berdasarkan skala usaha dari tahun 2000-2003 mengalami penurunan cukup tajam dari 14,18% pada tahun 2000 hingga 1,36% tahun 2003. Titik investasi terburuk terjadi tahun 2002 yang hanya mencapai 0,21%.[7] Hal ini diperkuat dengan data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengenai nilai investasi PMDN dan PMA yang tertera di Tabel 2.

[7] Sumber: Berita Resmi Statistik No. 21/VII/24 Maret 2004 yang disusun melalui kerjasama BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 2
Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal
1998-2002

Tahun	PMDN			PMA		
	Nilai (Rp. Miliar)	%	Jml Proyek	Nilai (juta US$)	%	Jml Proyek
1998	57.938,3	-51,7	320	13.585,5	-59,8	1.034
1999	53.120,2	-8,3	228	10.892,2	-19,8	1174
2000	92.410,4	74,0	355	15.426,2	41,6	1.524
2001	58.816,0	-36,4	264	15.055,9	-2,4	1.---
2002	25.262,3	-57,0	181	9.744,1	-35,3	1.135

Sumber: Litbang Kompas (data diolah dari BKPM 2003) dikutip oleh ISRBC & PUPUK, 2003:116

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi investasi pada tahun 2002 hampir sama buruknya dengan situasi pada masa krisis ekonomi 1998. Bahkan investasi PMDN lebih buruk daripada masa krisis. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak menunjukkan keadaan sektor riil pada umumnya. Menurunnya investasi di sektor riil (*Foreign Direct Investment*) akan berpengaruh terhadap pasar kerja di Indonesia, terutama jika penurunan terjadi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja banyak (*labor intensive industries*). Lapangan kerja akan mengalami pengurangan sementara jumlah angkatan kerja semakin menumpuk.

Penurunan investasi yang cukup menyolok terjadi di sektor manufaktur sub sektor TPT (Tekstil dan Produk Tekstil). Berdasarkan data Bank Indonesia, ekspor tekstil yang pada Januari 2003 mencapai 262 juta dolar, bulan Agustus 2003 turun drastis menjadi 10,1 juta dollar. Penurunan ini menyebabkan PHK besar-besaran. Tahun 2002 jumlah PHK di sektor ini mencapai 19 ribu buruh dan tahun-tahun berikutnya terus meningkat terutama pasca penghapusan kuota awal tahun 2005. Jumlah kuota TPT Indonesia tahun 2002 mencapai 47%. Diperkirakan hilangnya jatah kuota satu persen akan mengakibatkan PHK 10 ribu buruh atau sekitar 470 ribu buruh yang terancam PHK (Dinamika, 2003). Selain itu, dari 1,2 juta tenaga kerja yang terserap di sektor TPT, sebagian besar berstatus kerja tidak tetap (kontrak). Hal ini merupakan strategi yang dianggap efektif untuk menjawab ketidakstabilan permintaan dan menekan biaya produksi. Apalagi UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 melegalkan mekanisme fleksibilisasi tersebut termasuk sistem *outsourcing*.

Sektor Modern Formal vs Kondisi Perburuhan

Hasil analisis beberapa pihak menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya daya tarik berinvestasi di Indonesia, yaitu persoalan moneter/finansial (tingginya suku bunga, kebijakan pajak), maraknya pungutan liar dan birokrasi yang berbelit-belit sebagai dampak otonomi daerah, ketidakpastian hukum dan keamanan, dan masalah perburuhan (Aaron Carl, dkk, 2004; Wick, 2004; Sudrajat, 2004). Melalui *pro-jobs growth strategy*, lembaga-lembaga donor seperti GIAT dan USAID coba menawarkan solusi dengan melakukan reformasi tata kepemerintahan, menstabilkan makro ekonomi, merevisi kebijakan non tarif yang membatasi perdagangan internasional, kebijakan investasi dan perdagangan domestik, dan kebijakan perburuhan dengan membuka praktik fleksibilisasi seluas-luasnya dan meninjau kembali masalah kenaikan upah minimum dan uang pesangon. Isu yang terakhir ini sangat didukung oleh Bappenas (2003) yang menganggap UU ketenagakerjaan No. 13/2003 terlalu membatasi fleksibilisasi, dsb, sehingga menghambat masuknya investasi dan pada akhirnya mengurangi upaya perluasan kesempatan kerja. *Pro-jobs growth strategy* juga menekankan bahwa perluasan kesempatan kerja melalui sektor modern/formal (usaha besar) terkait dengan peningkatan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Industri modern formal dianggap mampu memberikan upah, kondisi kerja yang lebih baik, dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor informal (UK). *Apakah memang benar demikian?*

Dari sisi perburuhan, strategi yang ditawarkan tersebut sangat merugikan kelompok buruh dan mengancam kelangsungan sumber penghidupannya. **Argumen pertama**, strategi fleksibilitas produksi yang dipilih sebagai salah satu strategi penyerapan tenaga kerja memiliki berbagai kelemahan seperti mendorong terjadinya *labour turn over* yang tinggi. Semakin lama, masa kerja buruh semakin singkat.[8] Hal ini juga tidak mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi karena jumlah buruh keluar dan masuk sama, dengan hanya lebih menekan biaya produksi agar upah yang dikeluarkan tetap rendah.[9] **Kedua**, anggapan bahwa tingkat produktivitas dan output di sektor modern lebih tinggi daripada industri kecil juga masih perlu diperjelas.

[8] Hasil penelitian Akatiga (1999) memperlihatkan bahwa usia produktif buruh terutama buruh perempuan, menjadi semakin pendek, yaitu berkisar antara 17-25 thn.

[9] Suplai buruh baru secara terus menerus menjamin tingkat upah yang rendah, sehingga buruh-buruh yang sudah cukup lama bekerja akan di-PHK karena dianggap tidak produktif dan digantikan oleh buruh baru (tidak berpengalaman) yang bisa dibayar lebih murah.

Meskipun tingkat produktivitas di industri besar lebih besar tetapi biaya produksi yang dikeluarkan (meliputi upah, tekno-logi) juga jauh lebih besar. Jadi nilai tambah/output yang dihasilkan juga perlu diperhitungkan kembali karena besarannya relatif terhadap biaya produksi. **Ketiga**, pilihan perluasan kesempatan kerja melalui sektor modern/formal mensyaratkan buruh yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi (minimal SMA). Semen-tara itu, banyak tenaga kerja di Indo-nesia yang tingkat pendidikannya masih rendah sehingga tidak bisa mengakses kesempatan kerja yang ada. Hal ini juga semakin membatasi peluang kelompok miskin, terutama yang berpendidikan rendah, untuk bekerja di sektor formal. Dengan demikian, tujuan mengurangi kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja di sektor formal/modern tidak sepenuhnya bisa menjangkau kelompok-kelompok miskin. Hal penting lainnya adalah kemampuan penyerapan tenaga kerja di sektor formal sangat terbatas sementara jumlah pengangguran di Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, sektor formal tidak bisa dijadikan satu-satunya andalan upaya perluasan kesempatan kerja.

Dalam *World Summit for Social Development and Millenium Development Goals* yang ditunjukkan melalui laporan yang disusun oleh *The ACC Task Force on Full Employment and Sustainable Livelihoods,* tampak bahwa sektor formal/modern memang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, tetapi tidak memberikan kondisi kerja yang baik dan menimbulkan diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki.[10] Forum tersebut juga menekankan pentingnya sumber penghidupan yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, dalam rangka membuka kesempatan kerja bagi kelompok miskin, maka pendekatan tersebut dianggap tidak *pro-poor employment*. Oleh karena itu, upaya perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha kecil bisa menjadi salah satu jawabannya. Hal ini disebabkan, tidak adanya kriteria khusus bagi para pekerjanya dan UK terbukti berhasil menjadi sandaran kegiatan ekonomi di masa-masa krisis.

Perluasan kesempatan kerja di sektor usaha kecil menjadi penting karena bisa menyediakan pilihan lapangan kerja bagi buruh yang terlempar dari sektor formal dan buruh yang tidak bisa masuk ke sektor formal karena tidak memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. Sektor UK juga terbukti memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi krisis, terutama sektor UK yang bergerak di pasar yang tak terjangkau industri besar, tidak tergantung *input* impor dan kredit dari sektor perbankan, serta lebih melayani kelompok

[10] Hasil penelitian AKATIGA (lihat Verdi Yusuf, 1991 dan Indrasari Tjandraningsih, 1991) juga menunjukkan kondisi kerja yang dialami buruh yang bekerja di sektor formal untuk ekspor sangat buruk.

pembeli berpenghasilan rendah (elastisitas pendapatan negatif). Saat krisis 1998 kontribusi UK terhadap pembentukan PDB naik 1,55% menjadi 42,00%.

Pengembangan UK tidak dapat dilakukan secara seragam, karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam kaitannya dengan Usaha Besar (UB), maka UK dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu:

a. UK yang bersaing (kompetitif) dengan UB karena barang yang dihasilkan serupa (sama).
b. UK yang komplementer dengan UB karena memiliki kaitan vertikal atau horisontal di luar pasar dengan UB.
c. UK yang memiliki spesialisasi dalam menghasilkan barang-barang untuk segmen pasar khusus yang berada di luar jangkauan industri besar (Hill, 1995:4 dikutip oleh Thee Kian Wie, 1996:5-6).

Kategori UK yang akan dijadikan sasaran perhatian di studi literatur ini adalah UK yang mandiri (c) dan/atau memiliki kaitan dengan UB (b). Apabila UB mengalami goncangan, maka UK jenis ini masih tetap mampu bertahan karena masih memiliki segmen pasar tersendiri yang tidak terjangkau UB dan memiliki spesialiasi produk sendiri.

Sumbangan UK dalam Ekonomi Makro Indonesia

Data menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan tenaga kerja yang terserap di UK tahun 1997 sekitar 57,5 juta (lebih dari 80% angkatan kerja di Indonesia). Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga mencapai 65,3 juta orang pada tahun 2001 atau tumbuh rata-rata 3,22% per tahun. Data terkini memperlihatkan bahwa jumlah UK pada tahun 2004 diperkirakan mencapai 41,36 juta unit atau sekitar 99,99% jumlah unit usaha di Indonesia. Jumlah serapan tenaga kerjanya diperkirakan mencapai 74,6 juta orang atau sebesar 99,45% dari penyerapan tenaga kerja nasional.

Data tersebut membuktikan kemampuan UK dalam menyerap tenaga kerja memang cukup tinggi. Angka penyerapan tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997/1998, UK ternyata mampu membuktikan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yang jumlahnya membengkak akibat kolapsnya industri-industri besar. Sebagai ilustrasi, di bawah ini diperlihatkan tabel dan gambar yang memperli-hatkan kemampuan usaha kecil dari sisi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2000-2001 dibandingkan dengan usaha menengah dan besar.

Tabel 3
Penyerapan Tenaga Kerja UK, UM, UB Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2000-2001 (orang)

No	Sektor	2000			2001		
		UK	UM	UB	UK	UM	UB
1	Pertanian, peternakan, kehutanan, & perikanan	31,795,114	730,752	38,127	34,079,337	754,649	39,359
2	Perdagangan, hotel, & restoran	15,887,344	1,427,618	27,196	16,682,274	1,499,050	28,556
3	Industri pengolahan	8,154,656	3,553,767	234,876	7,592,509	3,771,252	249,250
4	Jasa-jasa	3,658,744	992,013	36,582	3,704,193	1,004,336	37,037
5	Pengangkutan & komunikasi	3,395,347	241,284	11,570	2,560,107	258,881	12,366
6	Bangunan	253,532	229,756	4,993	256,651	232,583	5,055
7	Pertambangan & penggalian	238,818	101,084	10,153	249,132	104,450	10,591
8	Keuangan, persewaan, & jasa perusahaan	111,614	261,834	12,802	114,898	269,538	13,178
9	Listrik, gas, & air bersih	6,721	92,290	10,114	7,193	98,760	10,823
	Jumlah	**63,501,890**	**7,630,398**	**386,413**	**65,246,294**	**7,993,499**	**406,215**

Sumber: Menegkop & UKM (2001) dikutip oleh ISRBC dan PUPUK (2003)

Dari sembilan sektor ekonomi tersebut terdapat tiga sektor utama yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar. Ketiga sektor tersebut adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor industri pengolahan.

Jumlah Unit UK dan Sumbangannya terhadap PDB

Berikut ini akan diperlihatkan mengenai perkembangan jumlah unit UK selama kurun waktu 1997-2001 (pra hingga pasca krisis). Selain itu juga dijelaskan mengenai sumbangan PDB yang diberikan UK. Selama ini UK dianggap tidak mampu memberikan sumbangan PDB yang signifikan, padahal data di bawah ini menun-

Tabel 4
Jumlah Unit UK Menurut Sektor Ekonomi
Tahun 1997-2001

Sektor	1997	1998	1999	2000	2001
Pertanian, peternakan, kehutanan, & perikanan	22,511,588	23,097,871	23,174,579	23,516,865	23,756,081
Pertambangan & penggalian	204,413	137,284	132,617	134,748	140,567
Industri pengolahan	2,817,379	2,104,856	2,526,163	2,713,857	2,874,383
Listrik, gas, & air bersih	13,434	7,319	4,492	4,835	5,174
Bangunan	199,253	122,945	102,332	110,183	111,539
Perdagangan, hotel, & restoran	9,986,510	8,325,351	8,688,215	9,212,900	9,673,872
Pengangkutan & komunikasi	1,852,401	1,507,629	1,707,762	1,867,288	1,995,727
Keuangan, persewaan, & jasa perusahaan	71,334	18,519	24,143	25,423	26,171
Jasa-jasa	2,048,349	1,439,915	1,499,206	1,535,251	1,554,322
Jumlah Unit UK	**39,704,661**	**36,761,689**	**37,859,509**	**39,121,350**	**40,137,836**
Jumlah Unit UM	60,449	51,889	52,214	55,437	57,743
Jumlah Unit UB	2,097	1,831	1,885	1,946	2,095

Sumber: Menegkop & UKM (2001) dikutip oleh ISRBC dan PUPUK (2003)

jukkan situasi sebaliknya.

Untuk memudahkan gambaran mengenai jumlah unit UK yang telah disajikan dalam tabel 4 maka di bawah ini akan diuraikan persentase jumlah unit UK dari 1997-2001.

Gambar 1
Persentase Jumlah Unit UK Menurut Sektor Tahun 1997

Dari gambar 1 terlihat bahwa sektor-sektor seperti sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor industri pengolahan menjadi tiga sektor yang memiliki jumlah unit UK terbesar dibandingkan sektor UK lainnya. Data tersebut diperkuat oleh besarnya penyerapan tenaga kerja di ketiga sektor tersebut.

Gambar 2
Persentase Jumlah Unit UK Menurut Sektor Tahun 1998

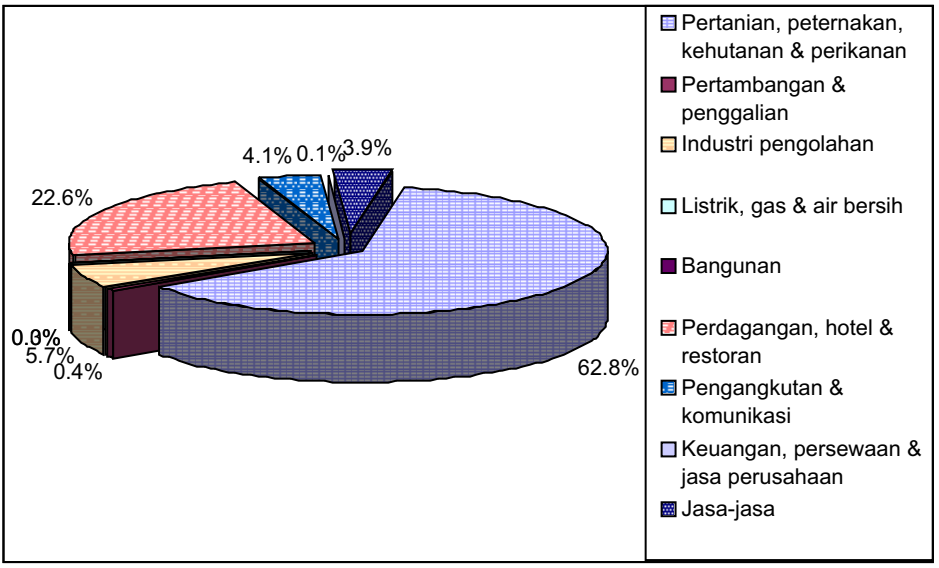

Saat krisis jumlah tenaga kerja yang terserap ke sektor pertanian mengalami peningkatan dari 22.511.588 menjadi 23.097.871. Sementara itu, tenaga kerja sektor industri pengolahan dan perdagangan, hotel, dan restoran mengalami penurunan. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah unit UK dan tenaga kerja yang terserap terus mengalami peningkatan, terutama di ketiga sektor unggulan tadi.

Gambar 3
Persentase Jumlah Unit UK Menurut Sektor Tahun 1999

Gambar 3 menunjukkan bahwa situasi UK pasca krisis relatif stabil dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang sempat mengalami penurunan saat krisis di tahun 1999

Gambar 4
Persentase Jumlah Unit UK Menurut Sektor Tahun 2000

mulai menunjukkan peningkatan.

Pada tahun 2000, sektor pertanian mengalami penurunan 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi kedua sektor unggulan lainnya mengalami peningkatan. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran meningkat sebesar 0,6%, sementara sektor industri pengolahan meningkat 0,2%.

Gambar 5
Persentase Jumlah Unit UK Menurut Sektor Tahun 2001

Mengacu pada kondisi UK di tiga sektor unggulan sebelum dan setelah krisis yang relatif stabil dan terus mengalami peningkatan, maka stimulan investasi sebaiknya didorong ke sektor-sektor tersebut. Hal ini berkaitan dengan minimnya penyerapan investasi di UK dibandingkan dengan UB dan UM, padahal penciptaan nilai tambah UK terus mengalami peningkatan dari 39,7% pada tahun 2000 menjadi 41,1% pada tahun 2003. Kondisi ini bertolak belakang dengan penciptaan nilai tambah di UB yang terus mengalami penurunan dari 45,5% tahun 2000 menjadi 43,3% pada tahun 2003. Sementara itu, peranan UM relatif stabil berkisar pada 15% selama periode tersebut.

Tabel 5
Rata-rata Penyerapan Investasi Tahun 2000-2003

Skala Usaha	Investasi (Miliar Rp)	Investasi (%)	Unit Usaha	Investasi per unit (juta Rp)
UK	58,884.00	19%	40,138,823.00	1,5
UM	73,191.00	23%	56,709.00	1,290.60
UB	185,043.00	58%	2,024.00	91,424.20
Total	**317,118.00**		**40,197,556.00**	

Sumber: Berita Resmi Statistik No 21/VII/24 Maret 2004

Tabel 5 memperlihatkan investasi yang terserap di masing-masing skala usaha selama 2000-2003. Terlihat dengan jelas bahwa investasi yang terserap di UK sangat kecil dibandingkan UB dan UM dan berbanding terbalik dengan jumlah unit usahanya.

Di bawah ini diuraikan mengenai sumbangan PDB yang diberikan oleh UK, UM, dan UB. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sumbangan PDB melalui UK kompetitif dengan sumbangan yang diberikan oleh UB dan mengalahkan sumbangan dari UM. Hal ini seharusnya bisa menjadi pertanda yang baik bagi perkembangan UK di masa mendatang.

Tabel 6
Rata-rata Struktur PDB UK, UM dan UB
Tahun 2000-2003

Sektor	Rata-rata 2000-2003 (%)		
	Kecil	Menengah	Besar
Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, & perikanan	85,74	9,09	5,17
Pertambangan & galian	6,73	2,96	90,30
Industri pengolahan	15,14	12,98	71,89
Listrik, gas, & air bersih	0,52	6,80	92,68
Bangunan	43,88	22,57	33,55
Perdagangan, hotel, & restoran	75,60	20,81	3,59
Pengangkutan & komunikasi	36,69	26,64	36,67
Keuangan, persewaan, & jasa	16,80	46,47	36,73
Jasa-jasa	35,59	17,19	36,60
PDB	40,55	15,22	44,24
PDB tanpa migas	46,22	17,19	36,60

Sumber: Berita Resmi Statistik No 21/VII/24 Maret 2004

Tabel 7 menjelaskan dengan detil kontribusi output yang disumbangkan UK bagi pembentukan PDB selama kurun waktu 1997-2001. Terlihat bahwa sumbangan UK cukup stabil dan terus mengalami peningkatan. Bahkan ketiga sektor unggulan memperlihatkan pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan sektor lainnya.

Tabel 7
Kontribusi Output UK terhadap Pembentukan PDB Tahun 1997-2001 (Rp Juta)

Sektor	Tahun					Rata-rata pertumbuhan (%)
	1997	1998	1999	2000	2001	
Pertanian, perkebunan, peternakan,	83,454,932	146,658,258	187,287,927	187,819,982	204,468,353	0,2511
kehutanan, & perikanan	8,183,374	7,990,917	8,349,025	9,443,345	10,863,750	0,0734
Pertambangan & galian	24,507,695	38,554,590	42,729,739	48,323,480	55,691,083	0,2278
Industri pengolahan Listrik, gas, & air bersih	52,047	75,772	85,196	91,007	101,739	0,1824
Bangunan	20,496,578	27,473,126	32,935,451	40,692,018	46,547,198	0,2276
Perdagangan, hotel, & restoran	74,627,738	112,465,649	133,445,906	147,516,548	167,829,510	0,2246
Pengangkutan & komunikasi	14,359,080	20,538,794	21,944,873	24,615,667	29,322,919	0,1954
Keuangan, persewaan, & jasa	8,882,435	12,341,036	12,944,873	14,632,657	16,503,999	0,1675
Jasa-jasa	19,361,227	33,670,744	39,076,677	42,225,922	47,030,614	0,2285
PDB	253,925,106	399,768,886	478,799,667	515,360,626	578,359,165	
% terhadap total	43,93	47,16	47,65	46,12	45,55	

Sumber: Menegkop & UKM (2001) dikutip oleh ISRBC dan PUPUK (2003)

Permasalahan Utama Usaha Kecil di Indonesia

Disamping berbagai potensi, ternyata UK di Indonesia juga memiliki berbagai persoalan yang menghambat perkembangan dan ketahanan usahanya. Berdasarkan hasil Konferensi Nasional Usaha Kecil di Cipanas, 4-6 Agustus 1997, masalah-masalah yang dihadapi usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Permodalan

- Suku bunga kredit perbankan masih tinggi, sehingga kredit menjadi mahal.
- Kurangnya informasi sumber pembiayaan dari lembaga keuangan non-bank termasuk informasi jenis sumber pembiayaan serta persyaratan dan prosedur pengajuan.
- Sistem dan prosedur kredit dari lembaga keuangan bank dan non-bank rumit dan lama. Waktu tunggu pencairan kredit juga tidak pasti.
- Kurangnya informasi dari perbankan mengenai standar proposal pengajuan kredit, sehingga pengusaha kecil tidak mampu membuat proposal yang sesuai dengan kriteria perbankan.
- Kurangnya pemahaman dari perbankan mengenai kriteria UK dalam menilai kelayakan suatu UK, sehingga jumlah kredit yang disetujui seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan UK.

2. Pemasaran

- Lemahnya kekuatan tawar pengusaha kecil ketika berhadapan dengan pengusaha besar, terutama dalam menentukan harga, sistem pembayaran, dan pengaturan tata letak produk usaha kecil di *department store* dan *supermarket*.
- Asosiasi pengusaha atau profesi belum berperan dalam mengkoordinasi pemasaran produk usaha kecil, sehingga sering menimbulkan persaingan tidak sehat antarusaha sejenis.
- Informasi untuk memasarkan produk di dalam maupun luar negeri masih kurang. Misalnya informasi mengenai produk yang diinginkan: siapa pembeli, di mana tempat pembelian, bagaimana potensi pasar, bagaimana tata cara memasarkan produk, serta bagaimana tender pekerjaan utamanya pada usaha jasa.

3. Bahan Baku

- Pasokan bahan baku kurang memadai dan berfluktuasi, antara lain disebabkan karena adanya kebijakan ekspor dan impor yang berubah-ubah, pembeli besar yang menguasai bahan baku, serta keengganan pengusaha besar untuk membuat kontrak dengan pengusaha kecil.
- Harga bahan baku masih terlalu tinggi dan berfluktuasi

karena struktur pasar masih bersifat monopolistik atau dikuasai pedagang besar.

- Kualitas bahan baku rendah, antara lain karena tidak adanya standardisasi dan adanya manipulasi kualitas bahan baku.
- Sistem pembelian bahan baku secara tunai sementara pembayaran penjualan produk umumnya tidak tunai menyulitkan pengusaha kecil.

4. Teknologi dan SDM

- Sulitnya memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja terampil, antara lain karena lembaga pendidikan dan pelatihan kurang dapat menghasilkan tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan UK.
- Kurang dan tidak meratanya akses dan sumber informasi teknologi, apalagi upaya penyebarluasannya yang masih minim.
- Spesifikasi peralatan yang sesuai dengan kebutuhan (tekonologi tepat guna) sukar diperoleh.
- Lembaga independen belum ada dan belum berperan, khususnya lembaga yang mengkaji teknologi yang ditawarkan oleh pasar kepada UK sehingga teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Peranan instansi pemerintah, non pemerintah, dan perguruan tinggi dalam mengidentifikasi, menemukan, menyebarluaskan, dan melakukan pembinaan teknis tentang teknologi baru atau teknologi tepat guna bagi UK masih kurang intensif.

5. Manajemen

- Sulitnya menemukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha, antara lain karena pengetahuan dan kemampuan manajerial pengusaha kecil relatif rendah. Akibatnya pengusaha kecil belum mampu menyusun strategi bisnis yang tepat.
- Pemisahan antara manajemen keuangan perusahaan dan keluarga atau rumah tangga belum dilakukan, sehingga pengusaha kecil sering mengalami kesulitan dalam mengontrol dan mengatur *cash flow* serta membuat perencanaan dan laporan keuangan.
- Kemampuan pengusaha dalam mengorganisasi diri dan karyawan masih lemah, sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas dan seringkali pengusaha harus bertindak sendiri (*one man show*).
- Kurang efektifnya berbagai pelatihan manajemen yang ada (materi terlalu banyak dan tidak sesuai kebutuhan, tidak ada kegiatan pendampingan pasca pelatihan).
- Produktivitas karyawan masih rendah sehingga pengusaha sulit memenuhi ketentuan UMR. Rendahnya produktivitas

berkaitan dengan tingkat pendidikan, etos kerja, disiplin, tanggung jawab, dan loyalitas karyawan yang rendah.

6. Birokrasi dan Pungutan

- Perijinan tidak transparan, mahal, berbelit-belit, diskriminatif, adanya ketidakpastian, serta adanya tumpang tindih vertikal (antara pusat daerah) dan horisontal (antarinstansi).
- Penegakan dan pelaksanaan hukum dan berbagai ketentuan masih kurang serta cenderung kurang tegas.
- Pengusaha kecil dan asosiasi UK kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan tentang UK.
- Pungutan atau biaya tambahan dalam pengurusan perolehan modal dari dana penyisihan laba BUMN dan sumber modal lainnya cukup tinggi.
- Mekanisme pembagian kuota ekspor tidak mendukung UK untuk mampu mengekspor produknya.
- Banyak pungutan yang seringkali tidak disertai pelayanan memadai.

7. Infrastruktur

- Biaya listrik, air, dan telepon tinggi, serta sering mengalami gangguan. Pelayanan petugas juga kurang baik.
- *Bounded Zone*, seperti PIK dan LIK kurang dilengkapi prasarana yang memadai seperti jalan, listrik, telepon, air, serta fasilitas penanganan limbah.

8. Kemitraan

- Kemitraan antara UK dengan UM dan UB dalam pemasaran dan sistem pembayaran, baik produk maupun bahan baku, dirasakan belum bermanfaat.
- Kemitraan antara UK dengan UM dan UB dalam transfer teknologi masih kurang.

Dari penjelasan mengenai persoalan di atas, tampak bahwa UK memiliki kesulitan dalam mengakses lembaga-lembaga formal, baik untuk keperluan bantuan kredit ataupun lainnya. Sifat keinformalan UK seringkali menjadi indikator ketidakpastian dan kerentanan usaha tersebut. Bank atau lembaga formal sulit mengeluarkan dana kredit atau bantuan bagi UK karena tidak mampu memenuhi persyaratan,[11] misalnya tidak terdaftar, dsb, sehingga mempengaruhi keper-cayaan untuk masalah pengembalian pinjaman. Namun hal ini banyak mengalami perubahan, terbukti dengan munculnya berbagai bantuan untuk mengembangkan UK mulai dari bantuan kredit, bantuan teknis, kemitraan, dsb, terlepas dari per-soalan keberhasilan berbagai pro-gram tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian AKATIGA

[11] Lihat Bisnis Indonesia, Jumat, 16 Juli 2004, artikel yang berjudul "Beri Kesempatan yang Sama kepada UKM".

(2003) yang berjudul, "Pola-pola eksploitasi terhadap usaha kecil", tampak bahwa ada tiga macam persoalan yang menghambat usaha kecil, yaitu: (1) persoalan internal UK, khususnya kapasitas manajemen; (2) persoalan infrastruktur yang menghubungkan UK dengan sumber modal, manajemen, teknologi, pelatihan; (3) persoalan relasi eksploitatif yang terdapat dalam rantai hulu-hilir UK. Pemahaman mengenai struktur menjadi sangat penting karena berguna dalam memetakan berbagai kekuatan ekonomi, sosial, dan politik yang mengganjal UK.[12]

Selain berbagai persoalan tersebut, dalam penelitian berikutnya AKATIGA juga akan menyoroti persoalan relasi sosial, ekonomi, dan politik di UK yang sangat bias gender. Berdasarkan hasil diskusi dengan para perempuan pengusaha kecil yang tergabung dalam Persepsi tampak bahwa relasi gender yang timpang (diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan) bisa menjadi penghambat perempuan untuk mengembangkan usahanya dan mengakses sumber daya.

Perkembangan Pendekatan Penguatan UK

Seiring dengan menjamurnya UK, sejak tahun 1970-an mulai bermunculan berbagai pendekatan untuk mengembangkan UK. Apa saja pendekatan-pendekatan tersebut? Secara singkat terdapat tiga pendekatan utama, yaitu:

a. Pendekatan kesejahteraan (pemerataan) berupa bantuan langsung (subsidi kredit, bantuan teknis (BIPIK), dan proteksi lainnya). Namun hal ini tidak berjalan lancar atau banyak mengalami kegagalan. Kemudian dikembangkan juga program bantuan tidak langsung, seperti kemitraan. Ternyata program ini juga kurang berjalan baik (Hill, 1995:19 dikutip oleh Thee Kian Wie, 1996:4-5).

b. Pendekatan yang lebih mengutamakan pendekatan efisiensi yang meliputi peningkatan kemampuan UK dalam hal manajemen, teknologi, pemasaran, serta usaha untuk menghilangkan berbagai kendala yang menghambat perkembangan UK (idem).

c. Pendekatan yang difokuskan untuk mengubah pola relasi ekonomi, sosial, dan politik yang bias gender baik melalui perubahan kebijakan maupun pemberdayaan pelaku UK.

Hasil riset AKATIGA selama kurun waktu 1990-2000-an juga telah menunjukkan berbagai perubahan. Pada awal tahun 1990-an, hasil-hasil penelitian AKATIGA tentang UK dalam kaitannya dengan proyek identifikasi peluang kerja di sektor non pertanian pedesaan menunjukkan bahwa persoalan UK banyak disebabkan oleh persoalan internal termasuk pema-

[12] Lihat kata pengantar dari Thee Kian Wie

saran, namun beberapa studi juga sudah mulai mengidentifikasi masalah-masalah struktural. Tetapi saat ini perhatian mulai bergeser ke persoalan struktural yang menghambat UK. Meskipun demikian, persoalan internal UK juga tetap diidentifikasi sebagai penghambat keberhasilan UK.

Tiga Kisah Sukses Usaha Kecil

Indikator yang dipergunakan untuk melihat UK yang berhasil adalah (1) kemampuannya mengatasi kendala, dan (2) mampu memberikan kondisi yang lebih baik/layak bagi pengusaha/pekerjanya. Studi literatur ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi terkini dan komprehensif mengenai UK yang berhasil dan situasi pekerjanya, karena perkembangan UK yang begitu dinamis. Selain itu, dalam pembahasan UK, faktor tenaga kerja seringkali luput dari perhatian. Data-data tahun 1990-an kurang *valid* karena telah banyak mengalami perubahan di tingkat makro & mikro yang mempengaruhi eksistensi UK, terutama di sektor-sektor tertentu.

Kasus-kasus di bawah ini diperoleh dari berbagai artikel di media massa sehingga data yang disajikan kurang lengkap dan perlu dikaji lebih lanjut. Tapi setidaknya kasus-kasus ini bisa dijadikan dasar pijakan untuk melakukan pendalaman. Dari berbagai kasus tampak bahwa usaha kecil yang mengandalkan sumber daya alam mampu bertahan, apalagi target pemasarannya khusus yang tidak terjangkau oleh industri besar. Selain itu barang yang dihasilkan juga cukup khas dan berbeda dengan hasil produksi industri besar. Dari dua di antara tiga kasus di bawah ini, tampak jelas bahwa strategi pemasaran tidak hanya tergantung oleh pasar ekspor, tetapi juga pasar lokal, sehingga jika salah satunya mengalami penurunan tidak akan mengakibatkan kebangkrutan/tutupnya usaha. Bantuan dari pemerintah juga memainkan peranan yang cukup berarti bagi kelangsungan industri ini, setidaknya untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses pasar, modal, birokrasi, dan pelayanan dari lembaga-lembaga pemerintah yang berfungsi mengembangkan UK.

Kasus 1
Usaha Kerajinan Logam di desa Pasir, Kab. Banyumas

Di daerah Pasir terdapat sekitar 200 pengrajin besi dan emas. Desa Pasir Wetan dan Pasir Lor khusus untuk pengrajin besi, sedangkan desa Pasir Kidul dan Pasir Kulon menjadi sentra pengrajin emas. Di desa Pasir Wetan terdapat sebuah usaha kerajinan logam yang cukup berhasil, yaitu PT. Sinar Etsa, milik Toto (40). Ia melakukan pemasaran produk di pasar domestik dan ekspor. Proses ekspor sendiri dilakukan oleh PT. Dadap Sembada Karya di Indramayu. Hasil produk PT. Sinar Etsa (SE) dibeli setengah jadi oleh PT.

Dadap yang akan menyelesaikannya hingga siap ekspor. Setiap bulannya PT. SE harus bisa menyelesaikan 1500 mainan/jenis dan 400 lampu lilin. Mainan dihargai Rp 15.000,-/unit dan lampu lilin Rp 75.000,-/unit. Selain melayani pesanan untuk ekspor, PT. SE juga memproduksi alat-alat pertanian, penyadap, emblem/logo. Bahan baku diperoleh dari daerah Tegal berupa besi apkir/sisa. Saat ini PT. SE mencoba mengembangkan usaha baru yaitu perakitan mobil lokal dan suku cadangnya. Untuk mewujudkannya diperlukan modal yang cukup besar. Oleh karena itu, PT. SE berharap ada investor yang bersedia bekerja sama. Keinginan ini juga mendapat dukungan dari Disperindag.
Penghasilan kotor perbulan PT. SE sekitar 45-50 juta dan berhasil menyerap tenaga kerja harian sebanyak 30 orang. Mereka diupah sekitar 10.000-20.000/hari tergantung ketrampilannya.

Hambatan:
- Kesulitan bahan baku, terutama untuk memenuhi pasar ekspor. Untuk mendapatkannya seringkali harus survei ke berbagai kota.
- Kesulitan untuk mencari penggunting kaleng, terutama untuk bahan baku lokal. Oleh karena itu, mereka mencoba meminta bantuan ibu-ibu rumah tangga sekitar 60 orang sebagai tenaga kerja lepas.

Sumber: Kompas, Kamis, 12 Februari 2004

Kasus 2
Usaha Tenun Tradisional Donggala, Sulawesi Tengah

Sentra kerajinan tenun sutra Donggala di Banawa, Wani, Palu, Parigi. Sarung biasa berharga Rp. 250 ribu dan kemasan satu set sarung, jas & selendang dipasarkan seharga Rp. 500 ribu. Sebagian pekerjanya adalah anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Pengusaha ini menyiasati ketidakstabilan pasar dengan melakukan promosi melalui media dan pameran. Hal ini mendapat dukungan dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulteng

Hambatan:
- Ketinggalan teknologi masih menggunakan ATBM sehingga seringkali tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Strateginya adalah melimpahkan produksi ke pengusaha tenun lain.
- Perlu inovasi produk agar tidak ketinggalan dengan produk tenun tradisional dari daerah lain seperti Bugis, Batak, & Nusa Tenggara. Proses inovasi ini mendapat bantuan dari biro desain & mutu Dekranasda.

Sumber: Bisnis Indonesia, 8 Maret 2004

Kasus 3
Kerajinan Bambu di Bali

Aneka jenis anyaman bambu buatan pengrajin Bali menghasilkan devisa sedikitnya US$ 9,7 juta selama Januari-Oktober 2003 atau naik 54% dibanding periode sama tahun lalu. Pemasarannya dilakukan secara lokal dan ekspor. Kenaikan ini disebabkan kemampuannya dalam melakukan inovasi atau membuat desain baru sesuai perkembangan dengan harga terjangkau. Desa Belega terkenal dengan kerajinan bambu berupa lidu-lidu, gringsing, kursi, lemari, meja makan, dan tongkat yang berfungsi sebagai tempat keris. Barang-barang tersebut banyak diminati oleh turis Australia. Sementara anyaman bambu dengan kombinasi rotan berupa tempat koran, bakul, dan topi berbentuk kerucut digemari oleh konsumen Eropa. Produk tas dan dompet disukai oleh wisatawan Jepang dan AS. Saat tragedi bom di Kuta dan wabah SARS, usaha anyaman ini tetap berjalan.

Sumber: Bisnis Indonesia, 17 Desember 2003

Kesimpulan

- Perkembangan UK cukup dinamis, terutama yang memiliki keterkaitan dengan sub sektor TPT termasuk sepatu. Usaha kecil pada tahun-tahun sebelumnya cukup berkembang tapi di tahun-tahun ini tampaknya akan mengalami penurunan karena terjadi kolaps (akibat turunnya permintaan, kalah bersaing dengan produk cina yang lebih murah, dsb). Dengan demikian, UK sulit sekali untuk dijadikan basis andalan perluasan kesempatan kerja, seperti yang terjadi di awal tahun 1990-an.

- Secara umum tingkat penyerapan tenaga kerja melalui UK sangat besar dan juga berpotensi untuk memperluas kesempatan kerja. Hal ini terkait dengan tingginya angka pertumbuhan lapangan kerja melalui UK. Kondisi tersebut diharapkan bisa mengimbangi atau menyiasati besarnya pertumbuhan angkatan kerja nasional. Namun potensi UK tidak didukung dengan penyerapan investasinya yang hingga saat ini masih sangat minim (lihat tabel 5). Padahal UK terbukti memberikan sumbangan PDB yang cukup besar, meskipun angkanya masih berada di bawah sumbangan PDB UB. Namun demikian, situasi ini mulai mengalami perubahan yang ditunjukkan dengan penurunan nilai tambah UB, sementara situasi sebaliknya terjadi di UK. Dari tahun ke tahun nilai tambah UK memperlihatkan kenaikan (Tabel 6).

- Untuk mendorong berkembangnya UK, pemerintah bisa memberikan prioritas perhatian kepada tiga sektor unggulan yang stabil

selama masa krisis dan cenderung mengalami peningkatan baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun sumbangan nilai tambah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus pada masalah produktivitas, terutama di sektor pertanian yang tingkat produktivitasnya masih sangat rendah dibandingkan sektor lainnya. Usaha kecil mampu menjadi basis perluasan kesempatan kerja karena kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja cukup tinggi. Namun untuk membuktikan apakah secara kualitas mampu memberikan kondisi kehidupan dan kerja yang lebih baik bagi buruhnya masih perlu dikaji dan dibuktikan lebih lanjut melalui penelitian lapangan.

- Berdasarkan hasil penelusuran, literatur mengenai UK ternyata tidak banyak yang mengangkat persoalan tenaga kerja. Sebagian besar hanya terfokus pada kegiatan usaha dan faktor-faktor yang menghambat usahanya baik yang berkaitan dengan manajemen usaha maupun struktural. Oleh karena itu, studi UK berikutnya sangat perlu untuk melihat persoalan di UK dalam kaitannya dengan isu perburuhan. Namun cara melihatnya agak berbeda dengan yang biasa dipergunakan dalam mengkaji hubungan perburuhan di industri formal.

Sektor modern/formal memang tetap diperlukan tetapi tidak bisa dijadikan satu-satunya andalan perluasan kesempatan kerja karena kondisi makro ekonomi yang tidak stabil. Apalagi bagi sektor modern berorientasi ekspor yang sangat tergantung terhadap permintaan pasar internasional.

Daftar Pustaka

Aaron, Carl, dkk. 2004. Strategic Approaches to Job Creation and Employment in Indonesia. Report prepared for The United States Agency for International Development, Jakarta Mission. 4 Februari.

AKATIGA dan The Asia Foundation. 1999. *Krisis dan daya tahan masyarakat miskin di Indonesia*. *Recent Developments.* Bandung: Yayasan AKATIGA dan The Asia Foundation.

Basjir, W. Wahyu. 2003. "Informalisasi dan Tantangan Perburuhan". *Jurnal Analisis Sosial. Vol. 8 No. 3 Desember*. Bandung: AKATIGA.

Benda-Beckmann, Franz von, Keebet von Benda-Beckmann dan Hands Marks (eds.). 2000. *Coping With Insecurity: An "underall" perspective on social security in the third world*. Yogyakarta/Nijmagen: Pustaka Pelajar dan Foocal Foundation.

BPS dan Kementrian Koperasi dan UKM. 2004. "Indikator Makro Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2003". *Berita Resmi Statistik No. 21/VII/24 Maret.*

Dewayanti, Ratih. 2004. Desain Studi Advokasi Perempuan Usaha Kecil 2004-2006. Bandung: AKATIGA.

Dir. Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas. 2003. *Kajian Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan dan Dampaknya Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja*. Jakarta: Bappenas.

Endang Suhendar (ed.). 1995. *Tanah, Buruh, dan Usaha Kecil dalam Proses Perubahan: Kumpulan Ringkasan Hasil Penelitian AKATIGA*. Bandung: AKATIGA.

Executive Summary Follow Up to The World Summit for Social Development UN ACC Task Force on Full Employment and Sustainable Livelihood. Geneva, March 27, 1997.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). 1998. Masalah-masalah di seputar usaha kecil Indonesia: prosiding konperensi nasional usaha kecil, Cipanas, 4-6 Agustus 1997. Jakarta: ISEI, Kadin dan TAF.

ILO. 2004. *Seri Rekomendasi Kebijakan Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: ILO.

ILO. 2004. "Dimensi Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Makro dan Sektoral". *Seri Rekomendasi Kebijakan Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: ILO.

ILO. 2004. "Penciptaan Pekerjaan dan Pengembangan Usaha (Usaha Kecil, Menengah, dan Ekonomi Lokal)". *Seri Rekomendasi Kebijakan Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: ILO.

ISBRC dan PUPUK kerjasama dengan LP3E Kadin Indonesia. 2003. *Usaha kecil Indonesia: tinjauan tahun 2002 dan prospek tahun 2003.* Jakarta: ISBRC PUPUK.

Manning, Chris. 1998. *Indonesian Labour in Transition: An East Asian Success Story?.* UK: Cambridge University Press.

Safaria, Anne Friday, dkk. 2003. *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal: Permasalahan dan Prospek*. Bandung: AKATIGA.

SDC workshop. 2002. Current trends in pro-poor small and micro enterprise development. Switzerland: Intercooperation SED Backstopping mandate. *SDC Workshop, January 10-11*.

Siregar, Safaruddin (ed.). 2002. *Usaha kecil dan mikro di tengah arus globalisasi: pengalaman usaha kecil dan mikro dampingan Bitra Indonesia.* Medan: Bitra Indonesia.

Sudrajat, Ade. 2004. Proyeksi Industri TPT Tahun 2005. Makalah yang disajikan dalam simposium "Berakhirnya Perjanjian Perdagangan Tekstil dan Pakaian dan Masa Depan Industri Pakaian di Indonesia - Implikasinya Terhadap Modal dan Buruh", tanggal 8 Juni di Hotel Kemang, Jakarta.

Tambunan, Tulus. 1999. *Perkembangan industri skala kecil di Indonesia.* Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Thee Kian Wie. 1993. Industrial structure and small and medium enterprise development in Indonesia. EDI Working papers. Economic Development Institute of The World Bank.

_____. 1994. *Industrialisasi di Indonesia: berbagai kajian*. Jakarta: LP3ES.

_____. 1996. *Mengembangkan daya saing industri kecil dan menengah di era perdagangan bebas*. Jakarta: Pusat Ekonomi Pembangunan LIPI.

Tjandraningsih, Indrasari (ed.). 1991. Tenaga Kerja Pedesaan pada Industri Besar Sepatu Olahraga Untuk Ekspor: Studi Kasus Tangerang dan Bogor. Seri *Working Paper*-Juli. Bandung: AKATIGA.

Usman, Marzuki dan Harry Seldadyo (ed.). 1997. "Kiat sukses pengusaha kecil". *Jurnal Keuangan & Moneter*. Jakarta: Badan Analisa Keuangan & Moneter, Dep. Keuangan RI bekerjasama dengan Institut Bankir Indonesia.

Wick, Ingeborg. 2004. Permainan Global Menyangkut Kancing dan Kerah: Akhir dari Perjanjian Textile Dunia Mempertajam Perbedaan Sosial. Makalah yang disampaikan dalam simposium "Berakhirnya Perjanjian Perdagangan Tekstil dan Pakaian dan Masa Depan Industri Pakaian di Indonesia - Implikasinya Terhadap Modal dan Buruh", tanggal 8 Juni di Hotel Kemang, Jakarta.

Widyaningrum, Nurul, dkk. 2003. *Pola-pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil*. Bandung: AKATIGA.

Yusuf, Verdi. 1991. Pembentukan Angkatan Kerja di Industri Garmen Untuk Ekspor, Pengalaman dari Bandung Jawa Barat. Seri *Working Paper*-Februari. Bandung: AKATIGA.

Surat Kabar dan Buletin:

Bisnis Indonesia, 30 September 2003.
Bisnis Indonesia, 17 Desember 2003
Bisnis Indonesia, 8 Maret 2004
Bisnis Indonesia, 16 Juli 2004.
Kompas, 12 Februari 2004.
Kompas, Selasa, 29 Juni 2004. Halaman 19.
Dinamika catatan akhir tahun 2003.

Dokumen:

UU RI No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Website:
www.depkop.go.id
www.sentrakukm.com

KERENTANAN USAHA KECIL: FAKTOR PENGARUH, DAMPAK, DAN SOLUSI

Dede Mulyanto[1]

Abstract

The concern on the criticality and the influencing conditions is expected to be the basic of developing strategy of empowering women in small enterprises effectively. This passage is going to describe the heterogeneous aspects of small enterprises criticality in their social contexts.

Kerentanan Usaha, Risiko, dan Guncangan

Pada intinya, kerentanan adalah kondisi ketika suatu usaha tidak mempunyai kemampuan menghindar, menghadapi, dan melindungi diri dari risiko-risiko dan guncangan yang disebabkan oleh perubahan keadaan yang negatif.[2] Risiko sendiri secara umum sering dibatasi sebagai *"a situation or event in which something of human value (including humans themselves) has been put at stake and where the outcome is uncertain"* (Jaeger dkk, 2001:17).[3] Risiko dan guncangan dalam usaha kecil bisa terjadi karena beberapa sebab, misalnya usaha tersebut memasuki suatu arena baru sehingga harus mengalami perubahan internal, seperti usaha mikro yang 'naik kelas' menjadi usaha kecil dan harus menghadapi pasar, persaingan, dan kendala yang belum pernah dialami. Atau bisa juga risiko dan guncangan terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang berdampak terhadap usahanya, seperti lonjakan harga bahan baku dan produk, fluktuasi yang tajam terhadap

---

1 Peneliti pada Yayasan AKATIGA

2 Terdapat banyak batasan tentang kerentanan (vulnerability) yang bisa digunakan. Tetapi, pada dasarnya kerentanan berhubungan dengan keadaan mudah 'jatuh', 'sakit', atau 'runtuh'nya sesuatu (lihat Musser, 2002).

3 Untuk diskusi lebih lanjut mengenai penggunaan dan batas-batas konsep risiko, lihat Jaeger dkk. (2001).

permintaan barang, perubahan kebijakan tingkat suku bunga kredit, penggusuran dan perubahan kebijakan tata kota lainnya, atau terjadinya bencana.

Kondisi rentan suatu usaha tidak bisa disamakan dengan keadaan usaha yang tidak bisa berkembang. Oleh karena itu persoalan yang berkaitan dengan pengembangan usaha, seperti ketersediaan modal usaha, tidak bisa dilihat sebagai faktor utama untuk menggambarkan kerentanan. Suatu usaha yang tidak bisa mengembangkan diri belum tentu rentan, misalnya usaha mikro mandiri yang sedikit sekali bergantung kepada pihak lain, baik dalam asupan (bahan baku dari kebun sendiri dan modal dari uang sendiri), maupun pemasaran (sudah ada pelanggan tetap di daerahnya sendiri). Meskipun usaha seperti ini tidak bisa menumpuk modal untuk pengembangan usaha, tetap tidak bisa dikatakan rentan, karena lonjakan harga bahan baku atau meningkatnya suku bunga kredit perbankan tidak memberi pengaruh besar terhadap usaha tersebut. Sebaliknya, suatu usaha yang mampu mengembangkan diri, tetapi karena memiliki ketergantungan pada salah satu pihak dan sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi ekonomi yang lebih luas, maka pada saat terjadi perubahan yang negatif usaha tersebut bisa digolongkan rentan.[4]

Kedua contoh di atas merupakan contoh ekstrim. Ada rentang yang diisi banyak kemungkinan kombinasi keadaan usaha, untuk menggolongkan usaha berdasarkan derajat kerentanannya. Karenanya, tidak ada karakteristik dan bentuk khusus kerentanan usaha kecil-mikro. Keragaman jenis hasilan, kondisi geografis, waktu, kemampuan ekonomi, kondisi politik, institusional pelaku usaha, latar belakang budaya, dan masih banyak lagi faktor lain yang dapat menjadikan keragaman karakter kerentanan usaha kecil merentang luas.[5]

Meski demikian, ada beberapa ciri umum risiko, yang tentunya akan berbeda-beda pada tiap usaha, yang potensial menimpa (perempuan) usaha kecil di Indonesia. Pertama, diskriminasi yang mungkin dihadapi pelaku usaha kecil yang memasuki kegiatan ekonomi informal. Meskipun semenjak lama orang percaya (terutama setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1998 yang banyak meruntuhkan usaha-usaha besar) bahwa usaha kecil di sektor informal merupakan penyumbang penting dalam perekonomian nasional, namun kenyataannya dalam sudut pandang kebijakan yang mementingkan investasi besar, kedudukan usaha kecil seringkali didiskriminasikan. Contohnya dari segi permodalan, seringkali usaha besar meski memiliki

---

4 Sebagai contoh lihat Widyaningrum, dkk. (2003).

5 Watts dan Bohle (1993:46 dikutip Musser, 2002) misalnya, menyatakan bahwa "*vulnerability is a multi-layered and multi-dimensional social space which centers on the determinate political, economic, and institutional capabilities of people in specific places at specific times*".

tunggakan hutang cukup besar tetap 'dimaafkan', tetapi tidak demikian dengan usaha kecil.[6] Selain itu, diskriminasi ini juga bisa terjadi karena kebijakan pemerintah yang memberikan angin segar bagi sekelompok pelaku dalam rantai usaha untuk melakukan monopoli dalam perdagangan komoditi tertentu (Widyaningrum, dkk., 2003).

Berkaitan dengan perempuan pengusaha kecil, kemungkinan risiko diskriminasi berdasarkan gender bisa terjadi. Risiko diskriminasi ini biasanya mendapat pembenaran dari norma bersama, baik norma tradisional maupun yang berasal dari pengaruh luar, meskipun sumber diskriminasi itu sendiri tidak selalu berasal dari lingkungan setempat (bisa berasal dari negara maupun LSM). Persoalannya adalah bagaimana perempuan pengusaha kecil memandang dan menanggapi sesuatu yang menurut pandangan emik sebagai diskriminasi gender dalam usaha pada kerangka budaya dan lingkungannya. Kadangkala, dalam kehidupan suatu komuniti, perbedaan berdasarkan gender tidak serta merta menjadi sumber risiko diskriminasi terhadap perempuan. Perbedaan gender berisiko melahirkan diskriminasi ketika campur tangan pihak luar masuk ke dalam kehidupan setempat, misalnya intervensi negara dalam persoalan kepemilikan lahan, serta pengaruhnya dalam perubahan pandangan dan perilaku terhadap kerja dan hasil kerja perempuan (Li, 2003). Oleh karena itu kita tidak bisa sewenang-wenang menilai suatu masyarakat dengan mengatakan mereka memiliki ciri asal yang mendiskriminasi perempuan. Mungkin saja keadaan itu terjadi karena pengaruh luar. Selain itu, sebagai praktik sosial, diskriminasi berdasarkan gender juga tidak terjadi terhadap semua perempuan di semua ruang waktu. Ada banyak faktor untuk memungkinkan terjadinya praktik ini. Masing-masing faktor terdiri dari komposisi yang berbeda-beda untuk tiap-tiap individu. Dari berbagai faktor tersebut, paling tidak, kemampuan politik, ekonomi, dan kelembagaan merupakan faktor penting terjadinya praktik diskriminasi, entah dari sisi pelaku ataupun korban.

---

6 Keengganan perbankan mengucurkan kredit untuk usaha kecil-mikro tercermin dari porsi kredit usaha kecil (KUK) terhadap total kredit yang cenderung mengecil dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Bank Indonesia, porsi KUK per Juni 2004 saja, hanya sebesar Rp.69,94 triliun, atau 14,4 persen dari total kredit. Porsi tersebut menurun drastis dari akhir tahun 2003 yang sebesar 16,9 persen. Kecenderungan mengecilnya porsi KUK ini kian tampak jika dibandingkan dengan porsi pada semester pertama 2003 yang sebesar 17,3 persen (Kompas-16/08/04). Selain itu, usaha-usaha kecil pun kesulitan untuk memperoleh kredit tersebut karena persyaratan yang kadang memberatkan. Sudut pandang pinjaman saat ini masih cenderung berpihak pada perbankan ketimbang pada usaha kecil-mikro. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh kenyataan bahwa usahalah yang harus berubah mengikuti prosedur perbankan; bukannya perbankan mengikuti kebutuhan usaha (misalnya kasus Bank Grameen di Asia Selatan). Hal ini juga menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah dan lembaga keuangan masih setengah-setengah.

Ketidakmampuan suatu usaha untuk menghindar atau menghadapi risiko dan guncangan menyebabkan suatu usaha menjadi rentan. Tidak adanya pilihan merupakan salah satu faktor penentu mengapa suatu usaha tidak mampu menghindar dari risiko dan guncangan. Ketiadaan pilihan ini menyebabkan usaha kecil tidak mampu berpaling ke arah lain untuk menyelamatkan diri. Faktor lain yang juga dapat mengakibatkan terjadinya ketidakmampuan adalah ketergantungan. Ketergantungan itu sendiri tidak memberikan dampak buruk selama diikuti dengan norma saling membantu dan tanpa keserakahan. Ketergantungan menjadi bencana bagi yang lemah, ketika hubungan tersebut lebih menguntungkan yang 'kuat' lewat perampokan nilai lebih, yaitu saat pelaku usaha yang lemah tidak mempunyai banyak pilihan. Ketergantungan demikianlah yang kemudian melahirkan risiko eksploitasi (Cross, 1997).[7] Selama masih ada pilihan dalam hubungan usaha, entah dalam asupan (bahan baku, modal) maupun dalam pemasaran, maka risiko eksploitasi bisa dihindari. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, penciptaan jaringan alternatif merupakan solusi terhadap risiko eksploitasi.[8] Risiko eksploitasi ini juga bisa terjadi dalam hubungan usaha yang dilakukan oleh (perempuan) pengusaha kecil terhadap (perempuan) buruh yang bergantung padanya.

Eksploitasi juga bisa terjadi karena hubungan kolusif dalam rantai perdagangan (asupan dan keluaran) antara pemilik modal besar dengan pemerintah, yang menciptakan iklim pemusatan jalur asupan dan keluaran oleh beberapa pelaku yang mampu (secara ekonomi, sosial, dan politik) untuk berkolusi dengan oknum pemerintah (Widyaningrum, dkk., 2003:92-4).

---

7 Mengenai analisis konseptual ketergantungan, kewirausahaan, dan eksploitasi dalam ekonomi informal lihat Cross (1997). Untuk contoh kasusnya lihat Widyaningrum (2003) yang menemukan bahwa ketergantungan pengusaha furnitur kayu pada eksportir yang bertindak sebagai prinsipal, dan ketergantungan eksportir pada kehendak importir yang mampu menekan untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan mereka, mengakibatkan terjalinnya hubungan eksploitatif oleh pihak yang kuat kepada yang lebih lemah. Meskipun demikian, kesejahteraan pengusaha furnitur yang 'rentan' ini lebih baik ketimbang pengusaha gula kelapa di Jawa Tengah (lihat laporan Dewayanti dan Chotim, 2004) sehingga mampu mengumpulkan surplus lebih banyak untuk tameng di kala guncangan. Risiko eksploitasi biasanya lebih dialami oleh usaha kecil yang tergolong dalam industri klaster. Usaha klaster umumnya mempunyai pasar yang sama dengan banyak usaha lain dalam satu wilayah, dan umumnya pemasarannya dilakukan melalui pedagang perantara. Selain kesamaan pasar, usaha-usaha klaster juga mempunyai kesamaan kebutuhan bahan baku. Kemungkinan risiko eksploitasi terjadi karena usaha bergantung pada asupan dan keluaran produksi melalui satu perantara saja. Selain usaha klaster, usaha-usaha yang menjalankan hubungan kerja 'putting out' atau subkontrak dengan satu eksportir juga rentan terhadap risiko eksploitasi. Ketergantungan asupan dan keluaran sekaligus pada satu pihak (produsen besar) akan memungkinkan perilaku eksploitatif terhadap yang lebih lemah posisi tawarnya; meskipun kondisinya mungkin lebih makmur dan memiliki kemampuan untuk berkembang ketimbang usaha mandiri (self-employed) di perdesaan yang memiliki pasar setempat.

8 Untuk kasus usaha gula kelapa dan genteng lihat Dewayanti dan Chotim (2004).

Sebagai usaha yang pada umumnya tergolong *household-based enterprise*, cadangan ekonomi usaha kecil umumnya tumpang tindih dengan cadangan ekonomi rumah tangga. Karena itu guncangan dalam ekonomi rumah tangga akan langsung mempengaruhi usaha. Terserapnya cadangan modal usaha untuk tujuan konsumsi rumah tangga memang sesuatu yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari di dalam usaha informal. Hal ini tidak serta merta mempengaruhi kerentanan usaha. Yang umumnya menjadi persoalan bukan penggunaan cadangan modal usaha itu sendiri, tetapi kemungkinan akan habisnya cadangan modal usaha untuk konsumsi, sehingga pada saat terjadi guncangan cadangan usaha tidak ada sama sekali dan usaha akan terancam ambruk.

Guncangan, Modal, dan Kerentanan Usaha: Kemungkinan Solusi

Seperti dalam suatu arena pertarungan, pelaku usaha harus mempunyai seperangkat tameng yang penting sebagai penahan risiko dan guncangan, atau menepis hambatan yang bakal dihadapi. Untuk dapat bertahan, pelaku usaha harus mempunyai modal[9] yang cukup untuk dapat digunakan dalam mengembangkan mekanisme pertahanan diri melalui siasat yang memadai guna menghindari dampak negatif perubahan keadaan. Mekanisme pertahanan diri ini menjadi semacam strategi adaptasi terhadap perubahan keadaan karena risiko, guncangan, atau hambatan yang bisa memperburuk keadaan. Untuk mempunyai mekanisme pertahanan diri, beberapa prasyarat harus dipenuhi, yaitu memiliki cadangan aset, modal sosial yang kuat, dan pengetahuan kewirausahaan.

Ketersediaan cadangan aset: sekadar ekonomi?

Tabungan dan investasi menjadi tameng yang diperlukan ketika sewaktu-waktu mengalami guncangan. Peristiwa-peristiwa seperti lonjakan harga bahan baku, fluktuasi harga produk, atau kemalangan anggota keluarga, bisa menjadi guncangan yang dapat meruntuhkan usaha jika tidak ada cadangan modal. Aset yang cukup berupa tabungan bergantung pada kemampuan unit usaha untuk menghasilkan *surplus*

9 Modal yang dimaksud di sini tidak dalam arti yang biasa dalam analisis Marx tradisional (dan ilmu ekonomi umumnya). Modal adalah hubungan sosial, dalam arti suatu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam arena perjuangan, di mana ia memproduksi dan mereproduksi. Dalam praktik sosial, modal berkaitan dengan kepemilikan obyektif (kekayaan ekonomi dan budaya). Karenanya modal di sini tidak hanya merujuk pada modal ekonomi, tetapi juga modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik (Bourdieu, 1989; Jenkin, 2004); dan bisa juga ditambah modal tubuh (body capital) yang merupakan tempat keempat modal tersebut ditubuhkan dan dikomunikasikan lewat tubuh sosial pelaku (Jackson dan Palmer-Jones, 2000:150). Bahkan bagi usaha mikro yang tergolong miskin, tubuh merupakan aset terpenting dalam usahanya. Selama tubuh bisa 'dimanfaatkan' (sehat, tidak terpenjara), maka usahanya akan tetap bisa berjalan (Narayan, dkk., 2000:95).

yang bisa mereka simpan atau investasikan dalam kapasitas produktif dan melanggengkan jaringan sosial. Kemampuan untuk menghasilkan *surplus* dan menyisihkan keuntungan juga dipengaruhi kondisi masyarakat pada umumnya, termasuk budaya kewirausahaan dan pola konsumsi. Perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak terduga, seperti turunnya nilai tukar rupiah, lonjakan harga bahan baku, kelangkaan suplai energi, atau guncangan politik yang berpengaruh pada ekonomi nasional, tidak hanya akan menghantam usaha, tetapi juga pelaku usaha itu sendiri sebagai warga komuniti. Karenanya, ketersediaan aset dan kemampuan mencadangkan laba tidak sepenuhnya harus dilihat sebagai kemampuan manajerial semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial-budaya tempat usaha tersebut dijalankan.

Pembentukan kelompok-kelompok usahawan yang memiliki kesamaan kepentingan, umumnya menjadi salah satu solusi persoalan cadangan aset bagi mereka yang relatif miskin. Kelompok-kelompok ini bisa membentuk semacam koperasi yang berfungsi menyediakan berbagai sarana produksi dan pengorganisasian distribusi. Kepemilikan bersama atas sebagian sarana produksi dan distribusi ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan usaha secara bersama-sama. Keberadaan kelompok semacam koperasi ini perlu pengendalian yang ketat dari anggotanya, agar tidak terjadi eksploitasi oleh tirani dalam kelompok. Untuk itu, diperlukan modal sosial yang kuat di antara sesama anggotanya. Prasyarat utama keberadaan kelompok ini adalah adanya kesamaan identitas, saling percaya, dan adanya pemain aktif yang dipercaya semua pihak untuk menggalang kebersamaan. Pemain aktif tersebut selayaknya datang dari antara mereka sendiri, meskipun bisa juga berasal dari pihak luar kelompok, seperti dari LSM atau pemerintah. Tetapi, risiko pemanfaatan secara eksploitatif oleh sebagian pihak atas 'modal sosial' ini, bisa saja terjadi.

Karena menabung bukan sekadar karena adanya *surplus*, tetapi juga menyangkut kerangka budaya dan lingkungan sosial, maka pelatihan-pelatihan tidak akan banyak memberikan manfaat langsung tanpa adanya nilai hemat dan pranata menabung. Selain itu menabung juga memerlukan kondisi di mana masyarakat bisa mengendalikan sifat konsumtif. Hal ini menjadi sulit karena pola hidup konsumtif semakin gencar dilancarkan melalui berbagai media massa yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sementara itu inflasi nilai rupiah membuat harga kebutuhan hidup semakin meningkat. Salah satu contoh adalah kisah PERSEPSI di Klaten. Konon, ada upaya salah satu kelompok pendamping yang memproduksi barang kelontong, seperti sabun cuci, sabun mandi, dan menjualnya dengan harga murah untuk pasar setempat, terutama bagi anggota Jarpuk (Jaringan Pengusaha Kecil).

Hal ini dimaksudkan agar anggota Jarpuk setempat tidak bergantung pada barang kebutuhan sehari-hari yang diproduksi perusahaan besar yang lebih mahal. Dengan demikian diharapkan mereka dapat menyisihkan laba untuk mengembangkan usaha mereka. Namun upaya tersebut hanya berjalan beberapa bulan saja, selanjutnya anggota Jarpuk kembali menggunakan produk yang diiklankan media massa. Sekarang, siapa pula yang sanggup menghadapi kekuatan dan menghindari dampak negatif iklan media massa (elektronik)?

Cadangan aset atau kekayaan yang cukup merupakan prasyarat penting ketahanan suatu usaha. Tetapi hal tersebut bukanlah prasyarat utama. Cadangan aset atau kekayaan yang dimiliki tidak akan bekerja dengan baik dalam suatu usaha tanpa diubah menjadi modal yang memang dibutuhkan oleh bidang usaha tersebut, serta dikaitkan dengan modal-modal lain yang juga dibutuhkan.[10]

Modal Sosial dalam Usaha Ekonomi

Meskipun diakui ada sisi buruk modal sosial, namun banyak juga yang mengakui bahwa modal sosial dalam bentuk jaringan sosial, entah terkait langsung dengan usaha atau tidak, merupakan 'tabungan' lain yang penting sebagai tameng. Secara umum modal sosial dibatasi sebagai "*the institutions, the relationships, the attitudes, and values that govern interactions among people and contribute to economic and social development*" (van Staveren, 2000:1). Batasan ini belum menampung aspek individual dari modal dan lebih menekankan kepada aspek struktural. Hal ini menjadi suatu kekurangan karena dalam praktik sosial aspek struktural ini hanya sekadar menjadi sumberdaya bagi pelaku untuk berpraktik. Oleh karena itu, Long (2001:132) menekankan bahwa modal sosial adalah

> "*capacity of individual to command scarce resources by virtue of their membership in network or broader social structure... the resources themselves are not social capital, the concept refers instead to the individual's (and group's) ability to mobilise them on demand.*"

Karena itu dalam tulisan ini modal sosial akan lebih dilihat sebagai kemampuan mengelola sumberdaya sosial-budaya seperti jaringan sosial.

Hubungan sosial sebagai sumberdaya modal sosial yang dikelola sedemikian rupa sehingga sewaktu-waktu bisa

---

10 *Wealth, the ultimate basis of power, can exert power and exert it durably, only in the form of symbolic capital* (Bourdieu, 1989:195). *Economic power lies not in wealth but in the relationship between wealth and a field of economic relations, ... it is in this relationship that wealth is constituted, in the form of capital, that is, as the instrument for appropriating the institutional equipment and the mechanisms indispensable to the functioning of the field, and thereby also appropriating the profit from it* (Bourdieu, 1989:184-5).

diaktifkan sebagai jejaring pengaman, tidak serta-merta terbangun. Perlu semacam 'investasi' yang harus ditanam. Hubungan bantuan mensyaratkan adanya panduan normatif yang bisa menggerakkan pihak-pihak terkait untuk membantu, yaitu kewajiban saling bantu. Kewajiban ini memerlukan 'investasi'.[11] Karenanya bantuan dari teman, kerabat, patron, atau tetangga tidak akan begitu saja bisa 'dicairkan' kapanpun kita menghendaki. Harus ada 'premi sosial' yang musti dibayar (Benda-Beckman dan Benda-Beckman, 2000).

Kerja-kerja sosial atau kerja sukarela untuk 'kepentingan' orang lain atau komuniti[12] memang bisa dilihat sebagai hambatan atau penghamburan uang, waktu, dan tenaga dari pelaku usaha untuk kepentingan yang tidak secara langsung terkait dengan pengembangan usahanya.[13] Bahkan hubungan-hubungan yang idealnya bersifat resiprokal-mutualisme ini bisa menjelma menjadi hubungan eksploitatif. Tetapi, dalam sorotan konsep investasi hubungan bantuan, kerja-kerja demikian, meskipun menyita uang, tenaga, dan waktu yang mungkin sebenarnya bisa diinvestasikan dalam bentuk modal usaha tambahan, justru penting untuk menumbuhkan panduan normatif kewajiban membantu. Keaktifan dalam kelompok-kelompok arisan antar tetangga, antar anggota keluarga, atau antar sesama pengusaha kecil, merupakan salah satu bentuk investasi sosial membangun jaringan hubungan bantuan. Hal ini diperlukan sebagai tameng pada saat guncangan menimpa. Persoalannya kemudian adalah bagaimana mengatur hubungan-hubungan investatif ini sedemikian rupa sehingga hubungan bantuan ini terus berlangsung dan

---

11 Pembahasan lebih lanjut mengenai kaitan investasi sosial dan usaha lewat studi kasus lihat Szanton (2000).

12 Seperti membantu selametan, memenuhi undangan pernikahan, kerja bakti kampung, dll.

13 Misalnya Dewayanti dan Chotim (2004) yang memandang kerja-kerja sosial demikian, atau dalam istilah mereka disebut sebagai 'kegiatan pengelolaan komunitas' (h. 25), sebagai salah satu faktor kultural yang merugikan perempuan usaha kecil dan menambah beban yang sudah mereka tanggung sehingga menghambat usaha. Selain itu mereka juga memandang negatif hubungan patron-klien, padahal hubungan patronase merupakan salah satu wahana penyaluran bantuan. Selama patron tidak bisa menyediakan bantuan untuk klien yang mengalami kesusahan, maka hubungan tersebut, bisa dikatakan, berhenti secara moral. Salah satu kewajiban patron adalah menyediakan 'jaminan sosial'. Selama kewajiban moral dalam hubungan tersebut tidak dipenuhi, maka hukuman sosial siap menimpa pelanggarnya. Dalam kasus penyaluran zakat misalnya, Scott menemukan di Sedaka bahwa salah satu pertimbangan yang dilihat patron adalah adanya hubungan patronase dengan calon penerima; termasuk dalam hubungan kategorial anutan politik (lihat Scott, 1979; 1984). Mengabaikan kewajiban ini sama saja menyediakan peluang untuk dihukum secara sosial; dan dalam kehidupan komuniti perdesaan, hukuman sosial lebih kejam ketimbang penjara. Penelitian Boomgaard (2000) tentang mitos 'kekayaan haram' menemukan bahwa mitos mengenai tuyul, pesugihan, dll., merupakan semacam kendali komuniti terhadap anggota komuniti yang 'kaya' (para patron) agar tetap menjadi sumber 'jaminan sosial' bagi anggota yang tidak beruntung; atau menjadi semacam moralitas kendali redistribusi.

semakin luas, sambil tetap bisa berproduksi dengan baik, karena bisa saja upaya membangun hubungan bantuan ini menjadi ajang eksploitasi oleh pihak yang lebih berkuasa. Kecurigaan Dewayanti dan Chotim (2004:85-6) terhadap pengaruh buruk 'kerja bakti' ini, terutama dalam kerangka hubungan patronase, terhadap kelangsungan usaha perempuan di perdesaan memang bisa dimaklumi. Tetapi hal ini jelas menunjukkan sudut pandang ekonomi murni yang melalaikan kedudukan pelaku usaha sebagai individu sosial sebagai bagian dari komuniti yang tidak mungkin hidup terisolasi. Terutama bagi mereka yang tinggal di perdesaan, melalaikan kerja-kerja seperti ini sama saja memutus hubungan sosial yang potensial sebagai jaring pengaman di kala susah. Kewaspadaan pada dampak buruk hubungan sosial yang mensyaratkan 'investasi sosial' memang perlu, tetapi tidak perlu menghilangkannya dalam upaya penguatan usaha kecil.

Tampaknya, kecurigaan mereka lebih dilandasi ketergesaan mengenai konsep hubungan patronase dan ikatan saling-bantu di dalamnya (karena keduanya menggunakan konsep patron-klien yang sudah banyak sekali dibahas ilmuwan sosial). Di satu sisi misalnya, Dewayanti dan Chotim (2004:85) menulis bahwa:

> "...Hubungan ini dikembangkan sebagai mekanisme ikatan dari patron terhadap klien, dalam hal ini usaha-usaha mikro. *Hubungan-hubungan sosial ini berfungsi 'membungkus' motif ekonomi. Bentuk hubungan patron-klien ini dikembangkan untuk 'menekan' biaya-biaya ekonomi secara keseluruhan yang seharusnya dikeluarkan oleh patron*" (cetak miring DM).

Tetapi, di sisi lain, secara konseptual mereka menyatakan bahwa:

> "...hal ini (maksudnya hubungan patronase; pen.) terungkap dalam berbagai bentuk, misalnya, *memberikan hadiah pada hari besar keagamaan tertentu, memberikan pinjaman pada situasi-situasi sulit, seperti anggota keluarga yang sakit, penyelenggaraan pesta, dan meminjam untuk kebutuhan sehari-hari.* Hubungan-hubungan ini yang biasa disebut dengan hubungan patron-klien. Dalam konteks ini, hubungan ekonomi berubah menjadi bentuk hubungan pribadi yang kompleks dan berkelanjutan sehingga sulit untuk dipisahkan untuk waktu yang panjang sekalipun" (idem:33, cetak miring oleh DM).

Selain itu untuk kasus Jawa, keduanya mengutip uraian Hayami dan Kikuchi (1987) yang mengatakan bahwa patronase adalah:

> "Hubungan atau ikatan *dyadic* dua pihak yang menyangkut suatu persahabatan; seseorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan

pengaruh dan sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan dan atau keuntungan bagi seseorang yang statusnya lebih rendah (*client*) dengan imbalan dalam bentuk pemberian dukungan dan bantuan secara umum termasuk pelayanan pribadi kepada bapak (*patron*) tadi." (idem:33)

Hubungan patronase, secara ideal, bukan hubungan monolog. Patronase merupakan bentuk hubungan pertemanan yang (lebih) instrumental. Meskipun demikian, seperti halnya hubungan duaan (*dyadic relationship*), pertukaran energi bersifat timbal-balik. Selama patron masih menyediakan bantuan modal, pinjaman untuk masalah keterdesakan kebutuhan, pemberian-pemberian, dan begitu pula sebaliknya dengan klien, maka selama itu pula hubungan ini bisa berjalan tanpa sanksi sosial.

Hubungan ekonomi (dan politik) memang merupakan bagian dari hubungan sosial. Hubungan birokratis ala Weber yang diterapkan dalam hubungan ekonomi justru menjadi kian dihindari. Pendekatan-pendekatan pribadi merupakan modal (sosial) penting dalam berusaha. Apalagi dalam konteks usaha perdesaan.

Memang harus diakui bahwa ketika kapitalisme sebagai sistem ekonomi merambah semua tempat, ada semacam dilema bagi pengusaha yang hidup dalam komuniti dengan ikatan-ikatan tradisional yang masih kuat, yang oleh Evers (1994) disebut sebagai '*traders' dilemma*'. Di satu sisi, sebagai pelaku usaha, cara pikir dan perilakunya harus sesuai dengan nalar ekonomi dengan menjunjung nilai keuntungan. Di sisi lain, sebagai anggota suatu komuniti, keterikatan terhadap dunia sosial dan kewajiban-kewajiban yang tidak secara langsung terkait dengan usaha, bisa dipandang mengurangi keuntungan dan upaya hemat. Solusi yang diajukan oleh Evers, dkk. (1994) adalah mengembangkan jiwa kewirausahaan dengan berpola pikir dan bertindak dalam kerangka ekonomi murni agar bisa tetap bertahan dan mengembangkan diri sebagai suatu usaha ekonomi (maksudnya harus dibedakan dengan usaha amal). Namun sebagian penelitian lain (Li, 2000; Berger dkk., 1991; Hefner, dkk., 2000) menunjukkan bahwa pelaku usaha sebagai warga komuniti tidak bisa melepaskan ikatan-ikatan sosial tanpa merugikan usahanya di masa depan. Bahkan, hubungan-hubungan bantuan berdasarkan identitas kesukubangsaan, agama, atau kesamaan asal daerah, memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan pengembangan usaha ekonomi.[14] Karena, bagaimanapun, kegiatan ekonomi adalah bagian dari dunia sosial.

14 Ada banyak kasus yang bisa dijadikan bukti dari Berger (1991), Mackie (2000), Szanton (2000), dan banyak lagi hasil penelitian yang menunjukkan arena wirausaha sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia sosial. Hal ini membuktikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial dan identitas budaya merupakan bagian dari kegiatan usaha sebagai landasan ketahanan dan pengembangan usaha.

Selain dalam hubungan sosial tradisional (pertetanggaan, kekerabatan, dan patronase), pengikatan hubungan bantuan juga bisa dibangun melalui pengelompokan pengusaha dengan kepentingan sama (Jarpuk, misalnya). Keragaman hubungan yang dibina dengan beraneka kelompok, paling tidak memberikan pengusaha banyak pilihan jaring pengaman. Namun, pengorganisasian kelompok pengusaha hanya merupakan salah satu jaring pengaman, bukan satu-satunya.

Kewirausahaan: manajerial, bakat, atau budaya?

Pendidikan kewirausahaan, diakui atau tidak, mempunyai peran penting sebagai salah satu sumberdaya (modal) yang bisa dijadikan energi pertahanan diri dari guncangan usaha. Yang dimaksud dengan pendidikan di sini adalah modal kultural berupa pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan langsung dengan usaha dan pengembangannya, entah yang didapat lewat pendidikan formal, non-formal, informal, maupun pengalaman hidup. Pendidikan dalam keluarga yang merupakan wahana sosialisasi nilai-nilai kewirausahaan merupakan salah satu sumber pembentukan 'jiwa' kewirausahaan. Pengetahuan mengenai arus uang dan barang, informasi harga bahan baku dan produk, perkembangan kebijakan pemerintah (berkenaan dengan energi, bahan mentah, transportasi, dan perbankan), keuletan, inovatif, dan visi, mutlak diperlukan untuk mampu mengantisipasi guncangan-guncangan yang tak teraba. Modal kultural ini tidak bisa diperoleh hanya lewat pendidikan formal, apalagi sekadar pelatihan atau kursus-kursus singkat, tetapi melalui tradisi atau budaya usaha yang tidak bisa didapat dalam waktu singkat. Selain itu, pengetahuan kewirausahaan ini juga harus terus-menerus direproduksi lewat jaringan sosial seperti teman, kerabat, rekanan usaha, dan termasuk juga dalam organisasi-organisasi sekepentingan (Jarpuk, misalnya).[15]

Seandainya pelatihan-pelatihan masih akan terus diberikan, maka sebaiknya sasarannya bukan lagi kepada pengusaha langsung dengan pelatihan manajerial semata, tetapi terhadap keluarga dengan 'pelatihan' kewirausahaan. Menumbuhkan kebiasaan berpikir dan bertindak secara wirausaha kepada anggota keluarga dan tetangga memang bukan merupakan solusi yang akan langsung terasa hasilnya. Kemampuan untuk bertahan terhadap risiko dan guncangan, serta kemampuan mengembangkan usaha tidak bisa diperoleh hanya lewat pelatihan manajerial. Oleh karena itu tanpa pendarah-

15 Ada beberapa kasus menarik yang dicatat dari pengalaman keseharian pendamping dan perempuan pelaku usaha kecil mengenai pentingnya pengetahuan sebagai modal kultural di Klaten dalam tulisan Winarni, dkk. (tanpa tahun).

dagingan pranata wirausaha, semua pelatihan akan sia-sia, dan hanya menghabiskan dana proyek.

Soal Solusi Lembaga Keuangan

Tidak ada solusi *mujarab* untuk semua bentuk dan karakter usaha kecil. Dari wilayah permodalan, kerentanan bisa terjadi karena cadangan modal usaha yang sedikit, sehingga tidak bisa membentengi kerugian atau pengeluaran mendesak karena guncangan. Dari wilayah produksi, kerentanan bisa muncul karena lonjakan harga atau kelangkaan bahan baku dan energi. Sedangkan dari wilayah pemasaran, risiko eksploitasi, hilangnya pasar karena persaingan dengan usaha yang lebih kuat, atau fluktuasi tajam harga produk, bisa menyumbang derajat kerentanan usaha.

Dari tiga wilayah itu saja, akan sangat beragam kemungkinan solusi yang bisa ditawarkan. Akses ke lembaga keuangan formal memang bukan solusi satu-satunya menghadapi masalah cadangan modal. Pinjaman lebih dekat dengan persoalan pengembangan usaha. Namun, adanya jaminan memperoleh pinjaman di masa sulit merupakan salah satu hal penting bagi ketahanan usaha. Jaminan cadangan uang dari luar ini harus bisa menutupi kebutuhan segera yang sering kali tiba-tiba datangnya. Ketersediaan pinjaman yang cepat, ringan, dan tidak memberatkan, merupakan salah satu cara meningkatkan ketahanan menghadapi guncangan. Oleh karena itu, cadangan uang dalam kegiatan arisan bukan solusi keterdesakan kebutuhan dana menghadapi guncangan. Dari sifatnya sendiri yang merupakan pranata penyimpanan uang berotasi, arisan tidak bisa dijadikan jalan keluar perolehan dana penanganan guncangan usaha tiba-tiba. Sebagai sarana jaring pengaman, kelompok arisan memang bisa menyediakan kemungkinan bantuan pinjaman dari antara anggotanya. Namun, sebagai pranata penyimpanan uang berotasi, arisan tidak bisa menjadi sandaran jaminan tersedianya dana penanganan guncangan mendadak (Nugroho, 2001). Maka, selain kelompok simpan-pinjam di antara pengusaha kecil, solusi lainnya yang mungkin adalah lembaga keuangan formal.

Kondisi perkreditan diharapkan mengalihkan perspektif pemberian pinjaman ke sudut pandang pelaku usaha. Misalnya, dengan memberi bunga yang seringan mungkin, prosedur pengajuan yang tidak berbelit-belit, serta menjalin hubungan secara sosial dengan kelompok-kelompok pelaku usaha lewat kerjasama dalam melembagakan kegiatan arisan bersama lembaga keuangan. Kebiasaan menjalin hubungan dengan nasabah secara personallah yang membuat para rentenir lebih populer di mata pengusaha kecil sebagai tempat peminjaman uang dibandingkan dengan lembaga bank (Nugroho, 2001), meskipun kerugian yang akan ditanggung biasanya jauh lebih besar.

Selain karena adanya jalinan ikatan personal, alasan lain mengapa masih banyak pengusaha kecil yang terus berhubungan dengan rentenir adalah karena prosedur yang lebih mudah dan waktu yang singkat dalam memperoleh pinjaman (1 hari).[16] Aspek cepat dan mudah ini menjadi sesuatu yang penting untuk keperluan yang mendesak. Ada prasyarat mutlak yang mesti dipenuhi untuk menciptakan hubungan personal antara nasabah dan lembaga keuangan, yaitu kepercayaan. Adalah hal yang wajar bila lembaga keuangan menginginkan jaminan pengembalian pinjaman, karena mereka bukan merupakan lembaga amal. Solusi yang umumnya ditawarkan adalah lewat formalisasi usaha.

Dari sisi pelaku usaha, harus disadari bahwa lembaga keuangan pun merupakan suatu usaha, yang tentu juga menginginkan keuntungan seperti halnya mereka sendiri. Untuk meyakinkan pihak lembaga keuangan perlu dilakukan pengorganisasian pelaku-pelaku usaha sedemikian rupa sehingga bisa meyakinkan pihak perbankan bahwa mereka bisa memperoleh keuntungan lewat kerja-sama dengan kelompok. Pengorganisasian kelompok seperti ini tidak hanya menunjukkan besarnya jumlah anggota (sehingga akan besar pula pinjaman yang diajukan), tetapi juga meyakinkan lembaga keuangan bahwa para pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Peran Pengorganisasian dalam Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Kecil

Aksi tanggap dan siasat pengorganisasian

Aksi tanggap adalah cara yang dilakukan oleh individu, baik perorangan maupun kelompok, yang timbul dari kesadaran praktis dalam menghadapi kondisi tertentu. Cara ini bisa dalam bentuk tindakan dalam kerangka kelembagaan dominan maupun tindakan-tindakan alternatif, yang bisa menjadi penguat daya tahan ketika terjadi guncangan dari risiko sosial. Perjuangan merupakan salah satu aksi tanggap alternatif terhadap pranata dominan yang menindas. Perjuangan memiliki aneka bentuk, mulai dari perjuangan yang dilakukan melalui organisasi politik antarbangsa terhadap wacana dominan tak-adil, hingga perjuangan yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari lewat kebisuan, penentangan keputusan suami, kepura-puraan, kemalasan, berbohong, dan lain-lain, yang oleh Scott disebut dengan istilah 'senjatanya orang-orang lemah'.[17]

---

16 Nugroho (2001); Widyaningrum (2002:85). Salah satu alasan responden meminjam pada BMT, dalam penelitian Widyaningrum (2002:81), adalah prosedur yang lebih mudah (51,3% responden) dan persyaratan yang lebih ringan (46,7%).

17 Scott (1979).

Perjuangan sebagai aksi tanggap alternatif memberi perempuan pilihan. Artinya tidak hanya *nrimo* terhadap semua risiko sosial sebagai satu-satunya pilihan dan menganggap risiko tersebut sebagai kodrat keperempuanannya yang sudah tercatat dalam *lauhf al-mahfuz*. Dalam kepustakaan kerentanan, memang 'ketiadaan pilihan' merupakan salah satu aspek kerentanan.

Memang benar bahwa pengorganisasian merupakan salah satu bentuk perjuangan. Bahkan Scott berani menyatakan bahwa terorganisasinya suatu gerakan perjuangan merupakan salah satu syarat keberhasilan mencapai tujuan.[18] Mengaktifkan modal sosial, budaya, dan ekonomi sekaligus lewat pengorganisasian juga bisa menjadi cara melawan. Banyak orang yakin bahwa berorganisasi dan berserikat adalah penting untuk menyehatkan kehidupan bermasyarakat, karena menyerukan hak-hak yang terhalangi, menggugat penindasan, atau melancarkan perjuangan bisa dilakukan lewat organisasi. Nyatanya di banyak konstitusi negara modern, berorganisasi merupakan bagian dari unsur hak asasi manusia. Tetapi tidak semua organisasi bisa menjadi senjata yang tepat sasaran. Di masa Orde Baru misalnya, organisasi-organisasi formal perempuan lebih dimanfaatkan penguasa sebagai wahana penjinakan (*domestification*) perempuan, sekaligus wahana penyebaran ideologi gender yang dianut negara, yang oleh sebagian feminis dipandang tidak adil. Organisasi perempuan yang lahir dari rahim konsep pembangunan bergaya atas-bawah menjadikan perempuan sebagai bagian dalam struktur dan organisasi yang diciptakan dan dikontrol oleh pemerintah. Perempuan tidak bisa, bahkan dilarang, mengidentifikasikan tujuan-tujuan dan kebutuhan alternatif dalam bidang pribadi maupun sosial, serta mengerahkan kemampuan untuk mencapainya. Lalu organisasi macam apa yang bisa jadi senjata perjuangan?

Dari kasus PKK atau Dharma Wanita di masa Orde Baru saja, kita bisa mengatakan bahwa organisasi bergaya atas-bawah justru melanggengkan kekuasaan dominatif negara atas perempuan. Jadi, saat ini yang masuk akal, atau paling tidak untuk tampil beda dengan masa lalu, tentunya adalah organisasi yang terbangun dari akar rumput; organisasi partisipatif yang sesuai dengan kepentingan perempuan. Apa benar demikian? Belum tentu! Ternyata selama ini ide pengorganisasian partisipatif perempuan lahir dari pendekatan pemberdayaan. Mulanya memang untuk menggantikan pendekatan lama yang mengabaikan keikutsertaan kalangan bawah dalam pembangunan yang nyatanya gagal menyejahterakan. Namun, praktik-praktik pengorganisasian partisipatif yang telah dilakukan nyatanya juga menyimpan sisi gelap atau mela-

[18] *Ibid.*

hirkan sebentuk tirani baru. Karenanya perlu kritik terus-menerus.

Bentuk-bentuk tirani baru tersebut misalnya adalah keberadaan 'elit-elit' organisasi atau kelompok yang memanfaatkan otoritasnya untuk kepentingan 'karir' politik dan lupa mengangkat persoalan bersama kelompok; hanya menunggangi organisasi dan memanfaatkan kedudukan politiknya untuk kepentingan diri. Persoalan ini bisa terjadi karena pelembagaan otoritas ada di tangan segelintir orang. Pelembagaan ini potensial melahirkan 'kelas baru' dalam organisasi. Segelintir orang dalam 'kelas baru' inilah yang kemudian menjadi 'tiran-tiran' yang bisa menjadi kepanjangan tangan penindas (entah negara, otoritas kapitalis, partai), secara sadar ataupun tidak.

Sejarah perjuangan kaum tertindas di banyak wilayah menunjukkan bahwa keberadaan organisasi formal permanen dalam gerakan sosial, di mana otoritas dilembagakan dan dipegang oleh segelintir 'elit', justru menjadi wahana paling mudah bagi negara atau otoritas lain untuk mengendalikannya.[19] Keberadaan organisasi permanen yang otoritasnya terlembaga secara formal dengan struktur perintah dan tujuan-tujuan yang relatif tetap justru akan memudahkan tangan-tangan otoriter yang lebih besar, entah dari negara maupun otoritas kapitalis, untuk memasukkan alat-alat peninaboboan. Seperti semua organisasi otoritarian, kedisiplinan dalam menjalankan struktur organisasi untuk mencapai tujuannya lebih bersifat disiplin heteronomi, berupa keberadaan struktur formal yang kuat, yang bisa mendisiplinkan anggotanya dari 'atas' dengan keberadaan 'pemerintah' yang terlembagakan secara formal. Dengan demikian organisasi hanya sebagai wadah penjinakan dan alat *status quo* untuk mengendalikan potensi perubahan sosial yang justru bisa melenyapkan mereka dan lembaga mereka sendiri, entah karena pelarangan maupun kehilangan sumber dana.

Berdasarkan hal di atas perlu adanya kritik secara terus-menerus, terutama kritik dari dalam (anggota) organisasi sendiri untuk bisa mengikis sisi gelapnya. Namun demikian, proses demokratisasi dalam organisasi saja belum cukup, melainkan perlu juga diwujudkan kehidupan demokrasi partisipasi yang komunikatif di dalam organisasi serta pengorganisasian kelompok-kelompok.

Selain itu, persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan dalam usaha kecil tidak bisa secara sederhana dirujuk pada satu sumber saja. Keterkaitan antarwilayah sosial

---

[19] Wieringa (1999) memberi contoh bagaimana Gerwani yang mulanya netral secara politik dengan beragam kalangan perempuan yang membangunnya, akhirnya dikooptasi oleh PKI dan menjadi corong gerakan komunis PKI. Gerwani disapu gelombang pasang Komunisme sehingga unsur-unsur feminis dan unsur non-PKI tersingkirkan sampai tiba kehancurannya pasca kup 1965

(kekerabatan, politik, ekonomi, budaya) mengakibatkan munculnya persoalan di satu wilayah, misalnya diskriminasi perempuan usaha kecil di arena ekonomi yang bisa dibentuk secara rumpil oleh pelaku, pranata, kebiasaan, norma, atau nilai di wilayah sosial lain. Praktik-praktik penindasan pun merentang dalam beragam bentuk dan derajat ketampakannya, dari yang paling jelas terlihat, seperti kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga, hingga kekerasan simbolik berupa hegemoni golongan berkuasa lewat pendidikan dan media massa.[20]

Dikaitkan dengan konsep arena perjuangan, struktur modal, dan tampakan persoalan yang dihadapi perempuan, maka perjuangan menuju keadaan yang lebih baik tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri dan hanya terpaku pada satu kemungkinan sumber persoalan (umumnya yang nampak di permukaan saja).

Bersatu Kita Teguh: pengorganisasian bersama sebagai perempuan atau sebagai golongan terpinggirkan?

Karena aksi tanggap merupakan hasil pengolahan kesadaran praktis, maka organisasi yang salah satu aspeknya adalah kesadaran menjadi penting. Misalnya kesadaran 'bersatu kita teguh' yang dilandasi oleh kenyataan bahwa ada penindasan terhadap golongan tertentu, dan bahwa warga golongan tersebut harus bersatu melawannya. Dalam kasus perempuan, persoalannya adalah apakah akan bersatu sebagai golongan perempuan atau sebagai sesama golongan tertindas. Tentu saja jawabannya akan beraneka ragam, seberagam teori sosial pergerakan feminis yang ada.

Lepas dari riuhnya perdebatan di kalangan teoretisi pergerakan perempuan[21], banyak juga orang percaya bahwa bidang-bidang penindasan tidak berasal dari satu sumber. Dunia sosial dialiri sungai dari banyak mata air. Sumber risiko sosial perempuan tidak bisa hanya dialamatkan pada ideologi dan tatanan gender patriarki, tetapi juga nalar dan praktik otoritas negara, ekonomi, budaya, dan bahkan praktik gerakan feminisme sendiri[22] ikut menyumbang beban risiko sosial perempuan. Karenanya, perlu perubahan sosial menyeluruh, dan ini berarti perlu solidaritas antar unsur tertindas atau sekutu potensial dalam masyarakat, untuk menuju pada perubahan yang lebih baik.

Dalam konteks lingkup kecil, misalnya

---

20 Mengenai ulasan empiris dan konseptual mengenai kekerasan simbolik terhadap perempuan dikaitkan dengan reproduksi sosial dan pembagian kerja antargender. Lihat Krais (1993:161-168).

21 Keriuhan ini misalnya dibahas Freedman (2001) atau Saptari dan Holzner (1997:420-434).

22 Untuk diskusi lebih lanjut mengenai perdebatan penindasan perempuan terhadap perempuan, kontradiksi gerakan politik feminis, konsep 'perempuan' yang dianut yang mempengaruhi nalar dan praktik teori dan

pemberdayaan ekonomi perempuan pengusaha mikro dan pengorganisasian serta penyebaran kesadaran politik, yang disasar tidak bisa hanya perempuan, karena justru sebagian besar usaha merupakan usaha rumah tangga yang setiap anggota rumah tangga mempunyai peran penting dalam memajukannya. Selain itu, sebagai bagian dari komuniti, perempuan bukan satu-satunya yang 'harus' berubah. Perubahan sepihak hanya menguatkan tekanan perjuangan dari pihak yang tidak ingin berubah, yang berarti semua usaha akan sia-sia. Selama perubahan hanya bersifat sebagian, maka sebagian yang lain akan menekan sedemikian rupa, sehingga penyesuaian terjadi tanpa perubahan menyeluruh. Pertanyaan berikutnya: lalu untuk apakah pengorganisasian ada? Sekadar penyadaran atau gerakan sosial?

Hasil ikutan atas dua pilihan di atas berbeda-beda. Jika kesadaran sebagai tujuan dekat suatu pengorganisasian, maka pengandaiannya masyarakat atau golongan sosial tertindas belum memiliki kesadaran bahwa mereka tertindas dan harus berjuang melawan penindasan. Karenanya, aksi tanggap yang dilakukan lebih pada kegiatan pendidikan penumbuh kesadaran. Sedangkan pilihan atas gerakan sosial, mengandaikan golongan tertindas sudah sadar dan tinggal mengorganisasi diri untuk bertindak menentang penindasan.

Tetapi, apapun pilihan yang diambil sebagai titik pijak pengorganisasian, hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pengorganisasian penting untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kepentingan golongan tertindas. Pengorganisasian diri adalah salah satu modal dalam praktik perjuangan, setidaknya di arena perjuangan politik, karena bagaimanapun, rendahnya tingkat keberdayaan politik dan organisasi merupakan salah satu sebab kerentanan sosial.[23]

Perjuangan juga berkait dengan masalah citra. Sebagai salah satu modal terpenting yang perlu dikembangkan untuk membangun struktur modal yang kuat dalam perjuangan di arena 'politik' menuju perubahan sosial, pengorganisasian gerakan perempuan (tentu saja organisasi gerakan lain juga) harus mempunyai jalur yang baik ke media dan mampu membuktikan bahwa ia mewakili golongan yang besar dan luas. Untuk mencapai tujuan ini langkah siasatnya adalah 'bersatu kita teguh' dengan kelompok-kelompok lain dengan meyakinkan bahwa persoalan yang dihadapi suatu golongan tertindas juga merupakan

gerakan feminis lihat Ramazanoglu (1989). Mengenai 'penindasan' feminis liberal dan radikal Barat terhadap perempuan di negara-negara Dunia Ketiga, paling tidak dalam pemaksaan konsep dan praktik politik yang mengabaikan tatanan sosial setempat di negara pasca-kolonial lihat Gandhi (1998).

23 Untuk argumentasi lebih lanjut lihat Cook, Kabeer, dan Suwannarat (2003).

persoalan bersama yang bisa menimpa golongan orang yang rentan secara sosial lainnya.

Kesimpulan

Kerentanan mempunyai dua sisi, yaitu *internal* yang berkaitan dengan kemampuan usaha menangkal guncangan dan menghadapi risiko; serta *eksternal* yang berkaitan dengan risiko, guncangan, atau tekanan yang datang dari lingkungan. Seperti halnya kemiskinan, kerentanan merupakan kondisi multidimensi yang berkaitan dengan kemampuan politik, ekonomi, dan kelembagaan seseorang dalam suatu ruang-waktu tertentu.

Meskipun kerentanan dan kemampuan berkembang tidak serupa, tetapi kondisi rentan sangat mempengaruhi kemampuan usaha dalam mengembangkan diri. Perkembangan usaha akan terganggu jika usaha tersebut rentan terhadap guncangan. Karenanya, tujuan utama penanganan kerentanan adalah meningkatkan ketahanan usaha terhadap risiko dan guncangan yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan memperoleh *surplus* dan menyimpan cadangan modal untuk kemudian menjadi tameng di kala susah.

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penguatan usaha kecil, yaitu:

1. Penguatan kemampuan usaha mencadangkan keuntungan lewat pelatihan manajerial dan menabung;
2. Peningkatan iklim usaha ekonomi yang sehat, yang mana kemampuan mencadangkan aset bisa dilakukan, misalnya dengan memberantas pungutan liar (dan pungutan tidak liar yang terlalu banyak), debirokratisasi penyelenggaraan perijinan dan penyelenggaraan usaha, atau menghilangkan praktik-praktik monopoli di tingkat tempatan (*local*);
3. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan tidak lagi difokuskan pada manajerial semata, tetapi prinsip-prinsip 'budaya' kewirausahaan;
4. Sosialisasi pentingnya jaringan sosial bagi kemajuan usaha dan penguatan organisasi para pengusaha kecil yang tidak hanya dalam kelompok kepentingan usaha kecil, tetapi juga lewat pemanfaatan organisasi-organisasi yang telah ada, terutama sebagai jaring pengaman di kala guncangan terhadap usaha dan rumah tangga terjadi;
5. Penguatan kelompok simpan-pinjam setempat dengan bantuan pelatihan manajerial dan dukungan politik dari pemerintah setempat agar bisa bersaing dengan rentenir;
6. Kerjasama lembaga keuangan dengan kelompok-kelompok pengusaha kecil yang tidak hanya terikat secara formal, tetapi juga *personal* sebagai cara mengalihkan peminjam dari jerat rentenir;
7. Penguatan posisi dan pengetahuan politik pengusaha kecil lewat

pengorganisasian kelompok dengan kepentingan sama. Pengetahuan politik dimaksud bukan sekadar pendidikan pemilih, tetapi kemampuan berargumentasi dengan pihak berwenang, lobi dan tawar-menawar di tingkat lokal, dll.

8. Penyesuaian program-program bantuan bagi usaha kecil dari pemerintah dan pelaku sosial berkepentingan lainnya (termasuk LSM) dengan kepentingan dan kebutuhan usaha kecil senyatanya.

Daftar Pustaka

Albert, Michael, L. Cagan, N. Chomsky, R. Hahnel, M. King, L. Sargent, dan H. Sklar. 1986. *Liberating Theory*. Boston: South End Press.

Andadari, Roos K., Ina Hunga, dan John Ihalauw. 1997. "Pungutan pada Usaha Kecil". *Jurnal Analisis Sosial*. (6) November:35-43.

Benda-Beckmann, Franz von dan Keebet von Benda-Beckmann. 2000. "Jaminan Sosial, Sumberdaya Alam, dan Kompleksitas Hukum", dalam F. von Benda-Beckmann dkk. (ed.). *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 23-60

Berger, Brigitte (ed). 1991. *The Culture of Entrepreneurship*. New Delhi: Tata McGraw-Hill.

Bourdieu, Pierre. 1989. *Outline of a Theory of Practice*. London: Cambridge University Press.

Cook, Sarah, Naila Kabeer dan Gary Suwannarat. 2003. *Social Protection in Asia*. New Delhi: Har-Anand Publication dan The Ford Foundation.

Cross, John C. 1997. "Entrepreneurship & Exploitation: Measuring Independence and Dependence in The Informal Economy". *International Journal of Sociology and Social Planning,* 17,(3/4):37-63.

Dewayanti, Ratih dan Erna E. Chotim. 2004. *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa*. Bandung: AKATIGA dan ASPPUK.

Evers, Hans-Dieter. 1994. "The Traders' Dilemma: a theory of the social transformation of markets and society" dalam Evers H-D dan H.

Schrader (ed). *The Moral Economy of Trade: Ethnicity and developing Markets* . London dan New York: Routledge. Hal 7-14

Finnegan, Gerry dan Katrine Danielsen. 1995. Promoting The Development of Women Enterpreneurs: means and ends in women enterpreneurship development. Makalah dipresentasikan pada First Intercultural Micro-enterprise Development Summit, Srilanka, 28 Agustus.

Freedman, Jane. 2001. *Feminism*. Buckingham: Open University Press.

Gandhi, Leela. 1997. *Post-Colonialism Theory: A Critical Introduction*. Indiana: University Press.

Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.

Haryatmoko. 2003. "Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu". *Majalah Basis* 52(11-12) Nopember-Desember.

Hefner, Robert (ed). 2000. *Budaya Pasar: Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia Baru*. Jakarta: LP3ES.

Henninger, Norbert. 1998. *Mapping and Geographic Analysis of Human Welfare and Poverty: Review and Assessment*. Washington: World Resources Institute.

Itoh, Makoto. 1995. *Political Economy for Socialism*. New York: St. Martin Press.

Jackson, Cecile dan R. Palmer-Jones. 2000. "Rethinking Gendered Poverty and Work" dalam Shahra Razavi (ed). *Gendered Poverty and Well-Being*. Oxford: Institute of Social Studies dan Blackwell.

Jaeger, Carlo C., Ortwin Renn, Eugene A. Rosa dan Thomas Webler. 2000. *Risk, Uncertainty, dan Rational Action*. London: Earthscan.

Li, Tania Murray. 2000. "Membangun Budaya Kapitalis: Problem Melayu Singapura dan mempertimbangkan kembali kewirausahaan", dalam Robert W. Hefner (ed.). *Budaya Pasar*. Jakarta: LP3ES. Hal 204-241.

_____. 2003. "Bekerja Terpisah Tetapi Makan Bersama: Kodrat, Kekayaan, dan Kekuasaan dalam Hubungan Perkawinan" *Jurnal Analisis Sosial* 8(2) Oktober.

Long, Norman. 2000. *Delopment Sociology: actor perspectives*. London: Routledge.

Machfud, Siti S.M.; dan Yatri I. Kusumastuti. 1991. "Peranan dan Status Wanita dalam Industri Rumahtangga di Jawa Barat: Kasus pengolahan pangan di Kabupaten Subang dan Majalengka, Jawa Barat". Project Working Paper Series No. A-19. Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB.

Mackie, Jamie. 2000. "Keberhasilan Bisnis di Kalangan Orang Cina Asia Tenggara: Peranan Budaya, Nilai-nilai, dan Struktur Sosial" dalam Robert W. Hefner (ed). *Budaya Pasar*. Jakarta: LP3ES. Hal179-203.

Musser, Laura. 2002. *Vulnerability Bibliography*. Boulder, CO.: Center for Science and Technology Policy Research University of Colorado.

Narayan, Deepa, Robert Chambers, Meera K. Shah dan Patti Petesch. 2000. *Voices of the Poor: Crying Out for Change*. Oxford: University Press dan The World Bank.

Nugroho, Heru. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Purnamadewi, Yeti L. 1989. Wanita dan Industri Rumahtangga Anyaman Bambu di Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Laporan Proyek Penelitian Sektor Luar-Pertanian di Jawa Barat PSP-IPB-ISS-PPLH-ITB.

Ramazanoglu, Caroline. 1989. *Feminism and The Contradictions of Oppression*. London: Routledge.

Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Grafiti Pers untuk Yayasan Kalyanamitra.

Schiller, Barbara M. 1978. Women, Work, and Status in Rural Java. Thesis M.A. Ohio University. Tidak diterbitkan.

Schroeder, Richard A. 1987. *Gender Vulnerability to Drought: A Case Study of the Hausa Social Environment*. Madison: University of Wisconsin Madison.

Scott, James C. 1979. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant*

Resistance. New Haven dan London: Yale University Press.

Stoler, Ann. 1983. "Struktur Kelas dan Otonomi Wanita di Pedesaan Jawa", dalam Koentjaraningrat (ed.). *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Pembangunan.* Jakarta: LP3ES. Hal 167-196.

Suryahadi, Asep dan Rizki Fillaili. 2004 "Pemetaan Upaya Penguatan Usaha Mikro". *Jurnal Analisis Sosial*, 9(2):143-155.

Szanton, David L. 2000. "Moralitas Kontingen: Investasi Sosial dan Ekonomi di sebuah kota nelayan Filipina", dalam Robert W. Hefner (ed.). *Budaya Pasar*. Jakarta: LP3ES. Hal 352-375.

van Staveren, Irene. 2000. *A Conceptualisation of Social Capital in Economics: Commitment and Spill-over Effect*. The Hague: Institute of Social Studies.

van Velzen, Anita. 1990. "Women in Foodprocessing Industries in West Java: the production of kerupuk and marine product in small coastal village in Subang". Project Working paper series No. B-4. Institute of Social Studies Bandung Research Project Office.

_____. 1990a. Women in Foodprocessing Industries in West Java: Production and labour relations in enterprises producing emping melinjo in Tuk, Cirebon. Project Working paper series No. B-7. Institute of Social Studies Bandung Research Project Office.

van Velzen, Anita dan Titi Setiawati. 1990. "Women in Foodprocessing Industries in West Java: Home industries producing kerupuk and rice-sweets (wajit/dodol) in Cikoneng and Cililin". Project Working paper series No. B-6. Institute of Social Studies Bandung Research Project Office.

Whitehead, Ann dan Matthew Lockwood. 2000. "Gendering Poverty: A Review of Six World Bank African", dalam Shahra Razavi (ed.). *Gendered Poverty and Well-Being*. Oxford: Blackwell. Hal 115-144.

Widyaningrum, Nurul. 2002. *Model pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil: Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor*. Bandung: AKATIGA.

_____. 2003. "Eksploitasi terhadap pengusaha kecil melalui rantai hulu-hilir. Kasus Studi: Industri mebel rotan dan jati". *Jurnal Analisis Sosial* vol.8, no.1 Februari.

Widyaningrum, Nurul, Ratih Dewayanti, Erna E. Chotim dan Isono Sadoko. 2003.*Pola-pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil*. Bandung: AKATIGA.

Winarni, Trisnawati dan Y. Susanti. t.t. *Perempuan Pedesaan, Pemiskinan & Agenda Pembebasan*. Klaten: PERSEPSI

Wisner, Ben. 2001. *Notes on Social Vulnerability: Categories, Situations, Capability, and Circumstances*. Oberlin College.

'PARTISIPASI POLITIK': STRATEGI SUBSISTENSI EKONOMI RUMAH TANGGA?

Catatan pinggir studi pustaka partisipasi politik 'orang miskin'

Eka Chandra[1]

Abstract

This passage is a little part of the note written by the writer during his literature study on the political participation of 'the poor'.

There are two categories of participating concepts having been noted from the literature study. First, the concept of participation with limited scope of the usage (minimum participation). Second, the concept of participation with a broader scope of the usage (maximum participation). The two concepts above have their respective strengths and weaknesses.

Pendahuluan

Tulisan ini bersumber dari catatan penulis selama melakukan studi pustaka tentang partisipasi politik orang-orang yang tergolong miskin. Tujuan studi pustaka adalah memahami pengetahuan yang sudah ada tentang tiga konsep utama, yaitu: partisipasi, kemiskinan, dan politik. Terdapat sejumlah *catatan pinggir* yang saya buat saat mempelajari sumber-sumber bacaan tentang konsep partisipasi. Tulisan ini menuangkan sebagian catatan pinggir tersebut dalam konteks mencari konsep partisipasi yang cocok untuk menangkap dan menjelaskan partisipasi orang-orang yang tergolong miskin.

Studi pustaka dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu sejak bulan Oktober s.d. Desember 2004. Terdapat kurang lebih 30 sumber bacaan dari berbagai kategori: sumber-sumber referensi umum, buku-buku ajar, artikel lepas, serta

---

1 Peneliti Yayasan AKATIGA

tulisan-tulisan hasil penelitian. Buku-buku tersebut terbit dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Hasil studi pustaka sendiri berupa kertas konsep yang diterbitkan terbatas untuk digunakan sebagai acuan pembuatan proposal penelitian tentang partisipasi politik orang miskin. Penelitian lapangan untuk studi ini dilakukan pada bulan Maret s.d. April tahun 2005. Tulisan ini dibuat saat penelitian lapangan berada pada tahap pengolahan data.

Partisipasi Minimalis dan Maksimalis: Catatan Pinggir Studi Pustaka

Catatan-catatan pinggir studi pustaka yang dilakukan penulis mengarah kepada dua kategori konsep partisipasi: 1) konsep partisipasi yang terbatas ruang lingkup penggunaannya, dan 2) konsep partisipasi yang luas. Pada tulisan ini penulis menyebutnya dengan istilah partisipasi minimalis dan maksimalis. Sekurang-kurangnya terdapat lima belas pengertian partisipasi, antara lain partisipasi sebagai komoditi, upaya peningkatan kesadaran, hubungan dinamika kesalingpercayaan, pergantian struktur kuasa, alat pengawasan, metode akumulasi pengetahuan, aliran neokolonialisme, narasi besar baru pembangunan, paradigma baru pembangunan, pengalaman keagamaan, dan sebagai konsep politik (Cooke & Uma Kothari, 2001:204-5).

Partisipasi minimalis

Pengertian partisipasi yang diterima banyak pihak adalah suatu bentuk pengaturan yang mensyaratkan warga masyarakat turut aktif dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program (Antlov, 2004). Dalam pengertian ini dianggap ada pelaku utama yang harus terlibat di dalam proses pengaturan yaitu 'masyarakat sipil' dan pemerintah. Partisipasi yang demikian dikategorikan sebagai minimalis. Pengertian minimalis meletakkan konsep partisipasi dalam konteks bentuk pengaturan, yaitu 'strategi dan teknik suatu bentuk pengaturan' (*mode of governance*) sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Lemke:

> *The production and circulation of forms of **participation** and inclusion are of strategic significance for the specific profile of neoliberal governmental techniques.*

Politik dalam partisipasi minimalis adalah serangkaian kegiatan perencanaan dan pengorganisasian proyek-proyek bersama, penetapan aturan dan standar-standar yang membatasi dan memaknai hubungan antar seseorang dengan orang lain, serta pengalokasian sumberdaya diantara kebutuhan-kebutuhan serta tujuan-tujuan yang ada. Politik merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam penentuan dan penerapan tujuan-tujuan publik yang melibatkan penggunaan kekuatan kelompok-kelompok yang berkepentingan (Evans, 1995). Partisipasi minimalis

melihat aktivitas politik warga masyarakat dalam peristiwa pengambilan keputusan publik pada pemerintahan maupun pembangunan.

Konsep partisipasi minimalis membatasi aktivitas politik kaum miskin dan cenderung membentuk stereotip tentang kapasitas mereka. Huntington dan Nelson (1976:118 dalam JRAA, 11) menjelaskan bahwa partisipasi tidak menjadi perhatian orang miskin karena: 1) Orang miskin tidak punya sumberdaya untuk terlibat secara efektif (berpartisipasi secara efektif): informasi, kontak-kontak yang memadai, uang, dan seringkali waktu; 2) dalam lapisan berpendapatan rendah, penduduk dibagi ke dalam ras, sukubangsa, agama, atau bahasa sekalipun *cleavages* tampak jelas, pembedaan dilakukan atas dasar perbedaan sekte, pendapatan, kedudukan, dan tempat asal; 3) Orang miskin cenderung mengharapkan permohonan atau tekanan *on their part*, apakah itu secara individual maupun kolektif. Joseph R.A. Ayee (2000) mengatakan bahwa salah satu prasyarat partisipasi kaum miskin dalam pembangunan adalah terbukanya hambatan sosial-budaya, seperti karakter fatalisme, sehingga dinyatakan bahwa partisipasi tidak relevan bagi kaum miskin dengan keadaan yang dihadapinya, kurang berkepentingan, dan rendahnya kesadaran.

Pandangan stereotip lain tentang kaum miskin terkait dengan gagasan mengenai modal sosial. Kelompok miskin dianggap tidak memiliki modal sosial yang mencukupi untuk digunakan dalam arena-arena politik formal maupun informal. Tidak adanya partisipasi kelompok miskin terkait dengan penurunan atau tidak terbangunnya modal sosial yaitu aset atau kapasitas kolektif (Fuchs, *et.all,* 2001).

Berdasarkan anggapan dan stereotip tersebut, konsep pemberdayaan partisipasi minimalis biasanya berupa kegiatan *normalisasi*. Kegiatan ini ditandai oleh adanya upaya mempersiapkan prasyarat-prasyarat bagi kaum miskin supaya lebih sesuai dengan situasi politik yang dicita-citakan. Selain itu juga adanya upaya menghilangkan hambatan sumberdaya, mengurangi sifat fatalistik, meningkatkan perhatian, dan membangun kemampuan berorganisasi. Pemberdayaan dimaknai sebagai upaya memenuhi prasyarat-prasyarat keahlian, pengetahuan, dan pengalaman agar kaum miskin mampu mengambil tanggung jawab lebih besar dalam suatu sistem politik.

Penelitian AKATIGA memperlihatkan adanya kemampuan kolektif di kalangan akar rumput. Nelayan yang berpendapatan rendah mampu membangun perkumpulan, melaksanakan kebiasaan berkumpul, menjalankan musyawarah, menentukan prioritas, dan mengambil keputusan bersama. Terdapat pula bentuk-bentuk solidaritas pertetanggaan, kekerabatan, dan pranata-pranata setempat yang berfungsi mengatasi persoalan perseorangan maupun kolektif (Eka Chandra & Yulifa S. Rangkuti, 2004). Pedagang kaki lima

memprakarsai pengerahan dana kolektif, membangun protes, dan melakukan boikot (Eka Chandra, 2003). Informasi tersebut tidak hanya memperlihatkan potensi kapasitas kolektif kaum miskin, tetapi juga menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya bekerja di dalam bingkai relasi masyarakat sipil dan pemerintah, tetapi juga berada di luar batas hubungan tersebut.

Partisipasi maksimalis

Terdapat sejumlah pustaka yang memberikan sumbangan pengertian terhadap konsep partisipasi yang memiliki kandungan lebih luas dan cenderung maksimalis. *Pertama,* partisipasi adalah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam rangka perjuangan pemenuhan kebutuhan hidup, menentukan pilihan, dan memperjuangkan kepentingan (Friedmann, 1992). *Kedua*, partisipasi tidak terbatas kepada kegiatan formal prosedural, melainkan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk pertukaran pengetahuan atau peristiwa-peristiwa aktivisme dalam gerakan-gerakan sosial yang menentang ketidakadilan dan penindasan (Cooke & Kothari, 2001). *Ketiga*, partisipasi dapat berupa *kegiatan kolektif* yang berakar dalam bentuk interaksi-interaksi tradisional dan asli yang ada dalam konteks kebudayaan tertentu (Rahnema, 1992). *Keempat*, partisipasi melibatkan bentuk-bentuk relasi kuasa: pesaingan, konflik, kerjasama, dan dominasi (Cooke & Kothari). *Kelima*, partisipasi merupakan upaya kolektif peningkatan kuasa sosial dan juga upaya kolektif transformasi dari kuasa sosial menuju kuasa politik, upaya kolektif yang dilakukan untuk mengubah hubungan kuasa (Friedmann, 1992).

Konsep-konsep partisipasi maksimalis menganggap kaum miskin memiliki kapasitas kolektif. Sebagaimana pandangan Michael Kaufman (1997:8), 'massa populasi (termasuk kaum miskin – pen.) memiliki seperangkat alat (*the means*) untuk mendefinisikan sejumlah istilah dan hakekat dari partisipasinya'. Penelitian AKATIGA di Kecamatan Majalaya memperlihatkan adanya kapasitas kolektif kelompok akar rumput dalam melakukan pengerahan sumberdaya, membangun protes, dan melakukan boikot (Eka Chandra, 2003). Partisipasi politik tidak hanya berada di ruang-ruang yang disediakan. Politik merupakan salah satu aspek hubungan-hubungan sosial daripada sekedar aktivitas pengambilan keputusan yang berpusat pada lembaga-lembaga pemerintahan (Gamble, 1990), yaitu suatu aktivitas kolektif yang dapat diamati di dalam keluarga, organisasi sukarela, perusahaan, partai, maupun pemerintahan berupa proses-proses mikro (*micro-processes*) maupun makro (Evans, 1995).

Ruang lingkup partisipasi maksimalis sangat luas. Kekuatan definisi yang luas memberi kemungkinan untuk menelusuri berbagai gejala partisipasi di berbagai konteks. Sedangkan kekurangannya terletak pada banyak-

nya isu serta aspek-aspek yang terkait di seputar definisi tersebut. Sebagai contoh, definisi partisipasi sebagai *kegiatan kolektif* yang berakar dari bentuk interaksi-interaksi tradisional dan asli yang ada dalam konteks kebudayaan tertentu (Rahnema, 1992). Definisi ini tidak hanya mengarahkan kita kepada penguraian konsep aksi kolektif, tetapi juga konsep tentang interaksi tradisional dan konteks kebudayaan. Menguraikan konsep aksi kolektif saja memaksa kita untuk menguasai sejumlah gagasan dan studi-studi empiris tentang perilaku dan tindakan kolektif yang sangat luas bidang kajiannya. Contoh lain adalah konsep partisipasi dilihat sebagai upaya kolektif peningkatan kuasa sosial serta upaya kolektif transformasi dari kuasa sosial menuju kuasa politik, yaitu upaya kolektif yang dilakukan untuk mengubah hubungan kuasa (Friedmann, 1992). Penggunaan konsep ini akan menggiring kita tidak hanya kepada versi lain dari aksi kolektif, yaitu gerakan sosial, tetapi juga kepada isu-isu tentang bentuk-bentuk kuasa dan relasi kuasa.

Secara konseptual, pandangan minimalis maupun maksimalis melibatkan unsur aksi kolektif dan politik. Perbedaan di antara keduanya terletak pada ruang lingkup dan tujuan. Perbedaan ini berpengaruh terhadap kerangka pemberdayaan sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini:

	Minimalis	Maksimalis
Ruang Lingkup Pengertian Partisipasi	Keterlibatan di dalam pengambilan keputusan publik: proyek, program pemerintah, kebijakan, dan penentuan peraturan.	Aktualisasi dan transaksi kekuatan: terlibat di dalam pengambilan keputusan, cara hidup berbeda, aktivisme politik dan gerakan sosial, negosiasi, dan aksi-aksi kolektif.
Tujuan/Cara	Partisipasi lebih dilihat sebagai cara daripada tujuan	Partisipasi lebih dilihat sebagai tujuan daripada sebagai cara
Pemberdayaan	Instrumental, penguatan kelembagaan, pembukaan ruang dialog, peningkatan kapasitas pelaku, dan pengembangan prosedur.	Transformatif, perubahan struktural, relasi kuasa
Politik	Proses dan peristiwa pengambilan keputusan publik	Aspek yang terdapat di dalam setiap bentuk hubungan sosial, merupakan aksi kolektif, terdapat di dalam berbagai institusi/organisasi: keluarga, kelompok, perkumpulan, komuniti, dll.

Penutup

Konsep minimalis dan maksimalis memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Meskipun demikian, kedua konsep ini memberi kontribusi bagi konseptualisasi 'partisipasi politik kelompok miskin'. Konsep minimalis tidak dapat sepenuhnya digunakan karena definisinya mengandung makna politik yang terbatas yang secara substansial tidak sesuai dengan situasi kelompok miskin. Pengertiannya lebih menekankan kepada mekanisme interaksi yang spesifik antara elit dan non-elit dalam proses pengambilan keputusan. Lebih dari itu, kondisi orang miskin dilihat sebagai hambatan dan kelemahan, sehingga harus disesuaikan (dinormalkan) agar perilakunya cocok dengan mekanisme interaksi yang digagas sebelumnya. Kontribusi konsep minimalis terhadap konseptualisasi partisipasi politik adalah: 1) batasan yang jelas tentang pihak-pihak yang berinteraksi, yaitu *elit dan non-elit,* serta 2) batasan konteksnya yaitu *proses pengambilan keputusan publik* dan pengalokasian sumberdaya. Sedangkan kontribusi konsep maksimalis terletak pada pandangan-pandangannya tentang politik, kekuatan kelompok miskin, dan

hubungan kekuatan antara elit dan non-elit. Partisipasi adalah kegiatan yang melibatkan relasi kuasa: dominasi, persaingan, konflik, dan kerjasama.

Dari sini timbul pertanyaan, *definisi mana yang cocok digunakan untuk menangkap dan menjelaskan partisipasi dan politik orang-orang yang tergolong miskin?*

Pertanyaan di atas sulit dijawab karena konsep *minimalis* dan *maksimalis* yang ada mengandung banyak asumsi dan terkait dengan konsep lainnya seperti 'orang miskin'. Upaya yang dapat dilakukan adalah mencoba menemukan konsep partisipasi melalui penelusuran empirik tentang strategi subsistensi orang-orang yang tergolong 'miskin'. Cara ini setidaknya memberi peluang perumusan konsep partisipasi yang berpangkal dari *persoalan-persoalan pemenuhan subsistensi ekonomi rumah tangga.*

Daftar Rujukan

Antlőv, Hans. 2004. "Filling the Democratic Deficit: Delibarative Forums and Political Orgnizing in Indonesia", draft chapter untuk Francis Loh dan Joakim Ojendal. *Democracy, Globalization and Decentralization in Southeast Asia.* Routledge Curzon Press.

Cooke, Bill & Uma Kothari. 2001. "The Case for Participation as Tyranny", dalam Cooke, Bill & Uma Kothari (ed.). *Participation as a New Tiranny.* London: Zed Book. Hlm 1-15.

Eka Chandra & Yulifa S. Rangkuti. 2004. Studi Perbandingan Terhadap Kasus Aksi-Aksi Kolektif f di Desa Panggung-Kabupaten Jepara. Seri Working Paper AKATIGA No. 19. Bandung: AKATIGA.

Eka Chandra, dkk. 2003. *Membangun Forum Warga: Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil.* Bandung: AKATIGA.

Evans, Mark. 1995. "Elitism", dalam David Marsh & Gerry Stoker (ed.). *Theory and Methods in Political Science.* London: Macmillan Press, Ltd. Hlm. 228-247

Friedman, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development.* London: Blackwell.

Kaufman, Michael. 1997. "Community Power, Grassroots Democracy, and the Transformation of Social Life", dalam Michael Kaufman & Haroldo D. Alfonso (ed.). *Community Power & Grassroot Democracy: The Transformation of Social Life.* London: Zed Books. Hlm. 1-26.

Rahnema, Majid. 1992. *The Development Dictionary.* London: Zed Books.

MENUJU KAMPUNG PEMERDEKAAN

Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-Akarnya Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code

M. Krismara [1]

Penulis : Darwis Khudori
Penerbit : Yayasan Pondok Rakyat
Tahun Terbit : 2002
Tebal Buku : xii + 271 halaman

Buku ini ditulis oleh seorang Darwis Khudori, arsitek sekaligus ilmuwan sosial yang dibesarkan dalam tradisi intelektual Perancis, salah satu lumbung pemikiran sosial mutakhir kontemporer. Selain aktif dalam bidang pemikiran, Darwis juga berpraksis sosial, terlibat dalam proyek transformasi besar Romo Mangun di pinggir Kali Code, Yogyakarta.

Mengapa harus Romo (Mangun)? Romo Mangun adalah sosok bersahaja yang mengabdikan seluruh kehidupan pribadinya untuk membangkitkan masyarakat miskin-marginal-proletar dari cengkeraman feodalisme-tradisionalisme-imperialisme, atau menurut Darwis, memerdekakan kaum miskin dari pranata budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang buas-menindas menuju pranata yang beradab-berkeadilan.

1 Penulis adalah lulusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung. Saat ini bekerja di sebuah BUMN dan juga bekerja secara *freelance* sebagai pemerhati masalah-masalah sosial dan pembangunan.

Mungkinkah meningkatkan taraf hidup kaum miskin kota melalui gerakan permukiman? Inilah pertanyaan dasar yang hendak dicari jawabannya oleh Darwis. Dengan berbekal pengalamannya, ia sampai pada kesimpulan bahwa hal ini adalah mungkin. Tentunya tidak secara *simsalabim* terjadi begitu saja, tetapi melalui proses intelektual dan praksis yang demikian intens.

Buku ini disajikan dengan format mozaik, disusun dari empat tulisan terpisah yang diracik sedemikian rupa menjadi suatu hidangan siap saji. Pembaca boleh membaca bagian yang mana saja yang lebih menarik hati dan pikirannya, atau bahkan dengan mencicipinya satu demi satu, dari hidangan pembuka hingga penutupnya.

Dimulai dengan deskripsi obyektif tentang proses pembangunan, kemasyarakatan, dan kondisi permukiman Kali Code, penulis kemudian memasuki wilayah teoretis dengan meneropong dimensi-dimensi makro-politik atas kemiskinan dan ketidakadilan struktural di daerah perkotaan lengkap dengan strategi gerakan untuk mengatasinya. Selanjutnya pertentangan dua konsep dihadirkan, yakni konsep pemerintah yang bersifat sangat teknokratik *top-down* dengan konsep alternatif yang lebih *bottom-up* berikut makna-makna tersembunyi di balik gerakan permukiman. Buku ini ditutup dengan menghadirkan dan mengelaborasi figur sang tokoh teladan sekaligus harapan, Romo Mangun.

Laporan dari Kampung Code

Kampung Gondolayu terletak di pusat Kota Yogyakarta, tepat di pinggir Kali Code, dengan luas tanah hanya 2000m2. Secara sosial mereka termarginalisasi dari masyarakat umum. Menurut Patrick Guinnes yang dikutip oleh Darwis, para gelandangan yang menetap di sana pada mulanya datang dari desa akibat sudah tidak tahan lagi hidup di desa. Penyebabnya beragam, misalnya karena perlakuan buruk dari orang tua angkatnya, dipaksa kawin, atau tanah keluarganya sudah dijual. Kebanyakan mereka bekerja di sektor informal; ada yang jadi pemulung, pedagang asongan, pengamen, bahkan seringkali mereka ini dianggap akrab dengan pencurian, pelacuran, kejahatan, dll. Di mata masyarakat umum, mereka adalah sampah, mereka harus disingkirkan sebagaimana layaknya wabah menular yang membahayakan. Mereka mengotori pemandangan kota, permukiman mereka adalah sarang kejahatan, dan satu hal yang pasti mereka bermukim secara ilegal. Mereka tidak tersentuh oleh program-program pengentasan kemiskinan ataupun Program Perbaikan Kampung (PPK), tiada lain karena mereka bukan penduduk 'resmi'.

Bertolak dari kondisi ini, proses reformasi diintroduksi oleh Romo Mangun pada tahun 1983, setelah sebelumnya beliau melakukan hal yang sama di permukiman bekas kuburan Cina, Ngebong. Tidak seperti program-program pemerintah, Romo tidak melakukannya dengan suatu

panduan besar yang sangat detil dan teknokratis, tetapi hanya secara *problem solving*, *trial and error*, dan dengan membangun partisipasi warga. Namun, andaikata harus dibuat kerangkanya, Darwis membuat garis besarnya dengan apa yang ia sebut TRIBINA: Bina Manusia (pendidikan), Bina Usaha (koperasi dan arisan), dan Bina Lingkungan. Dalam prosesnya, Romo berusaha membangkitkan prakarsa dan inisiatif masyarakat setahap demi setahap.

Selama dua setengah tahun terlibat, banyak perubahan yang sudah dihasilkan. Frekuensi pertengkaran dalam keluarga berkurang, pemukulan terhadap anak berkurang, nilai raport anak-anak meningkat, dan juga tingkat kesehatan meningkat. Namun ada juga yang masih belum bisa berubah, yakni kebiasaan berjudi dan meminjam uang pada lintah darat. Dari segi ekonomi, memang tidak terjadi peningkatan penghasilan yang cukup berarti, namun dengan adanya koperasi simpan pinjam dan arisan, tingkat keamanan ekonomi mereka lebih terjamin, terutama manakala mereka ditimpa musibah seperti sakit. Dari segi lingkungan, kualitas perumahan dan prasarana membaik dan lebih tertata rapi.

Tinjauan dan Renungan Teoretis

Dari sudut pandang teoretis, terdapat dua pandangan yang berseberangan dalam menjawab pertanyaan mengenai prospek peningkatan taraf hidup kaum miskin kota melalui gerakan permukiman.

Di satu pihak, John F.C. Turner dalam *Housing by People* (London, 1976), tanpa menyinggung soal "struktur makro", mempromosikan pembangunan perumahan oleh penghuninya sendiri (*self-help housing*). Gagasan pokoknya yang terkenal adalah "perumahan" harus dilihat lebih sebagai "kata-kerja" daripada "kata benda". "Perumahan" lebih sebagai "proses" daripada "barang jadi" dan bahwa nilai perumahan tidak terletak pada "kondisi fisiknya" *(what it is)*, melainkan pada "kegunaannya" *(what it does).* Karena perumahan merupakan proses yang berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penghuninya, maka perumahan tidak bisa distandardisasikan. Organisasi-organisasi besar seperti pemerintah, perusahaan industri, perusahaan perumahan, tidak akan mampu memecahkan masalah perumahan. Turner menganjurkan agar peran pemerintah diubah, bukan lagi sebagai perancang, pembangun, atau pemasok perumahan standar serta penggusur perumahan liar, melainkan lebih sebagai fasilitator untuk menyediakan prasarana umum, aturan hukum yang memberikan ruang gerak cukup luas, dan menyediakan serta melindungi akses rakyat kepada sumber-sumber proses pembangunan perumahan.

Di pihak lain, Rod Burgess dari kalangan Marxist dalam *Petty Comodity Housing or Dweller Control? A Critique of John Turner's Views on*

Housing Policy (Bromley Ray (ed.), Oxford, 1974) menyerang usulan Turner sebagai suatu usaha untuk mempertahankan *status-quo* dan dasar-dasar pembangunan kapitalis, karena nantinya yang akan menentukan adalah 'nilai pasar' bukan 'nilai guna'. Singkat cerita, Turner dianggapnya melakukan depolitisasi masalah perumahan dan negara.

Di antara dua kutub pemikiran ini, dengan mengutip istilah Shadid, Prins, dan Nas, Darwis berpandangan bahwa lebih baik menganggap gerakan yang dilakukan sebagai pemecahan persoalan sebagai langkah awal dalam pencarian pemecahan persoalan. Kesimpulannya adalah bahwa gerakan permukiman harus dicari di lapangan tempat kaum miskin kota itu bermukim.

Sebenarnya selain aspek makro di atas, ada juga aspek mikro yang cukup berpengaruh, yakni apa yang disebut oleh Oscar Lewis sebagai budaya kemiskinan dalam *The Culture of Poverty* (1963). Kaum miskin diidentikkan dengan perilaku menyimpang seperti kejahatan, kenakalan remaja, pelacuran, kesukaan mabuk, berjudi, minum obat terlarang, dan juga cenderung apatis dan mengalami keterasingan sosial. Mereka selalu 'curiga' terhadap dunia luar termasuk pemerintah, politisi, pekerja sosial, dan golongan menengah-atas.

Untuk mempertajam analisisnya, Darwis juga membahas Teori Marginalitas (Theory of Marginality) dan Ketergantungan (Theory of Dependency). Teori Marginalitas melihat gejala permukiman kumuh sebagai fenomena isolasi secara eksternal dari masyarakat umum, pemerintah, fasilitas sosial, selain disorganisasi internal yakni kurangnya kohesi sosial dan sikap introvert. Sebaliknya, Teori Ketergantungan melihat gejala permukiman kumuh sebagai akibat dari masuknya ekonomi kapitalis ke pedesaan dan secara struktural penduduk pedesaan terintegrasi dan diperas oleh perkotaan.

Dengan demikian, dari sudut pandang 'makro', masalahnya menyangkut segi-segi struktural masyarakat, sebagaimana terungkap dalam struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang bersifat menghambat bagi pengembangan diri kaum miskin kota. Sedangkan dari sudut pandang 'mikro', masalahnya menyangkut kondisi kaum miskin kota itu sendiri, sebagaimana terumuskan dalam istilah 'budaya kemiskinan' dan ketiadaan 'akses' kepada sumber daya pembangunan.

Darwis berkesimpulan bahwa tidak ada sarana untuk mencapai perbaikan kehidupan kaum miskin kota selain dimulai dengan meningkatkan partisipasi politik, sesempit apapun ruang geraknya, oleh pihak-pihak yang memperjuangkan perubahan kaum miskin termasuk dari kaum miskin itu sendiri. Dalam konteks gerakan permukiman, diperlukan upaya-upaya mendorong dan mewujudkan prakarsa kaum miskin kota dalam meningkatkan taraf

hidupnya melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan permukiman. Darwis menyajikan strategi dengan meningkatkan 'kekuatan politik', meningkatkan 'daya tukar/beli', meningkatkan 'akses', dan mengembangkan masyarakat perkotaan (tidak melulu perumahan secara fisik).

Hal lain yang cukup penting untuk dicermati adalah pembahasan Darwis mengenai Program Perbaikan Kampung (PPK) yang dalam pandangannya sangat *centralized*, menempatkan pemerintah sebagai pemrakarsa dan pengambil keputusan bagi proyek permukiman golongan rendah, dan bukan sebagai pendukung ataupun fasilitator bagi prakarsa rakyat. Partisipasi masyarakat masih dipandang sebagai 'alat' untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan, bukan sebagai 'tujuan' itu sendiri yang merupakan pola dasar dari pembangunan yang demokratis. Bagi Darwis, kampung adalah benteng terakhir kedaulatan rakyat.

Makna-makna Tersembunyi

Di mata Darwis, kegiatan pengembangan Kampung Code yang dilakukan Romo memiliki makna-makna tersembunyi baik sebagai *Gerakan Permukiman* ataupun *Bukan Sebagai Gerakan Permukiman*.

Gerakan Bukan Permukiman di sini dapat merupakan Gerakan Ide (berpihak kepada kaum miskin dan tertindas), Gerakan Moral (memenuhi panggilan moral humanisme), Gerakan Kebudayaan (mencakup pandangan hidup dan sistem nilai masyarakatnya), dan Gerakan Kerakyatan (memperjuangkan kepentingan rakyat banyak khususnya kaum miskin kota).

Sedangkan sebagai *Gerakan Permukiman* adalah seperti mazhab arsitektur yang dipegang oleh Romo, yang lebih menekankan pada masalah sosial politik daripada sekedar masalah estetika. Masalah permukiman merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan sangat kompleks. Bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Romo Mangun dalam kegiatan pengembangan Kampung Code lebih merupakan ”Karya arsitek untuk rakyat” daripada ”karya rakyat yang dibantu arsitek”, walaupun tidak mengabaikan partisipasi warganya sendiri.

Paradoks Romo Mangun

Bab terakhir ini sebenarnya akan terasa lebih pas jika disajikan sejak awal, sehingga pembaca langsung bisa mengenal sang tokoh dan bisa memasuki alam pemikirannya yang melandasi kiprahnya selama ini.

Romo Mangun hidup dalam kungkungan budaya Jawa yang notabene merupakan bagian dari sejarah panjang feodalisme, yang rakyatnya mengabdi kepada raja. Pencerahannya dimulai dari fakta bahwa Romo adalah Katolik, sementara lingkungan mayoritasnya merupakan Islam yang

tradisional. Dengan demikian, Romo berhasil mengatasi keterbelakangan intelektual massa Jawa yang mayoritas secara tradisional menganut Islam.

Selain itu Romo mulai mengenal nilai-nilai moralitas dari sekolah kolonial dan juga dari keluarganya. Hal inilah yang mendorongnya memilih jalan hidup sebagai pastur. Sejak kecil, Romo disuguhi gejolak revolusi yang banyak memakan korban, kebanyakan merupakan kaum miskin baik sebagai akibat perbuatan tentara kolonial maupun tentara Republik sendiri. Teguh sudah niatnya untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada mereka. Babak kehidupannya kembali berubah tatkala Uskup menyuruhnya bersekolah di arsitektur agar gereja-gereja di Indonesia bisa lebih pribumi *minded.* Dari sanalah ia memulai karier kemanusiaannya sebagai arsitek, sekaligus aktivis sosial.

Pandangan Romo Mangun dalam bidang permukiman berada di antara Hassan Fathy dan John Turner. Sebagaimana telah dijelaskan di awal tulisan ini, John Turner lebih berpandangan bahwa perumahan bisa dibangun oleh rakyat asal pemerintah memberi ruang yang kondusif. Sedangkan Hassan Fathy dalam *Housing for the Poor* (Chicago and London, 1973) cenderung sebaliknya, arsitek lebih berperan sebagai 'pandu rakyat'. Posisi Romo berada di antara keduanya, semua mendapat tempat. Dalam praktiknya jelas Romo cs adalah pandu bagi masyarakat Kampung Gondolayu mulai dari penataan lingkungan, perancangan rumah, pembiayaan, pembentukan pengurus kampung, koperasi simpan pinjam, dsb. Namun di saat lain ia juga sekaligus 'abdi' rakyat yang mencoba mendobrak dan bangkit dengan pemikiran dan aksi visionernya dengan selalu memberi ruang bagi partisipasi warganya. Satu hal yang paling penting untuk dicatat dari Romo adalah pengejawantahan nilai-nilai humanis yang ditimbanya dari mata air spiritualitas Kristiani. Posisinya sebagai Pastur tidak lantas menggiringnya melakukan Kristenisasi, tetapi lebih pada pengabdiannya untuk kemanusiaan universal.

Kaum miskin yang serba tradisional adalah dampak dari percepatan pasca revolusi industri. Mereka tertinggal dari laju modernisasi. Alvin Toffler, seorang futurolog kondang, dalam bukunya *Future Shock* (1971), mengatakan bahwa telah dan akan terjadi suatu fragmentasi dalam masyarakat, dengan hadirnya suatu *enclave of the future* (kantong masyarakat serba futuristik) dan *enclave of the past* (kantong masyarakat serba tradisional). Kaum miskin perkotaan inilah yang hidup dalam kehidupan sejarah masa lalu yang sekaligus hadir pada masa kini.

Darwis, mungkin karena pengaruh tradisi intelektual Perancis yang secara politik lebih bercorak sosial demokrat, lebih banyak memandang permasalahan dari sudut pandang kekiri-kirian. Ini terlihat dari penggunaan kata-kata seperti pranata yang buas-menindas atau pranata yang

beradab-berkeadilan serta dapat dilihat dari kegandrungannya akan teori Ketergantungan yang lebih bersifat strukturalis. Namun demikian, di tengah-tengah kibaran bendera kapitalisme global, tentunya sangat penting untuk memandang dunia dari sudut pandang yang berseberangan, untuk menemukan titik temu dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan.

Sebagai pengamat juga sekaligus pelaku, sebagaimana komentar Arief Budiman pada bagian akhir buku ini, maka hal-hal detail menjadi bisa lebih terungkap. Namun hal ini juga sekaligus rawan subyektivitas dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan dan alat analisis yang digunakan, rawan terhadap *the tyranny of vested interest.*

Yang paling penting dari kiprah Romo Mangun, lepas dari kiprahnya itu dipandang berhasil atau tidak, adalah komitmennya untuk selalu memperjuangkan nilai-nilai humanisme, seperti juga beberapa filsuf sosial lain, terutama dari Asia, yang juga sudah merintis masalah pemerdekaan dan pembebasan ini, misalnya saja Amartya Sen dengan *Development as Freedom*-nya atau juga Soedjatmoko (sebagai *President of Indonesian Intellectual* versi Cak Nur) dengan Etika Pembebasan-nya. Mengutip pertanyaan Yuswadi Saliya dalam komentarnya, bagaimana memelihara suatu kebudayaan dan peradaban itu? (Si)apakah meme (sebagai genetika budaya) Romo Mangun cs itu? Harapannya, nilai-nilai tersebut bisa direplikasikan dan ditransmisikan kepada masyarakat banyak.

Sebagai sebuah mozaik, buku ini memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Karena merupakan 4 tulisan terpisah maka tumpang tindih pembahasan tidak terhindarkan, pembaca berulang-ulang disuguhi tema yang sama. Namun keuntungannya pembaca bisa memilih dan bisa hanya membaca satu bagian saja sesuai kebutuhannya, tanpa harus kehilangan ikatan dari keseluruhan isi buku.

Sebagai penutup, buku ini sangat menarik dan perlu dibaca untuk memperkaya khazanah bagi kalangan yang memiliki perhatian terhadap masalah-masalah *social inequality*, kemiskinan, studi pembangunan, studi permukiman, *urban politics*, *urban planner*, dan arsitektur, baik itu dari kalangan pemerintahan, LSM, politisi, akademisi, cendekiawan, lembaga studi, tokoh agama, aktivis mahasiswa, para pengembang perumahan, serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

PERPUSTAKAAN DAN KONSEP DIGITALISASI: ANTARA KEBUTUHAN DAN REALITAS

Yose Ali Rahman[1]

Kilasan Perpustakaan

Perpustakaan dan kebutuhan akan informasi

Manakala harga buku di pasaran melambung seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US$, harga-harga buku di pasaran pun menjadi mahal, khususnya untuk buku-buku terbitan luar. Hal tersebut tentu saja menjadikan keadaan tidak menguntungkan bagi kita semua. Salah satu dampaknya mungkin buku-buku bagus tidak terbeli, sehingga akses untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bersumber dari buku-buku terbitan terbaru pun menjadi terbatas.

Dalam konteks inilah perpustakaan ada sebagai sarana alternatif untuk mencukupi kebutuhan informasi dan perkembangan pengetahuan bagi penggunanya. Mereka menjadi lembaga khusus yang berusaha memberi dan melayani kebutuhan informasi bagi pengguna. Dalam hal ini penyediaan informasi dan jasa pelayanan untuk penelusuran informasi yang baik menjadi satu keharusan bagi perpustakaan untuk berperan dalam pengembangan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan perpustakaan pada satu lingkungan, baik masyarakat maupun lingkungan organisasi, patut dipertimbangkan.

Adanya perpustakaan setidaknya memberikan peran kepada masyarakat luas untuk bisa memberikan bahan bacaan dan menyediakan fasilitas perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak semua orang mampu membeli buku, apalagi bagi sebagian besar masyarakat kita, konsumsi buku merupakan kebutuhan yang kesekian dibandingkan kebutuhan lain. Sehingga, yang diperlukan

1 Staf Perpustakaan Yayasan AKATIGA.

adalah semangat keingintahuan dan membaca agar bisa memanfaatkan segala pengetahuan yang ada di perpustakaan.

Di pihak lain, perpustakaan perlu merenungkan diri dan mencoba untuk berbenah sehingga bisa lebih baik dan layak untuk dikunjungi. Berdasarkan pengamatan penulis selama terjun di dunia perpustakaan, semangat orang untuk mengakses informasi di perpustakaan sangat rendah. Orang lebih senang datang ke tempat lain yang memberikan suasana menyenangkan daripada ke perpustakaan. Hal ini bukan merupakan salah mereka atau perpustakaan, tetapi kemungkinan disebabkan oleh budaya masyarakat kita yang tidak terbiasa memanfaatkan perpustakaan. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi perpustakaan untuk melakukan pembenahan dalam banyak segi agar bisa menarik lebih banyak orang untuk datang.

Bagian Fungsional Perpustakaan

Kegiatan yang ada di perpustakaan sebenarnya tidak sesederhana yang dibayangkan, melainkan memerlukan banyak waktu dan tenaga, terutama dalam pengolahan dan penataan koleksi. Secara nyata dan kasat mata, orang hanya melihat bahwa kegiatan yang ada di perpustakaan hanya bagian sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian, serta bagian pemfotokopian koleksi bagi pengguna yang membutuhkan. Itulah kegiatan yang terlihat secara nyata di depan mereka. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena ada banyak kegiatan di balik layar yang dilakukan untuk mengelola perpustakaan, antara lain: proses pengadaan koleksi, penataan ruang, pengaturan suhu dan kelembaban, pengaturan pencahayaan, pengklasifikasian, pengkatalogan, penyusunan koleksi, pemeliharaan, penyisiran, dan kegiatan lain yang membutuhkan penanganan dan perencanaan yang ahli pada masing-masing bagian yang melibatkan banyak orang. Semakin banyak koleksi yang dimiliki satu perpustakaan, semakin besar perpustakaan akan membutuhkan dan melibatkan banyak orang dalam menanganinya.

Untuk lebih jelasnya, pembagian fungsional berdasarkan fungsi atau seksi pada suatu perpustakaan adalah sebagai berikut (Basuki, 1993:195):

1. Bagian pengadaan
2. Bagian pengklasifikasian dan pengkatalogan
3. Bagian jasa sirkulasi
4. Bagian jasa referensi
5. Bagian koleksi majalah, buletin, dan jurnal
6. Bagian *shelfing*
7. Bagian pemeliharaan dan pengawetan

Pengaturan ini berlaku bagi perpustakaan yang cukup besar (dengan jumlah koleksi 5000 atau lebih). Pembagian kerja dengan bagian-bagian ini ditujukan agar setiap pekerjaan yang ada pada perpustakaan tesebut dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Para pengelola bertanggung jawab menjalankan

kegiatan pekerjaannya pada masing-masing bidang. Selain itu, karena jumlah koleksi setiap bulan pasti akan terus bertambah, baik koleksi buku, jurnal, majalah, audio visual, ataupun koleksi lainnya, maka penanganannya pun perlu lebih besar lagi.

Namun demikian, jika dilihat lebih lanjut, di kebanyakan perpustakaan yang kecil atau tidak cukup besar terlihat hampir semua bagian pekerjaan ditangani oleh beberapa orang saja, bahkan ada yang hanya oleh satu orang pustakawan. Keterbatasan tenaga seperti ini tentu saja sangat menghambat pekerjaan dan perkembangan perpustakaan itu sendiri, sehingga pelayanan informasi bagi pengguna akan dilakukan dengan minimalis tergantung pada kemampuan pustakawan tersebut untuk bisa mengelola dan mengembangkannya ke arah yang lebih baik.

Pembagian kerja pada suatu perpustakaan juga ditentukan oleh banyak faktor, tergantung dari besar kecilnya cakupan perpustakaan tersebut. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kesesuaian dengan pekerjaan yang akan diberikan antara lain, *pertama* kecakapan dan keterampilan pengelola perpustakaan. Sebuah perpustakaan membutuhkan minimal 3 pustakawan ahli yang menangani untuk skala perpustakaan sedang sampai besar dengan koleksi di atas 5000 buku.

Faktor *kedua* yang mempengaruhi adalah jumlah pengunjung perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan ini sangat menentukan bagi pimpinan perpustakaan untuk merekrut seberapa banyak orang yang menjadi pegawai perpustakaan tersebut, tentu saja dengan mempertimbangkan sumber dana yang dimiliki perpustakaan.

Faktor *ketiga* adalah kebutuhan pemakai: apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh target pengguna perpustakaan tersebut. Hal ini berkaitan dengan jenis perpustakaan apa yang kita dirikan, apakah perpustakaan untuk umum atau khusus. Dengan demikian, pengelola perpustakaan akan mengetahui kebutuhan-kebutuhan utama pengguna yang menjadi target perpustakaan tersebut, sehingga pustakawan dapat menentukan dengan mudah pengadaaan koleksi mana yang sesuai dengan jenis perpustakaannya. Kebutuhan pemakai dapat tercermin dari beberapa tolak ukur, misalnya dengan melihat koleksi mana saja yang menjadi favorit atau sering digunakan oleh pengguna, dari data jumlah dan kategori pengunjung yang datang ke perpustakaan (akademisi, remaja, anak-anak, pegawai instansi tertentu, atau komunitas tertentu). Dengan demikian pustakawan atau pengambil kebijakan dalam perpustakaan tersebut dapat melihat kebutuhan apa saja yang diperlukan pengguna, sehingga dalam mengambil satu kebijakan dapat terarah dan sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Keempat, banyak sedikitnya koleksi yang dimiliki juga merupakan satu hal

yang perlu diperhatikan oleh pimpinan pengelola perpustakaan. Untuk jumlah koleksi yang banyak maka dengan sendirinya diperlukan pustakawan dan petugas-petugas di lapangan yang cukup untuk menangani semua itu, demikian juga sebaliknya.

Kelima, jenis perpustakaan dalam hubungannya dengan pembagian kerja berdampak juga pada seberapa banyak pustakawan dan petugas yang dibutuhkan untuk mengelola perpustakaan tersebut. Jika perpustakaan tersebut merupakan perpustakaan umum dengan target masyarakat luas, maka dengan sendirinya diperlukan pustakawan dan petugas dalam jumlah yang lebih banyak. Sedangkan untuk jenis perpustakaan khusus biasanya memiliki pustakawan ahli dan petugas lapangan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, mengingat yang menjadi pengguna pada jenis perpustakaan khusus ini biasanya hanya pegawai lembaga penaung perpustakaan tersebut, kecuali perpustakaan tersebut melayani juga masyarakat umum sebagai pengguna selain pegawai lembaga tersebut.

Realitas Umum dan Permasalahan yang Dihadapi

Agar perpustakaan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna tidaklah semudah yang kita bayangkan. Banyak permasalahan yang terkandung di dalamnya, seperti: masalah dana/anggaran, kekurangan tenaga (pustakawan) profesional, koleksi yang monoton dan kadaluarsa, kekurangan tempat untuk koleksi, masalah ruangan yang tidak nyaman, sirkulasi udara yang kurang baik, dan berbagai masalah lainnya.

Kemampuan dana anggaran perpustakaan biasanya terbatas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan utama perlu perencanaan yang baik. Meskipun perpustakaan tersebut berada pada lembaga yang besar, namun tetap dalam pengalokasian anggaran perpustakaan biasanya dinomorakhirkan, sehingga kadang ruang gerak pustakawan untuk memajukan perpustakaannya sering terhambat.

Pengelola perpustakaan harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan dana yang dimiliki perpustakaan agar bisa mencukupi segala keperluan maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kemajuan perpustakaannya. Pustakawan harus bisa meyakinkan para atasannya agar perpustakaan bisa memiliki dana yang berkecukupan. Pustakawan harus bisa membuat program-program yang bisa memberikan angin segar bagi perpustakaan itu sendiri maupun lembaga penaungnya, sehingga mereka bisa percaya bahwa perpustakaan bukan satu unit kerja yang parasit yang menempel pada lembaga tetapi merupakan unit kerja yang perlu dan dapat diandalkan sehingga layak untuk mendapatkan perhatian dan dukungan.

Di lain pihak, perpustakaan perlu memanfaatkan segala fasilitas mau-

pun sumber daya yang dimilikinya untuk bisa dikembangkan dan digunakan sebagai sumber pencarian dana mandiri. Koleksi yang dimiliki merupakan sumber informasi yang perlu diolah dan digunakan sebagai senjata dan amunisi untuk mendapatkan dana sendiri. Biasanya kepemilikan koleksi yang spesifik dan lengkap merupakan kekayaan yang tidak ada duanya. Orang yang tertarik pada satu isu dan ingin mendapatkan berbagai informasi mengenai isu tersebut akan mencari di mana pun isu tersebut bisa didapatkan, sehingga perlu pengemasan satu informasi khusus yang bisa memenuhi dan memuaskan pengguna.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana pengelola perpustakaan bisa mengemas informasi yang mereka miliki agar bisa menarik bagi pengguna yang tertarik pada satu isu tertentu. Pengemasan informasi sekarang ini bisa banyak dan beragam macamnya, mulai dari pengemasan layananan yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat, seperti penyediaan fasilitas fotokopi di tempat, kemudahan layanan peminjaman dan kemudahan administrasi keanggotaan, dan banyak cara lain yang dapat digunakan untuk kenyamanan pengguna.

Salah satu cara memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan adalah dengan pengemasan informasi yang lebih baik dan sesuai dengan memanfaatan teknologi, seperti: membuat satu paket informasi dalam bentuk CD serta pengalihbentukan koleksi ke koleksi elektronik sehingga bisa dimanfaatkan oleh pengguna yang berada di luar wilayah bahkan luar negara.

Dengan cara ini, visi perpustakaan untuk menyebarkan informasi yang dimiliki dapat dilakukan dengan mudah dan mencakup area yang lebih luas. Terlebih dengan perkembangan internet yang semakin memasyarakat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi, sehingga perpustakaan sebagai lembaga yang memiliki banyak informasi dituntut untuk bisa berperan serta dalam menyediakan informasi yang dimiliki sesuai dengan kapasitasnya.

Di Indonesia sendiri, beberapa institusi besar telah mengembangkan praktik perpustakaan digital, baik *civitas akademika*, pemerintah, maupun swasta. Hal ini tentu saja sangat baik dan perlu dijadikan sebagai contoh untuk penyebaran informasi yang menjangkau bukan hanya anggota perpustakaan tertentu saja melainkan kepada masyarakat luas yang membutuhkan.

Perpustakaan Digital sebagai Sarana untuk Memajukan dan Mengurangi Kelemahan pada Perpustakaan Konvensional

Konsep Digital

Konsep digitalisasi dewasa ini

berkembang dengan pesatnya. Berbagai bidang baik dunia hiburan, dunia pendidikan, jual beli, maupun bidang lainnya mengacu pada konsep ini. Digitalisasi memberikan satu pengalaman baru yang dulu tak pernah terbayangkan oleh kita. Kita memperoleh banyak kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam mengerjakan tugas dan kegiatan sehari-hari.

> "Digitalisasi memang menghadirkan pengalaman yang baru dalam interaksi kita dengan dunia hiburan. Kemudahan untuk megakses, mencari dan menayangkan kembali… semua menjadi menyenangkan…" (Kompas, Senin 13 Juni 2005)

Dunia perpustakaan pun tak luput dari proses digitalisasi ini. Kita sering mendengar, membaca, dan melihat informasi dari berbagai media yang membahas mengenai perpustakaan digital. Ini merupakan satu efek dari konsep digital terhadap perpustakaan. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perpustakaan digital atau lebih dikenal dengan istilah *digital library*.

Digital library merupakan sebutan bagi perpustakaan yang semua koleksi ataupun dokumen-dokumen yang ada pada perpustakaan tersebut berbentuk elektronik (digital) dan secara nyata baik ruangan maupun koleksi tersebut tidak ada. Kalaupun ada, mungkin hanya sebatas satu ruangan kecil untuk mengoperasikan berbagai macam kegiatan utama dari perpus-takaan digital tersebut. Data yang berbentuk digital ini tentu saja memungkinkan untuk diakses dan digunakan oleh orang banyak. Akses perpustakaan digital biasanya melalui *browser* internet dengan alamat tertentu.

Kebutuhan akan ruangan yang besar dan luas biasanya merupakan hambatan bagi perpustakaan konvensional karena jumlah koleksi, baik koleksi perpustakaan dalam bentuk buku atau pun non buku, serta jenis koleksi lainnya, terus bertambah. Meng-*update* informasi yang ada di perpustakaan dengan melakukan pembelian koleksi baru, fotokopi, ataupun tukar-menukar koleksi dengan lembaga informasi lainnya membutuhkan tambahan tempat. Hal ini mengakibatkan koleksi akan terus bertambah banyak dan bertumpuk, sehingga ruangan perpustakaan akan semakin penuh. ***Sebesar apapun ruangan yang dimiliki satu perpustakaan tetap saja pada satu hari nanti ruangan tersebut akan dipenuhi oleh koleksi dan dokumen lainnya***. Tanpa ada penanganan yang baik, maka suatu saat perpustakaan akan menjadi gudang buku dengan tumpukan dan suasana yang penat, sehingga menyebabkan pengguna merasa kurang tertarik untuk mengunjunginya.

Membangun satu konsep perpustakaan digital bagi perpustakaan manapun menjadi satu impian yang harus diwujudkan untuk melengkapi perpustakaan konvensional yang telah ada. Hal ini merupakan satu solusi untuk masa kini dan masa yang akan datang

dalam mengatasi masalah kekurangan tempat yang selama ini menjadi kendala bagi perpustakaan di manapun berada. Selain itu, adanya perkembangan teknologi digital yang semakin canggih telah memudahkan kita untuk dapat membantu mewujudkannya.

Mengapa perpustakaan digital? Banyak manfaat yang didapat dengan hadirnya perpustakaan tak berwujud ini. Memang selama ini orang banyak yang masih ragu tentang perpustakaan digital. Kita masih terbiasa dengan cara konvensional dalam mencari dan menelusuri informasi dalam perpustakaan maupun pusat informasi lainnya. Banyak kekhawatiran bagi kita jika berhadapan dengan teknologi informasi. Mungkin karena tidak mengerti teknologi, tidak bisa mengoperasikan suatu alat tertentu, atau takut dianggap kampungan oleh sebagian orang, sehingga tidak mau bersentuhan dengan peralatan hasil perkembangan teknologi yang sebenarnya dapat membantu kita dalam melakukan banyak hal penting dalam kehidupan.

Kelebihan yang dimiliki perpustakaan Digital:

1. *Bisa diakses oleh banyak orang, baik lokal maupun internasional*.
   Dengan demikian penyebaran suatu informasi dapat dilakukan secepat angin ke seluruh pelosok dunia. Kehadiran teknologi informasi ini membuat orang bisa secara langsung memberikan *feedback* dari informasi yang ada, sehingga kebenaran satu informasi dapat langsung dicek. Dengan perpustakaan digital, pengakses perpustakaan bukan hanya pengguna dari negara tempat perpustakaan tersebut berada, tetapi juga pengguna yang berasal dari negara lain di seluruh dunia.
2. *Waktu untuk mengakses informasi dapat dilakukan kapanpun*.
   Biasanya perpustakaan digital dapat diakses selama 24 jam tanpa henti. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengakses informasi kapanpun diinginkan. Hal ini memungkinkan untuk penelusuran informasi yang tak kenal batas waktu dan ruang seperti pada perpustakaan konvensional.
3. *Data bersifat digital yang dapat di*download *dengan mudah*.
   Memberi kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dengan cara men*download*. Untuk memperoleh informasi ini bisa dengan cara membayar biaya keanggotaan atau bebas.
4. *Masyarakat bisa memilih dengan bebas data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan*.

Tidak semua perkembangan teknologi ini memberikan keuntungan bagi kita. Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dengan penggunaan teknologi ini. Beberapa kelemahan dari perpustakaan digital yang dirasakan selama ini masih bersifat teknis, seperti peralatan. Di antara kelemahan tersebut, yaitu:

1. *Membutuhkan peralatan teknologi yang canggih* (information

technology/IT).

Untuk membuat suatu perpustakaan digital diperlukan peralatan yang canggih dan mutakhir. Hal ini mengingat bahwa untuk bisa diakses secara global oleh siapapun dan di manapun maka dibutuhkan perangkat IT, agar mampu mengatasi semua kebutuhan dalam mengoperasikan perpustakaan digital tersebut. Biasanya permasalahan yang muncul di sini adalah hambatan pada transfer data yang membutuhkan waktu lama. Biasanya pengguna akan mulai bosan dan jenuh jika waktu yang dibutuhkan untuk masuk ke satu situs perpustakaan digital sangat lama. Hal ini harus menjadi pertimbangan bagi pengelola perpustakaan digital agar bisa memberikan akses informasi yang cepat dan tepat bagi penggunanya.

2. *Biaya yang dibutuhkan tinggi*.

   Kendala biaya dalam pelaksanaan kegiatan dalam perpustakaan merupakan satu permasalahan klasik tersendiri bagi semua perpustakaan di manapun. Untuk mewujudkan satu perpustakaan digital membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sumber dana bagi perpustakaan biasanya didapat dari lembaga penaungnya, jasa layanan perpustakaan, jasa penggandaan koleksi, dan lain sebagainya. Ini biasanya menjadi masalah serius. Di satu sisi pengelola sudah siap untuk membangun perpustakaan digital sebagai wujud impiannya, namun di sisi lain dana yang tersedia tidak mencukupi.

   Pada akhirnya perpustakaan harus mampu mencari dana sendiri atau dengan cara lain membuat satu jasa atau kegiatan yang mampu menghasilkan uang untuk mendanai cita-citanya dalam mewujudkan perpustakaan digital.

3. *Diperlukan tenaga ahli yang mampu mengolah perpustakaan digital tersebut*.

   Mewujudkan suatu perpustakaan digital tidaklah semudah yang dibayangkan. Selain dana, hal yang perlu dipertimbangkan adalah tenaga ahli atau orang yang mengerti, mengolah, dan melakukannya dengan dunia maya (dunia digital). Hal tersebut tentu saja menjadi satu cambuk atau pelajaran bagi pustakawan itu sendiri. Dengan demikian mereka harus melengkapi dirinya dengan kemampuan untuk mengolah dan mengoperasikan peralatan yang berhubungan dengan dunia digital. Atau dengan cara lain, meminjam dan mempekerjakan orang-orang yang ahli dibidang IT, sehingga mau tidak mau dana yang dibutuhkan dalam membangun perpustakaan digital tidaklah sedikit.

4. *Diperlukan perawatan dan pemeliharaan peralatan*.

   Perawatan dan pemeliharaan peralatan operasional dalam perpustakaan digital mutlak dibutuhkan. Mengingat baik perangkat keras ataupun perangkat lunak tersebut mudah sekali rusak. Untuk itu, diperlukan petugas tersendiri yang khusus menjaga,

memelihara, dan merawat peralatan te rsebut.

5. *Tidak semua orang mampu mengakses perpustakaan digital*
   Hal ini juga perlu dipikirkan, apalagi yang terjadi pada negara-negara berkembang yang tertinggal dengan kemajuan teknologi informasi.

Aplikasi E-book *di Perpustakaan*

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk mengawetkan koleksi yang dimiliki perpustakaan dari kerusakan karena termakan usia yakni dalam bentuk data digital. Dalam hal ini *e-book* atau buku digital merupakan sarana yang sekarang sedang berkembang dan diminati. Buku digital bisa dibawa kemana pun dengan menggunakan perangkat baca digital yang *mobile*.

> "E-book kependekan dari electronic book atau dengan nama lain buku elekronik". (Situs: www.komputeraktif.com)

Kemajuan *hardware* dan *software* komputer membuat kita bisa mengembangkan sarana yang memudahkan kita dalam mendapatkan informasi. Akses informasi menjadi lebih mudah, lebih menyenangkan, dan tidak monoton. Kita bisa kapan saja dan di mana saja membaca beberapa buku tanpa harus membawa buku tersebut secara fisik. Kemasan *e-book* ini (biasanya berupa CD atau file tertentu) umumnya mampu menampung beberapa buku dengan format dan desain yang sesuai dengan buku aslinya, atau bahkan dibuat lebih bagus dan menarik.

Hanya saja, untuk mengakses *e-book* kita memerlukan peralatan khusus untuk membacanya, tergantung pada jenis format yang digunakan. Peralatan yang biasa dipakai untuk mengakses *e-book* banyak ragamnya, seperti: PC, Notebook, PDA (*personal digital assistant*), atau alat baca yang diciptakan khusus seperti Rocket eBook, Softbook Reader, dan Everybook. Semua peralatan tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan biasanya hanya mampu membaca satu atau beberapa format *e-book* saja.

Format *e-book* yang sering digunakan adalah PDF. Format ini banyak digunakan dalam tutorial atau panduan *software*. File bentuk PDF ini diperkenalkan oleh Adobe yang bergerak pada *software* grafis. Selain itu format lain yang sering digunakan dalam bentuk *e-book* adalah HTML, RTF, DOC, EXE, LIT, PDB, PRC, dan TXT.

Mengapa *e-book* perlu?

1. Bersifat elektonik atau data digital, sehingga tidak membutuhkan ruang besar, dan dengan demikian dapat mengurangi penggunaan ruang.
2. (Ada) rasa bosan dengan buku. Merupakan satu alternatif untuk menyajikan dan menyebarkan informasi yang ada di perpustakaan dalam bentuk lain yang memungkinkan untuk dibaca dan

menarik pengguna.

3. Materi *e-book* bisa diperkaya dengan unsur animasi, audio, bahkan video. Hal ini untuk mengurangi rasa bosan dengan halaman yang hanya berupa huruf. Dengan menyelipkan gambar atau animasi dalam teks bacaan memberikan daya tarik tersendiri.
4. Format digital memungkinkan kita untuk mencari kata atau bagian terpenting secara tepat dan mudah dengan memanfaatkan fasilitas pencarian. Dalam hal ini kita memerlukan *software* untuk pembuatan *e-book* yang dibeli (*shareware*).
5. Tampilan aksara *e-book* bisa dibuat semenarik mungkin. Tanpa harus menggunakan *font* baku seperti *Times new Roman* atau *Arial*, teks bisa dibuat dengan gaya lain dan tetap mudah dibaca oleh penggunanya.
6. Karena formatnya digital, maka tidak ada koleksi yang terlipat atau sobek seperti yang terjadi pada buku, sehingga meminimalkan kegiatan preservasi bagi koleksi yang ada.
7. Lebih mudah dan praktis dalam produksi dan penggandaannya, baik untuk keperluan lembaga sendiri maupun pengguna yang membutuhkan, karena dibuat dalam bentuk file.

E-book dapat memberi manfaat lebih bagi lembaga dalam mendokumentasikan koleksi, arsip, atau berkas yang dimiliki dalam bentuk digital. Setiap perpustakaan memiliki potensi pada koleksinya masing-masing, apalagi jika perpustakaan tersebut merupakan perpustakaan khusus, karena biasanya koleksi pada perpustakaan khusus akan menitikberatkan pada satu isu tertentu yang berkaitan dengan lembaga penaungnya. Sebagai contoh, perpustakaan yang dimiliki AKATIGA yang mengkhususkan diri pada ilmu sosial, atau lebih spesifik pada masalah perburuhan, usaha kecil, agraria, dan demokratisasi lokal. Koleksi perpustakaan AKATIGA ini akan lebih merujuk ke isu-isu tersebut dan beberapa hal yang berkaitan dengan isu tersebut.

Untuk ringkasnya, bagi perpustakaan kegunaan *e-book* ini adalah sebagai:

1. Dokumentasi

   Sebagai dokumentasi, *e-book* di sini mungkin akan ditujukan pada koleksi-koleksi yang bersifat lebih khusus misalnya buku yang sering dipinjam. Dengan demikian, koleksi *e-book* merupakan pelengkap atau cadangan bagi koleksi konvensional, terlebih lagi bagi koleksi-koleksi yang langka dan sudah tidak diterbitkan. Dengan demikian, pelestarian dan pemeliharaan koleksi dapat terjaga dan bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama.

   Sebagai lembaga yang kegiatannya juga meliputi dokumentasi, perpustakaan dapat memberikan solusi ini dalam jajaran koleksi yang mengkhususkan dalam penyimpanan data secara digital.
2. Mempermudah pengelompokan koleksi.

   Satu CD e-book biasanya tidak hanya berisi satu judul buku saja,

tetapi bisa lebih dari 5 buku. Pengorganisasian dalam pembuatan *e-book* ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan beberapa buku yang sama, subyek yang sama, atau pengarang yang sama dalam satu CD. Sehingga satu CD Interaktif dapat berisikan beberapa buku dari satu pengarang atau satu subyek.

3. Sarana lain penyajian informasi yang ada di perpustakaan.

Namun demikian, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu masalah tentang hak cipta. Hak cipta ini merupakan satu hak khusus yang dimiliki pengarang atau lembaga yang diberikan wewenang dari penciptanya untuk mengedarkan ciptaannya. Adanya hak cipta memberikan batasan bagi kita untuk bisa menghargai dan menghormati karya orang, sehingga dalam pengeksploitasian karya seseorang diperlukan satu ijin khusus dari pemegang hak ciptanya.

Penutup

Secara konsep, digitalisasi pada perpustakaan memang sudah selayaknya dilakukan dan dikembangkan oleh setiap perpustakaan yang ingin memberikan kontribusi dalam penyebaran informasi yang lebih luas. Di Indonesia sendiri sudah saatnya untuk bisa menerapkan konsep perpustakaan digital, mengingat perkembangan teknologi, terutama teknologi komputer, sekarang ini sudah memadai untuk melakukan segala aktivitas dalam dunia digital. Hal ini ditambah dengan fasilitas pendukung *wireless* yang saat ini sedang marak, sehingga setiap saat orang dapat terhubung dengan dunia digital melalui perlengkapan *mobile computer*-nya di area Hotspot pada tempat-tempat tertentu .

Dengan semua itu, maka dipastikan perkembangan situs-situs bagi perpustakaan digital akan semakin banyak dan menjadi pilihan bagi banyak orang untuk mengakses informasi tanpa harus datang ke tempatnya, sehingga akses dan penyebaran informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

Untuk Indonesia sendiri, perpustakaan digital sebenarnya sudah ada sejak dekade 1990-an. Hanya mungkin beberapa institusi besar saja yang memilikinya. Tetapi untuk saat ini banyak institusi yang memiliki perpustakaan konvensional, dan sudah mulai (sedikit-sedikit) mengembangkan perpustakaan digital sebagai pelengkapnya. Terutama untuk lingkungan civitas akademika yang memiliki sistem pengajaran jarak jauh, maka penting bagi mahasiswanya untuk diberikan satu akses informasi tertentu untuk melengkapi kelengkapan mata kuliah dengan memberikan bahan atau materi melalui perpustakaan digital. Pada negara-negara maju, mahasiswa sistem pengajaran jarak jauh diberikan nomor PIN agar bisa mengakses secara penuh informasi pada perpustakaan digital kampusnya. Sehingga mahasiswa tersebut bisa mengikuti dan membaca materi yang

diperoleh dari perpustakaan digital kampusnya.

Terakhir, ada kekhawatiran segelitir orang bahwa perpustakaan digital akan membawa dampak yang kurang baik, yaitu mengurangi jumlah pekerja yang diperlukan untuk mengelola suatu perpustakaan. Kekhawatiran ini tidak beralasan, karena bagaimanapun, sejauh ini perpustakaan digital lebih merupakan pelengkap perpustakaan konvensional. Dengan demikian, perkembangan keduanya dapat dikatakan tetap sejalan dan saling melengkapi. Sudah selayaknya kita dituntut untuk mempelajari dan memiliki kemampuan yang lebih, baik dalam dunia digital maupun perpustakaan secara konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Buxbaum, Shari (ed.). 2004. *Library Services: perpustakaan virtual untuk kuliah bisnis sistem jarak jauh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Basuki, Sulistyo. 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Kompas. 2005. *'Teknologi Informasi "Digital Jukebox" sebagai kesatuan Multimedia Utuh'*. 13 Juni.

BUKU BARU AKATIGA

RP. 25.000,00

YANG BERKUASA, YANG TERSISIH, YANG TAK BERDAYA
Demokratisasi yang Bagaimana di Indonesia?

Penulis : Ina E. Slamet
Kata Pengantar : Hans Antlõv
Jumlah Halaman : xii + 92 hal.

Buku ini menyuguhkan cerita yang sangat kuat mengenai peminggiran dan penindasan. Dengan menggunakan analisis struktural dari relasi kelas di dua studi kasus (Papua dan Jawa), penulis menyuguhkan argumen yang kuat mengenai penyebab peminggiran kaum miskin beserta kondisi kerentanan yang menyertainya. Menariknya, penulis tidak hanya berhenti sampai di analisis struktural saja, tetapi juga memberikan sejumlah langkah penting untuk keluar dari peminggiran.

Ina Slamet adalah seorang Antropolog yang pertama-tama memulai penelitian lapangan secara partisipatif (*participatory fieldwork*) dan memfokuskan penelitiannya pada isu keterpinggiran dan perlawanan petani. Seseorang yang memiliki komitmen sosial, dan pada satu masa harus membayar mahal untuk komitmennya tersebut...

RP. 25.000,00

GALI TUTUP LUBANG ITU BIASA
Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan dari Waktu ke Waktu

Penulis : Resmi Setia M.S.
Jumlah Halaman : xv + 159 hal.

Berbagai macam strategi coba dikembangkan buruh untuk menghadapi persoalan yang menimpa diri, keluarga, dan komunitasnya. Dalam kasus buruh di Majalaya, selama kurun waktu 1928-2000-an, persoalan dan strategi yang dipilih oleh mereka mengalami begitu banyak perubahan dan menjadi lebih kompleks. Waktu, energi, dan pikiran mereka juga semakin tersita untuk menanggulangi persoalan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi pekerjaan sebagai buruh pabrik terbukti tidak bisa dijadikan sandaran hidup satu-satunya. Kondisi ini dapat mengancam motivasi serta loyalitas buruh untuk berorganisasi di dalam serikat buruh. Buku ini berupaya mengangkat problematika kehidupan buruh dan melihat kaitannya dengan upaya-upaya pengorganisasian dan pembentukan identitas buruh.

JURNAL ANALISIS SOSIAL YANG TELAH TERBIT

Vol. 9 No. 3 Desember 2004
Demokratisasi Akar Rumput: Gagasan dan Praktik
(*Harga Rp. 20.000,-*)

Vol. 9 No. 2 Agustus 2004
Usaha Kecil dan Masa Depan Perekonomian Indonesia
(*Harga Rp. 20.000,-*)

Vol. 9 No. 1 April 2004
Pembaruan Agraria: Antara Negara dan Pasar
(*Harga Rp. 20.000,-*)

Vol. 8 No. 3 Desember 2003
Antara Informalisasi, Jaminan Sosial, dan Pengorganisasian Buruh
(*Harga Rp. 20.000,-*)

Vol. 8 No. 2 Oktober 2003
Perempuan, Kemiskinan, dan Pengambilan Keputusan
(*Harga Rp. 20.000,-*)

Vol. 8 No. 1 Februari 2003
Pasar yang Adil bagi Usaha Kecil
(*Harga Rp. 20.000,-*)

Vol. 7 No. 3 Desember 2002
Menegaskan Kembali Konteks Pembaruan Agraria
(*Harga Rp. 15.000,-*)

Vol. 7 No. 2 Juni 2002
Demokrasi dan Kemiskinan: Kesempatan atau Kesempatan?
(*Harga Rp. 15.000,-*)

Vol. 7 No. 1 Februari 2002
Upah Minimum dan Kesejahteraan Buruh: Peluang dan Tantangan bagi Serikat Buruh
(*Harga Rp. 15.000,-*)

Vol. 6 No. 3 Desember 2001
Lembaga Keuangan Mikro dalam Wacana dan Fakta: Perlukah Pengaturan?
(*Harga Rp. 15.000,-*)

Vol. 6 No. 2 Juli 2001
Sumber Daya Agraria: Dimensi Pengelolaan dan Tantangan Kelembagaan
(*Harga Rp. 15.000,-*)

Vol. 6 No. 1 Februari 2001
Perempuan: Dalam Transisi Demokrasi dan Globalisasi
(*Harga Rp. 15.000,-*)

Vol. 5 No. 1 Januari 2000
Lampu Kuning Desentralisasi
(*Harga Rp. 10.000,-*)

Vol. 4 No. 2 Mei 1999
Situasi Krisis: Titik Balik Kekuatan Buruh?
(*Harga Rp. 10.000,-*)

Vol. 4 No. 1 Januari 1999
Usaha Kecil pada Masa Krisis Mampukah Bangkit?
(*Habis,* photocopy *dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA*)

Ed-6 (1997)
Pungutan dan Usaha Kecil
(*Harga Rp. 4.000,-*)

Ed-5 (1997)
Pekerja Anak dan Anak Jalanan Versus Konvensi Hak Anak
(*Habis,* photocopy *dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA*)

Ed-4 (1996)
Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan
(*Habis,* photocopy *dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA*)

Ed-3 (1996)
Tanah: Komoditas Strategis
(*Habis,* photocopy *dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA*)

Ed-2 (1996)
Tantangan Globalisasi: Mampukah Usaha Rakyat Menjadi Aktor Utama dalam Perekonomian Nasional
(*Habis,* photocopy *dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA*)

Ed-1 (1995)
Buruh dan Krisis Hubungan Industrial
(*Habis,* photocopy *dapat dipesan di Perpustakaan AKATIGA*)